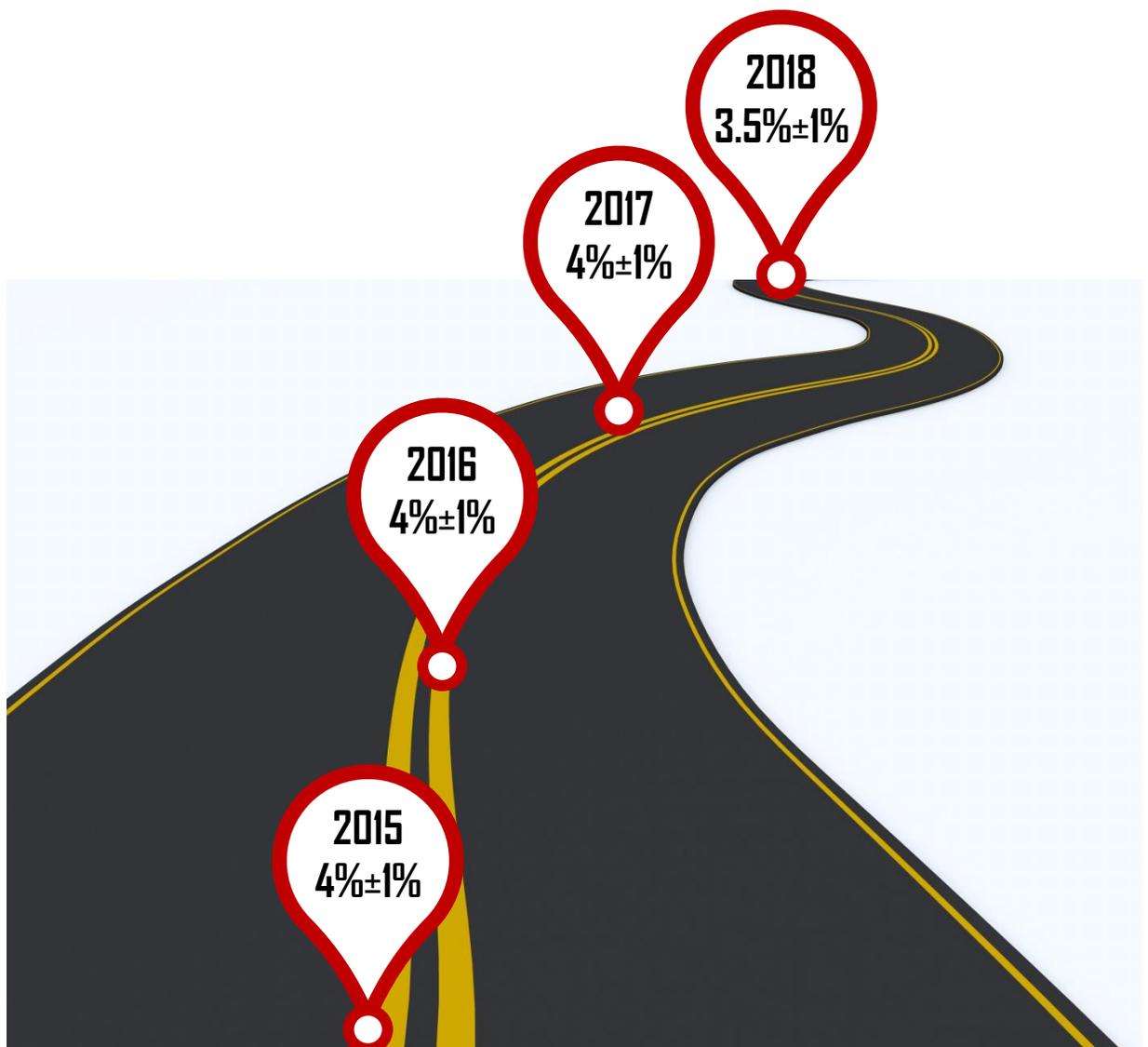


ROADMAP

PENGENDALIAN INFLASI

2015-2018

TIM PENGENDALIAN INFLASI (TPI)
POKJANAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)



KATA PENGANTAR

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inflasi yang tinggi dapat langsung mengurangi daya beli masyarakat dan daya saing suatu negara, sehingga pada gilirannya menggerus tingkat kesejahteraan masyarakat luas. Di level mikro, kondisi tersebut akan mempengaruhi keputusan konsumsi, produksi maupun investasi dari pelaku usaha dan individu. Melihat besarnya dampak inflasi tinggi tersebut bagi masyarakat, adalah merupakan suatu keharusan bagi semua pihak untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil.

Seiring dengan membaiknya koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, inflasi tahun 2015 diperkirakan berada pada rentang sasaran inflasi, yaitu $4\% \pm 1\%$. Inflasi nasional dalam satu dasawarsa terakhir juga menunjukkan tren yang menurun, walaupun dalam beberapa periode realisasi inflasi masih berada di atas sasaran yang ditetapkan. Masih belum terpenuhinya pencapaian sasaran tersebut merupakan tugas bersama semua pihak berkepentingan.

Untuk mencapai sasaran inflasi nasional, yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018 berada pada angka $4\% \pm 1\%$ (2016 dan 2017) dan $3,5\% \pm 1\%$ (2018), maka masing-masing komponen kelompok penyumbang inflasi harus dijaga agar bergerak dalam tren yang menurun (*disinflation path*), yaitu pada kisaran 3%-5% (yoy) untuk *volatile food*, 2%-3% (yoy) untuk komponen *administered prices* dan 3,5%-4% (yoy) untuk inflasi inti.

Pengendalian inflasi dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural, yaitu: (i) terbatasnya peningkatan kapasitas perekonomian domestik, (ii) ketergantungan yang tinggi pada ekspor berbasis SDA dan bahan baku impor, (iii) produksi pangan yang rentan terhadap gangguan pasokan, (iv) inefisiensi struktur mikro pasar, (v) pemenuhan kebutuhan energi nasional yang tergantung dari impor BBM dan LPG, (vi) masih lemahnya konektivitas antar daerah, dan (vii) stabilitas nilai tukar Rupiah.

Beberapa tantangan pengendalian inflasi yang perlu menjadi fokus perhatian terkait inflasi *volatile food* adalah (i) fluktuasi harga sejumlah komoditas pangan yang masih sangat besar terkait ketersediaan pasokan yang utamanya dipengaruhi oleh faktor cuaca, dan (ii) instrumen kebijakan stabilisasi harga masih terbatas dan belum mengatasi akar permasalahan.

Untuk inflasi *administered prices* beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah potensi dampak penghapusan subsidi energi dan kelancaran distribusinya. Sementara itu,

tantangan pengendalian inflasi inti adalah dalam hal bagaimana mengelola ekspektasi inflasi yang belum mengarah ke sasaran inflasi dan stabilitas pergerakan nilai tukar.

Dengan memperhatikan berbagai tantangan tersebut diperlukan “*extra effort*” yang terkoordinasi dan terencana dengan baik, serta komitmen penuh dari seluruh *stakeholders*, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melihat fakta bahwa kewenangan dalam pengendalian inflasi nasional berada di beberapa instansi baik pusat dan daerah, diperlukan acuan tunggal sebagai peta jalan (*roadmap*) dalam rangka harmonisasi kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran inflasi nasional. *Roadmap* Pengendalian Inflasi ini terdiri dari 5 bagian, yaitu: (1) *Roadmap* Pengendalian Inflasi Nasional, (2) *Roadmap* Pengendalian Inflasi Wilayah Sumatera, (3) *Roadmap* Pengendalian Inflasi Wilayah Jawa, (4) *Roadmap* Pengendalian Inflasi Wilayah Kalimantan, dan (5) *Roadmap* Pengendalian Inflasi Wilayah Sulawesi-Maluku-Papua-Bali-Nusa Tenggara.

Roadmap pengendalian inflasi mencoba menjawab bagaimana koordinasi pengendalian inflasi dapat dilakukan dan langkah yang dapat diambil oleh pihak-pihak tersebut. *Roadmap* Pengendalian Inflasi disusun berdasarkan aspek kewilayahan (pulau) sesuai karakteristik masing-masing dan juga mencakup langkah-langkah identifikasi, rekomendasi (jangka pendek dan menengah) serta dukungan/peran Bank Indonesia, Pemerintah Pusat (kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah.

Roadmap Pengendalian Inflasi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif jika disertai dengan langkah-langkah nyata, koordinatif dan berkesinambungan. Batasan-batasan, kewenangan serta tanggung jawab yang dimiliki instansi yang terlibat tentunya harus diakomodasi dan diberi ruang yang cukup untuk komunikasi dan harmonisasi.

TIM PENGENDALIAN INFLASI (TPI)
KELOMPOK KERJA NASIONAL TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (POKJANAS TPID)

BANK INDONESIA

**KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG
PEREKONOMIAN**

**KEMENTERIAN
KEUANGAN**

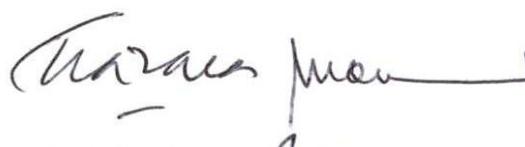
**KEMENTERIAN
DALAM NEGERI**

**KEMENTERIAN
ENERGI
DAN SUMBER DAYA
MINERAL**



JUDA AGUNG
Direktur Eksekutif
Departemen
Kebijakan
Ekonomi dan
Moneter

BOBBY H. RAFINUS
Deputi Bidang
Koordinasi
Ekonomi Makro dan
Keuangan



SUAHASIL NAZARA
Kepala Badan
Kebijakan Fiskal

MUH MARWAN
Direktur Jenderal
Bina
Pembangunan
Daerah



M. TEGUH PAMUDJI
Sekretaris Jenderal ✓

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bagian I: Roadmap Pengendalian Inflasi Nasional

1.1. Pendahuluan

1.2. Identifikasi Permasalahan

1.3. *Roadmap* Pengendalian Inflasi Nasional

1.4. *Roadmap* Pengendalian Inflasi Daerah (Ringkasan)

Lampiran 1.A: Arahan Presiden RI dalam Rakornas VI TPID 2015

Lampiran 1.B: Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Lampiran 1.C: Permasalahan Inflasi *Administered Prices*

Bagian II: Roadmap Pengendalian Inflasi Wilayah Sumatera

2.1. Pendahuluan

2.2. Identifikasi Permasalahan

2.3. *Roadmap* Pengendalian Inflasi Wilayah Sumatera

Bagian III: Roadmap Pengendalian Inflasi Wilayah Jawa

3.1. Pendahuluan

3.2. Identifikasi Permasalahan

3.3. *Roadmap* Pengendalian Inflasi Wilayah Jawa

Lampiran 3.A: Arahan Presiden RI dalam Rakornas VI TPID

Lampiran 3.B: Pengembangan Kerjasama Antar Daerah

Lampiran 3.C: Alternatif Model Kerjasama Antar Daerah yang Dapat Dikembangkan untuk Pengendalian Inflasi Daerah

Lampiran 3.D: *Standard Operating Procedure* Subsidi Ongkos Angkut & Pasar Lelang dan Trading House

Bagian IV: Roadmap Pengendalian Inflasi Wilayah Kalimantan

4.1. Pendahuluan

4.2. Identifikasi Permasalahan

4.3. *Roadmap* Pengendalian Inflasi Wilayah Kalimantan

Lampiran 4.A: Isu Strategis El Nino dan La Nina

Lampiran 4.B: Isu Strategis Daging Sapi

Lampiran 4.C: Pendalaman Produksi Padi “Menata Hulu, Mengatur Hilir”

Lampiran 4.D: Pendalaman Distribusi “Manajemen Rantai Pasok Komoditas Pokok”

Lampiran 4.E: Tindak Lanjut Rakornas TPID

Bagian V: Roadmap Pengendalian Inflasi Wilayah Sulawesi Maluku Papua Bali Nusa Tenggara

5.1. Pendahuluan

5.2. Identifikasi Permasalahan

5.3. *Roadmap* Pengendalian Inflasi Wilayah Sulampua-Balnustra

Tim Penyusun



Bagian I

Roadmap Pengendalian Inflasi Nasional

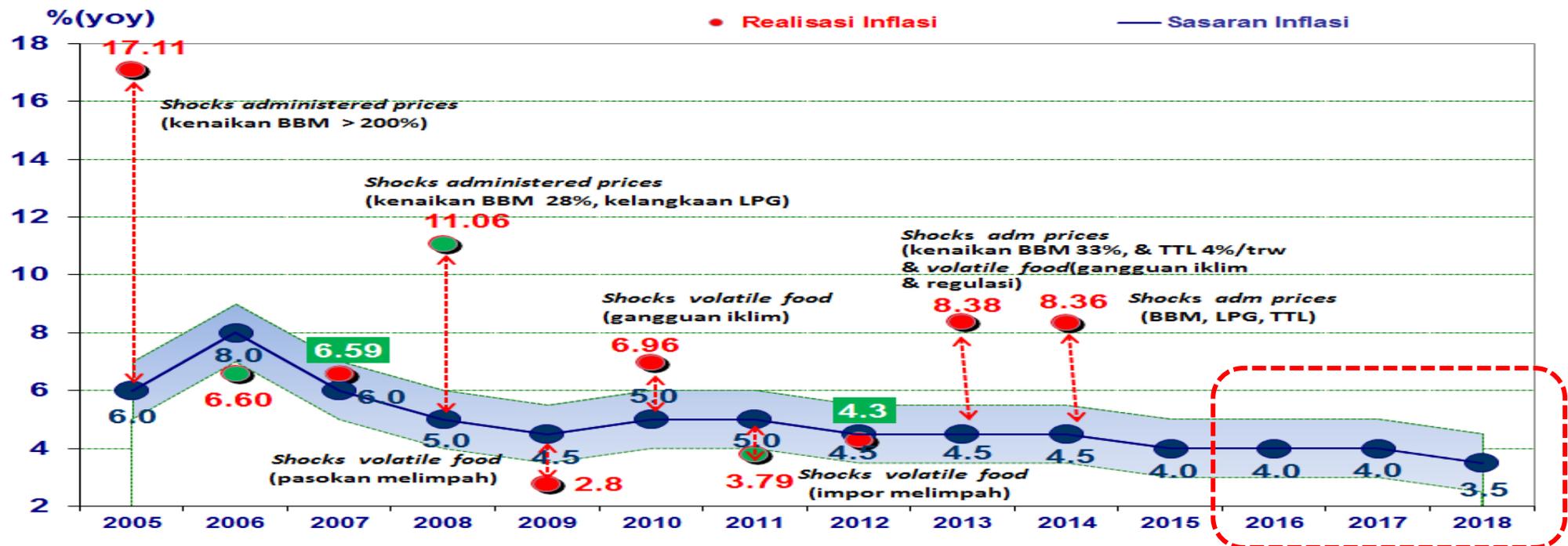


Halaman ini sengaja dikosongkan

1.1. *Pendahuluan*

Perlunya Roadmap Pengendalian Inflasi

1. Target inflasi ditetapkan **cukup rendah dan menurun** (*challenging*).
2. Pencapaian sasaran inflasi *) penting untuk **kredibilitas** kebijakan Bank Indonesia.
3. Untuk mencapai inflasi $3,5\% \pm 1\%$ (2018), **waktu yang tersedia sangat singkat**.
4. Perlu ada **guideline** program pengendalian inflasi yang **terstruktur dan terintegrasi** (Pusat – Daerah).
5. Perlunya **mengintegrasikan arahan Presiden** dalam Rakornas VI TPID ke dalam *Roadmap* Pengendalian Inflasi

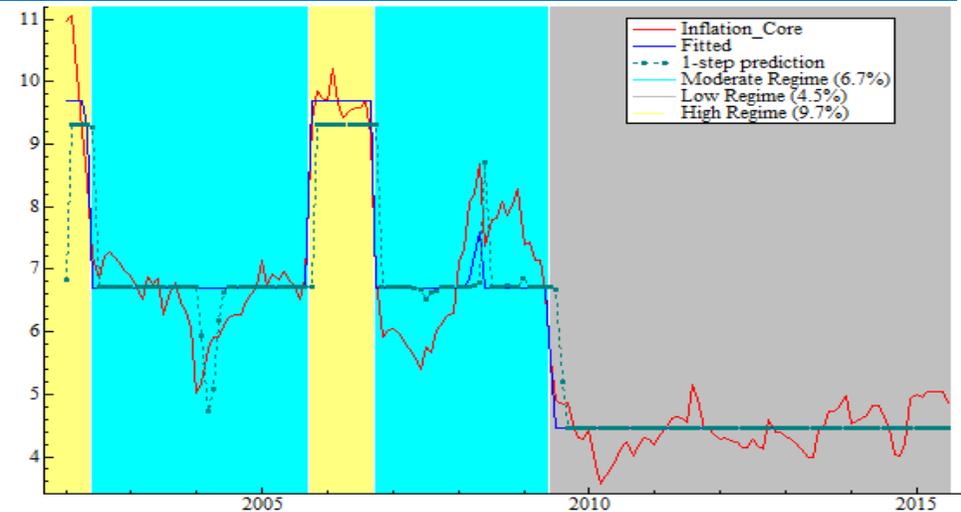


*)PMK No 93/PMK.011/2014 tentang Sasasaran Inflasi Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018

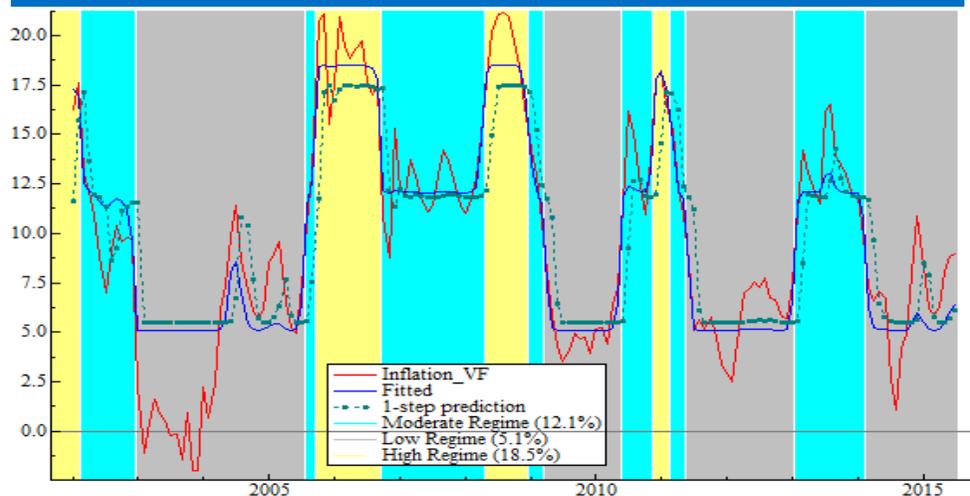
Historis Inflasi Masih Tinggi

- Secara umum disagregasi inflasi mengalami tren menurun. Meskipun demikian, menghadapi *path* sasaran inflasi ke depan yang terus menurun, tingkat inflasi masih berada di level yang cukup tinggi dan rentan gejolak.
- Untuk menjamin pencapaian sasaran inflasi tersebut diperlukan upaya pengendalian inflasi yang lebih intensif serta penyelesaian permasalahan struktural inflasi yang terintegrasi antara Pusat dan Daerah.

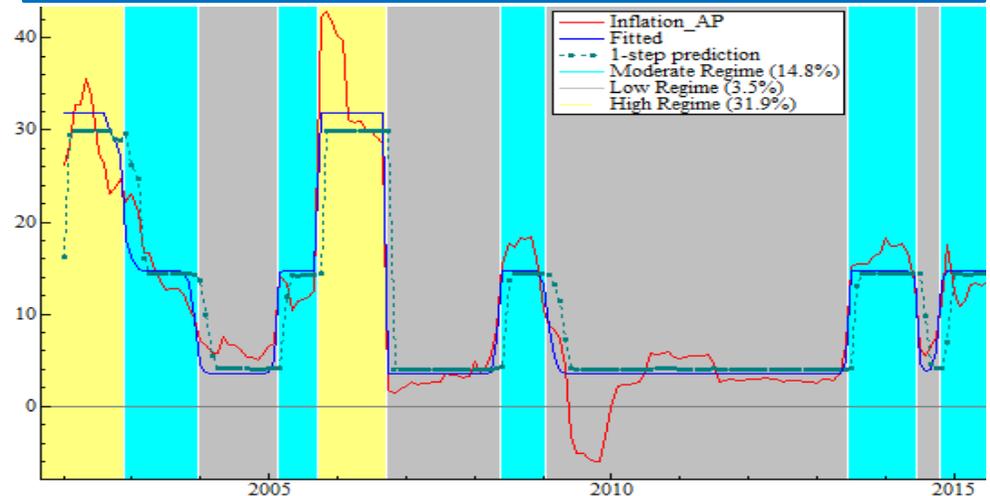
Inflasi Inti



Inflasi Volatile Food



Inflasi Administered Prices



6 Tantangan Struktural Nasional

Roadmap Pengendalian Inflasi Nasional secara umum diarahkan untuk mengatasi 6 Tantangan Struktural:

1



Terbatasnya peningkatan kapasitas perekonomian domestik

2



Ketergantungan yang tinggi pada ekspor berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dan bahan baku impor

3



Produksi pangan yang rentan terhadap gangguan pasokan

4



Inefisiensi struktur mikro pasar

5



Pemenuhan kebutuhan energi nasional yang tergantung dari impor BBM & LPG

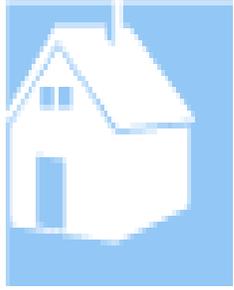
6



Masih lemahnya konektivitas antar daerah

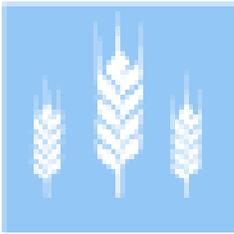
Permasalahan Spesifik Daerah

Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah disusun untuk mengatasi permasalahan spesifik daerah:



Inflasi Inti

Tingginya inflasi kontrak dan sewa rumah disebabkan antara lain oleh terbatasnya pasokan tempat tinggal. Selain itu, inflasi inti juga didorong oleh **kenaikan harga *processed food*** sebagai dampak lanjutan dari masih tingginya inflasi bahan makanan.



Inflasi Volatile Food (Komponen Bergejolak)

Masalah yang terjadi di hampir seluruh wilayah terkait dengan **kendala produksi** (lahan produktif, sarana produksi termasuk bibit dan pupuk, irigasi, pemanfaatan teknologi), **inefisiensi struktur pasar, ketidaklancaran distribusi, kurangnya dukungan infrastruktur ,dan lemahnya kelembagaan petani.**

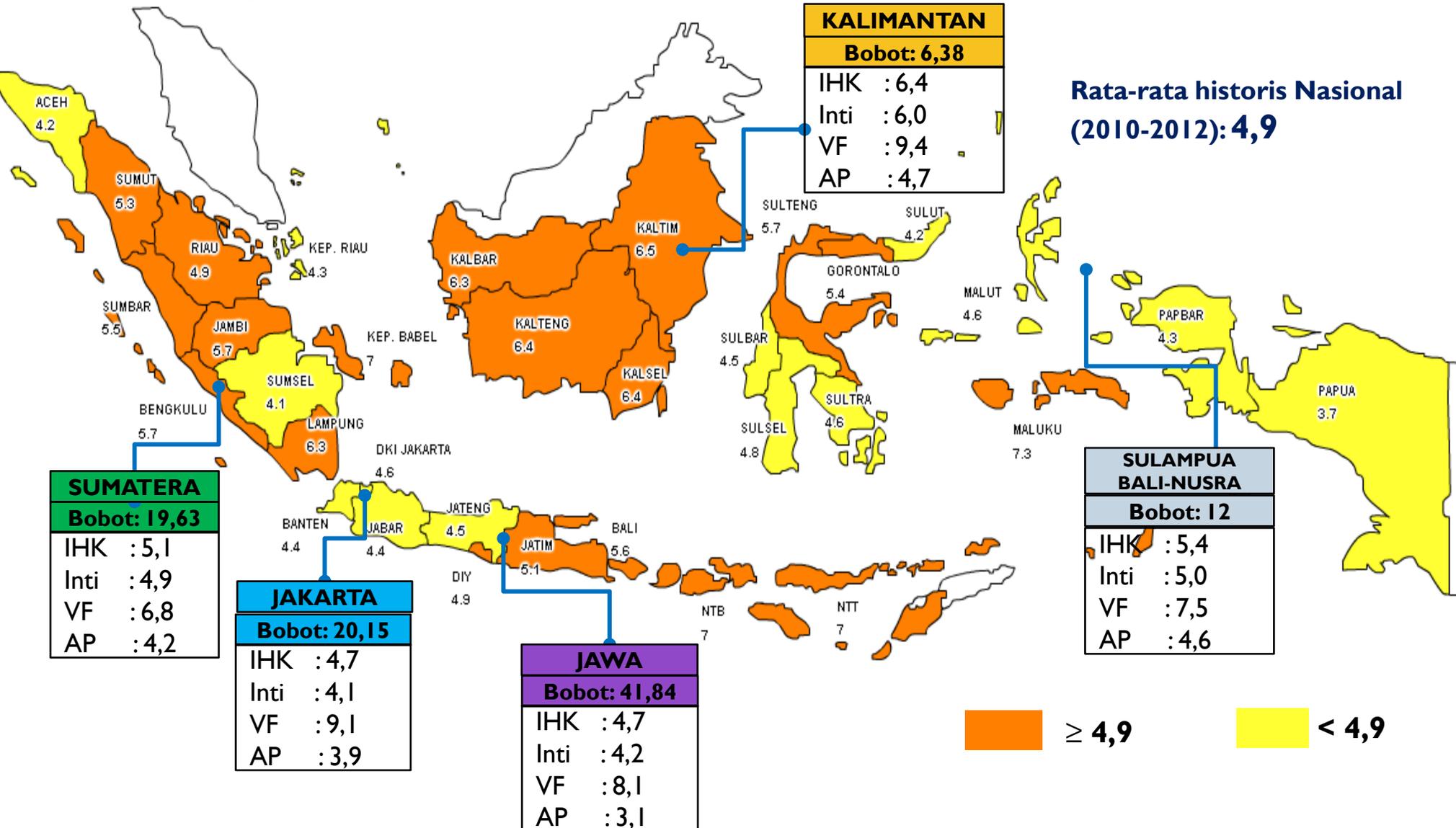


Inflasi Administered Prices (Komponen Diatur Pemerintah)

Tekanan inflasi terutama disebabkan oleh komoditas **tarif angkutan dalam kota, tarif angkutan udara, dan terbatasnya moda transportasi umum yang antara lain dilakukan melalui** perbaikan mekanisme penetapan harga jual dan meminimalkan dampak lanjutannya serta memperkuat upaya diversifikasi energi.

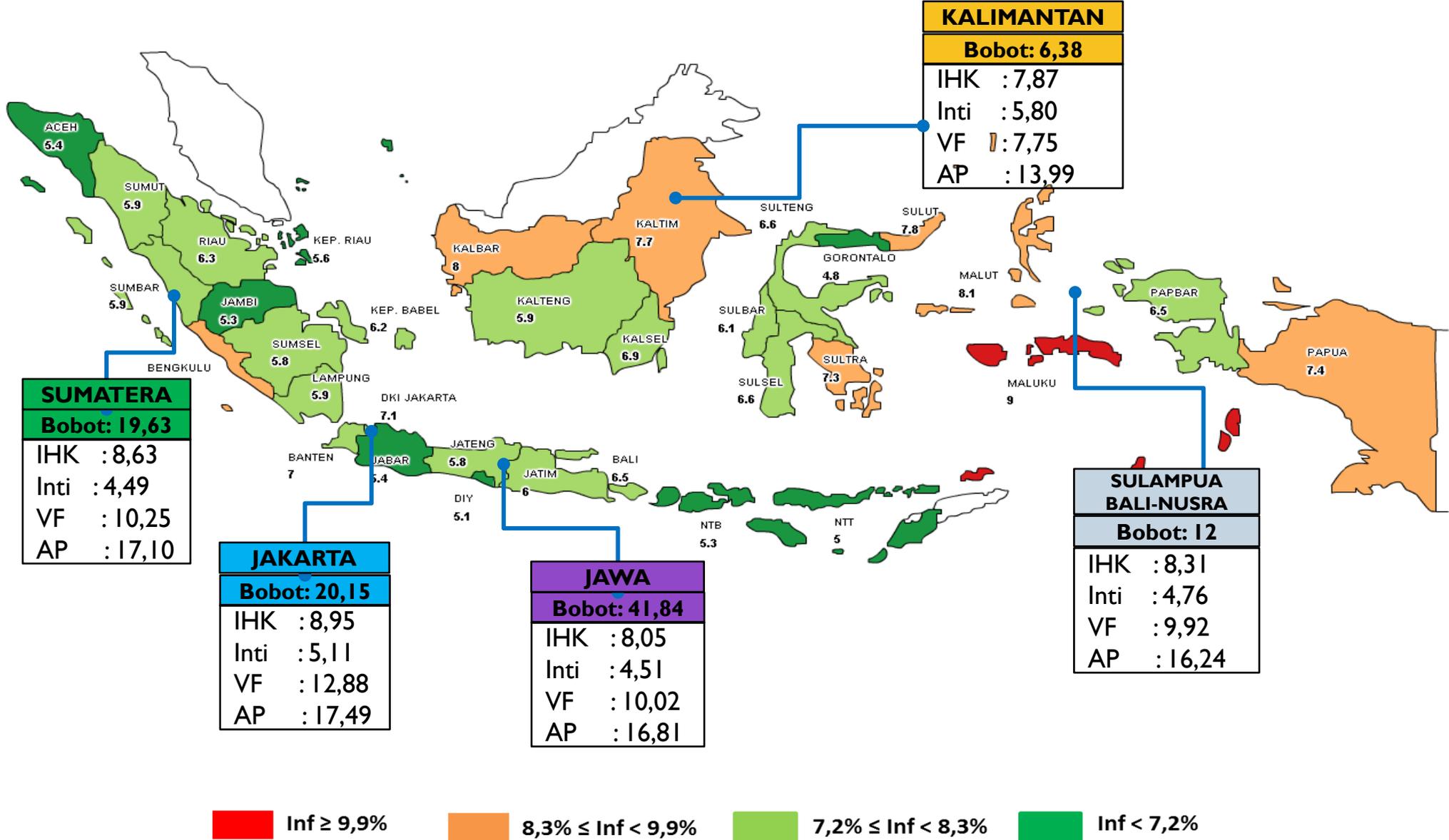
Historis Inflasi Daerah (Tanpa Kenaikan BBM)

Secara Historis (2010-2012, tanpa shock BBM), inflasi secara spasial masih tinggi terutama Luar Jawa.



Inflasi Daerah Tahun 2014 (Dengan Kenaikan BBM)

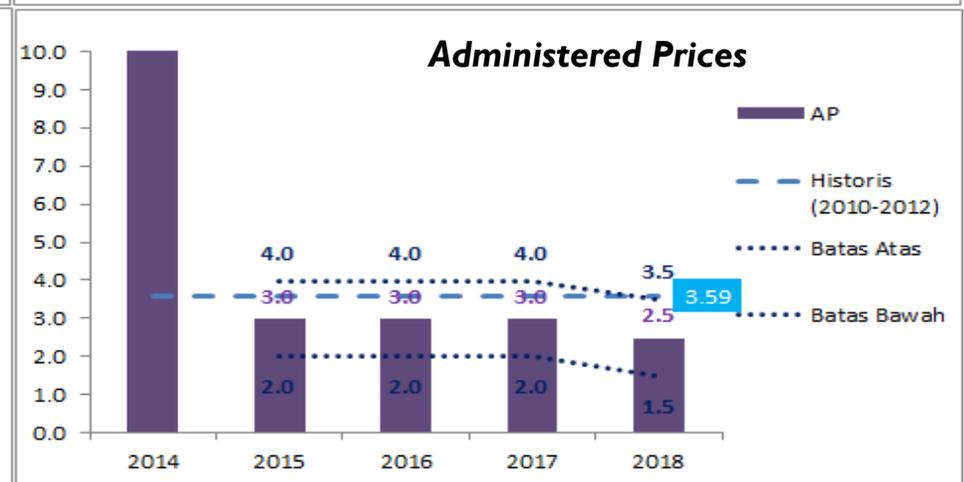
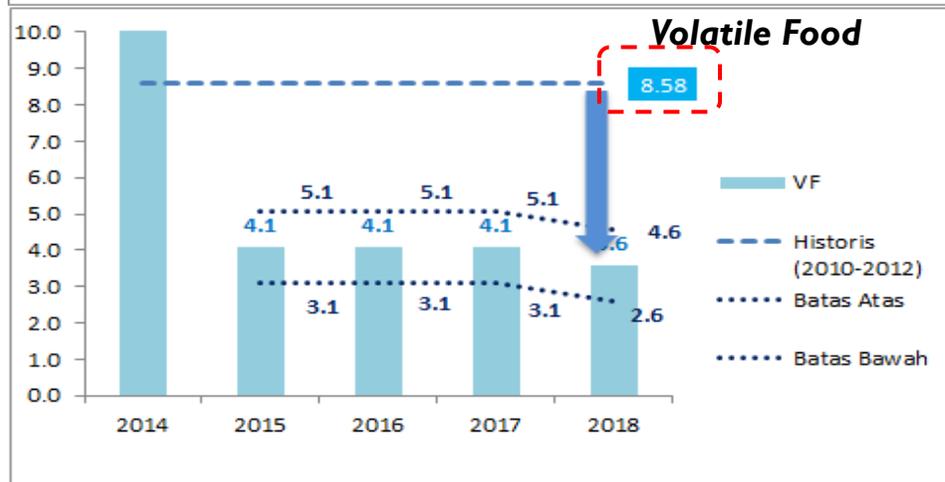
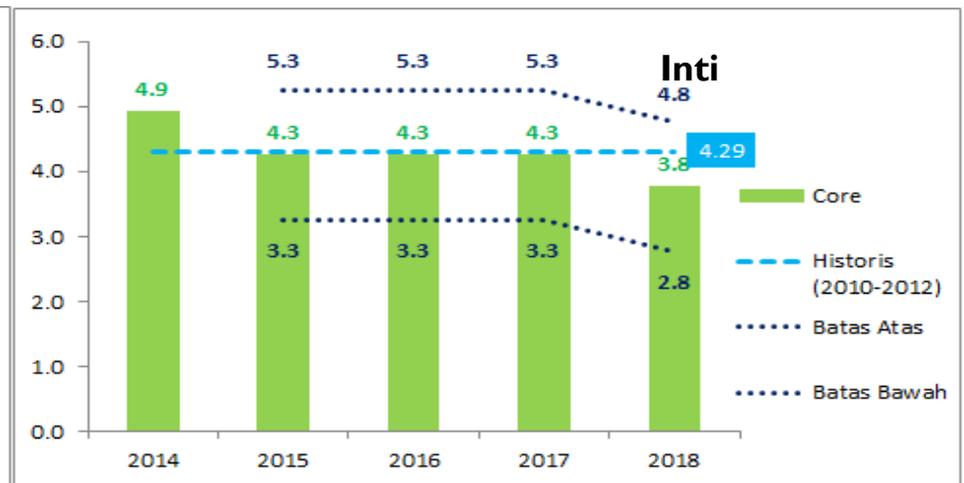
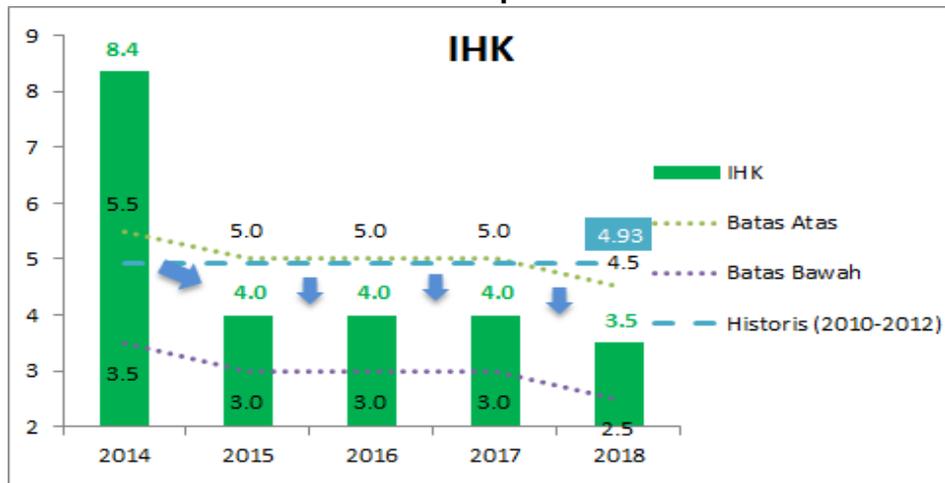
Shocks BBM mendorong Inflasi Tahun 2014 Lebih Tinggi



Ke Depan Perlu *Extra Effort*

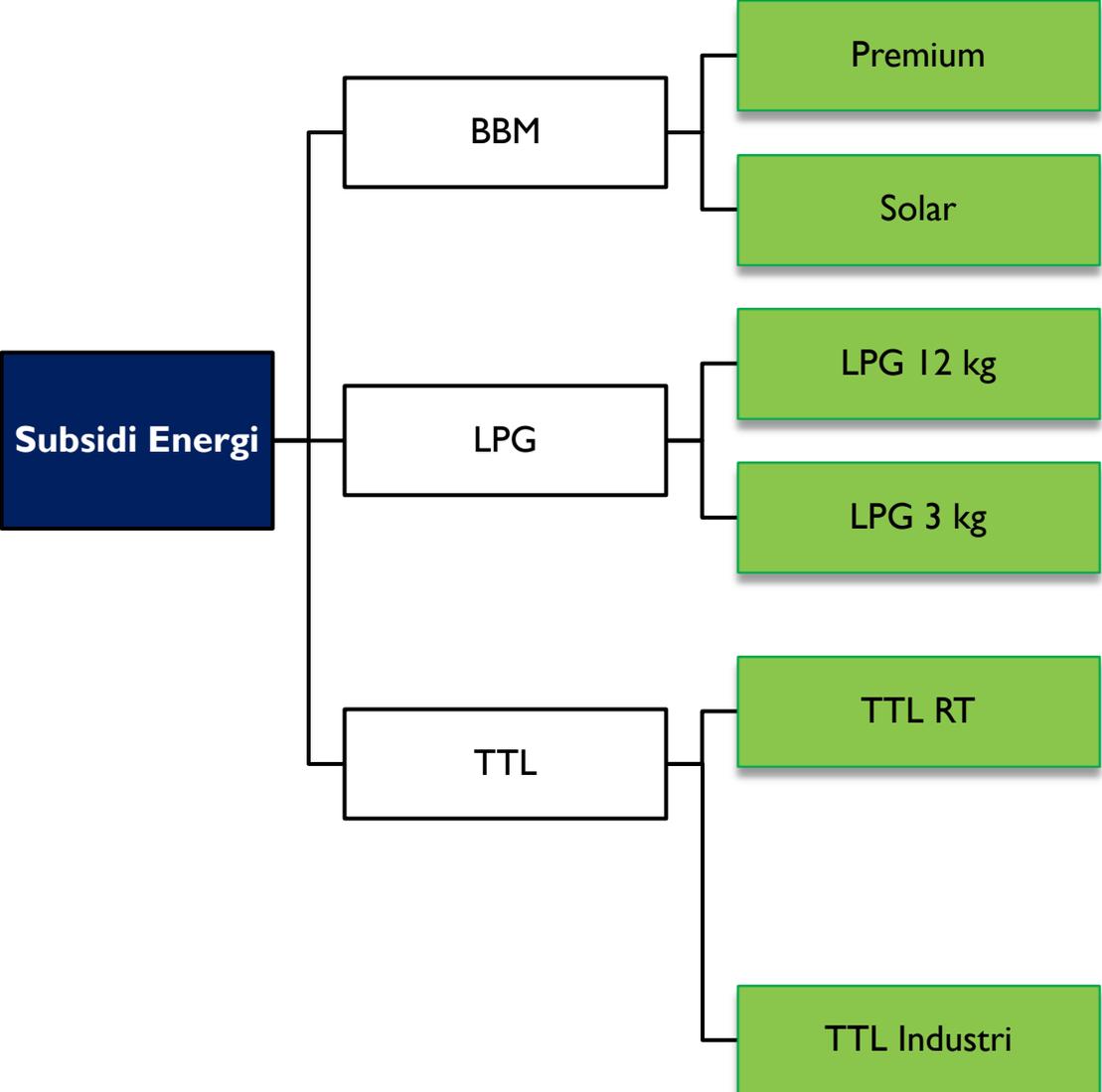
Agar dapat mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan menurun ke $3,5 \pm 1\%$ di tahun 2018, diperlukan “extra effort” dari semua pihak....

Secara historis (diluar periode kebijakan BBM), inflasi IHK, Inti, *Volatile Food*, dan *Administered Prices* masing-masing sekitar 4,9%, 4,3%, 8,6% dan 3,6%. Perlu upaya mengurangi tingkat inflasi ke depan agar batas atas sasaran inflasi kedepan tidak terlewati.



Risiko dari Kelanjutan Reformasi Subsidi Energi

Secara umum reformasi subsidi energi mengurangi shock inflasi. Meskipun demikian, kedepan masih terdapat risiko yakni dari LPG 3 Kg dan TTL Rumah Tangga Golongan 450 VA dan 900 VA yang masih disubsidi.



Kebijakan	Timeline
Market Price	1 Jan 2015
Fixed Subsidy: Rp1000/L	1 Jan 2015
Market Price	19 Jan 2015
LPG 3 kg naik Rp1.000 per kg	2016
Kelanjutan Subsidi LPG 3 kg	?
Market Price (>2200VA)	2014
Market Price (1300VA- 2200VA)	2016 ?
Pengurangan subsidi listrik 450VA-900VA	2016 ?
Market Price (450VA -900VA)	?
Market Price (13 dan 14)	2014

Tantangan Semakin Berat jika Reformasi Subsidi Energi Berlanjut (I)

Mempertimbangan risiko inflasi administered price yang ada (LPG 3 kg dan TTL RT 450-900VA), untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, inflasi inti dan volatile food harus dibawa lebih rendah dibandingkan rata-ratanya pada 2010-2012.

Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam APBN 2016, inflasi tahun 2016 berisiko melewati batas atas sasaran. Selanjutnya apabila reformasi subsidi energi terus berlanjut khususnya untuk LPG 3 kg dan TTL 450 VA dan 900 VA hingga mencapai keekonomian pada 2018, maka inflasi 2017-2018 juga berisiko terlewati. Diperlukan *extra effort* untuk membawa inflasi dalam targetnya.

Risiko Inflasi Administered Price 2016-2018

	2016	2017	2018
LPG 3kg	0.34	0.68	0.68
TTL 450 VA-900 VA	1.08	0.28	0.28
Total Sumbangan Risiko Administered Prices	1.42	0.96	0.96
YoY Administered Prices /year	7.88	5.33	5.33

Kenaikan tarif menuju harga keekonomian di tahun 2018

	Historis 2010-2012	2016	2017	2018
Core	4.29	3.5	3.9	3.5
AP	3.59	11.5	8.9	8.9
VF	8.58	4.2	5.4	4.0
Batas Atas IHK		5.0	5.0	4.5

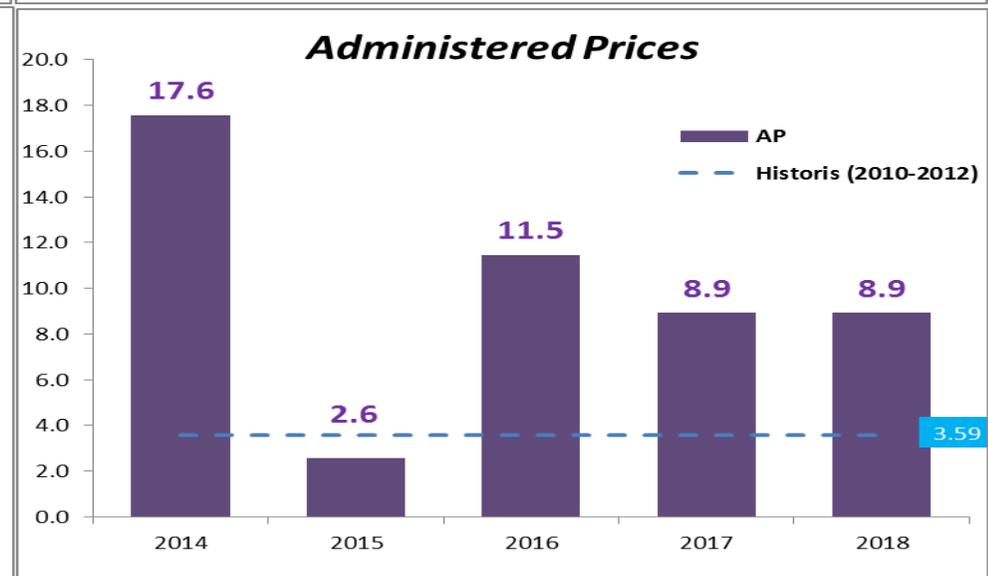
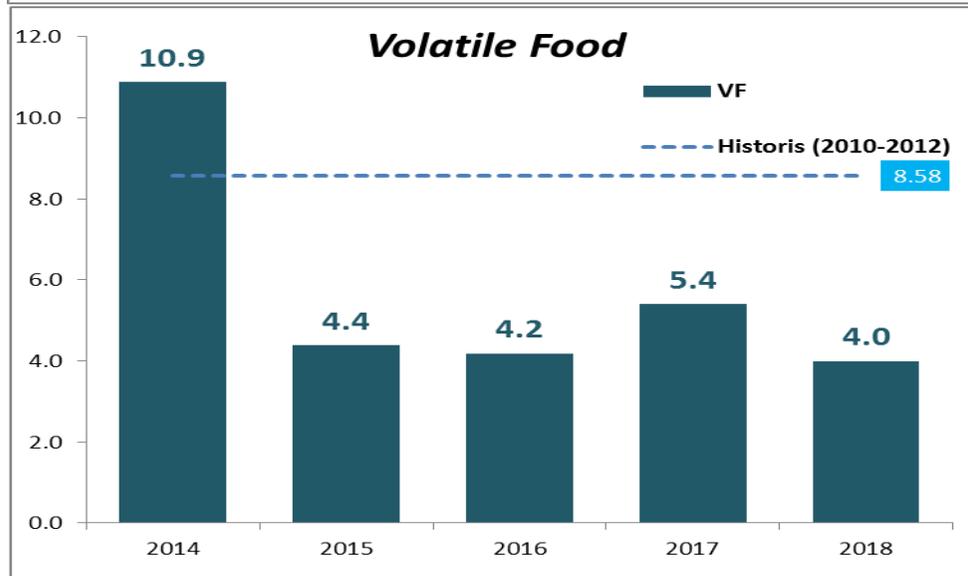
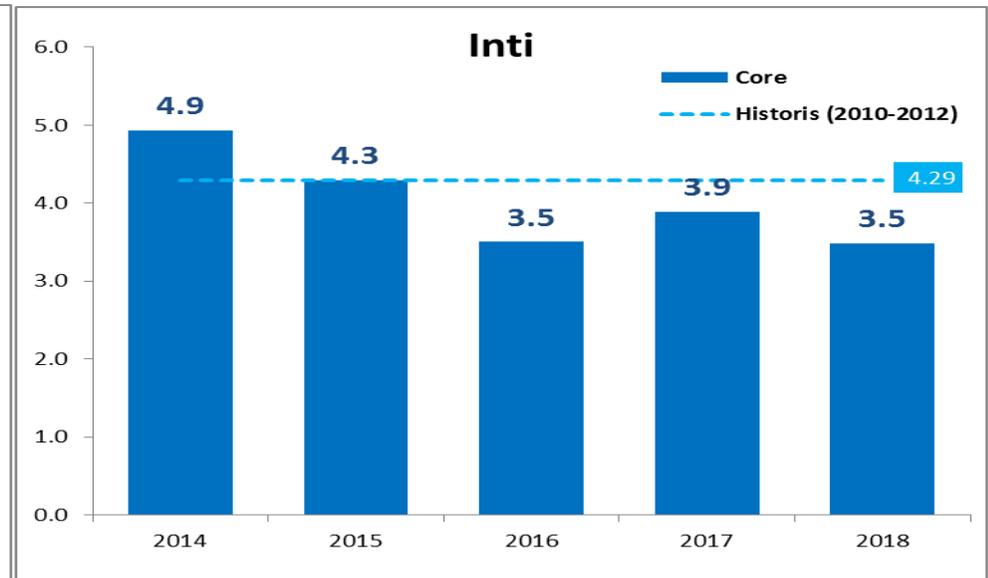
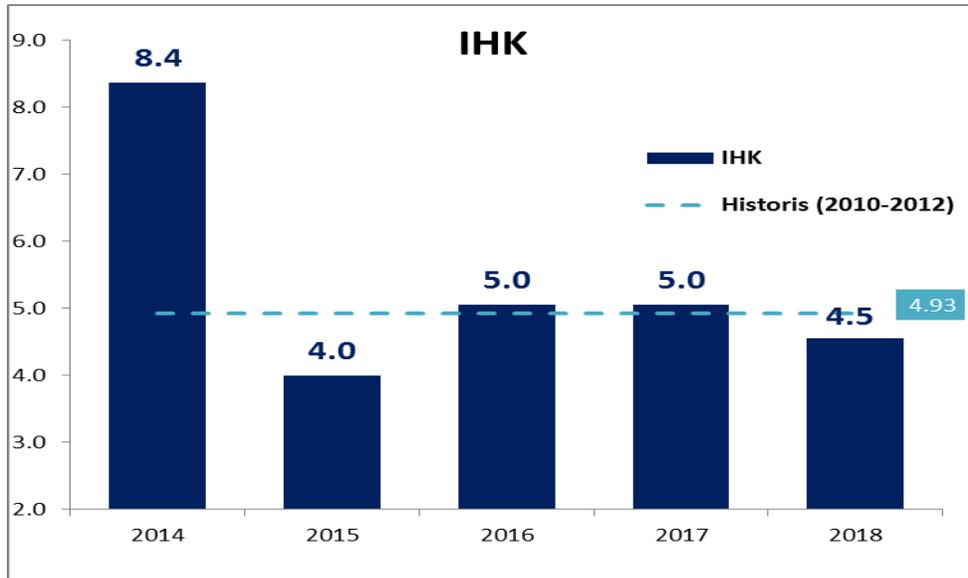
Inflasi inti agar menurun dibawah 3,5%

Rata-rata inflasi AP 2010-2012 (yoy) + risiko inflasi AP (yoy)

Inflasi VF agar dibawa menurun

Tantangan Semakin Berat jika Reformasi Subsidi Energi Berlanjut (2)

Inflasi Inti dan Volatile Food harus lebih rendah dari historisnya untuk mencapai sasaran inflasi



1.2 Identifikasi Permasalahan Inflasi

Komoditas Utama Penyumbang Inflasi

Untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil diperlukan “extra efforts” dari semua pihak dan membutuhkan komitmen bersama (pusat-daerah).



Roadmap
Pengendalian
Inflasi Volatile
Food

Bobot yang besar ada pada komoditas Beras, Daging Ayam Ras, Daging Sapi, Cabai Merah dan Bawang Merah



Roadmap
Pengendalian
Inflasi
Administered
Prices

Bobot yang besar ada pada komoditas Bensin, Tarif Listrik, Bahan Bakar RT dan Solar.



Roadmap
Pengendalian
Inflasi Inti

Menjawab isu:

- Permintaan domestik dan kapasitas perekonomian
- Gejolak eksternal (nilai tukar dan harga komoditas global)
- Ekspektasi inflasi

- **Pusat dan Daerah**

- **Jangka Pendek (2015, 2016) dan Menengah (2017 dst)**

Identifikasi Permasalahan Inflasi Inti

Output Gap



- Pertumbuhan ekonomi yang melambat terutama investasi menyebabkan **terbatasnya peningkatan kapasitas perekonomian**
- Pelaksanaan berbagai infrastruktur pemerintah diperkirakan baru akan dimulai pada semester II 2015 dan **memerlukan waktu untuk beroperasi penuh**
- Terjadinya **deindustrialisasi** di berbagai sektor dan **konversi lahan pertanian** menjadi lahan komersial.

Nilai Tukar



- Tekanan **depresiasi** nilai tukar Rupiah pada 2015 cukup besar yang bersumber dari eksternal dan domestik
- Dari domestik terkait dengan **struktur ekspor yang berbasis sumber daya alam** dan **import content tinggi**

Ekspektasi Inflasi



- Kendati **ekspektasi inflasi** mulai menurun namun masih pada **tingkat yang tinggi**
- Peran **backward expectation** masih kuat antara lain tercermin pada penetapan UMP dan tarif listrik
- Sasaran inflasi belum menjadi **anchor** pembentukan ekspektasi

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

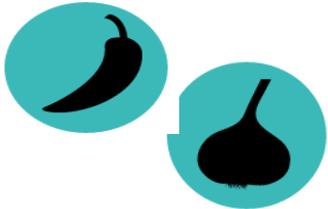
Secara umum permasalahan pada komoditas volatile food mencakup produktivitas rendah, rantai distribusi panjang, struktur pasar terkonsentrasi pada sejumlah pelaku, asimetri informasi, downward rigidity harga, dan akurasi data produksi, konsumsi, dan stok. Secara khusus pengendalian inflasi difokuskan pada 3 kelompok pangan, yakni beras, hortikultura, dan aneka daging.

Beras



- Tren **produksi** melambat
- **Saluran distribusi** panjang
- **Petani sebagai *price taker***
- ***Downward rigidity*** pada harga
- **Kelembagaan petani** lemah

Hortikultura



- Rentan oleh ***shocks*** (anomali cuaca, perubahan kebijakan Pemerintah) dan faktor musiman (Hari Raya)
- **Kendala pasokan antar waktu dan antar daerah**
- **Saluran distribusi** panjang
- **Petani sebagai *price taker***

Aneka Daging



- **Defisit pasokan dalam negeri daging sapi** (perlu impor)
- **Kendala bibit/ bakalan sapi**
- **Kendala transportasi**
- **Rentan oleh faktor musiman** (Hari Raya)
- **Kendala bibit, pakan, dan vaksin ayam yang masih tergantung impor**
- **Struktur pasar ayam yang terkonsentrasi pada beberapa pelaku (oligopoli).**

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Administered Prices*

BBM



- *Supply* energi domestik terbatas menyebabkan **ketergantungan impor yang tinggi**
- **Ketergantungan transportasi darat pada BBM**
- **Usaha angkutan darat belum tertata dengan baik** (masih banyak perusahaan perseorangan), **menyulitkan pengaturan sektor angkutan darat.**
- **Terbatasnya *public transport* yang disubsidi oleh Pemerintah**

Tarif Listrik



- **Subsidi masih besar untuk Tarif listrik Rumah Tangga golongan 450 VA dan 900 VA,** berdampak besar terhadap inflasi jika ada penyesuaian tarif.
- **Harga minyak dunia, inflasi, dan kurs** berpengaruh terhadap penetapan tarif listrik.
- Penggunaan variabel inflasi dalam perhitungan *tariff adjustment* TTL berpotensi menimbulkan efek spiral inflasi.

LPG



- **Subsidi terhadap LPG 3 kg masih besar dan jika terjadi penyesuaian harga dampak inflasinya besar.**
- **Distribusi LPG 3 kg belum dikelola dengan baik dan masih bersifat terbuka,** sedangkan alokasi subsidi di APBN jumlahnya terbatas
- **Harga gas dunia, kurs, dan biaya distribusi** berpengaruh terhadap harga LPG.
- **Ketergantungan impor LPG yang tinggi.**

1.3.

Roadmap

Pengendalian

Inflasi Nasional

Roadmap Pengendalian Inflasi Inti

<i>Output Gap</i>				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Pertumbuhan ekonomi yang melambat terutama investasi	Memastikan berbagai program infrastruktur berjalan sesuai tenggat waktu yang ditargetkan		Menyederhanakan perizinan, pemberian insentif untuk mendorong investasi khususnya di bidang infrastruktur, energi, logistik	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Keuangan • Kementerian Perhubungan • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • BI
Pelaksanaan program infrastruktur pemerintah baru akan dimulai pada semester II 2015 dan perlu waktu untuk beroperasi penuh	Mendorong kebijakan fiskal yang lebih ekspansif		Mendorong peningkatan alokasi dan percepatan realisasi belanja modal daerah	
Indikator permintaan cenderung melemah.	Pengelolaan sisi permintaan melalui bauran kebijakan makro dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian			

Roadmap Pengendalian Inflasi Inti

Nilai Tukar				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Meningkatkan kapasitas ekonomi		Melaksanakan berbagai program infrastruktur sesuai dengan jadwal, terutama infrastruktur lintas sektor (energi dan logistik)	Menyederhanakan perizinan, pemberian insentif untuk mendorong investasi khususnya di bidang infrastruktur, energi, logistik	<ul style="list-style-type: none"> • BI • Kementerian Keuangan • Kementerian Dalam Negeri • Kementarian Perdagangan
		Kebijakan fiskal yang akomodatif terhadap pertumbuhan ekonomi		
Tekanan depresiasi nilai tukar Rupiah cukup besar bersumber dari eksternal dan domestik	Bauran kebijakan makro untuk menjaga stabilitas nilai tukar	Mengarahkan nilai tukar agar sesuai dengan fundamentalnya	Mendorong industri daerah berorientasi ekspor dan atau industri substitusi impor antara lain dengan memberikan insentif (kemudahan perizinan dan usaha)	
	Pendalaman pasar keuangan valuta asing (valas) sebagai bagian dari <i>capital flow management</i>			
Struktur ekspor masih berbasis SDA dan import content tinggi	Peningkatan ekspor non Sumber Daya Alam (SDA), misalnya ekspor manufaktur		Mendorong pengembangan infrastruktur yang mendukung industri berorientasi ekspor	
	Penyediaan bahan baku lokal untuk mengurangi impor bahan baku			

Roadmap Pengendalian Inflasi Inti

Ekspektasi Inflasi				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Ekspektasi inflasi masih dalam tingkat yang masih tinggi	Komunikasi target inflasi secara efektif sehingga menjadi <i>anchor</i> bagi pelaku ekonomi	Membangun kredibilitas kebijakan moneter, antara lain melalui pencapaian sasaran inflasi, konsistensi kebijakan dan komunikasi kebijakan	Mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok	<ul style="list-style-type: none"> • BI • Kementerian Dalam Negeri • Kemenko Perekonomian • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Tenaga Kerja • Kementerian Pertanian • Kementerian Perdagangan
Peran <i>backward expectation</i> masih kuat	Mengembangkan PIHPS untuk mengurangi <i>asymmetric information</i>			
	Mengatur <i>timing</i> dan mekanisme reformasi subsidi energi			
	Kebijakan yang terintegrasi untuk mendorong produksi dalam rangka kemandirian pangan			
	Memperkuat cadangan pangan pemerintah			
	Menjaga stabilitas nilai tukar			
Penetapan UMP yang diindeksasi dengan inflasi dikhawatirkan menimbulkan dampak spiral	Me-review perumusan UMP		Mendorong penggunaan sasaran inflasi dalam penetapan UMP	

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (I)				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Gejolak harga akibat El Nino	<p>2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyaluran Raskin/Rastra ke 13 (September 2015) dan 14 (November 2015) Penyelenggaraan Pasar Murah/ Pasar Penyeimbang Percepatan Pencairan Penyertaan Modal Negara di BULOG pada 2015 Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah Percepatan Pembentukan Badan Pangan Nasional (turunan UU Pangan No.18 tahun 2012) Memberikan fleksibilitas bagi BULOG guna meningkatkan kemampuannya dalam pengadaan DN Menambah pasokan dari pengadaan LN 	Secara bertahap memupuk cadangan beras	Mendukung kerjasama antar daerah	<ul style="list-style-type: none"> Kemenko Perekonomian Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan Kementerian Sosial
	<p>2016:</p> <p>Implementasi Peraturan Presiden No.71 Tahun 2015 (antara lain penetapan harga, pengelolaan stok, pengendalian ekspor dan impor)</p>			

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (2)				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Gangguan Produksi	2015: <ul style="list-style-type: none"> Menambah produksi melalui penambahan area pertanian, perbaikan irigasi, peningkatan bibit sapi, pakan ternak, dan sarana produksi Produksi/ Penanaman varietas pangan sesuai preferensi lokal, untuk mengurangi biaya angkut akibat mendatangkan dari daerah lain 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kontinuitas pasokan dengan perluasan area pertanian dan irigasi Produksi/ Penanaman varietas pangan sesuai preferensi lokal, untuk mengurangi biaya angkut akibat mendatangkan dari daerah lain 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung distribusi sarana dan infrastruktur penunjang Mendukung sosialisasi metode peningkatan produksi padi 	<ul style="list-style-type: none"> Kemenko Perekonomian Kementerian Pertanian Pemerintah Daerah
	2016: <ul style="list-style-type: none"> Menetapkan HPP Beras di awal tahun Menambah produksi melalui penambahan area pertanian, perbaikan irigasi, dan penyediaan sarana produksi 	Mengurangi angka susut gabah menjadi beras		
Biaya Logistik	Program Tol Laut untuk pengangkutan barang guna mengurangi disparitas harga	Program Tol Laut untuk pengangkutan barang guna mengurangi disparitas harga		<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan Kementerian Perdagangan
Price Strategy: Memperkuat Posisi Tawar Petani	Penguatan akses pembiayaan bagi petani Peningkatan akses informasi harga pangan	Mengembangkan sistem pembiayaan usaha tani untuk mengurangi ketergantungan kepada tengkulak		<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pertanian Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Koperasi dan UMKM

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (3)				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Channel of Distribution Panjang	2015: <ul style="list-style-type: none"> Memperpendek jalur distribusi dengan membangun jaringan toko tani Indonesia dan depo bahan kebutuhan pokok Penerapan mekanisme lelang di pasar induk untuk mengurangi level harga Memperbaiki rantai distribusi dari terminal agribisnis-sub terminal agribisnis-pasar induk-sub pasar induk dengan sistem informasi yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Efisiensi tata niaga beras dan mengurangi margin pedagang besar, antara lain dengan memperkuat kelembagaan dan keuangan BULOG Penerapan mekanisme lelang di pasar induk untuk mengurangi level harga Memperbaiki rantai distribusi dari terminal agribisnis-sub terminal agribisnis-pasar induk-sub pasar induk dengan sistem informasi yang terintegrasi Membangun toko-toko bahan pangan di daerah perbatasan 	Mendukung kerjasama antar daerah	<ul style="list-style-type: none"> Kemenko Perekonomian Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan
	2016: <ul style="list-style-type: none"> Efisiensi tata niaga beras dan mengurangi margin pedagang besar, antara lain dengan memperkuat kelembagaan dan keuangan BULOG Perbaikan sistem penetapan harga dan suplai beras melalui lelang terbuka 	Kerjasama antar daerah surplus-defisit secara intensif Membangun jaringan toko tani Indonesia dan depo bahan kebutuhan pokok		
Preferensi konsumen	Edukasi kepada masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan	Edukasi kepada masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan		<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (I)				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017, dst)	Peran Daerah	Keterangan
Price Strategy: Memperkuat Posisi Tawar Petani	Penguatan akses pembiayaan bagi petani	Mengembangkan sistem pembiayaan usaha tani untuk mengurangi ketergantungan kepada tengkulak		<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Otoritas Jasa Keuangan • Kementerian Keuangan • Kementerian Koperasi dan UMKM
	Peningkatan akses informasi harga pangan			
Gejolak Harga akibat Risiko La Nina 2016	2015: Penerbitan Peraturan Menteri turunan dari Peraturan Presiden No. 71 tahun 2015 tentang penetapan kebijakan harga termasuk penetapan harga subsidi	Membangun jaringan toko tani Indonesia dan depo bahan kebutuhan pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Gerakan Tanam Cabai di pekarangan • Kerjasama antar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Kementerian Perdagangan
	Pelaksanaan Operasi Pasar Cabai Merah			
	2016: Implementasi Peraturan Presiden No.71 Tahun 2015 (antara lain penetapan harga, pengelolaan stok, pengendalian ekspor dan impor)			

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (2)				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017, dst)	Peran Daerah	Keterangan
Channel of Distribution	Memperbaiki rantai distribusi dari terminal agribisnis-sub terminal agribisnis-pasar induk-sub pasar induk dengan sistem informasi yang terintegrasi	Memperbaiki rantai distribusi dari terminal agribisnis-sub terminal agribisnis-pasar induk-sub pasar induk dengan sistem informasi yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung sosialisasi informasi harga pangan • Mendukung kerjasama daerah • Menyederhanakan perizinan pembangunan infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kementerian Keuangan • Kementerian Perdagangan • Kementerian Perhubungan • Kementerian Dalam Negeri • Pokjanas TPID
	Membangun jaringan toko tani Indonesia dan depo bahan kebutuhan pokok			
Produksi: tingkat penyerapan cabai merah lokal untuk industri DN kecil	Mengatur penyerapan produksi dalam negeri oleh industri sebagai syarat impor	Mengatur penyerapan produksi dalam negeri oleh industri sebagai syarat impor Mendorong kemudahan perizinan industri makanan-minuman yang akan menyerap cabai lokal di daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong kemudahan perizinan industri makanan-minuman yang akan menyerap cabai lokal di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Kementerian Perdagangan

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (3)				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Price Setting: Pedagang lebih dominan dalam menentukan harga	Stabilisasi harga tingkat petani Harga Minimum Kabupaten (HKM) untuk daerah sentra		<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan Peraturan Daerah/ Peraturan tingkat Kabupaten terkait Harga Minimum Mendukung sosialisasi harga referensi ke publik 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan
	Stabilisasi harga tingkat konsumen a. Melanjutkan harga referensi yang didukung oleh sosialisasi kepada publik b. Meningkatkan akses informasi harga pangan antara lain melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)			
Ketersediaan pasokan antar waktu berfluktuasi dan sifat komoditas cabai tidak tahan lama	Perbaikan dalam pola tanam		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan distribusi pasokan dan pengawasan penyimpanan (<i>storage</i>) cabai 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan
	Penanganan paska panen untuk menjamin pasokan antar waktu kontinyu (antara lain <i>cold storage</i>)			
Biaya Logistik	Program Tol Laut untuk pengangkutan barang guna mengurangi disparitas harga	Program Tol Laut untuk pengangkutan barang guna mengurangi disparitas harga		<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan Kementerian Perdagangan

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (I)				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Gejolak Harga akibat Risiko La Nina 2016	Stabilisasi harga melalui: <ul style="list-style-type: none"> Percepatan penerbitan Peraturan Menteri turunan dari Peraturan Presiden No. 71 tahun 2015 termasuk penetapan harga subsidi Penerbitan Inpres untuk menunjuk BUMN-BUMN yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan harga, pengelolaan stok, dan pengelolaan impor (penugasan untuk komoditas daging sapi, bawang merah, kedelai) 	Implementasi Peraturan Presiden No.71 Tahun 2015 (antara lain penetapan harga, pengelolaan stok, pengendalian ekspor dan impor)	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong Gerakan Tanam Bawang di pekarangan Kerjasama antar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan
Channel of Distribution	Membangun jaringan toko tani Indonesia dan depo bahan kebutuhan pokok		Menjaga kelancaran distribusi	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan
Biaya Logistik	Program Tol Laut untuk pengangkutan barang guna mengurangi disparitas harga	Program Tol Laut untuk pengangkutan barang guna mengurangi disparitas harga		<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan Kementerian Perdagangan

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (2)				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Price setting: Pedagang lebih dominan dalam menentukan harga	Stabilisasi harga tingkat petani Penetapan Harga Minimum Kabupaten (HMK) untuk daerah sentra		<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan Peraturan Daerah/ Peraturan tingkat Kabupaten terkait Harga Minimum Mendukung sosialisasi harga referensi ke publik 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan
	Stabilisasi harga tingkat konsumen <ul style="list-style-type: none"> Melanjutkan Harga Referensi yang didukung oleh sosialisasi kepada publik yang lebih intensif. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis 			
Ketersediaan pasokan antar waktu + sifat komoditas bawang tidak tahan lama	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan pola tanam Penanganan paska panen untuk menjamin pasokan antar waktu kontinyu sepanjang tahun misal dengan <i>cold storage</i> 		<ul style="list-style-type: none"> Mendukung sosialisasi sistem pola tanam yang kontinyu sepanjang tahun Mendukung industri hilirisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan
Pemanfaatan kelebihan produksi untuk ekspor belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola hasil surplus Memperluas peluang ekspor 		<ul style="list-style-type: none"> Mendukung kerja sama antar daerah Meleakukan penyederhanaan peraturan untuk mendukung ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> Kemenko Perekonomian Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan
Price Strategy: Memperkuat Posisi Tawar Petani	Penguatan akses pembiayaan bagi petani	Mengembangkan sistem pembiayaan usaha tani untuk mengurangi ketergantungan kepada tengkulak		<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pertanian Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Koperasi dan UMKM
	Peningkatan akses informasi harga pangan			

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Sapi (1)				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Gejolak harga akibat pembatasan impor	Membuka Opsi Impor		Melakukan penyederhanaan ketentuan untuk mendukung industri peternakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Perdagangan • Kemenko Perekonomian
	Percepatan penerbitan Peraturan Menteri turunan dari Peraturan Presiden No. 71 tahun 2015 ttg penetapan kebijakan harga, termasuk penetapan harga acuan	Implementasi Peraturan Presiden No.71 Tahun 2015 (antara lain penetapan harga, pengelolaan stok,pengendalian ekspor dan impor)		
Produksi dalam negeri terbatas dan ketergantungan impor	Mendorong peningkatan bibit sapi melalui intervensi pemerintah	Mengupayakan agar usaha ternak sapi berkesinambungan dan berkembang menjadi industri peternakan (<i>farm estate</i>).	Melakukan penyederhanaan ketentuan untuk mendukung industri peternakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Dalam Negeri
Channel of Distribution	Membangun jaringan toko tani Indonesia dan depo bahan kebutuhan pokok		Mendukung kelancaran distribusi bibit sapi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Dalam Negeri
Biaya Logistik	Program Tol Laut untuk pengangkutan barang guna mengurangi disparitas harga	Program Tol Laut untuk pengangkutan barang guna mengurangi disparitas harga		<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • Kementerian Perdagangan

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Sapi (2)				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Price Setting: pedagang memiliki <i>market power</i> dan kebijakan harga referensi belum dapat menstabilkan harga	Review peraturan yang mengatur sistem distribusi sapi.	Perlu kepastian tingkat harga kedepan sebagai insentif bagi peternak dalam negeri untuk berproduksi.	Monitoring harga referensi di pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Dalam Negeri
	Meningkatkan akses informasi harga pangan			
	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).			
Penguatan Stok	Penguatan peran Bulog dalam penyediaan daging sapi antara lain melalui PNM Bulog untuk infrastruktur (<i>cold storage, chiller</i>)	Penguatan peran Bulog dalam penyediaan daging sapi antara lain melalui PNM Bulog untuk infrastruktur (<i>cold storage, chiller</i>)		<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kementerian Perdagangan • Bulog

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (I)				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Pembatasan Impor Pakan Ternak	Jaminan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pakan ternak antara lain melalui peningkatan produksi jagung dalam negeri		Mendukung kerja sama antar daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kementerian Pertanian • Kementerian Perdagangan
Produksi sangat bergantung pada ketersediaan GPS/ DOC	Pengendalian <i>Day Old Chicks (DOC)</i>	Sinkronisasi industri pakan ternak dalam negeri	Mendukung pemantauan DOC	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perdagangan • Kementerian Pertanian • Kementerian Dalam Negeri
	Mekanisme pengendalian jumlah DOC yang saat ini diserahkan pada pengusaha unggas secara suka rela dikhawatirkan menjadi sumber baru kartel dalam pengaturan harga --> perlu peran Pemerintah	Mengatur jalur distribusi industri pakan. Khusus untuk penyediaan komoditas jagung sebagai bahan utama pakan ternak perlu ada perbaikan struktur pasar agar harga yang terbentuk lebih efisien.	Mendukung kelancaran distribusi perdagangan daging ayam dan pakannya.	

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (2)				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Gejolak harga akibat pembatasan impor	Percepatan penerbitan Peraturan Menteri turunan dari Perpres No. 71 tahun 2015 ttg penetapan kebijakan harga, termasuk penetapan harga acuan	Implementasi Perpres No.71 Tahun 2015 (antara lain penetapan harga, pengelolaan stok,pengendalian ekspor dan impor)	Mendukung kerja sama antar daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kementerian Pertanian • Kementerian Perdagangan
Channel of Distribution	Membangun jaringan toko tani Indonesia dan depo bahan kebutuhan pokok			<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kementerian Pertanian • Kementerian Dalam Negeri
Biaya Logistik	Program Tol Laut untuk pengangkutan barang guna mengurangi disparitas harga	Program Tol Laut untuk pengangkutan barang guna mengurangi disparitas harga		<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • Kementerian Perdagangan

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Bahan Bakar Minyak (I)				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Harga minyak dunia dan kurs berpengaruh besar terhadap harga BBM domestik.	Menjaga stabilitas nilai tukar	Diversifikasi energi (bio gas, gas, listrik)	Fleksibilitas tarif PBBKB	<ul style="list-style-type: none"> • BI • Kementerian Dalam Negeri • Kemenko Perekonomian • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	<i>Hedging</i> kurs dan minyak oleh Pertamina	Pembangunan infrastruktur energi non-BBM	Insentif/penyederhanaan perizinan daerah terkait pembangunan infratrutur energi non-BBM.	
	Me-review mekanisme distribusi BBM dari depo ke SPBU.	Insentif untuk pembangunan infrastruktur		
Penetapan harga tidak konsisten dengan formula harga BBM	Konsisten melaksanakan formula penetapan harga BBM	Menghapuskan BBM jenis Premium Ron 88	Mendukung sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		Bertahap mengurangi impor <i>crude oil</i>		
Supply energi domestik terbatas → ketergantungan impor tinggi.	Efisiensi		Peraturan Daerah tentang kepemilikan mobil (a.l: pemilik mobil harus memiliki lahan parkir)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Perhubungan
	<i>Demand side management</i>		Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor pribadi.	

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Bahan Bakar Minyak (2)

Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Ketergantungan transportasi berbahan dasar BBM	Mendorong penggunaan transportasi BBG antara lain dengan memberikan insentif (antara lain: keringanan pajak dan alat <i>converter</i> BBM ke BBG) kepada penyedia jasa transportasi umum dan pemberian margin tertentu kepada pemilik SPBG		Insentif PKB untuk kendaraan non-BBM	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Keuangan• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	Penetapan harga BBG yang seragam secara nasional			
	Meningkatkan jumlah SPBG			

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Bahan Bakar Minyak (3)

Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Penetapan harga BBM yang sering berubah (bulanan) menyulitkan penetapan tarif angkutan orang dan barang.	Me-review kebijakan penetapan batas atas dan bawah tarif angkutan (antar kota antar provinsi).		Merumuskan koridor batas atas dan batas bawah penyesuaian tarif angkutan dalam kota serta frekuensi penerapannya (jangka pendek).	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Perhubungan• Kementerian Dalam Negeri
	Review variabel perhitungan struktur biaya transportasi		Menyediakan/ menambah transportasi masal.	
	Memberikan insentif kepada penyedia jasa transportasi dengan pemberian insentif perpajakan untuk mengurangi biaya produksi			Diskon pajak bea balik nama dari kendaraan pribadi menjadi berbadan hukum.

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Tarif Tenaga Listrik (I)				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Harga minyak dunia, inflasi, dan kurs berpengaruh besar terhadap tarif listrik. Variabel inflasi dalam perhitungan <i>tariff adjustment</i> TTL → menimbulkan efek spiral	Meniadakan variabel inflasi dari formula perhitungan <i>tariff adjustment</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan penggunaan batu bara nasional sebagai pembangkit listrik Meningkatkan penggunaan Energi Baru-Terbarukan (EBT) 	Mempercepat dan mempermudah perizinan pembangkit listrik	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Dalam Negeri
	Menjaga stabilitas nilai tukar	Mengoptimalkan pemanfaatan insentif fiskal untuk pengembangan EBT		
	<i>Hedging</i> kurs dan minyak oleh PLN			
Beban subsidi untuk pelanggan Rumah Tangga 450VA dan 900VA masih sangat besar.	<ul style="list-style-type: none"> Bertahap mendorong pelanggan 900VA menjadi pelanggan 1300VA secara langsung, antara lain dengan pembebasan ongkos penambahan daya. Restriksi penambahan pelanggan daya baru untuk 450 VA dan 900 VA (dengan menunjukkan kartu keluarga sejahtera) 	Mengurangi subsidi secara bertahap mulai 2016	Sinergi dalam hal sosialisasi migrasi pelanggan dari 900VA menjadi 1300VA.	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Dalam Negeri Kementerian Keuangan

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Tarif Tenaga Listrik (2)				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Ada sekitar 7 juta pelanggan dari 24 juta yang layak mendapatkan subsidi listrik belum mendapatkan sambungan.	Pendataan ulang pelanggan PLN, mencocokkan data TNP2K dengan PLN.	Unifikasi data pelanggan PLN dengan data penduduk miskin TNP2K (NIK Kemendagri).		
Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik terus meningkat (inefisiensi)	<i>Review BPP</i>	Menyederhanakan izin terkait infrastruktur listrik	Menyederhanakan izin terkait infrastruktur listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kemenko Perekonomian • Kementrian Dalam Negeri
		Mengevaluasi barang kena retribusi terkait penyediaan energi listrik, antara lain air.	Mengevaluasi barang kena retribusi terkait penyediaan listrik.	

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

LPG (I)				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Harga gas dunia, kurs, dan biaya distribusi berpengaruh besar terhadap harga LPG	Menjaga stabilitas nilai tukar		Review RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dengan memasukan jargas	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Dalam Negeri • BI
	Me-review sistem distribusi LPG			
	Hedging kurs oleh Pertamina			
Ketergantungan impor LPG yang tinggi.	Mengendalikan jumlah tabung untuk wilayah yang sudah konversi (orientasi <i>zero growth</i>).	Mendorong pengembangan jaringan gas kota untuk mengurangi impor LPG.	Mendukung sistem distribusi tertutup dan pengawasan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Dalam Negeri
	Membangun sistem distribusi <i>online</i> dan terpadu.	Menerapkan sistem distribusi tertutup LPG 3 kg jika harganya masih disubsidi.	Mendorong penggunaan bahan bakar alternatif LPG	
	Pembangunan kilang LPG baru			
	Mempercepat penyelesaian revisi Peraturan Menteri ESDM yang mengatur mekanisme distribusi LPG 3 kg.	Mendorong penggunaan bahan baku alternatif untuk LPG		

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

LPG (2)				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Beban subsidi LPG 3 kg masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi subsidi (sekitar Rp 6 T) dengan menaikkan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 1000/kg Mempersiapkan mekanisme subsidi yang tepat sasaran, antara lain dengan uji coba distribusi LPG 3 kg secara tertutup sesuai dengan harga keekonomian di Batam, Tarakan, dan Bali Melakukan pembahasan distribusi tertutup LPG 3 kg. 		Menetapkan RTS (Rumah Tangga Sasaran)	<ul style="list-style-type: none"> Kemenko Perekonomian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri
	Penyesuaian harga LPG 3 kg sesuai harga keekonomian secara bertahap dan tertutup. Untuk Rumah Tangga Sasaran dan Usaha Mikro diberikan kuota pemakaian LPG 3 kg dengan harga subsidi. Pemakaian di atas kuota akan dikenakan harga keekonomian.		Mendukung implementasi sistem distribusi yang baru	

Roadmap Pengendalian Inflasi

Dana Investasi Daerah (DID)				
Permasalahan	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)	Peran Daerah	Keterangan
Peran daerah dalam pengendalian inflasi, masih perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> Di dalam APBN 2016 telah dimasukkan indikator pengendalian inflasi daerah sebagai salah satu kriteria pemberian DID (total dana yang dialokasikan untuk DID sebesar 5T). Indikator pengendalian inflasi yang digunakan masih menggunakan pendekatan PDRB Deflator. Meningkatkan konektivitas dengan meningkatkan alokasi DAK untuk infrastruktur. Meningkatkan produksi pertanian dengan meningkatkan alokasi DAK untuk pertanian dan irigasi Mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi DID secara umum diarahkan tidak hanya berbasis capaian tetapi juga berdasarkan proses. Indikator pengendalian inflasi daerah menggunakan kriteria penilaian kinerja TPID berprestasi (aspek proses dan aspek keluaran) untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota Meningkatkan alokasi belanja transfer ke daerah terutama terkait infrastruktur, serta pertanian dan irigasi Mengoptimalkan pemanfaatan APBD untuk mendorong produksi pertanian, pembangunan infrastruktur (antara lain jalan dan irigasi) Mendorong sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk membangun infrastruktur di daerah (antara lain melalui KPS, RIDF (<i>regional infrastructure development fund</i>)) 	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penghitungan TPI berprestasi. Mendorong pembentukan TPID untuk daerah yang belum membentuk TPID. Kesiapan regulasi dan kelembagaan daerah untuk meningkatkan kualitas proses perencanaan, penganggaran, implementasi, dan pelaporan. 	<p>Kemenkeu Kemendagri Kemendagri BI BPS Kemendes (TPI – Pokjanas TPID)</p>

1.4.

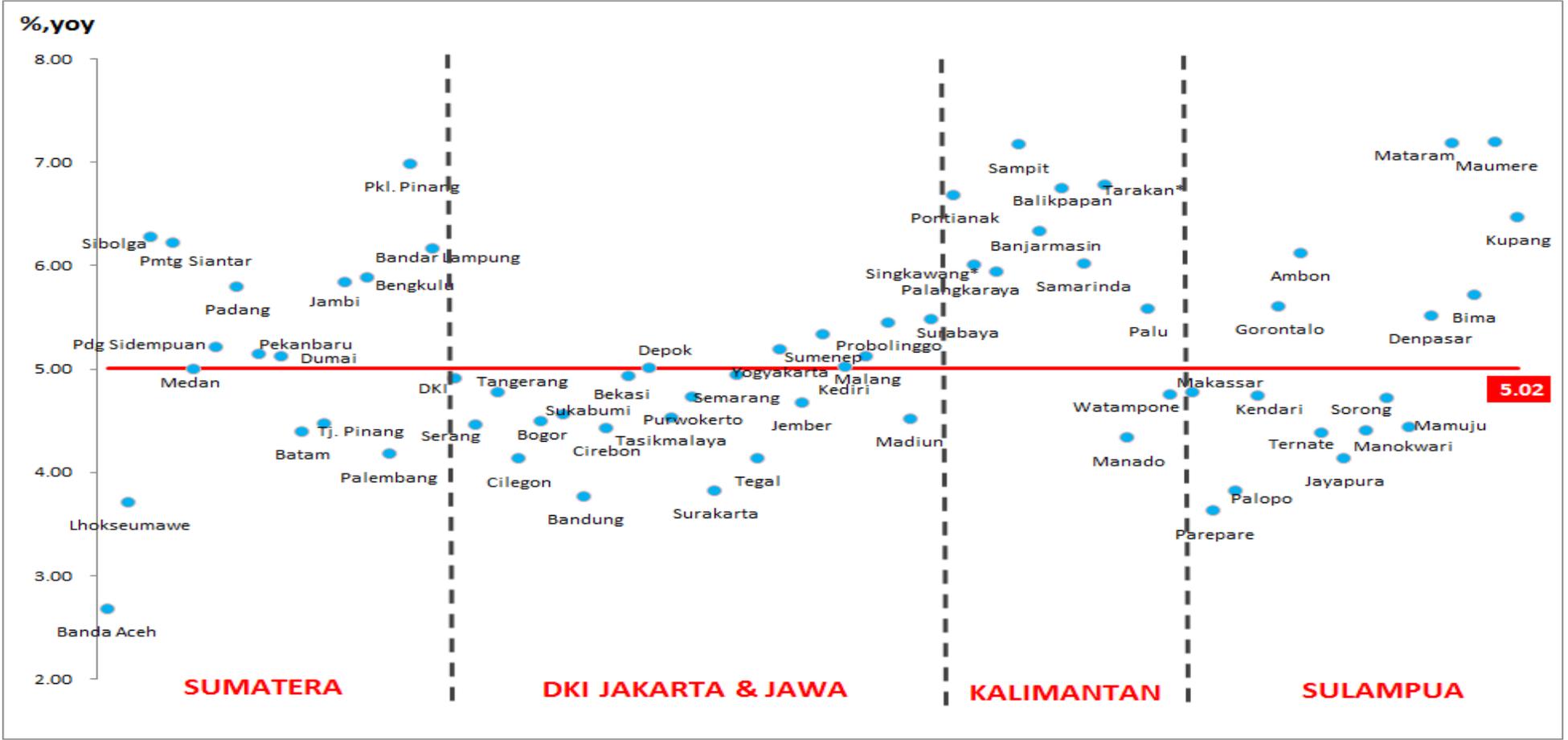
Roadmap

Pengendalian

Inflasi Daerah (Ringkasan)

Peta Inflasi Daerah

Dalam kondisi normal (2010-2012, tanpa kenaikan harga BBM), masih terdapat sejumlah kota di 3 wilayah (kecuali DKI Jakarta dan Jawa) yang secara historis lebih tinggi dari inflasi nasional. Kota ini dapat menjadi fokus perhatian untuk upaya penurunan inflasi secara bertahap.



5.02

Komoditas Utama Penyumbang Inflasi



Inflasi Inti

Komoditas	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulampua- Bali-Nusa Tenggara
Sewa rumah	√	√	√	√
Kontrak rumah	√	-	-	-
Mobil	-	√	-	-
Lainnya		Nasi dengan lauk	Nasi dengan lauk	
		Seragam anak sekolah		
		Akademi		

Komoditas Utama Penyumbang Inflasi



Inflasi Volatile Food

Komoditas	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulampua-Bali-Nusa Tenggara
Beras	√	√	√	√
Cabai Merah	√	√	√	-
Bawang Merah	√	√	√	√
Daging sapi	√	-	√	-
Daging ayam ras	√	√	√	√
Lainnya		Telur Ayam Ras	Telur Ayam Ras	Cabai rawit
			Ikan layang	Ikan Cakalang
			Cabai rawit	
			Ikan gabus	

Komoditas Utama Penyumbang Inflasi



Inflasi Administered Prices

Komoditas	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulampua-Bali-Nusa Tenggara
Bensin	√	√	√	-
Solar	-	-	-	-
Tarif Listrik	√	√	√	-
BBRT	√	√	√	-
Lainnya	Angkutan Udara	Angkutan Udara	Angkutan Udara	Angkutan udara
	Angkutan dalam kota	Rokok kretek filter		

Identifikasi Permasalahan Inflasi Daerah

Volatile Food

	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulampua-Bali-Nusra
ISU²				
Produksi				
Tata Niaga				
Distribusi		-		
Pola Konsumsi				
SDM & Kelembagaan Pet.			-	
Infrastruktur	-			-
Pasokan Antar Pulau	-	-	-	
Informasi Harga	-	-		-

BERAS	TELUR AYAM	BAWANG MERAH	DAGING SAPI	CABAI MERAH	CABAI RAWIT	DAGING AYAM	IKAN
-------	------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------

Identifikasi Permasalahan Inflasi Daerah

Inti dan Administered Prices

ISU ²	Sumatera 	Jawa 	Kalimantan 	Sulampua-Bali-Nusra 
Regulasi Penetapan Tariff				
Kurang Pasokan				
UMP				
Dampak Lanjutan dr <i>Volatile Food</i>				

 BENSIN	 TARIF KA	 TARIF LISTRIK	 ANGKUTAN DLM KOTA	 BBRT	 SEWA & KOTRAK RUMAH	 ANGKUTAN UDARA	 TUKANG BKN MANDOR	 NASI & LAUK
---	--	---	---	---	---	--	---	---

Peran Pengendalian Inflasi Daerah (I)

Untuk mencapai sasaran inflasi nasional, perlu dukungan program pengendalian inflasi yang terintegrasi antara Pusat-Daerah, mendapat komitmen penuh dari Pemerintah, dan menjadi bagian dari Program Kerja Pemerintah



Core inflation



- Peningkatan kapasitas perekonomian di daerah
- Kelancaran distribusi
- Komunikasi untuk mengarahkan ekspektasi
- Penetapan UMP

Administered prices



- Pengelolaan dampak lanjutan kebijakan harga BBM di daerah pada tarif angkutan dan harga barang2 lainnya
- Sinkronisasi tarif atau pungutan lain (d/r meningkatkan PAD)

Volatile food



- Peningkatan kapasitas dan infrastruktur produksi
- Pengaturan kesinambungan produksi
- Penguatan kapabilitas akses pasar bagi pelaku industri hulu



- Penguatan infrastruktur logistik pangan & konektivitas
- Peningkatan efisiensi bongkar muat



- Mendorong efisiensi struktur pasar
- Mendorong transparansi informasi
- Sinergi antar daerah



- Penguatan koordinasi pusat daerah/antar daerah
- Komunikasi intensif



Peran Pengendalian Inflasi Daerah (2)

Program TPID seyogyanya mulai didorong untuk mengatasi permasalahan struktural, yang dalam prakteknya memerlukan waktu penyelesaian dalam jangka >1 tahun ...

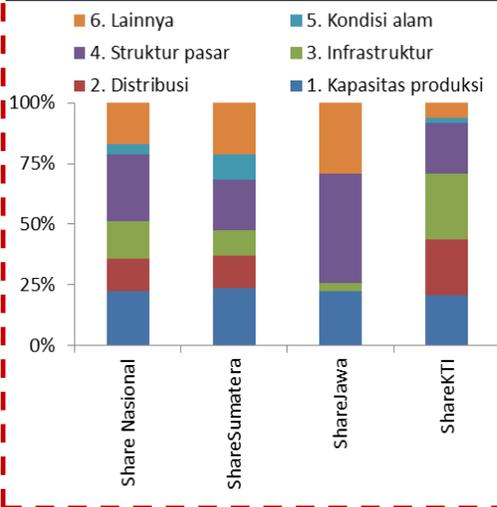
Sasaran Inflasi

3,5% + 1%



Permasalahan Struktural

Tantangan Pengendalian Inflasi Daerah



- Program pengendalian inflasi harus menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah daerah (APBD)
- Fokus program TPID diupayakan untuk mengatasi permasalahan struktural
- TPID perlu memiliki basis data sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan program kerja di wilayah masing-masing

- Program pengendalian inflasi harus sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
- Program pengendalian inflasi daerah dapat berupa kegiatan spesifik sesuai kondisi masing-masing daerah dan atau merupakan program yang secara nasional dilakukan secara serentak

- Implementasi program TPID harus memiliki target yang terukur, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dievaluasi.
- Satu program bisa merupakan sinergi dari setiap komponen yang terlibat dalam keanggotaan TPID ("keroyokan")
- Target utama mampu mendorong terwujudnya "4K"

"4K": Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribui, Komunikasi yang Efektif

Roadmap Pengendalian Inflasi Inti

Tukang Bukan Mandor

	2015-2016	2017-2018	Daerah
2015: Koordinasi penetapan UMK		TPID menjadi salah satu rujukan dalam penentuan rekomendasi kenaikan UMK	Jawa
Identifikasi kebutuhan tenaga kerja bangunan tukang bukan mandor dalam jumlah mencukupi		Penentuan upah ditetapkan menggunakan produktivitas dan tersedianya tenaga kerja sesuai kebutuhan	
2016: Terciptanya mekanisme penanganan berita negatif media yang dapat meningkatkan ekspektasi inflasi			
Sosialisasi penerapan metode perhitungan upah menggunakan pendekatan produktivitas			

Kontrak Rumah

Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Sumatera
Bantuan stimulan untuk peningkatan kualitas hunian masyarakat kurang mampu	Bantuan stimulan untuk peningkatan kualitas hunian masyarakat kurang mampu	
Pembangunan rumah sederhana sehat	Pembangunan rumah sederhana sehat	
Pembangunan Rusunawa dan rusunami	Pembangunan Rusunawa dan rusunami	

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (I)

	2015-2016	2017-2018	Daerah	
Produksi	Penambahan area tanam		Kalimantan, Sulampua	
	Peningkatan produktivitas	Peningkatan produktivitas	Bali-Nusra	
	Bantuan Saprodi		Sumatera, Jawa	
	Perbaikan irigasi		Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulampua-Bali-Nusra	
	Pemanfaatan teknologi pertanian		Pemanfaatan teknologi pertanian	Sumatera, Jawa,
			Optimalisasi Metode Hazton	Kalimantan Sulampua-Bali-Nusra
	Pemanfaatan kalender tanam	Pengembangan <i>Early Warning System</i>	Kalimantan	
Kelembagaan Petani	Modernisasi lembaga penyuluhan	Penyederhanaan ketentuan pembentukan lembaga petani	Sumatera	
	2015: Sosialisasi pemanfaatan skema kredit program 2016: Revitalisasi penggilingan padi		Jawa Jawa	

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (2)			
	2015-2016	2017-2018	Daerah
Channel of Distribution	2015: Memperpendek jalur distribusi	Perbaikan infrastruktur	Sumatera, Jawa
	Perbaikan sistem penetapan harga & suplai	Pemanfaatan Sistem Resi Gudang	Kalimantan
	Efisiensi tata niaga dan mengurangi margin pedagang	Efisiensi tata niaga dan mengurangi margin pedagang	Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulampua-Bali-Nusra
	Pembangunan Pusat Distribusi Regional		Sumatera
	Menambah jam kerja pelabuhan		
	2016: Kerja sama antar daerah		Jawa
	Pengaktifan Pasar Induk		Kalimantan
	Pemanfaatan Sistem Resi Gudang		Sulampua-Bali-Nusra
	Optimalisasi lelang komoditas (fisik & online)		Kalimantan
Price Setting	Peningkatan akses informasi harga pangan	Stabilitas Harga tingkat Petani melalui	Sumatera
	Pengembangan pembiayaan usaha tani	Harga Minimum Kabupaten (HMK)	Sumatera
	Memperkuat peran BULOG dalam stabilisasi harga	Memperkuat peran BULOG dalam stabilisasi harga	Kalimantan, Sulampua-Bali-Nusra

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah – Bawang Merah (I)

	2015-2016	2017-2018	Daerah
Produksi	Perbaikan pola tanam	Peningkatan produktivitas lahan	Sumatera, Jawa, Sulampua-Bali-Nusra, Kalimantan
	Bantuan Saprodi		Sumatera
	Perbaikan irigasi		Sumatera
	Pengembangan klaster		Kalimantan, Sulampua-Bali-Nusra
Ketersediaan pasokan antar waktu	2015: Pemetaan data surplus defisit 2016: Penanaman paska panen	Penanganan paska panen	Sumatera, Jawa
	Kerjasama antar daerah	Kerjasama antar daerah	
	Penyediaan <i>Cold Storage</i>	Pengembangan industri hilir	
Pola Konsumsi	Konsumsi Cabai Olahan		Sulampua-Bali-Nura

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah – Bawang Merah (2)

	2015-2016	2017-2018	Daerah
Channel of Distribution	Memperpendek jalur distribusi	Perbaiki infrastruktur	Sumatera
	Perbaiki sistem penetapan harga & suplai	Efisiensi tata niaga dan mengurangi margin pedagang	
	Efisiensi tata niaga dan mengurangi margin pedagang		Jawa, Kalimantan, Sulampua-Bali-Nusra
	Optimalisasi terminal agribisnis	Optimalisasi terminal agribisnis	Sumatera, Sulampua-Bali-Nusra
	Pemanfaatan Gudang <i>Pooling Community/</i> SRG		Sulampua-Bali-Nusra
Price Setting	Peningkatan akses informasi harga pangan	Stabilitas Harga Tingkat. Petani melalui Harga Minimum Kabupaten (HMK)	Kalimantan
	Pengembangan pembiayaan usaha tani		
Kelembagaan	Peningkatan kelembagaan petani		Kalimantan, Sulampua-Bali-Nusra

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Sapi-Daging Ayam Ras (I)

	2015-2016	2017-2018	Daerah
Produksi	2015: Penelitian pembuatan pakan ternak & peningkatan produktivitas pakan ternak	Pembentukan BUMD pakan ternak	Sumatera, Sulampua-Bali-Nusra
	2016: Kerjasama dengan daerah penghasil pakan ternak	Pengembangan industri pakan ternak lokal	
	Penguatan dukungan teknis pelayanan kesehatan	Integrasi klaster peternakan ayam dengan industri pakan	
	Bantuan kandang ternak		Kalimantan, Sulampua-Bali-Nusra
Ketersediaan Pasokan Antar Waktu	2015: Pemetaan surplus defisit	Penyediaan <i>cold storage</i>	Sumatera
	2016: Penguatan kelembagaan peternak		Sumatera
	Kerjasama antar daerah		Jawa

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Sapi-Daging Ayam Ras (2)

	2015-2016	2017-2018	Daerah
Channel of Distribution	2015: Pemutusan mata rantai oligopoli		Jawa
	2016: DOC ditentukan melalui mekanisme pasar		
	Koordinasi antar daerah sentra		Kalimantan
	Peningkatan konektivitas dengan daerah sentra		Sulampua-Bali-Nusra
Lainnya	Peningkatan kompetensi peternak		Sulampua-Bali-Nusra
	Membangun pola kemitraan		Sulampua-Bali-Nusra

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Bensin			
	2015-2016	2017-2018	Daerah
Distribusi	Peningkatan kualitas infrastruktur (jalan raya, kereta api, dan pelabuhan)	Peningkatan kualitas infrastruktur (jalan raya, kereta api, dan pelabuhan)	Sumatera, Jawa
		Distribusi melalui sungai	Sumatera
	Komunikasi & koordinasi dengan ORGANDA	Penyatuan fasilitas pelayanan Vigas dengan SPBU	Jawa
Konsumsi	2015: Penambahan panjang kereta api	Penambahan panjang kereta api	Sumatera
	2016: Pengembangan transportasi massal	Pengembangan transportasi massal	Sumatera
Bahan Bakar Rumah Tangga			
Distribusi	Pengawasan distribusi LPG 3 kg	Pembuatan jaringan gas dengan me-review RTRW	Sumatera
	Regulasi & Sosialisasi penyesuaian HET LPG		
	Pembuatan jaringan gas dengan me-review RTRW		

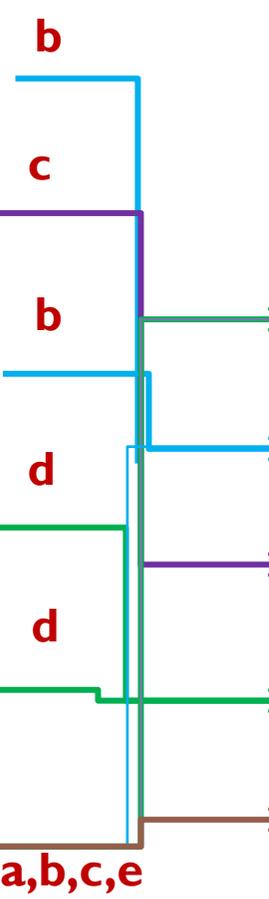
LAMPIRAN I.A

Arahan Presiden RI pada Rakornas VI TPID dan Tindak Lanjut

Roadmap Pengendalian Inflasi Nasional dengan Arahan Presiden RI

Arahan Presiden

- 1 **Revitalisasi peran BULOG sebagai penyangga**, tidak hanya untuk komoditas beras tetapi juga untuk komoditas pangan lainnya
- 2 **Penguatan Peran KPPU di Pusat maupun Daerah** agar melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha komoditas pangan
- 3 **Kapolri dan Jaksa Agung agar memerintahkan jajaran dibawahnya untuk bekerjasama dengan TPID** untuk turut melakukan pengawasan dan mencegah aksi-aksi penimbunan atau spekulasi.
- 4 **Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum lainnya agar tidak menjadikan kebijakan daerah dalam stabilisasi harga sebagai objek pemeriksaan hukum.**
- 5 **Pemerintah Pusat akan menginisiasi dan mengembangkan pasar lelang komoditas pangan di sejumlah daerah**
- 6 **Pemerintah Pusat akan menjajaki besaran penambahan transfer ke daerah yang dikaitkan dengan upaya daerah dalam menjaga stabilisasi harga mulai tahun 2016**



Roadmap Pengendalian Inflasi Nasional terkait Stabilisasi Volatile Food

- a. Meningkatkan produksi pangan strategis
- b. Menjaga ketersediaan pasokan pangan antar waktu
- c. Membenahi saluran distribusi pangan
- d. Menstabilkan dan meningkatkan transparansi harga pangan strategis
- e. Memperkuat kelembagaan petani

Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah dengan Arahan Presiden RI

Beberapa arahan Presiden yang belum tertuang dalam Roadmap Pengendalian Inflasi akan menjadi topik bahasan dalam Rapat TPI/ Pokjanas TPID

Arahan Presiden

- 1 **Wajib membentuk TPID** sebagai wadah koordinasi kebijakan untuk stabilisasi harga di daerah.
- 2 Semakin cermat dalam **mengidentifikasi komoditas-komoditas yang memiliki pengaruh besar** dalam mendorong inflasi*)
- 3 Memberikan dukungan penuh bagi **percepatan pembangunan infrastruktur pangan** seperti irigasi dan bendungan, serta infrastruktur distribusi
- 4 Menggerakkan **pertanaman cabe** di pekarangan/ halaman rumah
- 5 **Mengalokasikan anggaran yang memadai** untuk stabilisasi harga
- 6 TPID bersama-sama dengan aparat penegak hukum agar secara intensif **melakukan pemantauan langsung di lapangan**
- 7 Perlu **memperkuat komunikasi dan kerjasama** baik antar kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota

Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah terkait Stabilisasi Volatile Food

- a. Meningkatkan produksi pangan
- b. Membenahi *Channel of Distribution*
- c. Menstabilkan dan meningkatkan transparansi harga pangan strategis
- d. Menjaga ketersediaan pasokan antar waktu
- e. Mengubah pola konsumsi pangan
- f. Memperkuat kelembagaan Petani
- g. Lainnya (memperkuat komunikasi, kerja sama antar daerah, koordinasi pengendalian inflasi, dll)

*) Identifikasi komoditas yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong inflasi merupakan tahapan awal dalam penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi

Arahan Umum Presiden RI pada Rakornas VI TPID

Selain memberikan arahan khusus kepada Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pengendalian inflasi pangan, Presiden juga memberikan arahan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dalam negeri yang sejalan dengan upaya pengendalian inflasi inti dan administered prices



1

Pemerintah Daerah agar mendorong dan memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembangnya hilirisasi/industrialisasi di daerah. Peran daerah ini sangat diperlukan guna mengubah posisi Indonesia yang tergantung pada ekspor komoditas, menjadi negara yang berorientasi ekspor komoditas barang jadi/setengah jadi.



2

Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mendorong percepatan realisasi APBN/APBD secara tepat dan efektif guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi, serta secara konsisten menempuh kebijakan reformasi energi. Dalam konteks ini, menambah energi listrik sebesar 35.000 watt dalam 5 tahun merupakan kebutuhan, bukan target. Keberadaan listrik akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, ditengah perekonomian global yang melambat, sehingga Indonesia dapat terus menjaga dan memperbaiki peringkat investasinya.

Roadmap Pengendalian Inflasi Nasional terkait Stabilisasi Inflasi Inti

a. Permintaan domestik dan kapasitas ekonomi

b. Stabilisasi nilai tukar rupiah

c. Ekspektasi inflasi

Roadmap Pengendalian Inflasi Nasional terkait Stabilisasi Inflasi Administered Prices

Reformasi subsidi energi (BBM, tarif listrik, LPG)

Tindak Lanjut yang Diperlukan dengan Adanya Arahannya Presiden (I)

Atas dasar arahan Presiden dalam Rakornas VI TPID:

I. TPI dan Pokjanas TPID perlu melakukan:

No.	Agenda	Koordinator
1	Menyusun konsep pedoman standar terkait dengan pelaksanaan Operasi Pasar yang pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD	Kemendagri, Kemenko Perekonomian, Kemendag, Kemenkeu
2	Memfasilitasi pembahasan dalam rangka menyusun formula terkait dengan transfer daerah yang dikaitkan dengan pembentukan TPID di seluruh Provinsi, Kota/ Kabupaten	Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, Kemendagri
3	Menyusun <i>Roadmap</i> revitalisasi Peran BULOG agar dapat secara optimal dalam menunjang stabilisasi harga	BULOG, Kemenko Perekonomian, Kemendag, Kemenkeu
4	Menginisiasi perluasan kerjasama/koordinasi pengendalian inflasi daerah dengan KPPU, Kapolri, Jaksa Agung, dan penegak hukum lainnya baik di pusat maupun daerah guna membenarkan permasalahan struktural, tata niaga, pengawasan terhadap aksi penimbunan dan spekulasi termasuk diseminasi tentang pentingnya kebijakan daerah dalam stabilisasi harga dan tidak menjadikan sebagai objek pemeriksaan hukum	Kemenko Perekonomian, Kemendagri, BI
5	Melengkapi konsep panduan pengembangan pasar lelang komoditas pangan di berbagai daerah	Kemendag, Kemenko Perekonomian
6	Memperkuat peran sekretariat koordinasi pengendalian inflasi seiring dengan jumlah TPID yang semakin banyak	Kemenko Perekonomian, Kemendagri, BI, Kemenkeu

Tindak Lanjut yang Diperlukan dengan Adanya Arahannya Presiden (2)

Atas dasar arahan Presiden dalam Rakornas VI TPID:

ii. TPID Provinsi dan Kabupaten/ Kota perlu melakukan :

No.	Agenda	PIC
1	Mempersiapkan pendirian TPID di Kabupaten/ Kota yang belum terbentuk dan membina TPID Provinsi, Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia yang telah terbentuk	TPID Provinsi, TPID Kabupaten/ Kota
2	Mengembangkan serta memperkuat kapasitas aparatur daerah dalam melakukan identifikasi sumber penyebab tekanan inflasi dan merumuskan usulan rekomendasi yang diperlukan untuk pengendaliannya	TPID Provinsi, TPID Kabupaten/ Kota
3	Memperkuat komitmen dalam pengendalian inflasi yang diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran daerah (APBD) untuk stabilisasi harga	TPID Provinsi, TPID Kabupaten/ Kota
4	Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pangan dengan melakukan “4P” yakni (1) Penyediaan dukungan kemudahan perizinan, pengadaan lahan, dan penguatan komunikasi dengan masyarakat untuk percepatan pembangunan infrastruktur; (2) Pengawasan secara intensif terhadap distribusi sarana produksi pertanian; (3) Pembenahan rantai distribusi komoditas pangan strategis; (4) Pemberian dukungan alokasi APBD yang memadai dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan	TPID Provinsi, TPID Kabupaten/ Kota

Tindak Lanjut yang Diperlukan dengan Adanya Arahan Presiden (3)

Selain tindak lanjut atas dasar arahan Presiden, dalam **Jangka Pendek** TPI dan Pokjanas TPID perlu melakukan:

- a. **Memastikan kelanjutan reformasi subsidi energi untuk LPG 3kg dan TTL RT Gol. 450 dan 900 VA** (*timing, magnitude, mekanisme*). Diusulkan untuk melakukan pembahasan *High Level* terkait kelanjutan reformasi subsidi energi dengan K/L terkait
- b. **Memperkuat kesepahaman** tentang *roadmap* dengan K/L & Pemerintah Daerah serta **komitmen stakeholders** untuk memasukkan *roadmap* dalam pembahasan RAPBN dan RAPBD mulai 2016 dan menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- c. **Memperkuat koordinasi** pengendalian inflasi di tingkat Pusat & Daerah terutama dalam mengantisipasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

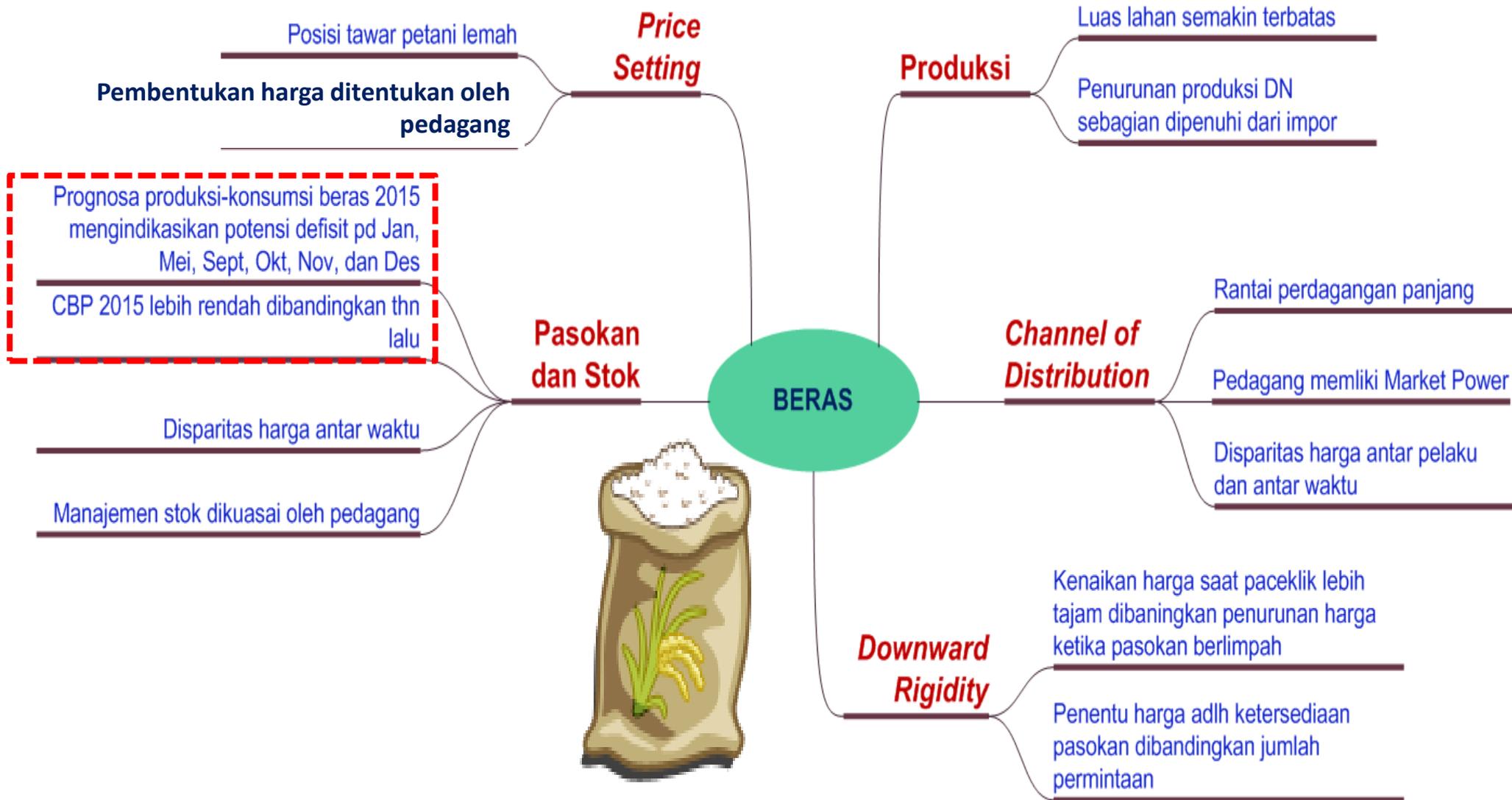
Dalam **Jangka Menengah**, TPI, Pokjanas TPID, dan TPID perlu mendorong langkah-langkah strategis untuk:

- a. **Mengendalikan inflasi inti** melalui:
 - Membangun kredibilitas kebijakan moneter antara lain melalui peningkatan efektivitas pengendalian permintaan agregat dan strategi komunikasi secara efektif
 - Memastikan berbagai program infrastruktur berjalan sesuai dengan jadwal agar peningkatan kapasitas perekonomian domestik dapat mengimbangi peningkatan permintaan, mendorong kelancaran distribusi dan konektivitas antar daerah
 - Meningkatkan efisiensi perekonomian (antara lain kemudahan perizinan, dll)
- b. **Menurunkan inflasi *volatile food* secara bertahap ke level 3% di 2018** melalui:
 - Mendorong peningkatan produksi agar tersedia setiap saat dan di seluruh daerah dengan melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah
 - Mengefisienkan struktur pasar dan distribusi, termasuk rencana penyempurnaan program penyaluran Beras untuk masyarakat miskin (*raskin*) dengan melibatkan K/L terkait.
 - Menyelaraskan program dengan peraturan pemerintah terkait stabilisasi harga yang akan dikeluarkan
 - Meningkatkan akurasi data dan informasi pangan
- c. **Mengendalikan inflasi *administered prices*** melalui:
 - Mendorong implementasi program diversifikasi energi dan secara bertahap mengurangi impor minyak mentah, BBM, dan LPG
 - Memastikan berlanjutnya program reformasi subsidi energi yang dilakukan secara terencana sehingga tidak mengganggu pencapaian sasaran inflasi

LAMPIRAN I.B

Permasalahan Inflasi *Volatile* *Food*

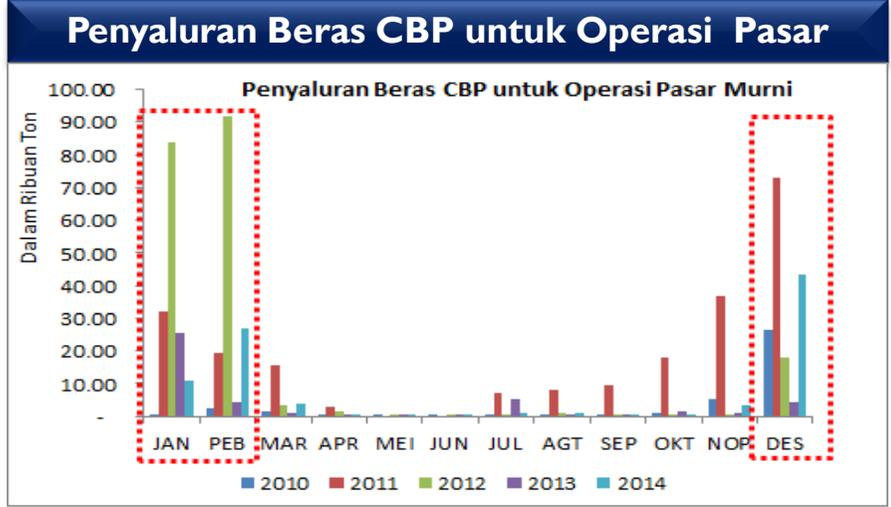
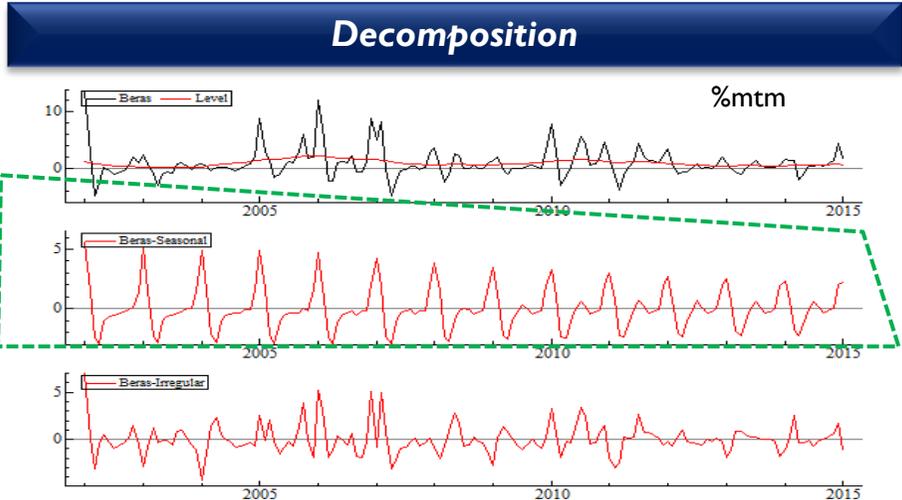
Tantangan Pengendalian Inflasi - Beras



Beras: Stylized facts (I)

Metode dekomposisi menunjukkan bahwa: i) dinamika inflasi beras bersumber dari tingginya gejala komponen seasonality & irregularity, ii) seasonality cenderung menurun; a.l. terkait upaya stabilisasi harga beras.

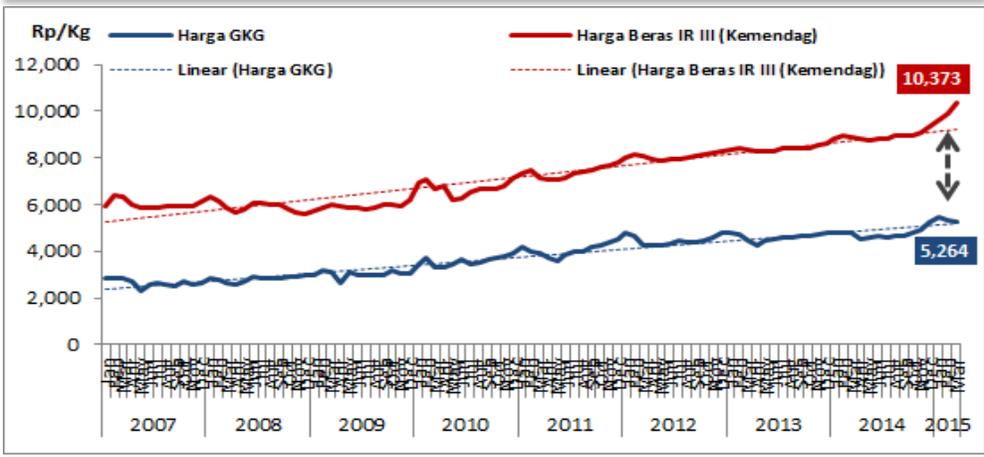
- Gejolak harga beras terutama terjadi pada komponen jangka pendek –seasonality & irregularity- yang terkait permasalahan kontinuitas pasokan antar waktu; sejalan dengan produksi padi yang bersifat musiman.
 - ✓ Seasonality tinggi di awal tahun (musim paceklik),
 - ✓ Kekosongan raskin di November dan Desember 2014 tertangkap pd peningkatan komponen irregularity.
- Komponen seasonality beras dari waktu ke waktu terlihat menurun yang terutama terjadi di Januari-Februari. Hal ini tidak terlepas dr upaya intensif BULOG dalam stabilisasi harga beras (OP).
 - ✓ Namun demikian, upaya pengendalian (intervensi) masih perlu ditingkatkan, terutama di Desember dan Juli.



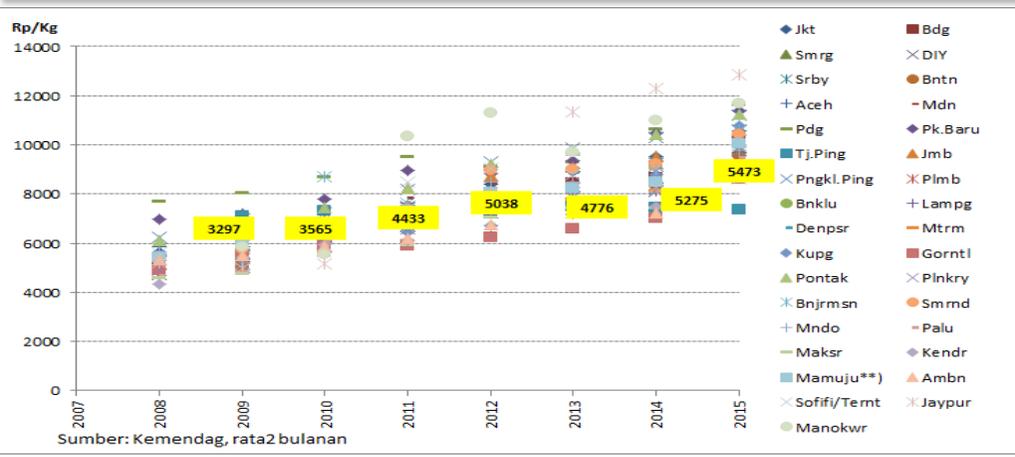
Beras: Stylized facts (2)

Disparitas harga baik antar pelaku dan antar wilayah belum mengalami perbaikan, sementara disparitas antar waktu mengalami perbaikan..

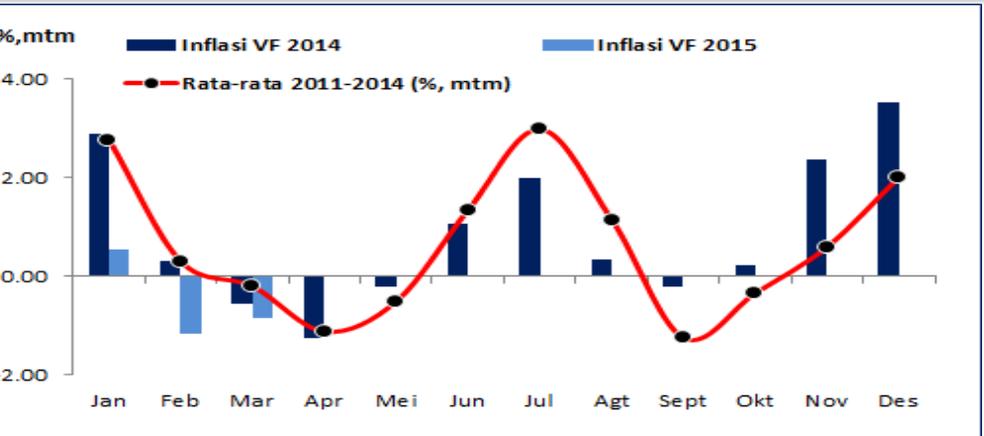
Harga Petani Vs Harga Konsumen



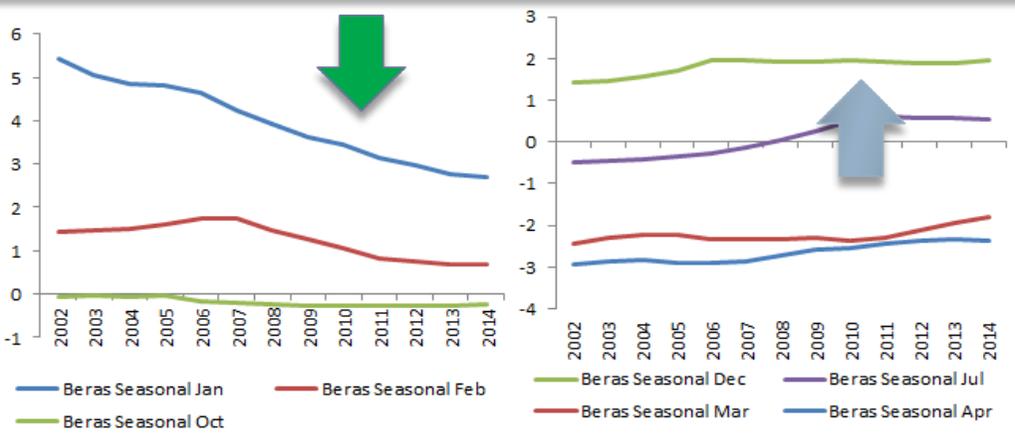
Disparitas Harga Antar Daerah



Harga Antar Waktu



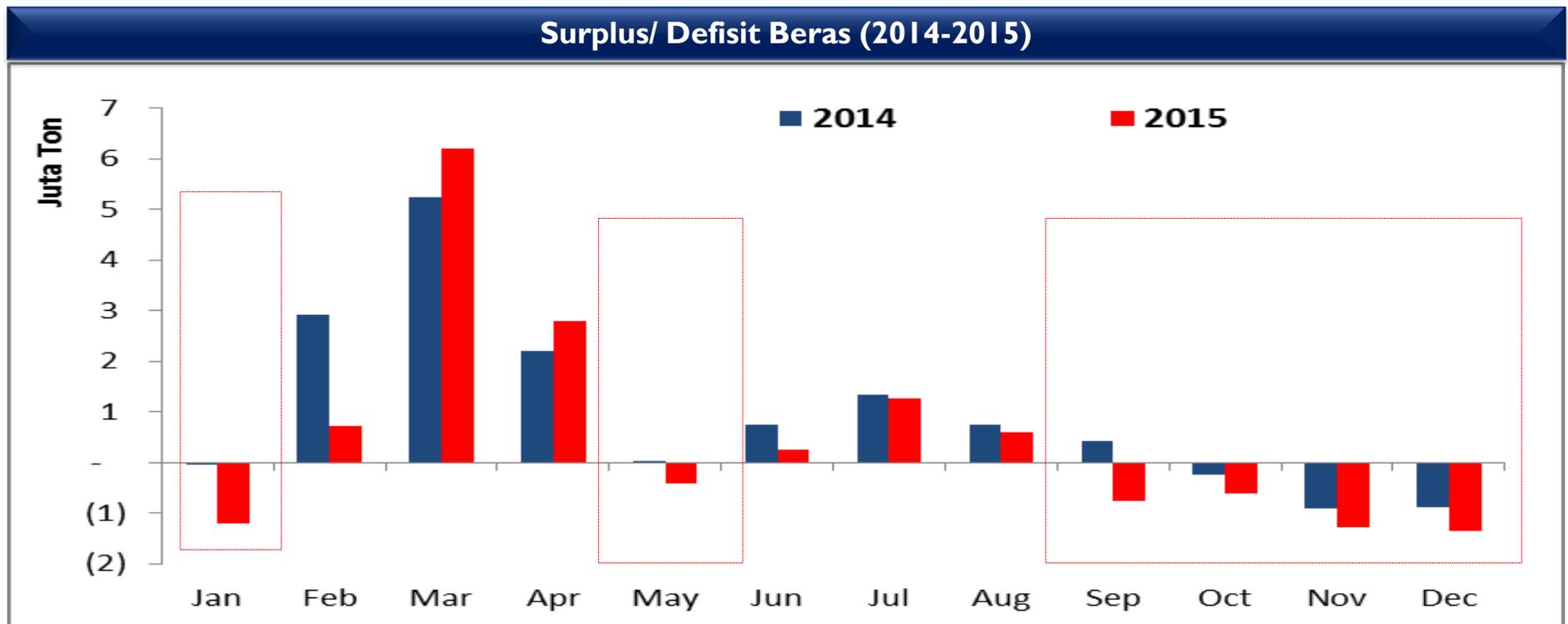
Seasonality Harga Beras Antar Waktu



Arah Inflasi Beras 2015 (2) – Prognosa Bulanan 2014-2015

Kendati secara keseluruhan tahun surplus beras 2015 lebih besar daripada 2014, namun pada beberapa bulan (Januari, Mei, dan September-Desember) diperkirakan terjadi defisit yang lebih besar dari 2014

- Untuk keseluruhan tahun 2015, Kementan memperkirakan surplus beras sebesar 6,2 juta ton. **Namun demikian, terdapat beberapa bulan di 2015 yang diperkirakan akan mengalami defisit**, yaitu Januari, Mei, September, Oktober, November, dan Desember dan diperkirakan lebih besar dari defisit periode sama tahun lalu.
- Produksi beras diprakirakan mengalami puncaknya pada Maret 2015, **namun demikian perlu mempertimbangkan potensi pergeseran ke April** karena masa tanam kedua tahun lalu yang mundur karena musim kemarau.

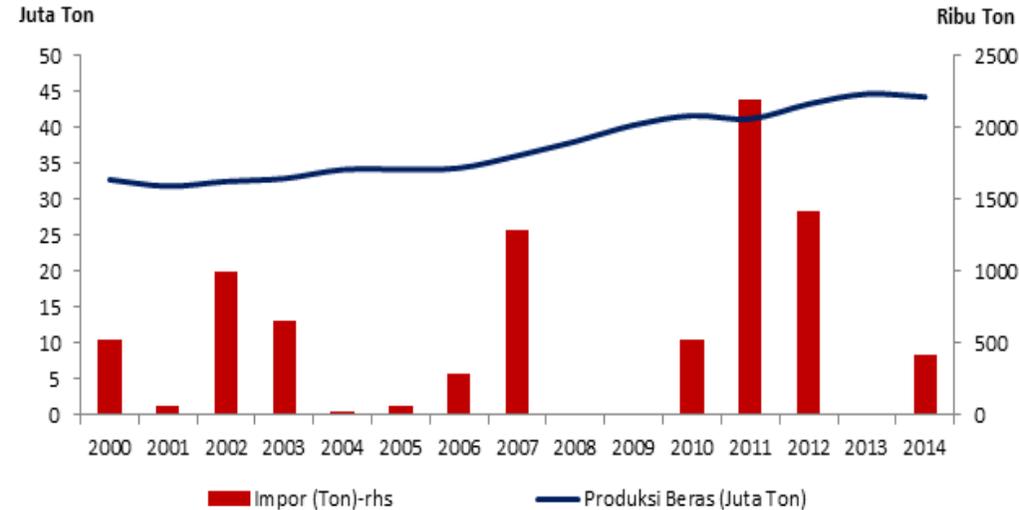


Isu Struktural - Hulu

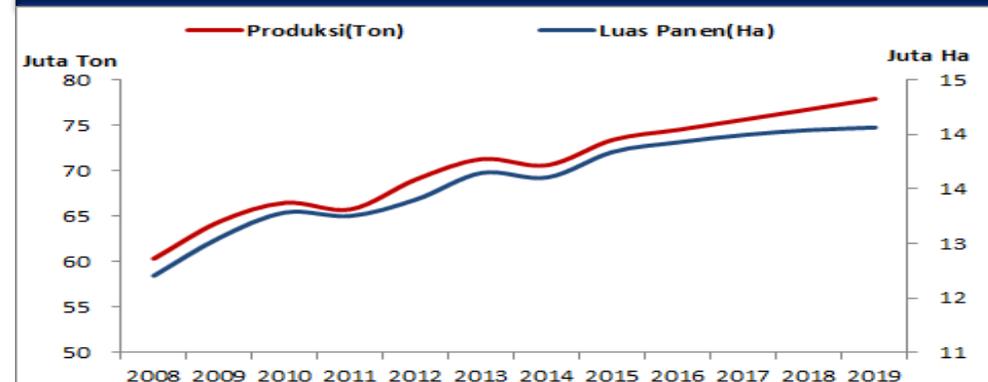
Produksi beras dalam beberapa tahun terakhir menurun terutama akibat masalah lahan

- Pertumbuhan produksi beras tidak mengalami perbaikan yang berarti, bahkan cenderung menurun di 2014. Luas panen tidak mengalami perbaikan. Peningkatan produksi membutuhkan peningkatan produktivitas.
- Penurunan produksi DN sebagian dipenuhi dari impor, tercemin pada realisasi impor beras yang cukup besar di 2014 (413,78 ribu ton) dibandingkan 2013 dimana BULOG tidak mengadakan pengadaan luar negeri.

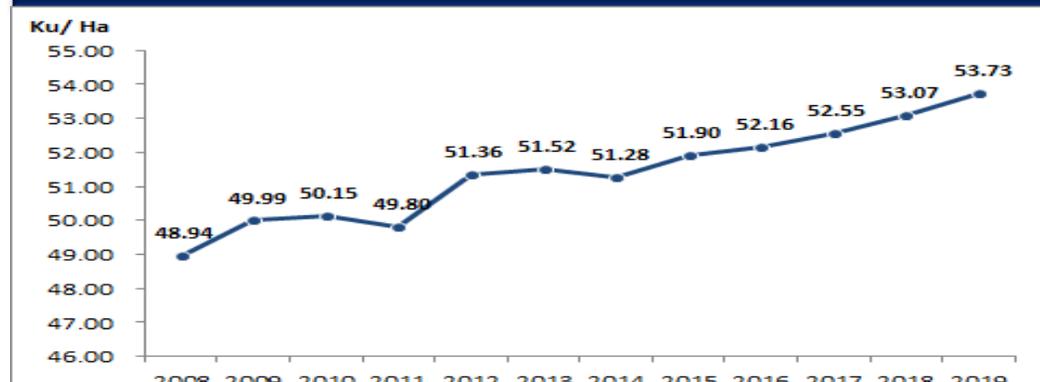
Produksi dan Impor Beras



Luas Panen dan Produksi



Produktivitas Padi



Isu Struktural – Channel of Distribution

Panjangnya mata rantai perdagangan pada komoditas beras dan struktur pasar yang cenderung oligopolistik berdampak pada disparitas harga beras..

- **Rantai perdagangan beras cukup panjang;**

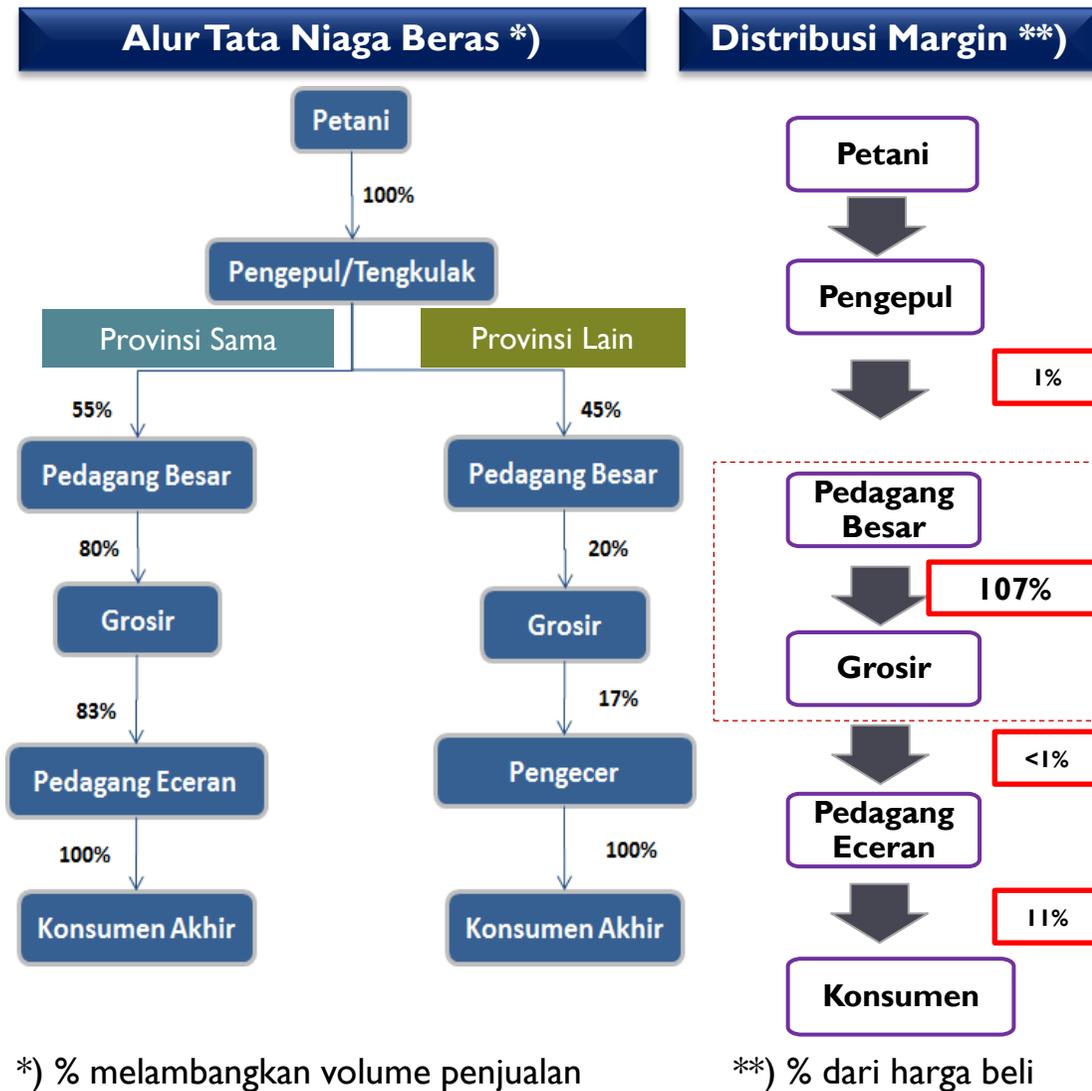
- ✓ Dari produsen, pengumpul, pedagang besar, grosir, pedagang eceran hingga sampai ke konsumen.

- **Ada indikasi bahwa pedagang memiliki market power, sehingga:**

- ✓ Pedagang lebih dominan dalam menentukan harga –baik harga di level produsen maupun konsumen, dan
- ✓ **mendapatkan margin keuntungan terbesar.** Kedua hal tersebut mencerminkan kondisi pasar beras yang kurang efisien (cenderung bersifat oligopolistik).

- Hal tersebut di atas berdampak pada adanya **disparitas harga beras**; baik antar pelaku, antar waktu, maupun antar daerah.

► Sumber: Tumpak et.al , “Pemetaan Struktur Pasar dan Pola Distribusi Komoditas Strategis Penyumbang Inflasi Daerah serta Implikasinya terhadap Kebijakan Pengendalian Harga Komoditas Daerah“(2011)

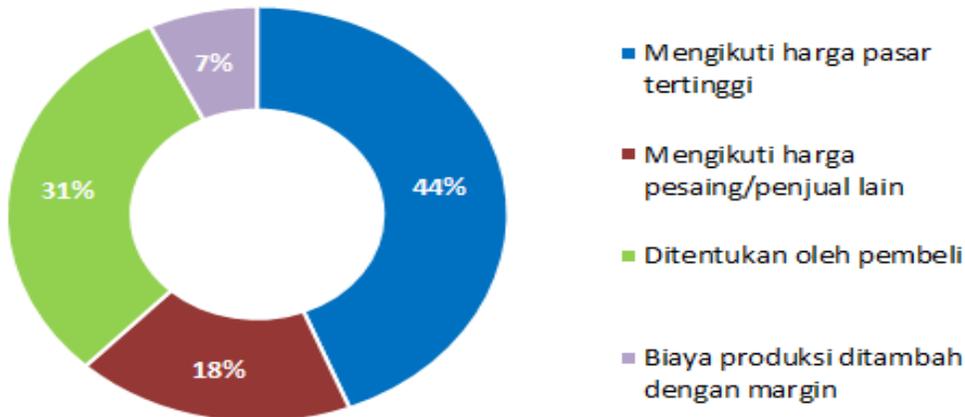


Isu Struktural – Price Setting

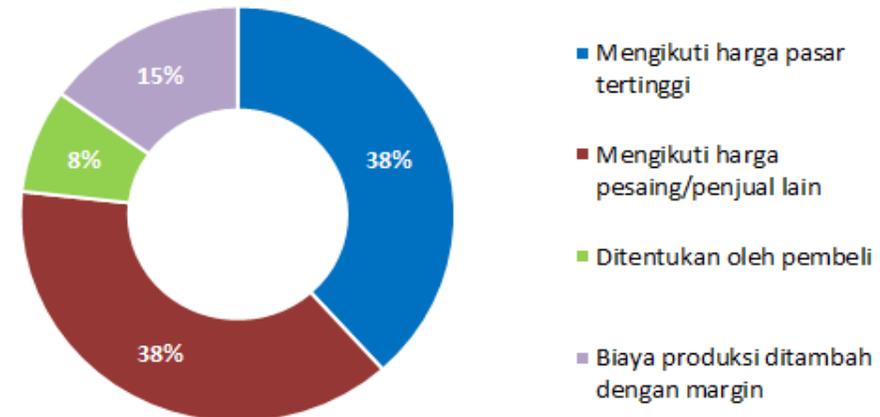
Hasil survei pembentukan harga kembali mengkonfirmasi indikasi struktur pasar beras yang cenderung oligopolistik. Mayoritas responden menjawab bahwa pembentukan harga baik di tingkat produsen maupun konsumen mengikuti harga pasar tertinggi.

- Pelaku di sisi hulu produksi (**petani**) cenderung memiliki posisi tawar yang lemah (hanya 7% pembentukan harga ditentukan oleh biaya produksi & *margin* petani).
 - Di tingkat petani, pembentukan harga **didominasi penjual** yang tersirat pd jawaban harga pasar tertinggi; ditentukan oleh pembeli dan mengikuti harga pesaing
- Di tingkat pedagang, mayoritas juga menjawab pembentukan harga mengikuti harga pasar tertinggi dan mengikuti harga pesaing lain. Hal ini kembali mengindikasikan struktur pasar beras yang cenderung oligopolistik.

► Pembentukan Harga Produsen



► Pembentukan Harga Pedagang



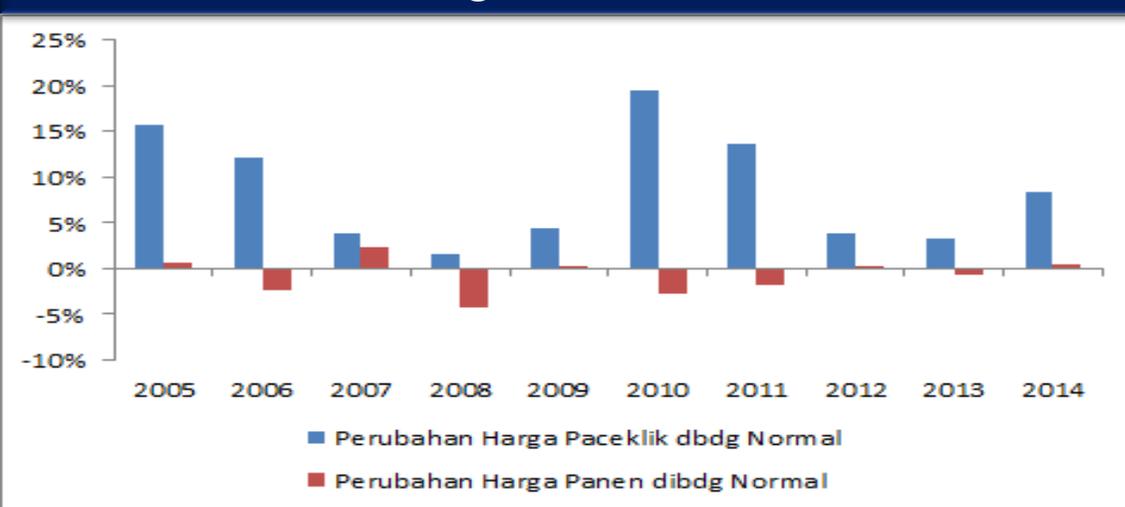
► Sumber: Tumpak et.al, "Pemetaan Struktur Pasar dan Pola Distribusi Komoditas Strategis Penyumbang Inflasi Daerah serta Implikasinya terhadap Kebijakan Pengendalian Harga Komoditas Daerah" (2011)

Isu Struktural – Downward Rigidity

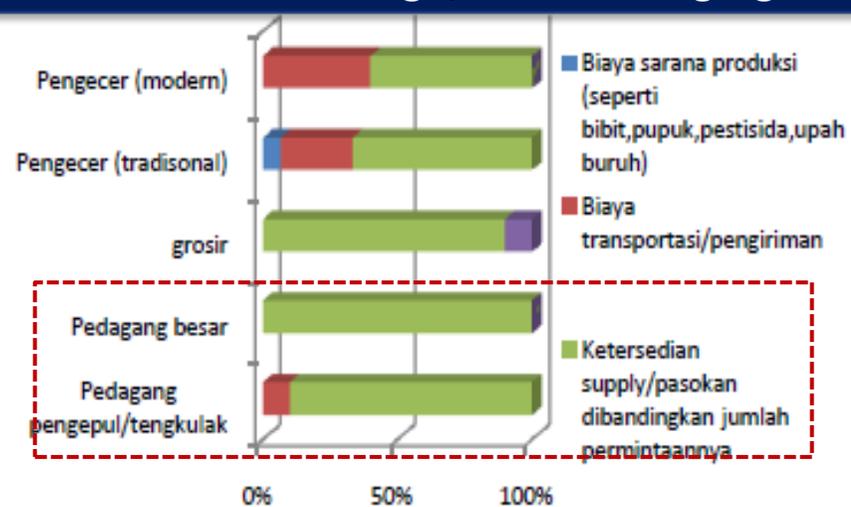
Terdapat indikasi gejala antar waktu dimanfaatkan oleh pedagang untuk mendapatkan excessive profit taking; meningkat signifikan ketika terjadi paceklik namun hanya sedikit turun ketika panen raya (downward rigidity)..

- Kenaikan harga jauh lebih tajam ketika pasokan sedikit dibandingkan penurunan harga ketika pasokan sedang berlimpah (*downward rigidity*).
- Secara rata – rata kenaikan harga pada saat paceklik berkisar sebesar 7%, sementara penurunan ketika panen hanya sebesar -1%.
- Hal ini diperkuat dengan hasil survei yang menemukan bahwa faktor yang dominan menentukan harga jual oleh pedagang adalah ketersediaan pasokan dibandingkan jumlah permintaannya.

Perubahan Harga Beras Paceklik vs Panen

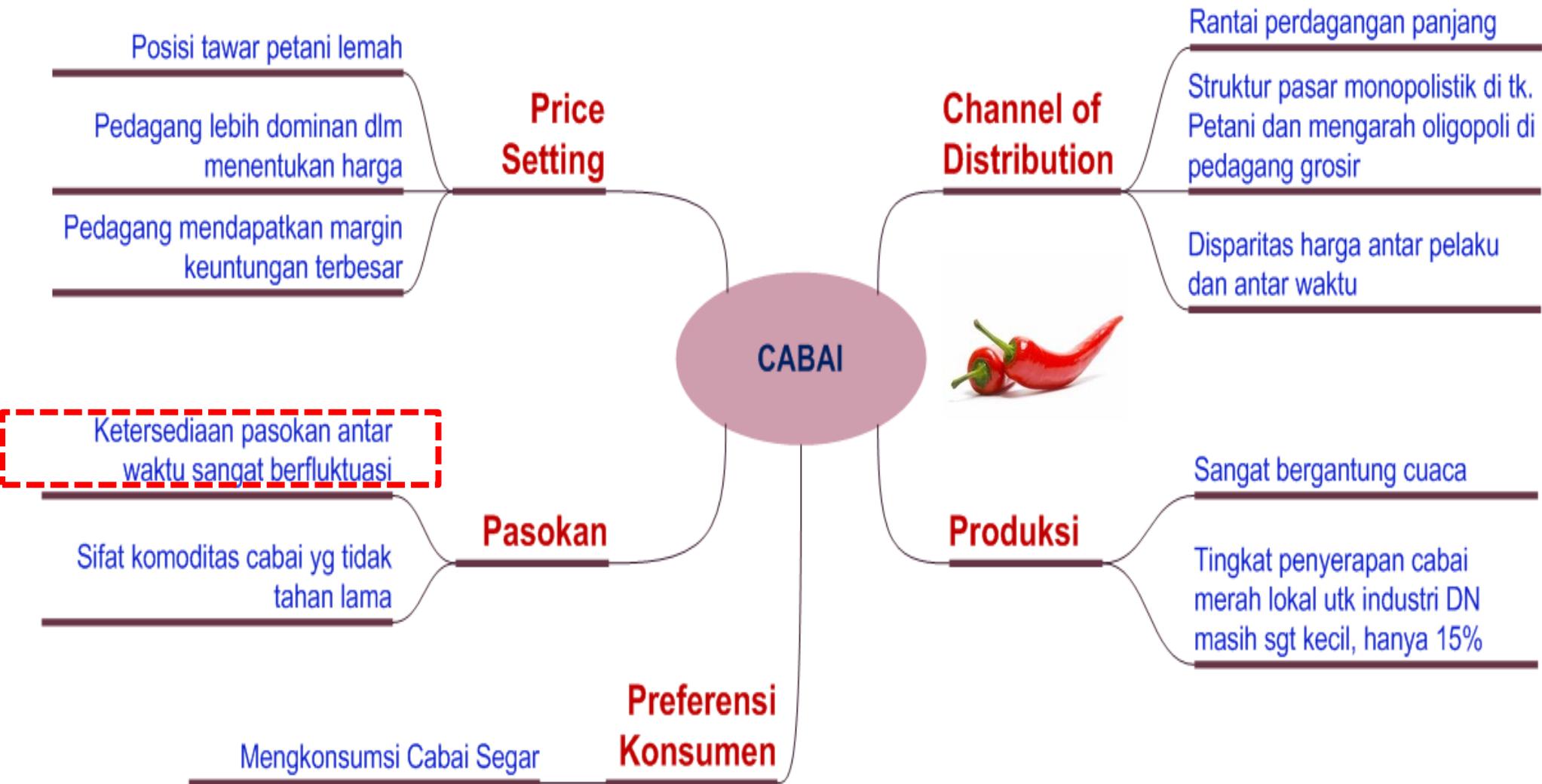


Faktor Penentu Harga Jual oleh Pedagang



Sumber: Tumpak et.al, "Pemetaan Struktur Pasar dan Pola Distribusi Komoditas Strategis Penyumbang Inflasi Daerah serta Implikasinya terhadap Kebijakan Pengendalian Harga Komoditas Daerah" (2011)

Tantangan Pengendalian Inflasi - Aneka Cabai

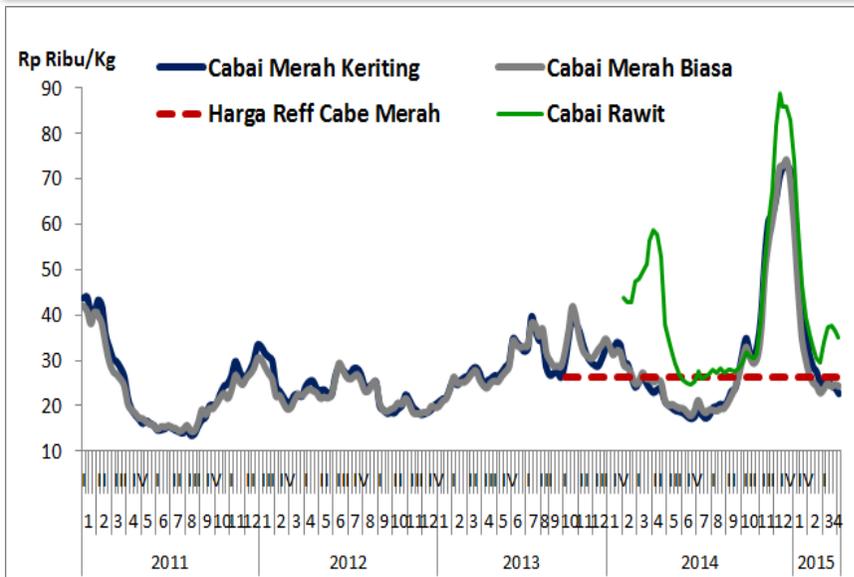


Cabai Merah : Stylized facts

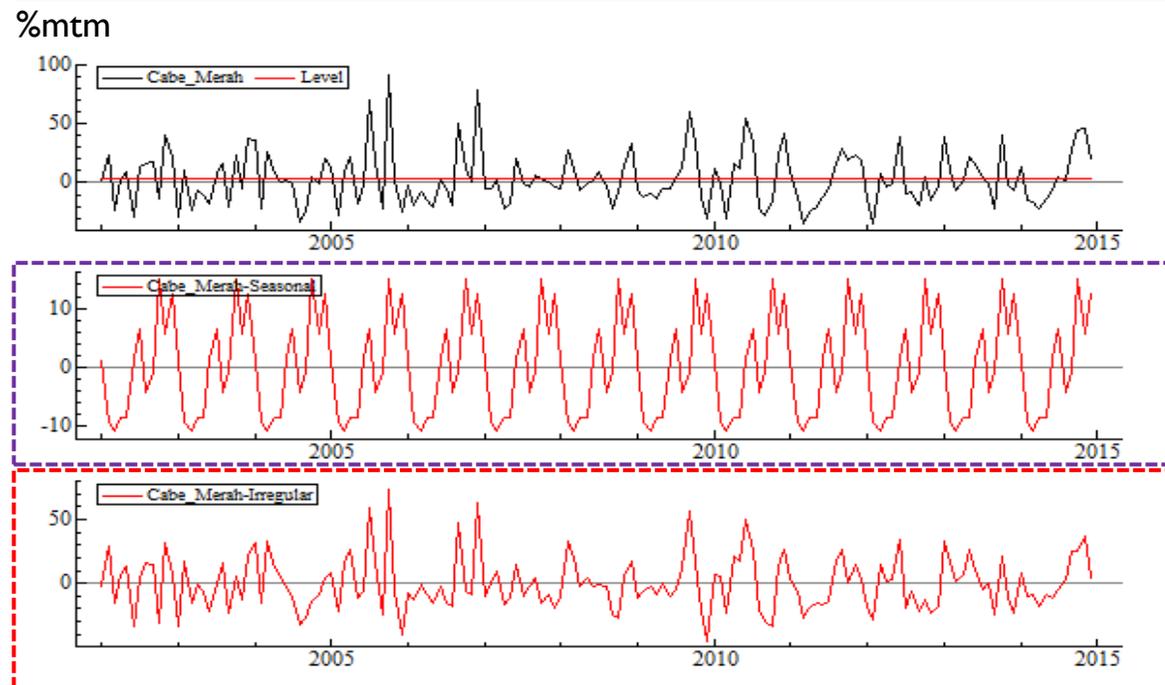
Kecukupan pasokan rentan oleh shocks akibat anomali iklim maupun faktor lain, seperti kebijakan. Secara antar waktu, gejala musiman masih terus berlangsung..

- ✓ Secara tahunan produksi cukup, namun pola musiman yang kuat mengganggu kestabilan pasokan antar waktu.
- ✓ Selain belum ada perbaikan dalam pola musiman, faktor *shocks/irregularity* (anomali cuaca, regulasi) juga besar dalam mempertajam volatilitas aneka cabai.
- ✓ Kebijakan stabilisasi harga di tingkat konsumen, yakni harga referensi, efektivitasnya perlu ditingkatkan.

Inflasi Aneka Cabai

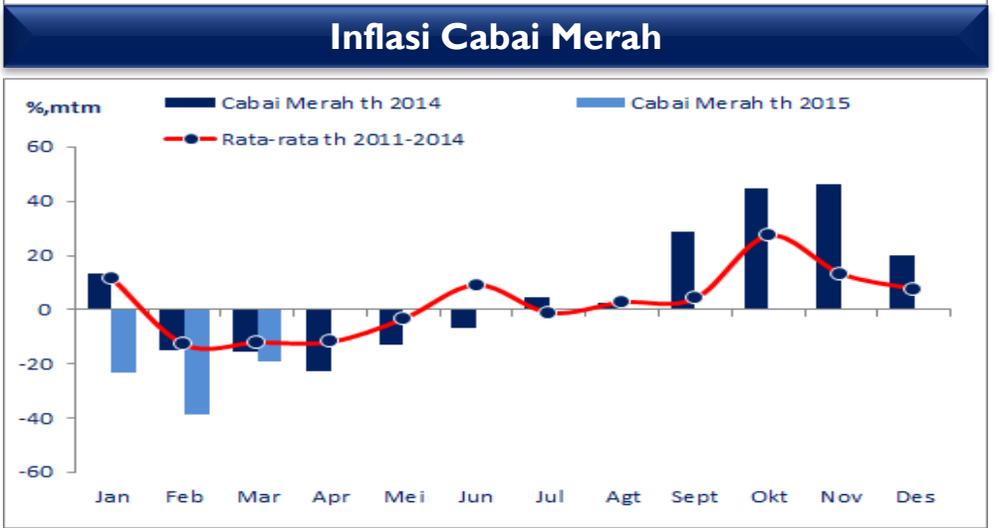
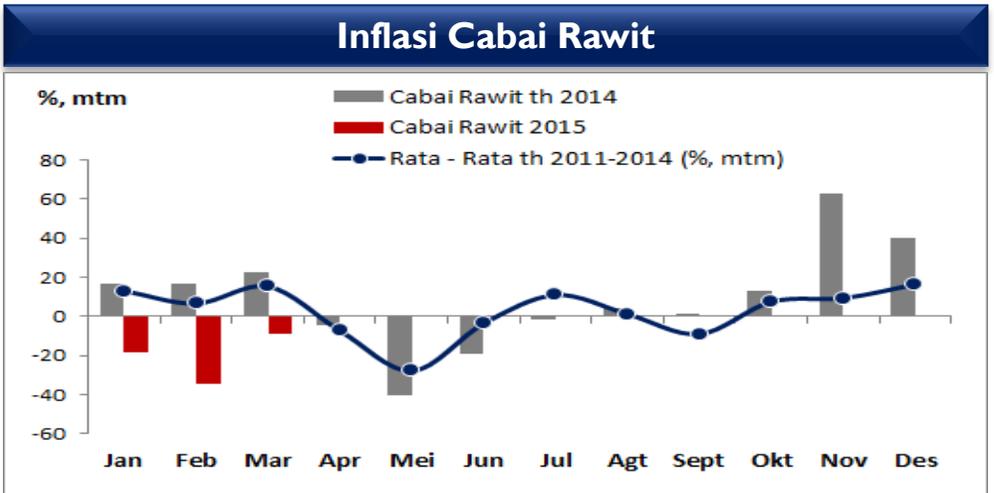


Tren, Seasonal, Irregular (Shocks) Cabai Merah

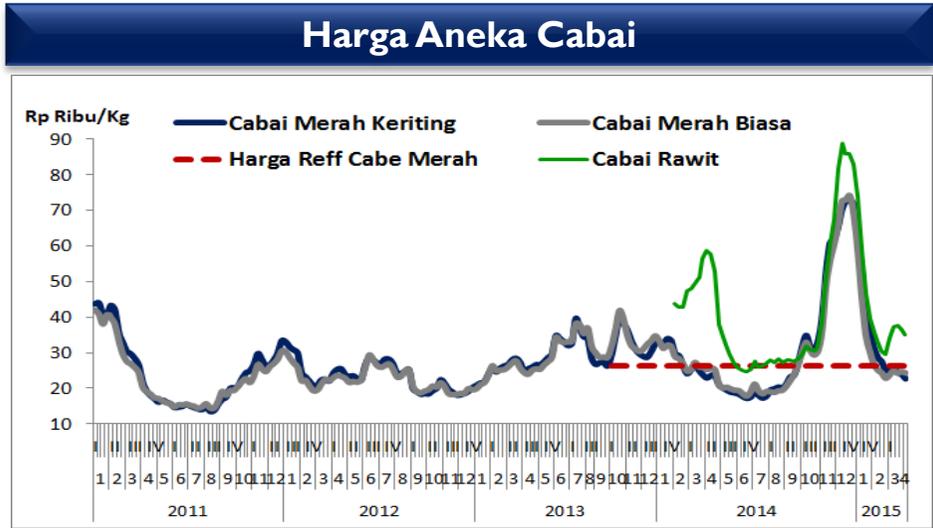


Arah Inflasi Aneka Cabai 2015

Gejolak harga antar waktu masih menjadi tantangan pengendalian inflasi aneka cabai pada 2015 (tantangan struktural)



- *Oversupply* yang terjadi pada kelompok aneka cabai pada dua bulan pertama 2015 mendorong koreksi harga cabai hingga 38%.
- Belum ada nya sistem penyimpanan yang memadai menyebabkan gejolak harga antar waktu masih menjadi tantangan pengendalian inflasi aneka cabai.

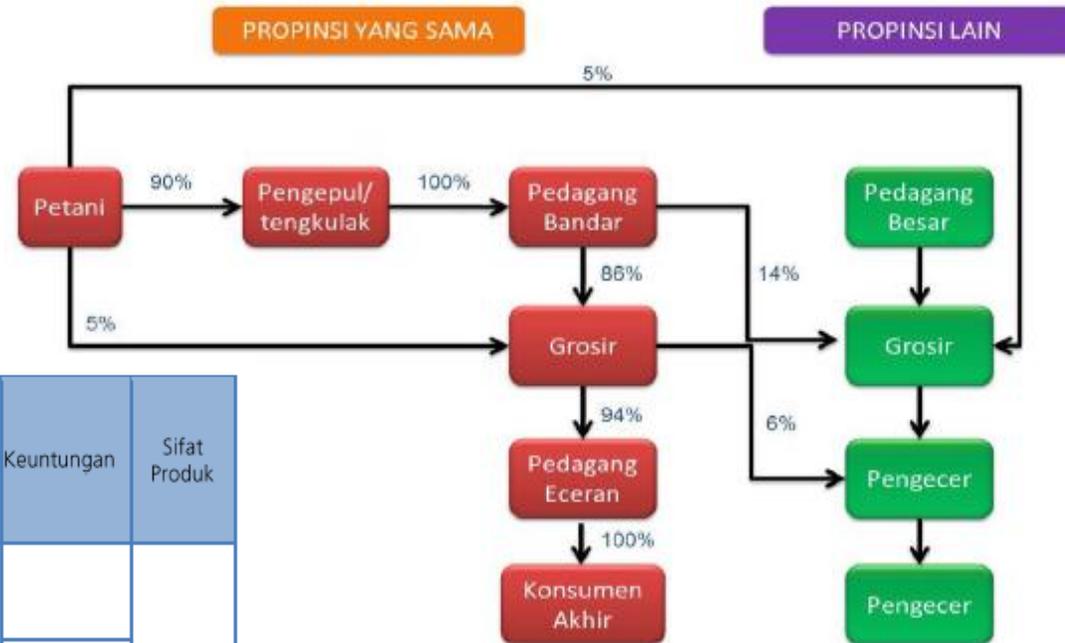


Isu Struktural – Channel of Distribution

- Struktur pasar cabai merah **monopolistik** di tingkat Petani – pedagang besar, dan mengarah ke **oligopoli** di tingkat Pedagang grosir.
- **Rantai perdagangan cabai merah panjang;**
 - Dari produsen, pengumpul, pedagang besar, grosir, pedagang eceran hingga sampai ke konsumen.

Pelaku Pasar	Struktur Pasar	Jumlah Pesaing	Market Power			Hambatan Masuk/ Keluar	Keuntungan	Sifat Produk
			Derajat Pengambil Keputusan (Penentu harga jual)	(Pengaruh pasokan terhadap harga jual di pasar)	Cara Penentuan Harga Jual			
Produsen	Monopolistik				Mengikuti harga pasar tertinggi			
Pedagang pengepul	Monopolistik	10	Kesepakatan bersama	Tidak mempengaruhi	Mengikuti harga pesaing	Hambatan masuk/ keluar kecil	Normal profit	Standard (homogen)
Pedagang besar	Monopolistik	13	Kesepakatan bersama	Tidak mempengaruhi	Biaya produksi + margin		Normal profit	
Grosir	Oligopoli	10	40% oleh penjual	50% mempengaruhi	Mengikuti harga pesaing		Normal profit	
Pengecer (tradisional)	PPS	26	Kesepakatan bersama	Tidak mempengaruhi	Ditentukan oleh pembeli		Normal profit	
Pengecer (modern)	Oligopoli	2	27% oleh penjual	Tidak mempengaruhi	Biaya produksi + margin		Normal profit	

Alur Tata Niaga Cabai Merah*)



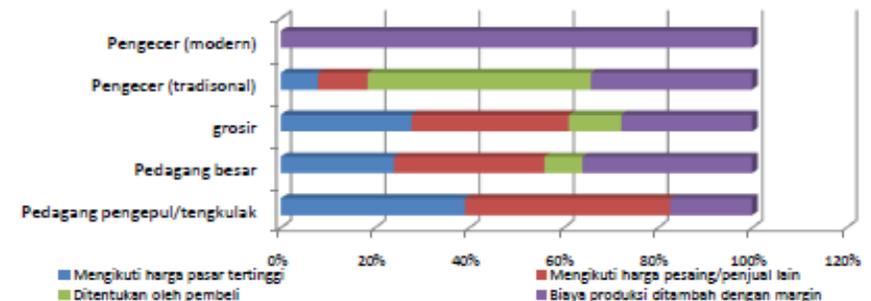
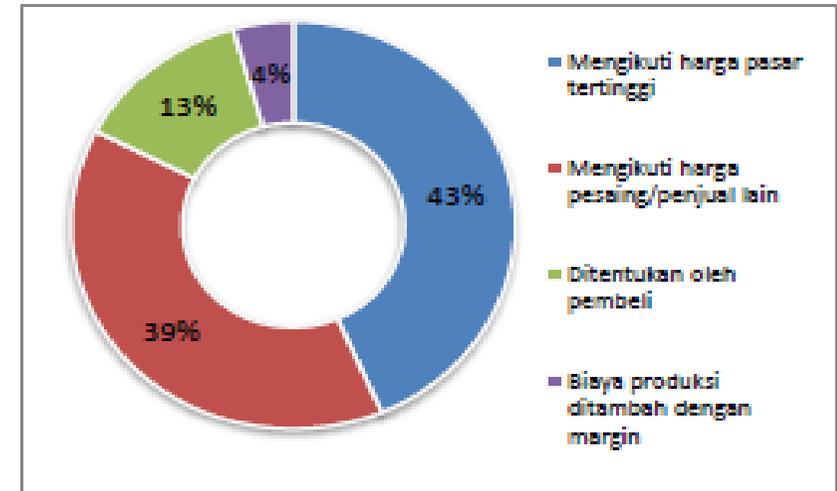
*) % melambangkan volume penjualan

•Sumber:Tumpak et.al , “Pemetaan Struktur Pasar dan Pola Distribusi Komoditas Strategis Penyumbang Inflasi Daerah serta Implikasinya terhadap Kebijakan Pengendalian Harga Komoditas Daerah“(2011)

Isu Struktural – Price Setting

Hasil survei pembentukan harga kembali mengkonfirmasi indikasi struktur pasar cabai yang tidak sempurna. Mayoritas responden menjawab bahwa pembentukan harga baik di tingkat produsen maupun konsumen mengikuti harga pasar tertinggi.

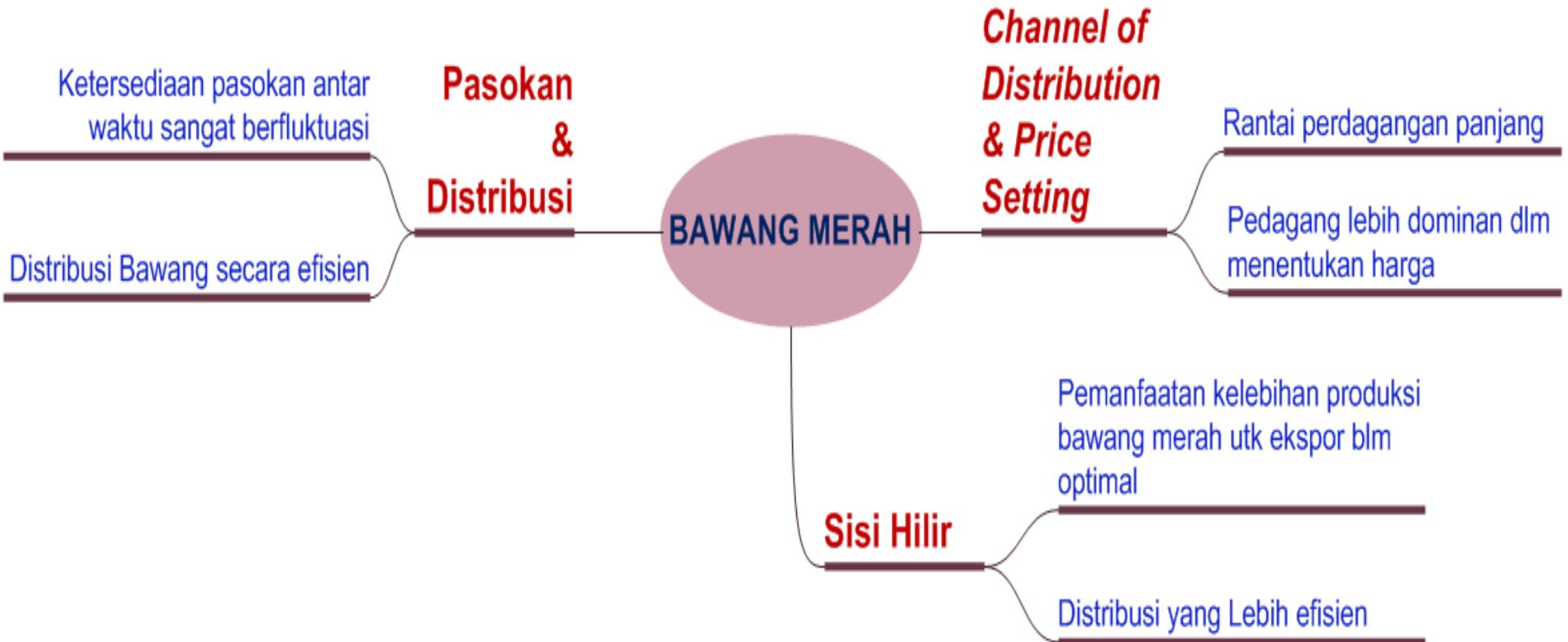
- Pelaku di sisi hulu produksi (petani) cenderung memiliki posisi tawar yang lemah (hanya 4% pembentukan harga ditentukan oleh biaya produksi dan margin petani).
- Ada indikasi bahwa **pedagang memiliki market power**, sehingga:
 - Pedagang lebih dominan dalam menentukan harga, baik harga di level produsen maupun konsumen, dan
 - **mendapatkan margin keuntungan terbesar**. Kedua hal tersebut mencerminkan kondisi pasar beras yang kurang efisien (cenderung **bersifat oligopolistik**).



Sumber: Tumpak et.al, "Pemetaan Struktur Pasar dan Pola Distribusi Komoditas Strategis Penyumbang Inflasi Daerah serta Implikasinya terhadap Kebijakan Pengendalian Harga Komoditas Daerah" (2011)



Tantangan Pengendalian Inflasi - Bawang Merah

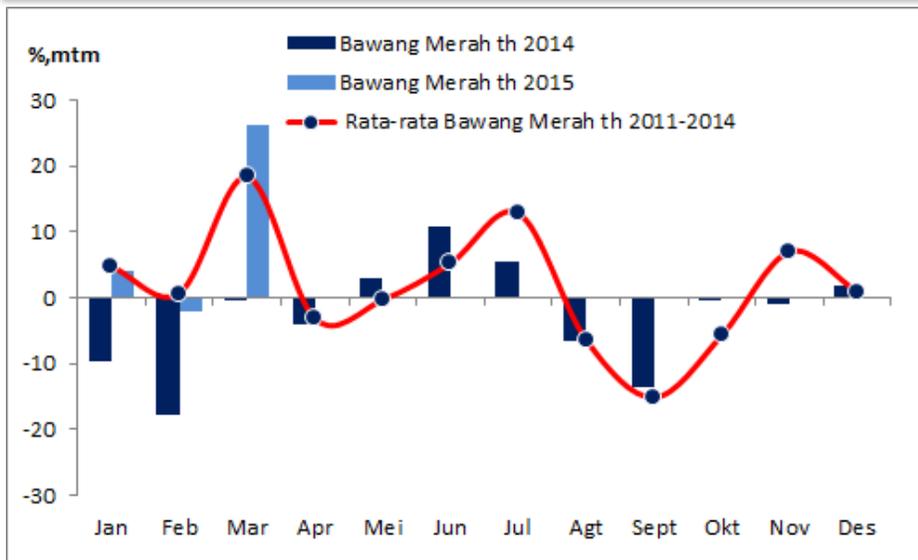


Bawang Merah : *Stylized facts*

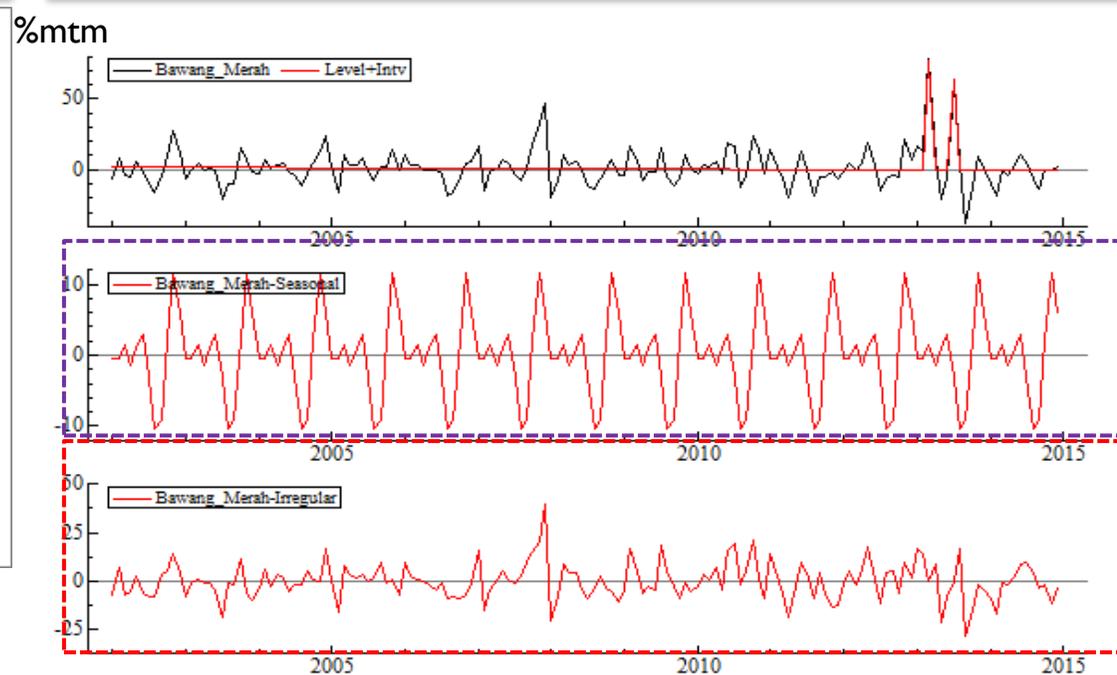
Kecukupan pasokan rentan oleh shocks akibat anomali iklim maupun faktor lain, seperti kebijakan. Secara antar waktu, gejala musiman masih terus berlangsung..

- ✓ Produksi DN secara tahunan cukup, namun pola musiman mempengaruhi ketersediaan antar waktu.
- ✓ Selain belum ada perbaikan dalam pola musiman, faktor *shocks/irregularity* (anomali cuaca, regulasi) juga besar dalam mempertajam volatilitas bawang merah.
- ✓ Paska implementasi harga referensi, **fluktuasi harga terindikasi membaik.**
- ✓ Kebijakan stabilisasi harga di tingkat konsumen, yakni harga referensi, telah cukup efektif.

Inflasi Bawang Merah

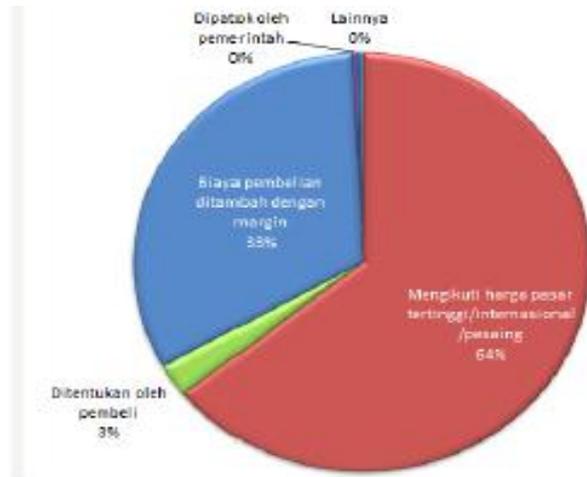


Tren, Seasonal, Irregular (Shocks) Bawang Merah

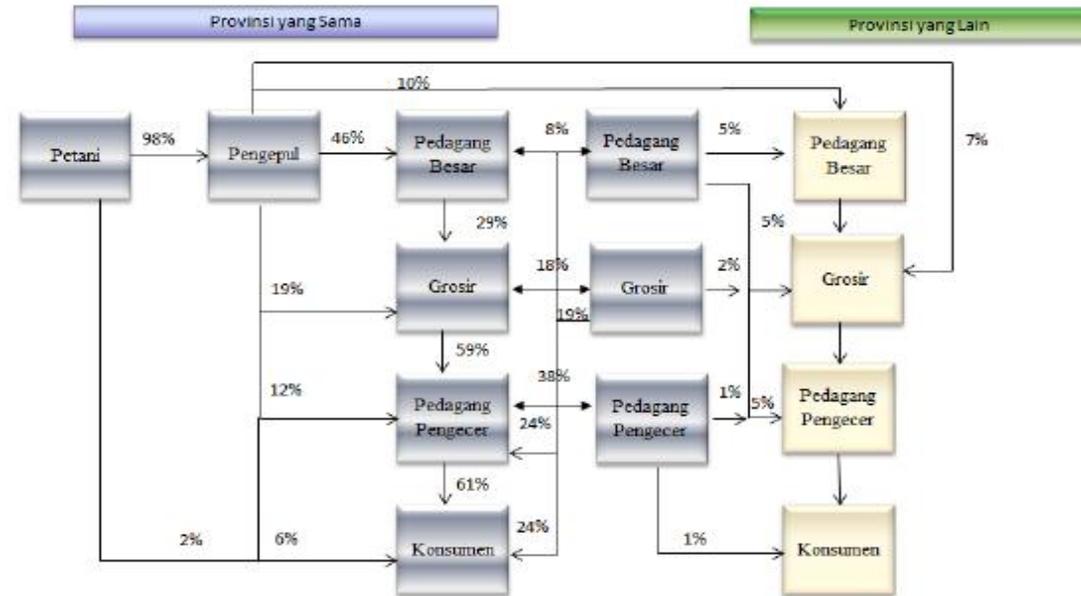


Isu Struktural – Channel of Distribution dan Price Setting

- **Rantai perdagangan bawang merah panjang;**
 - Dari produsen, pengumpul, pedagang besar, grosir, pedagang eceran hingga sampai ke konsumen.
- **Pedagang lebih dominan** dalam menentukan harga jual yang tercermin dari metode penentuan harga jual yang mayoritas menjawab mengikuti harga pasar tertinggi/pesaing.



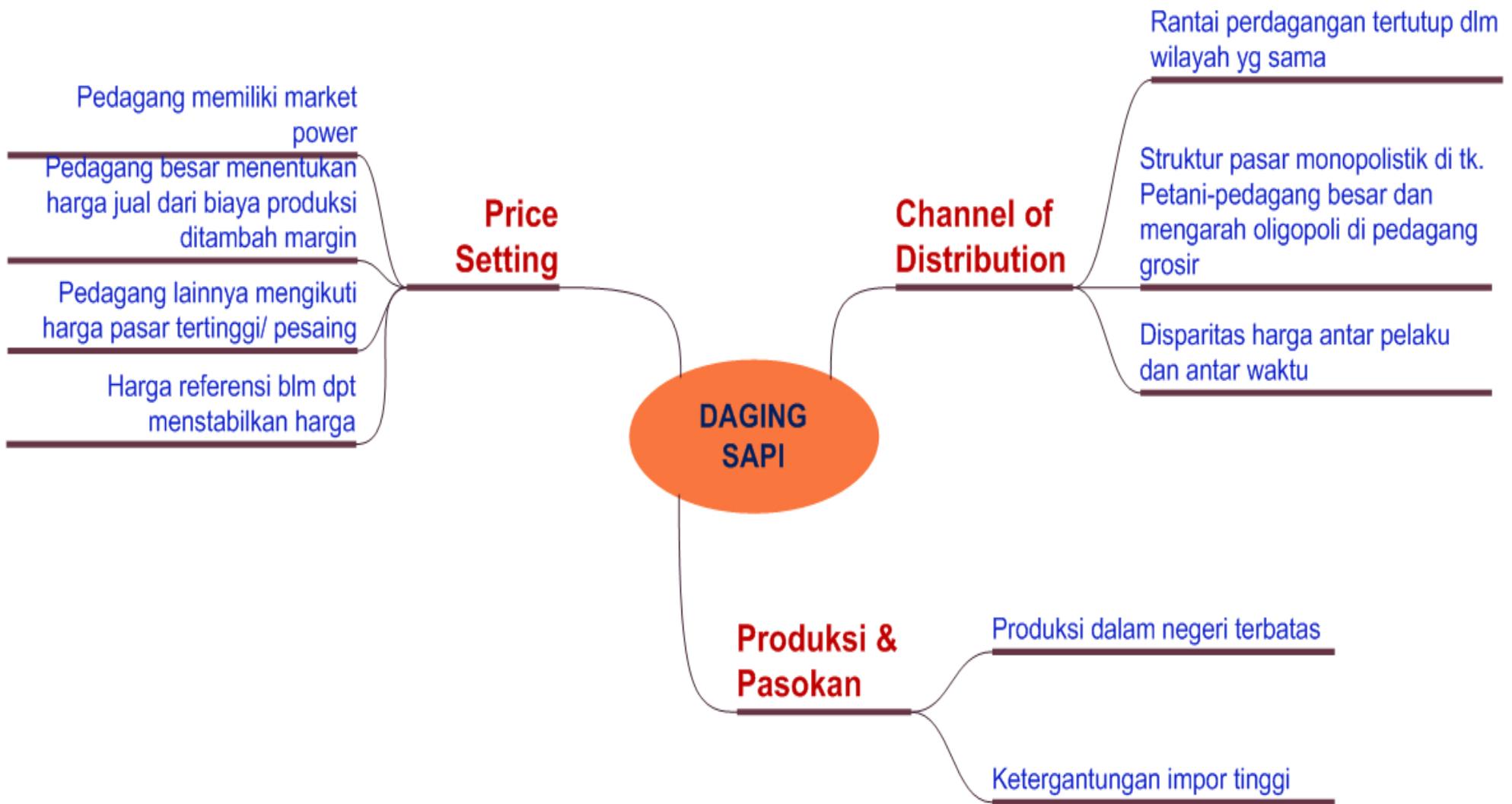
Alur Tata Niaga Bawang Merah*)



Gambar 5d. Struktur Pasar Bawang Merah

Sumber: Ridhwan et.al, "Perdagangan Antar Daerah, Distribusi, Transportasi, dan Pengelolaan Stok Komoditas Pangan Strategis di Indonesia"(2012)

Tantangan Pengendalian Inflasi - Daging Sapi

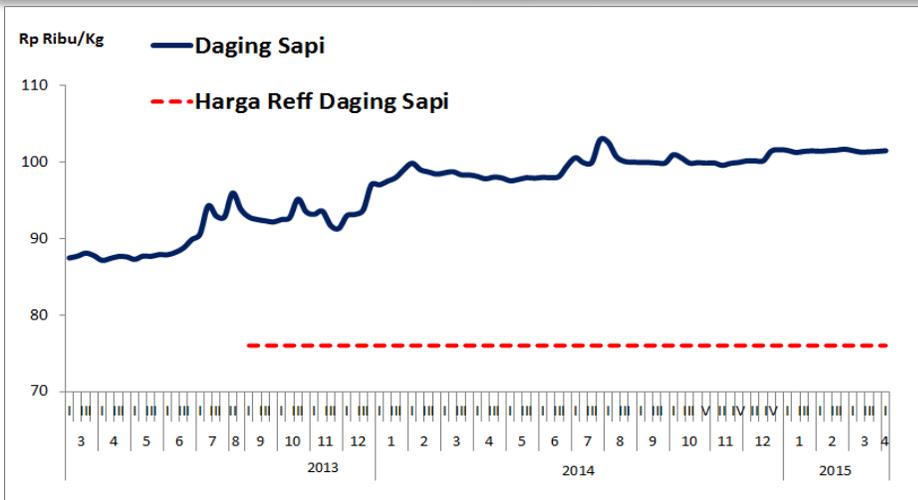


Daging Sapi : Stylized facts

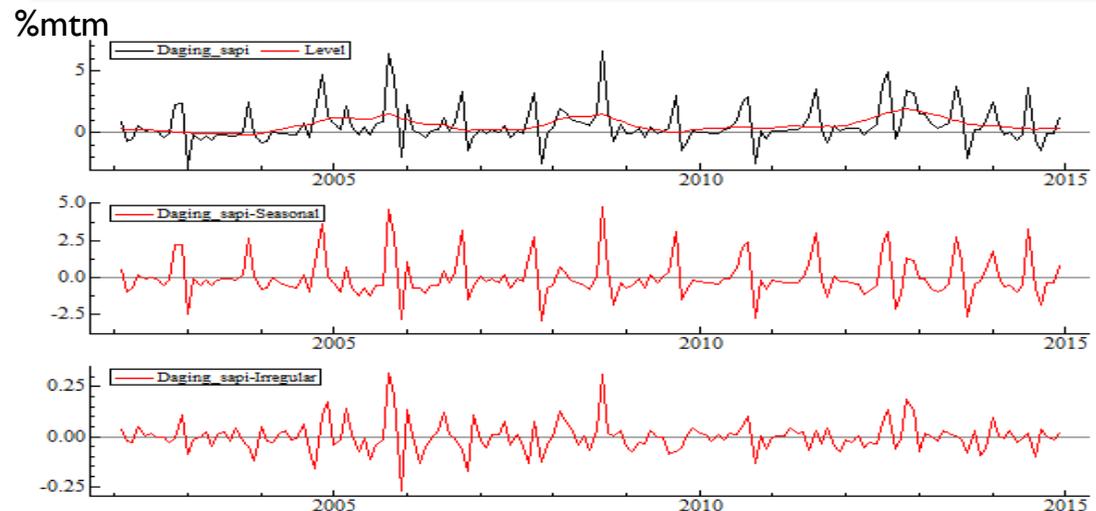
Faktor seasonal dan shocks relatif minimal. Permasalahan utama terletak pada neraca pangan yang defisit sehingga harga bertahan di level tinggi.

- ✓ Pertumbuhan produksi DN terbatas , dengan neraca masih defisit.
- ✓ Harga cenderung meningkat, dan akseleratif sejak tahun 2012.
- ✓ Implementasi harga referensi sejak 2013 belum berdampak pada stabilisasi harga.
- ✓ Harga aktual di pasar >> harga referensi Rp 76.000,-/kg maupun harga indikatif berdasar perkiraan biaya produksi (Rp 80.000,-/kg – Rp 85.000,-/kg)
- ✓ Kebijakan stabilisasi harga di tingkat konsumen, yakni harga referensi, efektivitasnya perlu ditingkatkan.

Inflasi Daging Sapi



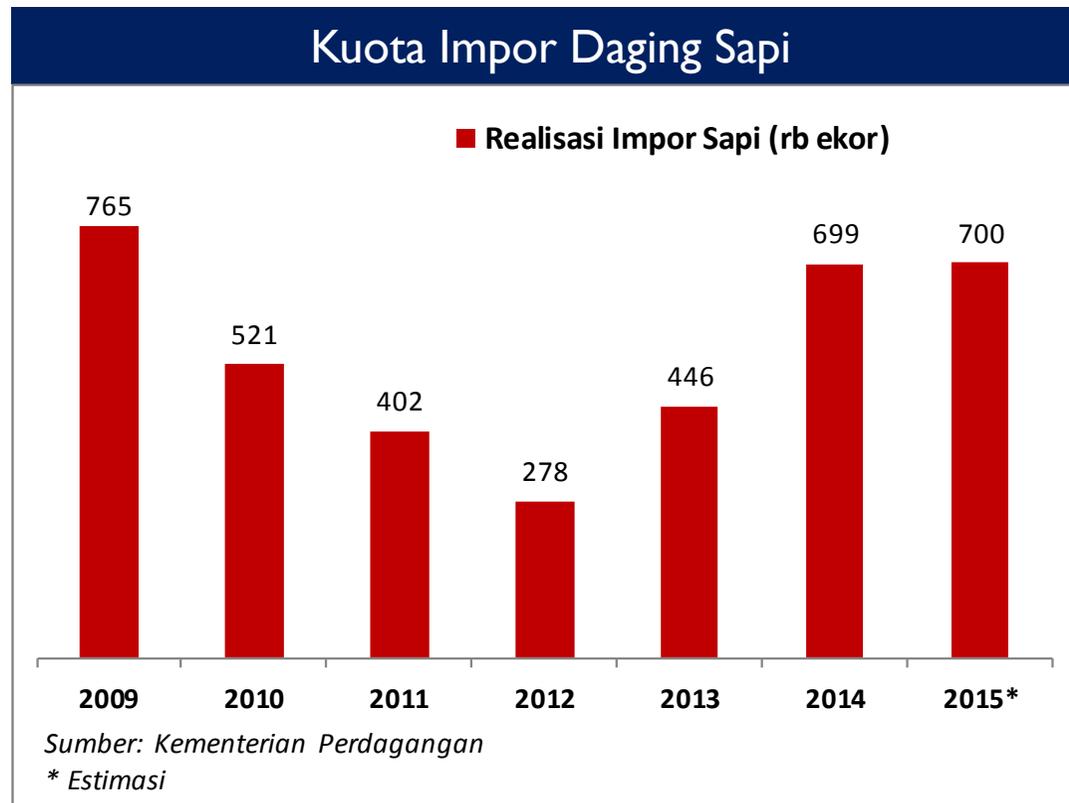
Tren, Seasonal, Irregular (Shocks) Daging Sapi



Arah Inflasi Daging Sapi

Perlu adanya kejelasan mengenai program swasembada sapi yang saat ini masih terkendala pengadaan bibit sapi dan masih terkendala dengan belum adanya peternakan dengan skala usaha yang memadai

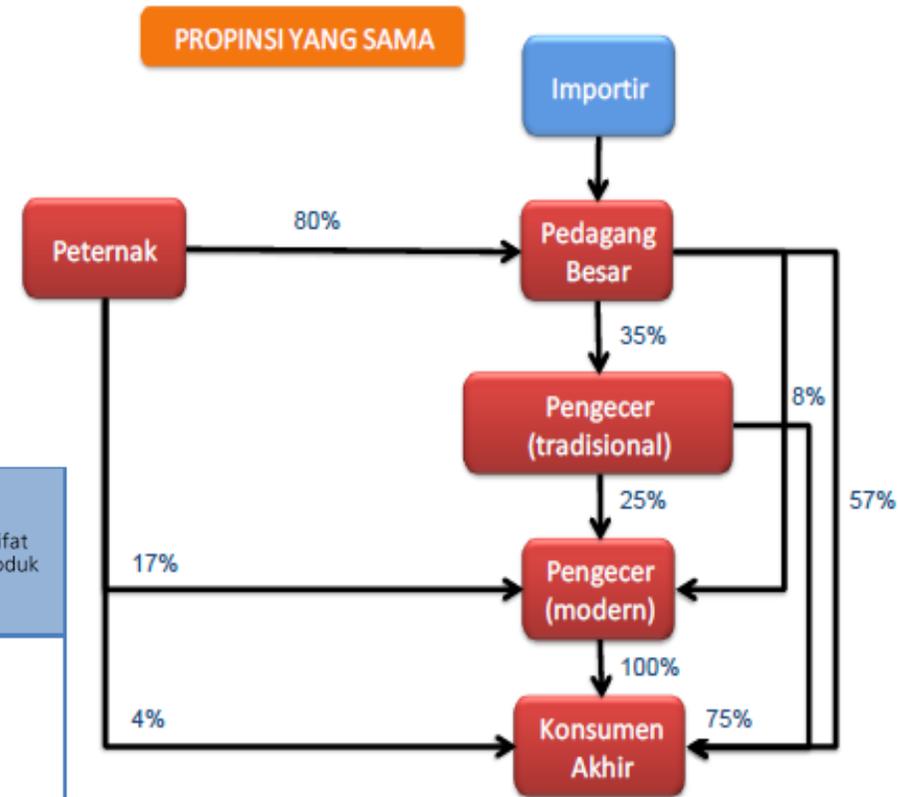
- Dalam kondisi swasembada belum dapat dilakukan namun kuota impor daging sapi terus diturunkan
- Sampai kapan harga referensi daging sapi dibiarkan jauh berbeda dibandingkan dengan harga transaksi, perlu ada intervensi dari pemerintah



Isu Struktural – Channel of Distribution

- Struktur pasar daging sapi **monopolistik** di tingkat Petani – pedagang besar, dan mengarah ke **oligopoli** di tingkat Pedagang grosir.
- Rantai perdagangan daging sapi tertutup dalam wilayah propinsi yang sama;
 - ✓ Relatif lebih pendek daripada produk pertanian.
 - ✓ Harga jual daging sapi di kawasan Jabodetabek lebih tinggi dibandingkan ke propinsi lain.

Alur Tata Niaga Daging Sapi*)

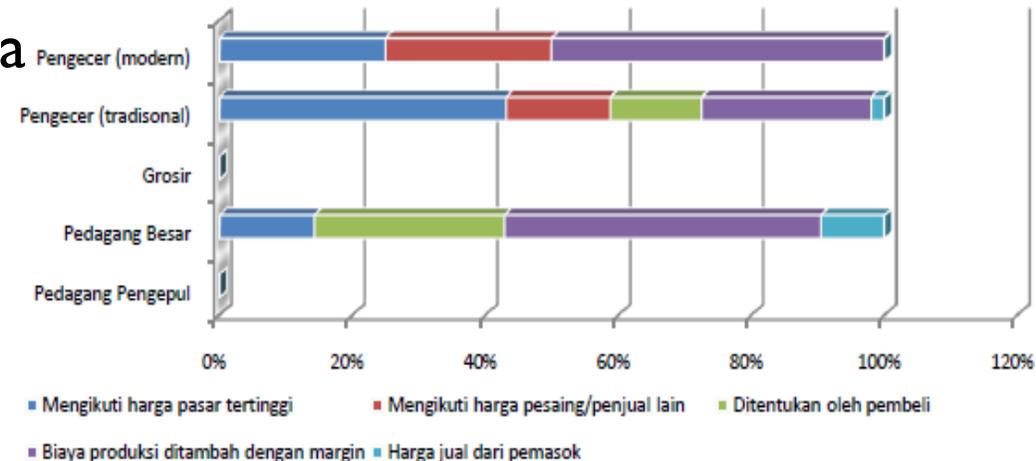
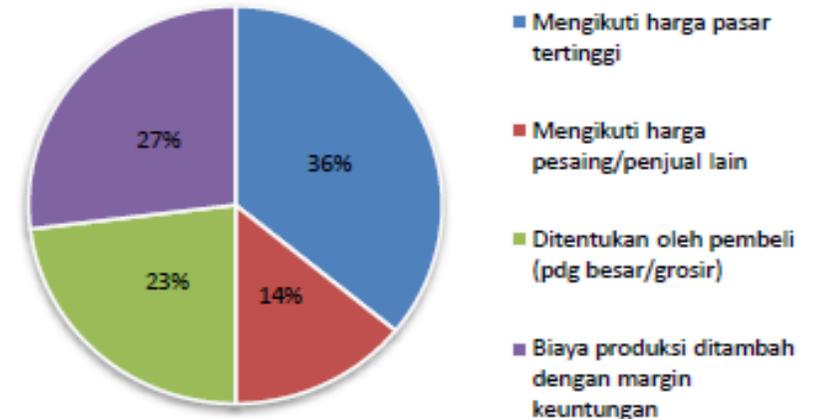


Pelaku Pasar	Struktur Pasar	Jumlah Pesaing	Market Power			Hambatan Masuk/ Keluar	Keuntungan	Sifat Produk
			Derajat Pengambil Keputusan (Penentu harga jual)	(Pengaruh pasokan terhadap harga jual di pasar)	Cara Penentuan Harga Jual			
Produsen	Monopolistik				Mengikuti harga pasar tertinggi	Hambatan masuk/ keluar kecil	Standard (beragam)	
Pedagang Pengepul	n/a		n/a	n/a	n/a			n/a
Pedagang besar	Oligopoli	12	Penjual	Tidak mempengaruhi	Biaya produksi + margin			Abnormal profit
Grosir	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			n/a
Pengecer Tradisional	Oligopoli	24	90% Penjual	21% mempengaruhi	Mengikuti harga pasar tertinggi			Normal profit
Pengecer modern	Monopolistik	5	Kesepakatan bersama	20% mempengaruhi	Biaya produksi + margin			

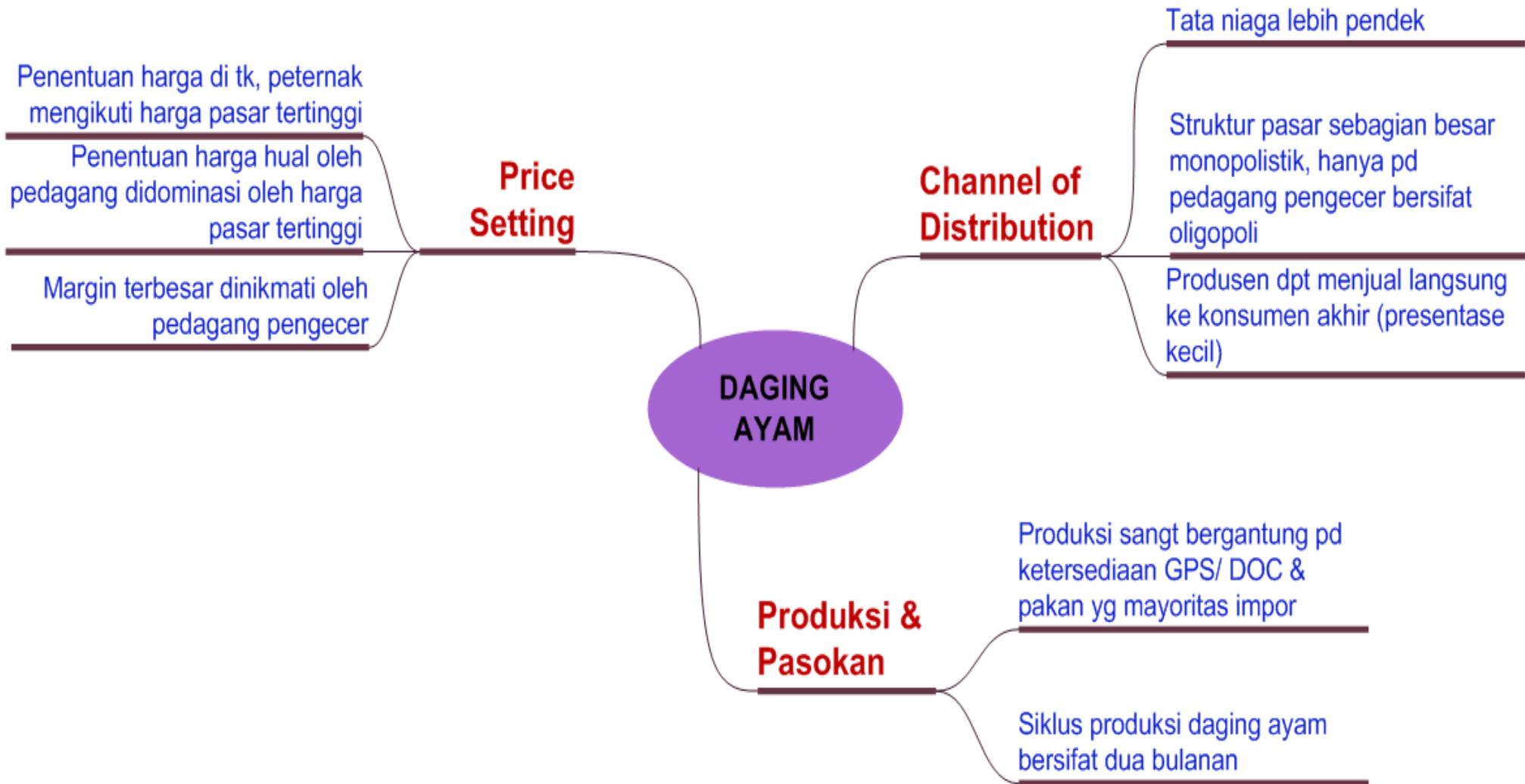
Isu Struktural – Price Setting

Pedagang memiliki *market power*, yakni:

- ✓ Pedagang besar mempunyai peran besar dalam jalur distribusi daging sapi.
 - ☐ Harga jual di level peternak juga ditentukan oleh pedagang besar.
- ✓ Pedagang besar menentukan harga jual dari biaya produksi ditambah *margin*
- ✓ Sementara pedagang lainnya mengikuti pasar tertinggi/pesaing.



Tantangan Pengendalian Inflasi - Daging Ayam

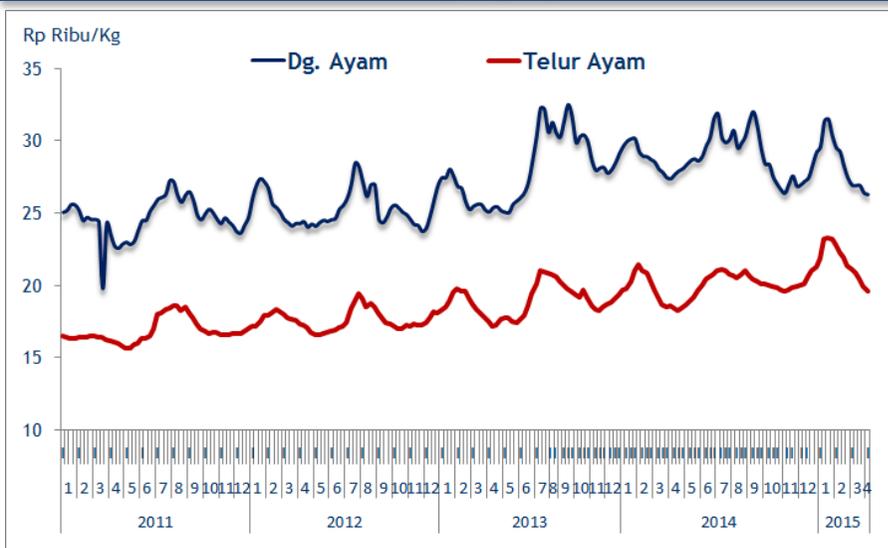


Daging Ayam : Stylized facts

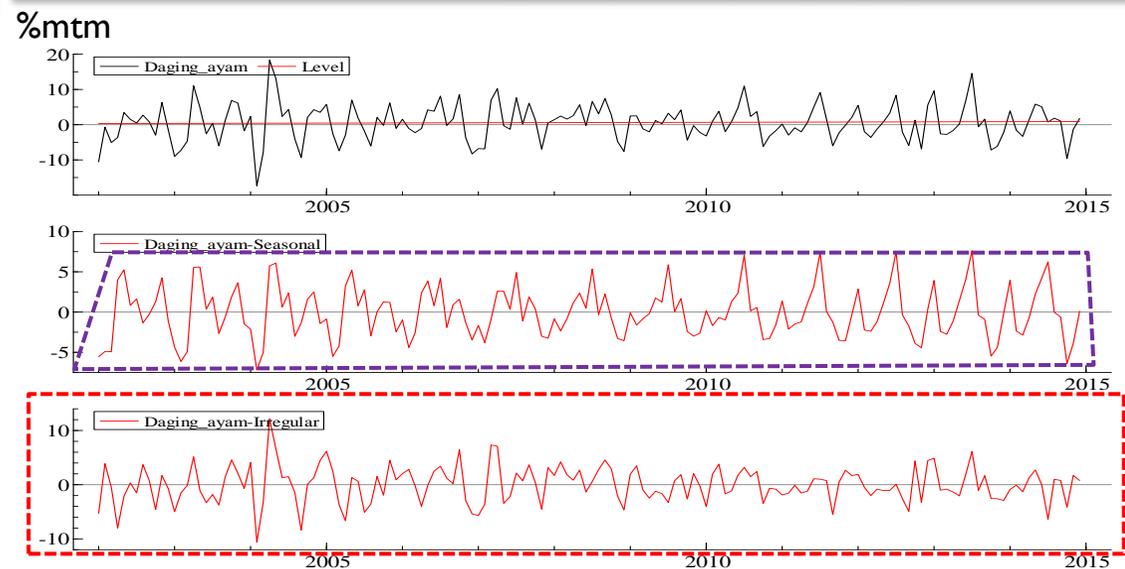
Dinamika inflasi daging ayam dominan bersumber dari komponen jangka pendek yakni seasonality dan irregularity..

- Produksi meningkat.
- Harga dalam beberapa waktu terakhir menurun.
- Berbeda daging sapi, *seasonality* pada daging ayam tidak bersifat tetap (acak). Hal ini diperkirakan terkait dengan siklus produksi daging ayam yang bersifat dua bulanan dan banyaknya produsen skala kecil (*home industry*). Selain itu, produksi juga sangat tergantung dengan ketersediaan GPS/DOC dan pakan yang mayoritas impor → mempengaruhi banyaknya *irregularities*.

Inflasi Daging Ayam



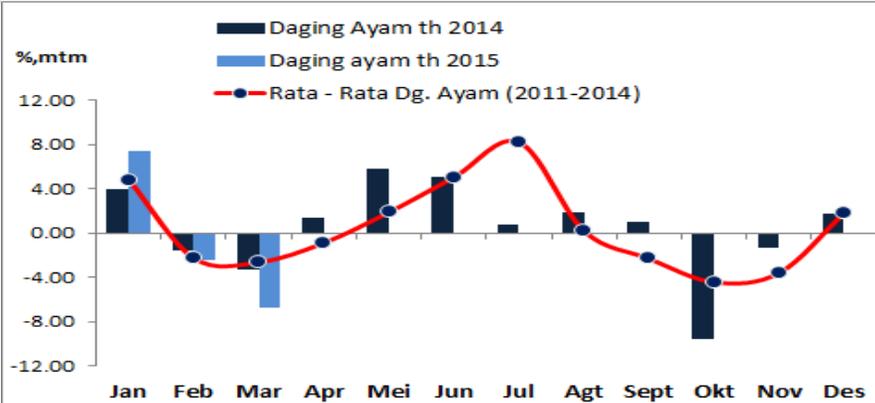
Tren, Seasonal, Irregular (Shocks) Daging Ayam



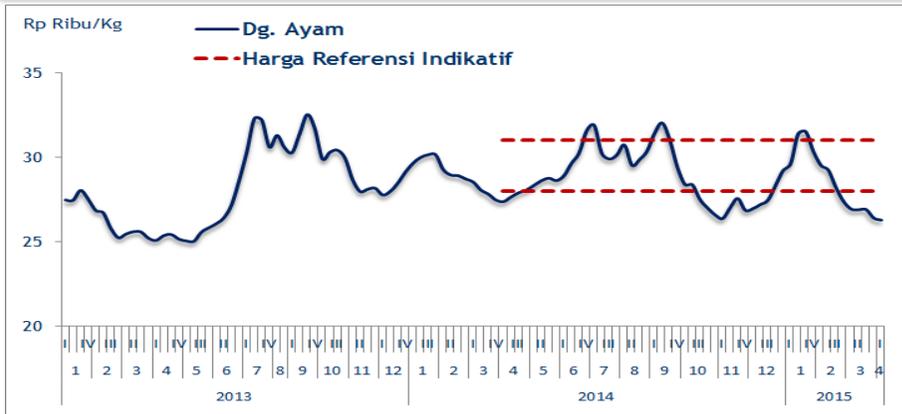
Arah Inflasi Daging Ayam 2015

Penurunan kuota impor dan gejolak harga musiman masih menjadi tantangan pengendalian inflasi daging ayam pada 2015

Inflasi Daging Ayam

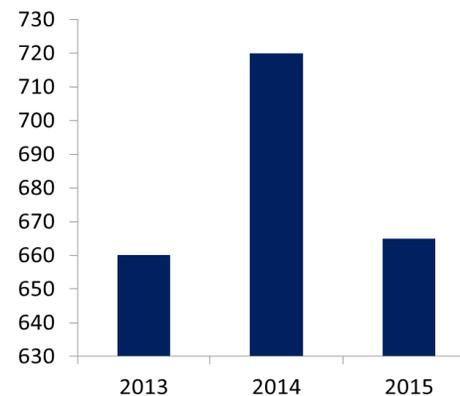


Harga Daging Ayam

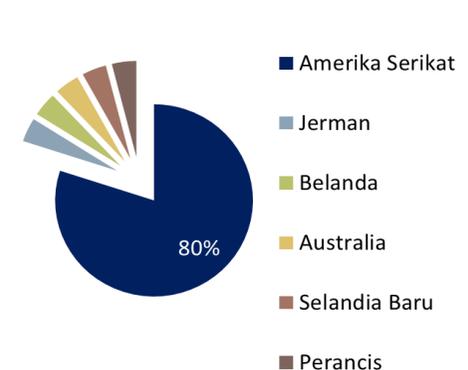


- Impor ayam diturunkan tahun 2015 dan bentuknya dalam telur, bukan *Grand Parent Stock* (induk ayam)
- Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) menjelaskan bahwa kuota impor telah disesuaikan dengan kebutuhan domestik. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa terjadi *over-supply* pada 2014.
- Disamping tantangan terkait penurunan kuota impor, gejolak harga musiman (a.l pd hari raya keagamaan) masih menjadi tantangan pengendalian inflasi daging ayam 2015.

Impor GPS (ribu ekor)



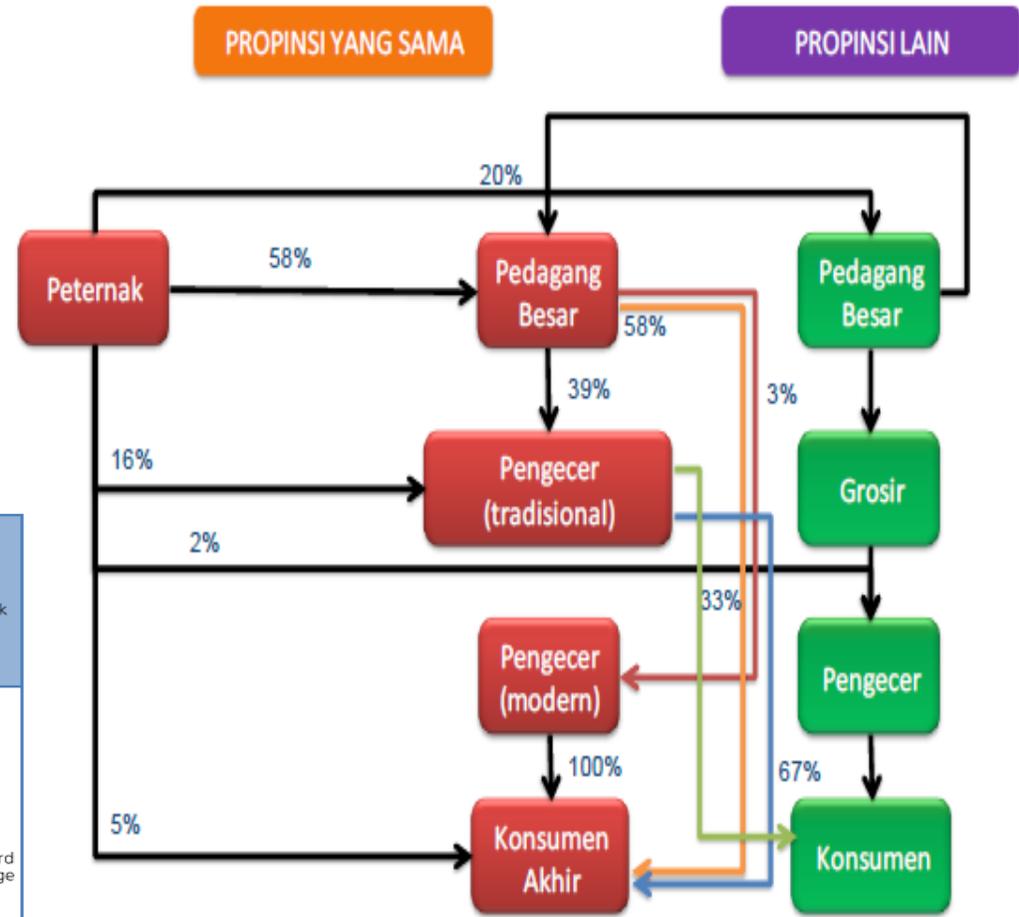
Impor GPS berdasarkan Negara



Isu Struktural – Channel of Distribution

- Alur tata niaga daging ayam lebih pendek, namun sangat terbuka interaksi antar provinsinya.
 - Produsen dapat menjual produk ayam langsung kepada konsumen akhir, meski persentasenya kecil.
- Struktur pasar sebagian besar berbentuk pasar monopolistik hanya pada pedagang pengecer struktur pasar berbentuk oligopoli.

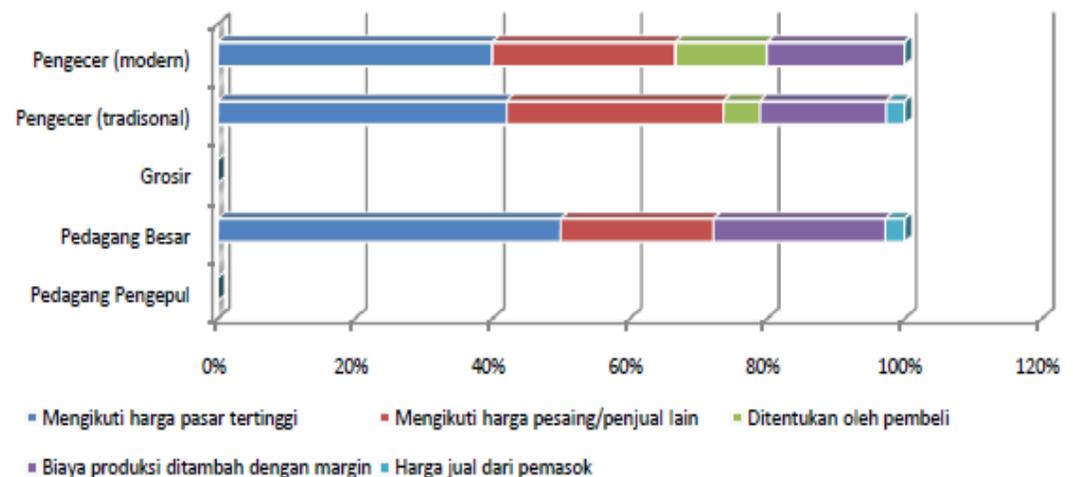
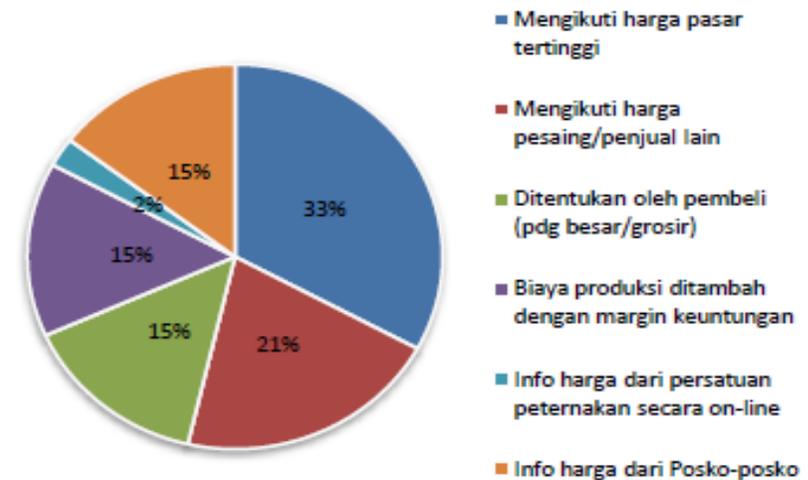
Alur Tata Niaga Daging Ayam*)



Pelaku Pasar	Struktur Pasar	Jumlah Pesaing	Market Power			Hambatan Masuk/ Keluar	Keuntungan	Sifat Produk	
			Derajat Pengambil Keputusan (Penentu harga jual)	(Pengaruh pasokan terhadap harga jual di pasar)	Cara Penentuan Harga Jual				
Produsen	Monopolistik				Mengikuti harga pasar tertinggi	Hambatan masuk/ keluar kecil	Normal Profit	Standard (homogen)	
Pedagang Pengepul	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
Pedagang besar	Monopolistik	18	57% oleh Penjual	Tidak mempengaruhi (23% mempengaruhi)	Mengikuti harga pasar tertinggi				
Grosir	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
Pengecer Tradisional	Oligopoli	20	Kesepakatan bersama	Tidak mempengaruhi (10% mempengaruhi)	Mengikuti harga pasar tertinggi				Abnormal profit
Pengecer modern	Monopolistik	6		Tidak mempengaruhi	Mengikuti harga pasar tertinggi				

Isu Struktural – Price Setting

- Di level peternak, penentuan harga jual mayoritas mengikuti harga pasar tertinggi.
- Penentuan harga jual oleh pedagang juga didominasi oleh harga pasar tertinggi.
 - ✓ Di level pengecer terdapat sedikit variasi dengan biaya ditambah *margin*.
- Dari sisi variabilitas harga, *margin* terbesar terindikasi dinikmati oleh pedagang pengecer.



Sumber: Tumpak et.al, "Pemetaan Struktur Pasar dan Pola Distribusi Komoditas Strategis Penyumbang Inflasi Daerah serta Implikasinya terhadap Kebijakan Pengendalian Harga Komoditas Daerah" (2011)

LAMPIRAN I.C

Permasalahan Inflasi ***Administered Prices***

Perkembangan Sektor Energi

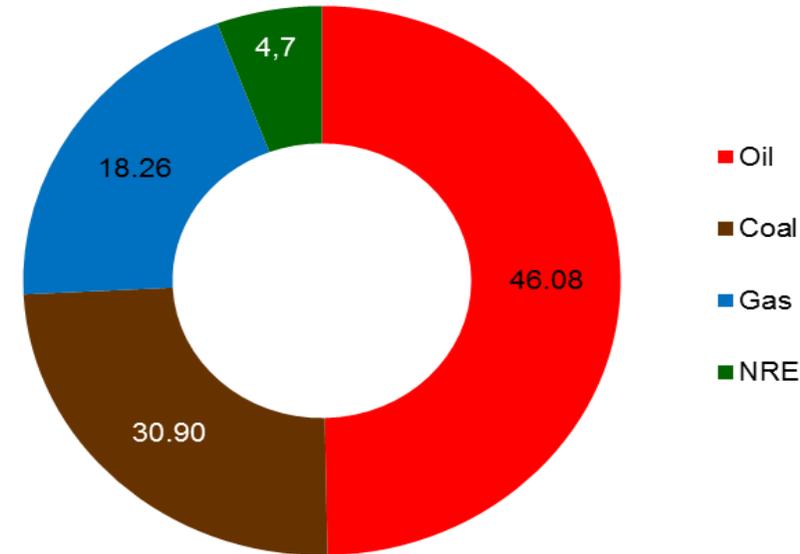
Ketergantungan terhadap energi fosil cukup tinggi. Bauran energi tahun 2013: 46.08% minyak; 30.90% batubara; 18.26% gas and 4.7% EBT

tahun 2014*:

- Menjadi *net oil importer*, dengan kondisi: produksi 794 ribu bpd; konsumsi 1,5 juta bpd; import minyak (*crude+BBM*) 757 ribu bpd
- Kapasitas pembangkit masih rendah sebesar 53.3 GW; konsumsi listrik sebesar 199 TWh; elektrifikasi nasional \pm 84.35%;
- Energi ditempatkan sebagai komoditas ekspor (*revenue base*):
 - Gas: produksi 1.221 MMSCFD dan 48 % dari produksi untuk *export*
 - batubara : produksi 435 juta ton dan 83 % dari produksi untuk *export*
- Subsidi energi masih tinggi: 274.84 triliun Rupiah
- Pengembangan energi terbarukan masih rendah

*) angka sementara

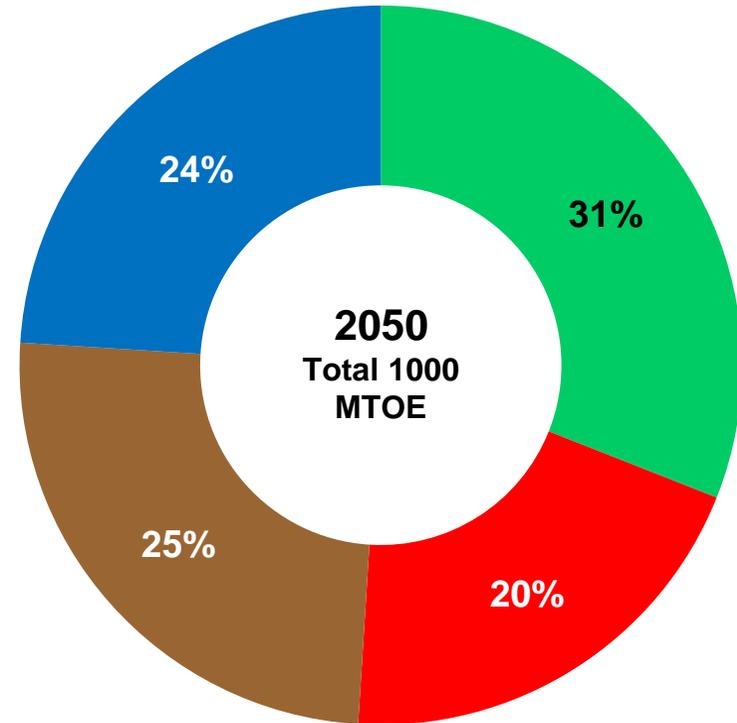
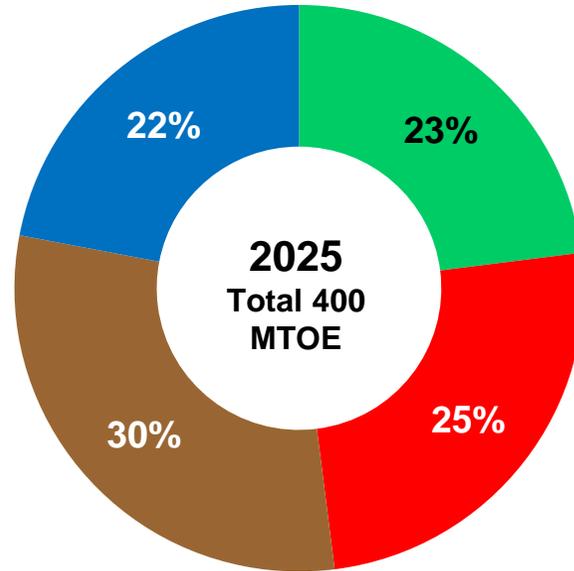
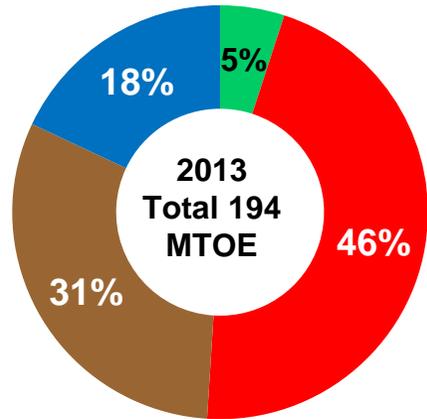
Energy Mix 2013



Sumber: Dewan Energi Nasional

Target Bauran Energi

- Energi Baru dan Terbarukan
- Minyak Bumi
- Gas Bumi
- Batubara



Pembangkit: 51 GW
Konsumsi Energi: 0.8 TOE/kap
Konsumsi Listrik: 776 KWh/kap

Pembangkit: 115 GW
Konsumsi Energi: 1.4 TOE/kap
Konsumsi Listrik: 2500 KWh/kap

Pembangkit: 430 GW
Konsumsi Energi: 3.2 TOE/kap
Konsumsi Listrik: 7000 KWh/kap

Benchmarking Reformasi Subsidi Energi

The fall in the price of oil & gas provides a once-in-a-generation opportunity to fix bad energy policy (The Economist, 17 Jan 2015)

Pengalaman berbagai negara menunjukkan reformasi subsidi energi tidak mudah

- 12 episode dikategorikan *successful* (berhasil diterapkan permanen).
- 11 *partially successful*; berhasil diterapkan lebih dr 1 tahun namun subsidi kembali diterapkan.
- 5 *unsuccessful*; subsidi kembali diberikan ketika terjadi kenaikan harga dunia.

Region/Country	Reform episode	Reform outcome	Reform impact
CEE-CIS			
Turkey	1998	Successful	SOEs turned from net loss to net profitability
Emerging and Developing Asia			
Indonesia	1997	Unsuccessful	n.a.
	2003	Unsuccessful	n.a.
	2005	Partially successful	Subsidies declined from 3.5 percent of GDP in 2005 to 1.9 percent in 2006
	2008	Partially successful	Subsidies declined from 2.8 percent of GDP in 2008 to 0.8 percent in 2009
Philippines	1996	Successful	0.1+ percent of GDP
LAC			
Brazil	Early 1990s–2001	Successful	From 0.8 percent of GDP in subsidies in mid-1990s to revenue generating since 2002
Chile	Early 1990s	Successful	n.a.
Peru	2010	Partially successful	0.1 percent of GDP
MENA			
Iran	2010	Partially successful	Growth in the consumption of petroleum products initially stabilized
Mauritania	2008	Unsuccessful	n.a.
	2011	Partially successful	Subsidies declined from 2 percent of GDP in 2011 to close to zero in 2012
Yemen	2005	Partially successful	Subsidies declined from 8.7 percent of GDP in 2005 to 8.1 percent in 2006
	2010	Partially successful	Subsidies declined from 8.2 percent of GDP in 2010 to 7.4 percent in 2011
Sub-Saharan Africa			
Ghana	2005	Partially successful	50 percent price increase on average
Namibia	1997	Partially successful	0.1+ percent of GDP
Niger	2011	Partially successful	0.9 percent of GDP
Nigeria	2011-12	Partially successful	Subsidies declined from 4.7 percent of GDP in 2011 to 3.6 percent in 2012
South Afrika	1950s	Successful	Successfully avoided subsidies and secured supply

Kebijakan Tarif Angkutan Darat

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 89 Tahun 2002

Tarif angkutan AKAP kelas ekonomi ditetapkan sebesar:

- a. Tarif batas atas: +30% dari biaya pokok
- b. Tarif batas bawah: -20% dari biaya pokok

Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 31 Tahun 2015

- a. Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi Biaya Pokok Angkutan Umum AKAP setiap 3 (tiga) bulan, untuk mengetahui harga komponen tarif angkutan umum terkini
- b. Penyesuaian Tarif Angkutan Umum AKAP secara langsung dapat dilakukan jika kenaikan/penurunan harga BBM mempengaruhi kenaikan/penurunan Biaya Pokok Angkutan Umum di atas 20%, meskipun belum harus dilakukan evaluasi 3 bulanan tersebut



Bagian II

Roadmap Pengendalian Inflasi Wilayah Sumatera



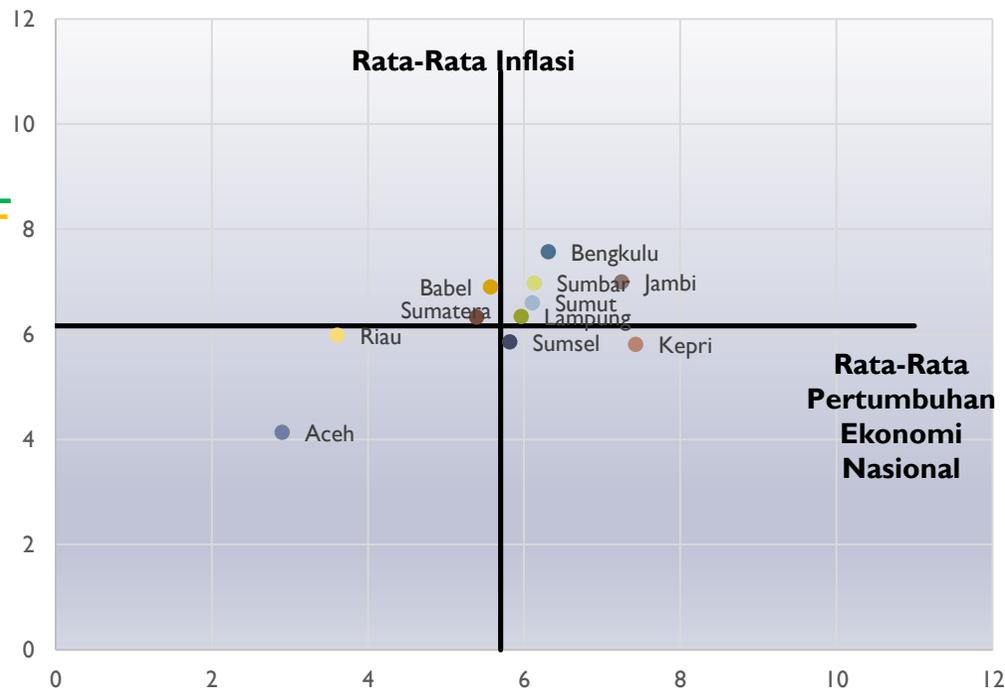
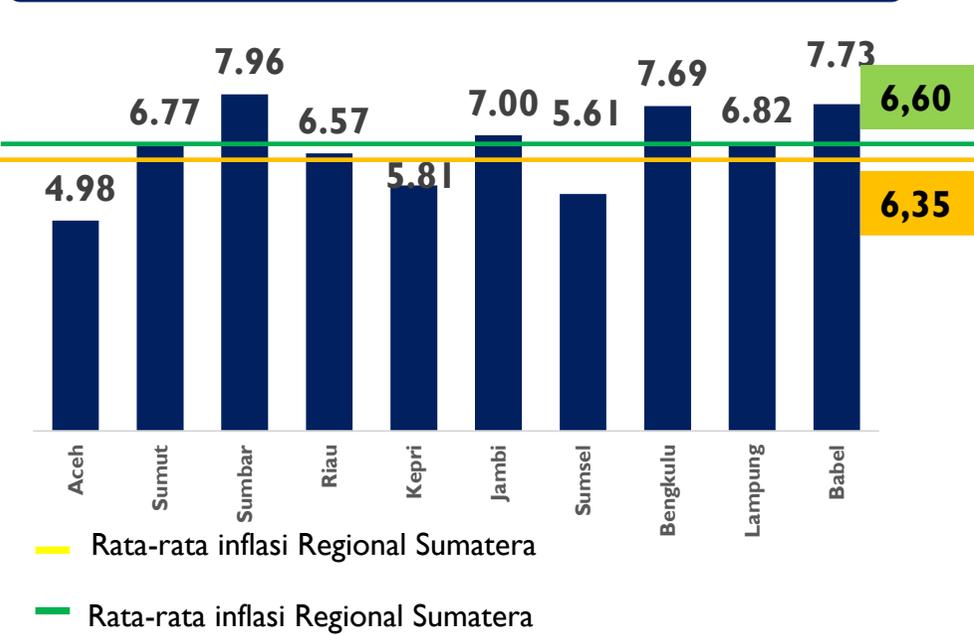
Halaman ini sengaja dikosongkan

2.1 *Pendahuluan*

Pendahuluan

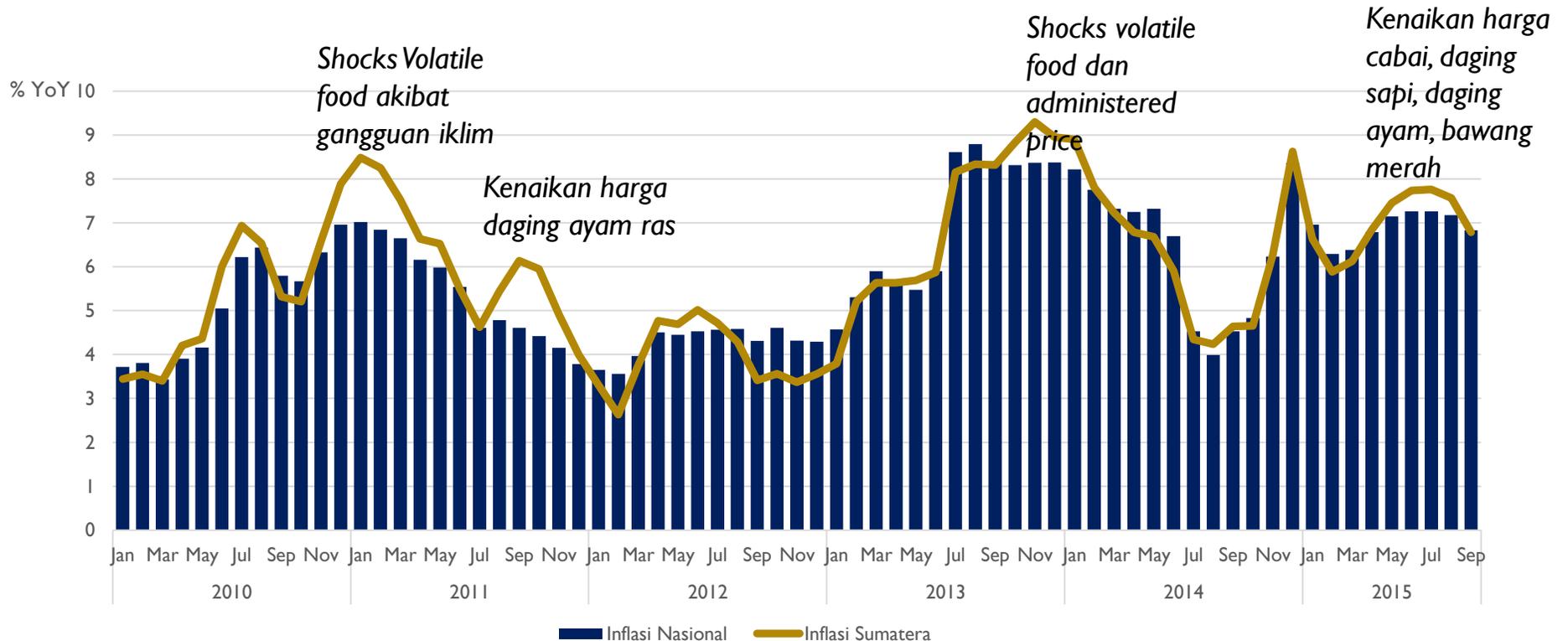
- *Sumut, Sumbar, Bengkulu, Jambi, Lampung dan Bangka Belitung merupakan daerah-daerah yang secara rata-rata memiliki inflasi lebih tinggi dibandingkan Regional Sumatera dan nasional.*
- *Tingginya rata-rata inflasi Sumut, Sumbar, Jambi, Bengkulu, dan Lampung sejalan dengan relatif tingginya pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Sementara di Kep. Riau dan Sumsel, pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi diiringi dengan rata-rata inflasi yang relatif lebih rendah.*
- *Rata-rata inflasi Aceh lebih rendah dibandingkan rata-rata regional Sumatera dan nasional sejalan dengan rendahnya laju pertumbuhan ekonomi.*

Rata-Rata Inflasi Sumatera (%)



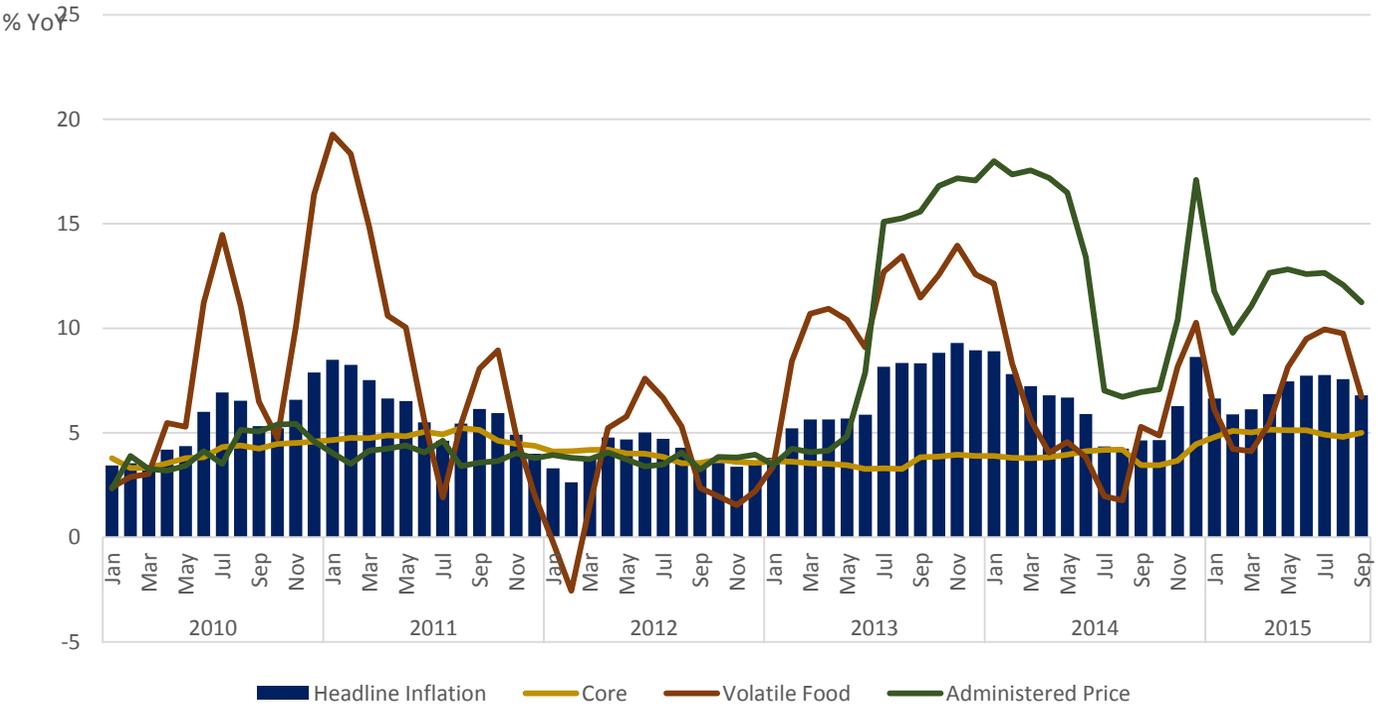
Pendahuluan

- *Trend inflasi Sumatera secara umum searah dengan perkembangan inflasi nasional.*
- *Volatilitas harga kelompok volatile food menyebabkan terjadinya deviasi realisasi inflasi Sumatera dengan nasional, mengingat bobot yang relatif tinggi komoditi-komoditi volatile food terhadap pembentukan inflasi Sumatera.*
- *Kecenderungan peningkatan harga kelompok volatile food dalam empat bulan terakhir menyebabkan relatif tingginya realisasi inflasi Sumatera dibandingkan realisasi nasional.*



Pendahuluan

- Laju inflasi Sumatera di bulan September menunjukkan trend yang menurun terutama didorong oleh menurunnya tekanan inflasi volatile food seiring dengan membaiknya pasokan komoditi pangan. Meski demikian inflasi inti masih memberikan tekanan terhadap laju inflasi Sumatera hingga di bulan September.
- Sedangkan untuk kelompok administered prices, meskipun masih memberikan tekanan, namun mengalami trend yang menurun paska normalisasi tarif angkutan udara usai perayaan hari raya keagamaan.

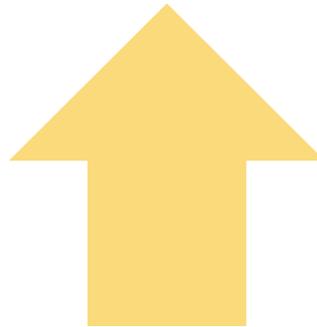


September		
	Inflasi (%)	Sum-bangan (%)
Core	5	2,72
Volatile food	6,72	1,57
Administered Prices	11,24	2,50
Head-line	6,79	6,79

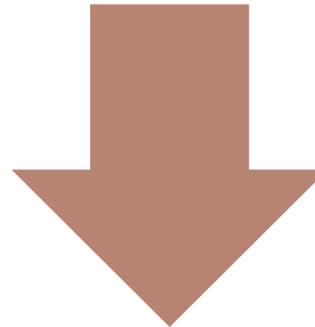
Pendahuluan

Proyeksi inflasi Sumatera tahun 2015 adalah sebesar 4,41% (yoy) diperkirakan akan tercapai.

- *Depresiasi nilai tukar yang cukup dalam memberikan tekanan kepada kelompok inti. Dampak peningkatan terhadap komoditi core terlihat dari kecenderungan peningkatan mtm. di bulan September, core inflation meningkat dari 0,09% (Agustus) menjadi 0,43% (September).*
- *El Nino yang melanda Indonesia diperkirakan masih akan berlangsung sampai dengan bulan Oktober – November mendatang. Kekeringan terutama terjadi di Sumatera Bagian Tengah Selatan (Riau, Jambi, Sumsel dan Lampung).*
- *Realisasi impor beberapa komoditi pangan dan terjadinya panen beberapa komoditas bumbu-bumbuan di Sumatera Utara meningkatkan pasokan komoditi volatile food (September – 2015).*
- *Normalisasi tarif angkutan udara dan trend penurunan harga BBM memberi andil terhadap prospek menurunnya laju inflasi Sumatera.*



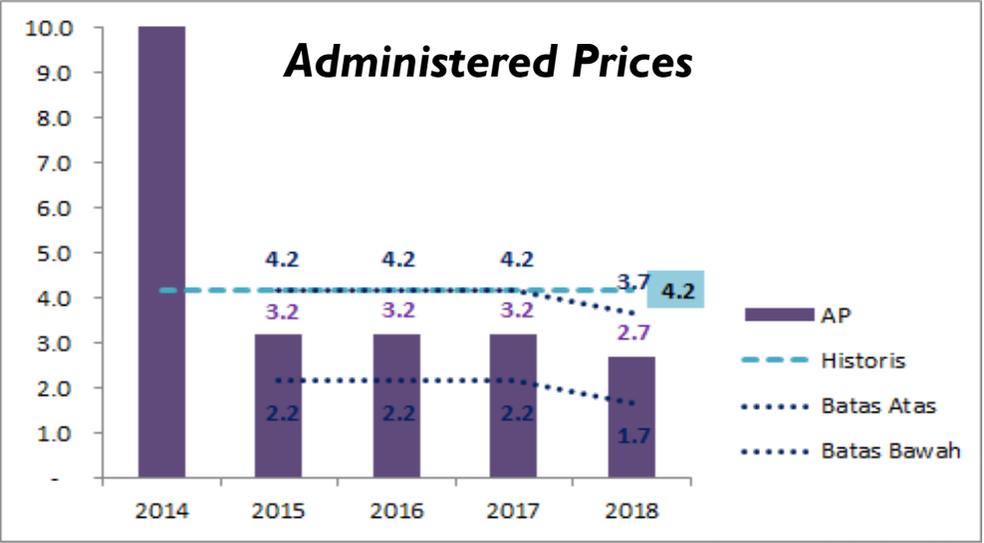
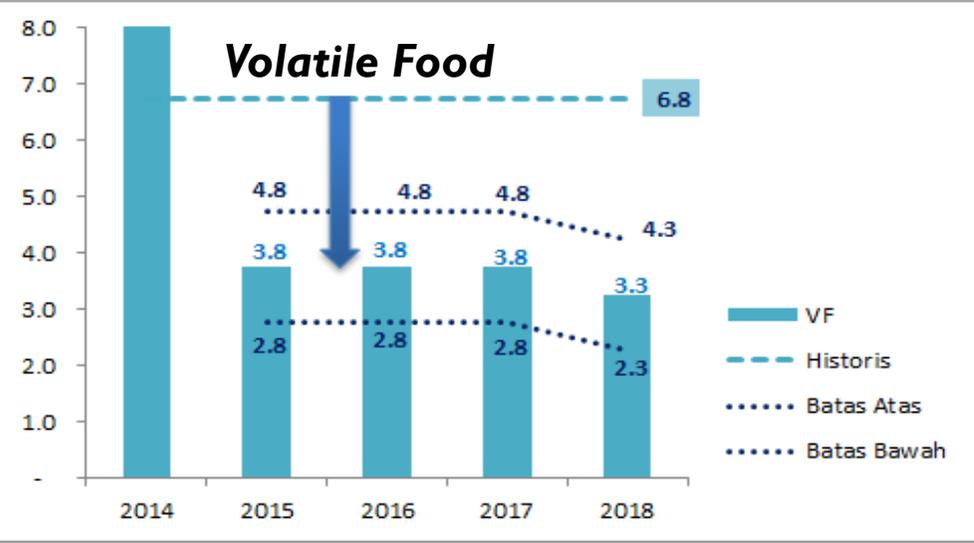
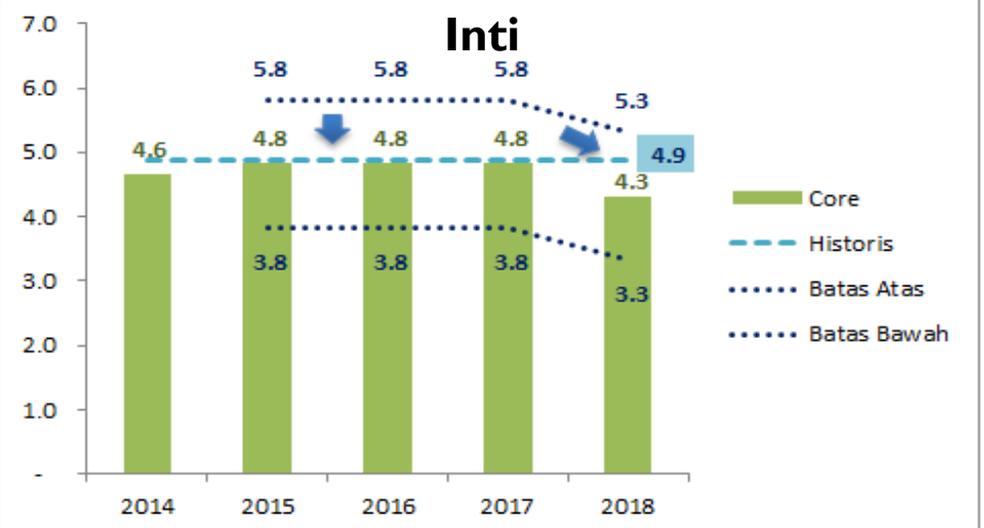
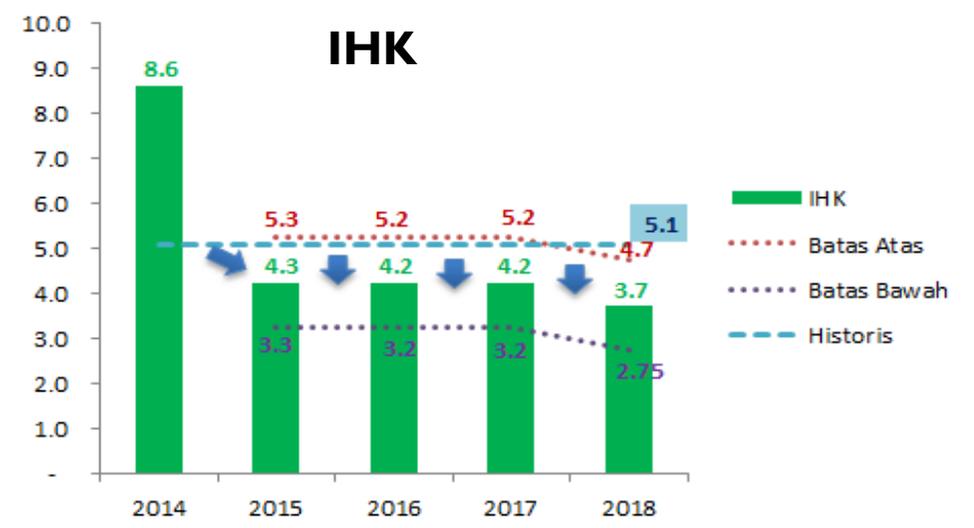
Risiko nilai tukar
Gangguan pasokan
akibat El-nino dan
bencana asap



Menurunnya permintaan
barang dan jasa
Membaiknya pasokan
Menurunnya harga BBM

Ke Depan Perlu *Extra Efforts*

Untuk mencapai sasaran inflasi, diperlukan extra effort terutama pada kelompok volatile food..



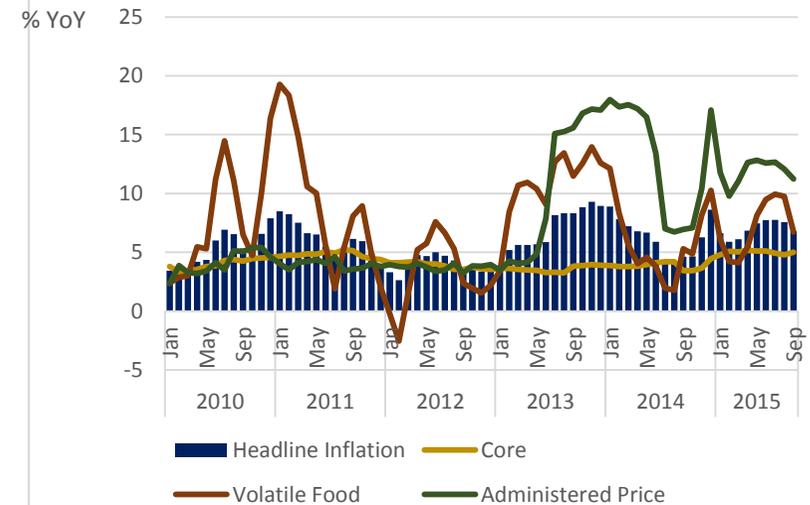
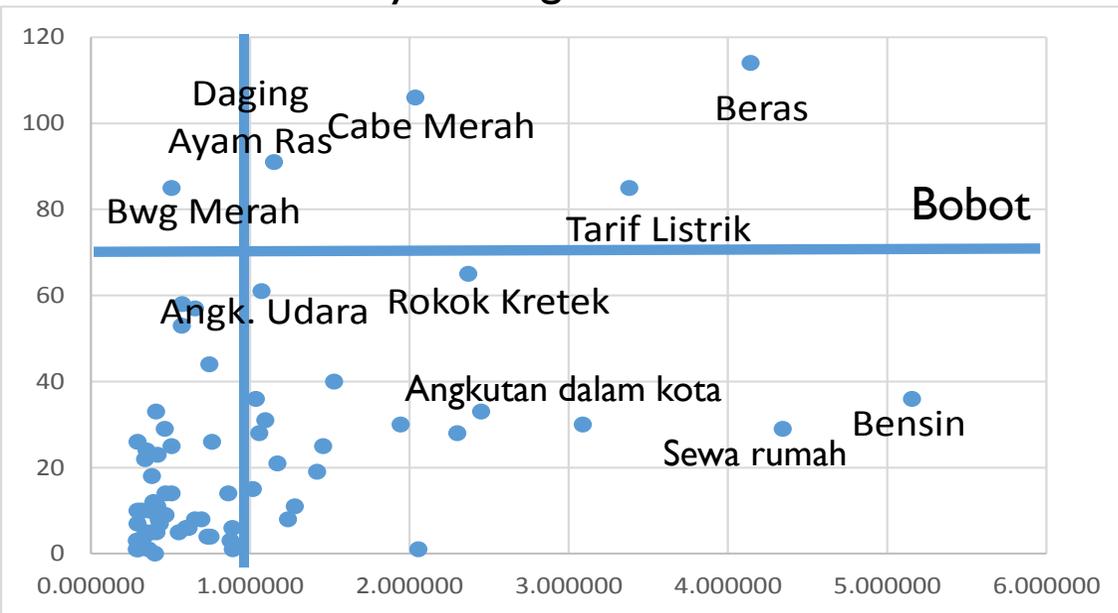
Historis 3 tahun (2010 – 2012)

2.2 Identifikasi Permasalahan Inflasi

Komoditas Utama Penyumbang Inflasi

- **Komoditas-komoditas volatile food merupakan penyumbang utama inflasi di wilayah Sumatera.**
- **Pengendalian inflasi volatile food akan mendukung pengendalian inflasi Sumatera.**
- **Sejalan dengan pola inflasi volatile food yang bergerak selaras dengan pergerakan inflasi administered prices, dampak lanjutan kenaikan harga administered prices perlu untuk diwaspadai dan dikendalikan**

Frekuensi Penyumbang



Komoditas Utama Penyumbang Inflasi

Inflasi yang rendah dan stabil dapat dicapai melalui sinergitas dan kejelasan peran masing-masing instansi di daerah maupun pusat



VOLATILE FOOD

1. Beras
2. Cabe Merah
3. Daging Ayam Ras
4. Daging Sapi
5. Bawang Merah

ADMINISTERED PRICES

1. Bensin
2. Tarif Listrik
3. Angkutan Udara
4. Angkutan Dalam Kota

CORE

1. Sewa dan Kontrak Rumah

Identifikasi Permasalahan Inflasi Inti

Fakta

1. Tingginya pengaruh eksternal (*import contain*) komoditi dan ketergantungan terhadap impor barang konsumsi
2. Kebijakan pengupahan kurang mendukung perkembangan industrialisasi
3. Regulasi dan birokrasi kurang mendukung berkembangnya iklim investasi dan industrialisasi
4. Ketersediaan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia mendorong terjadinya terpusatnya aktivitas bisnis

Kondisi Ideal

1. Berkembangnya industrialisasi dan penyediaan bahan baku industri
2. Mekanisme pengupahan yang mendorong kepastian berusaha
3. Sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah
4. Tersedianya infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang memadai secara merata di setiap wilayah
5. Ketersediaan pembiayaan infrastruktur dan investasi
6. Tumbuhnya industri yang berdaya saing tinggi

Identifikasi Permasalahan Inflasi Inti

Ekspektasi

- Permintaan untuk tujuan tidak produktif
- Pasar keuangan belum terlalu dalam dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat

Kesenjangan Perekonomian

- Sebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tidak merata
- Kualitas pendidikan dan SDM tidak merata

Regulasi

- Lemahnya perencanaan pembangunan
- Komitmen pelaksanaan RTRW
- Mekanisme penetapan UMP

Anggaran Pemerintah

- Terbatasnya penerimaan dan sumber pembiayaan pembangunan



**Inflasi
Inti**

Identifikasi Permasalahan Inflasi Inti

Sewa dan Kontrak Rumah			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Eksternal			Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
Ekspektasi inflasi	<ul style="list-style-type: none">• Kenaikan biaya hidup di pusat-pusat ekonomi• Kenaikan harga upah dan bahan bangunan		
Regulasi		<ul style="list-style-type: none">• Pertumbuhan ekonomi tidak merata• <i>Financial deepening, financial inclusion, financial literacy</i>: Rumah dan lahan sebagai sarana investasi (untuk memperoleh <i>capital gain</i>) dan penyimpanan aset	
Konsumsi		Tingginya permintaan rumah untuk tempat tinggal dan sarana investasi	
Struktur Anggaran Pemerintah		<ul style="list-style-type: none">• Keterbatasan keuangan daerah untuk menyediakan sarana perumahan dan transportasi publik yang murah dan layak	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

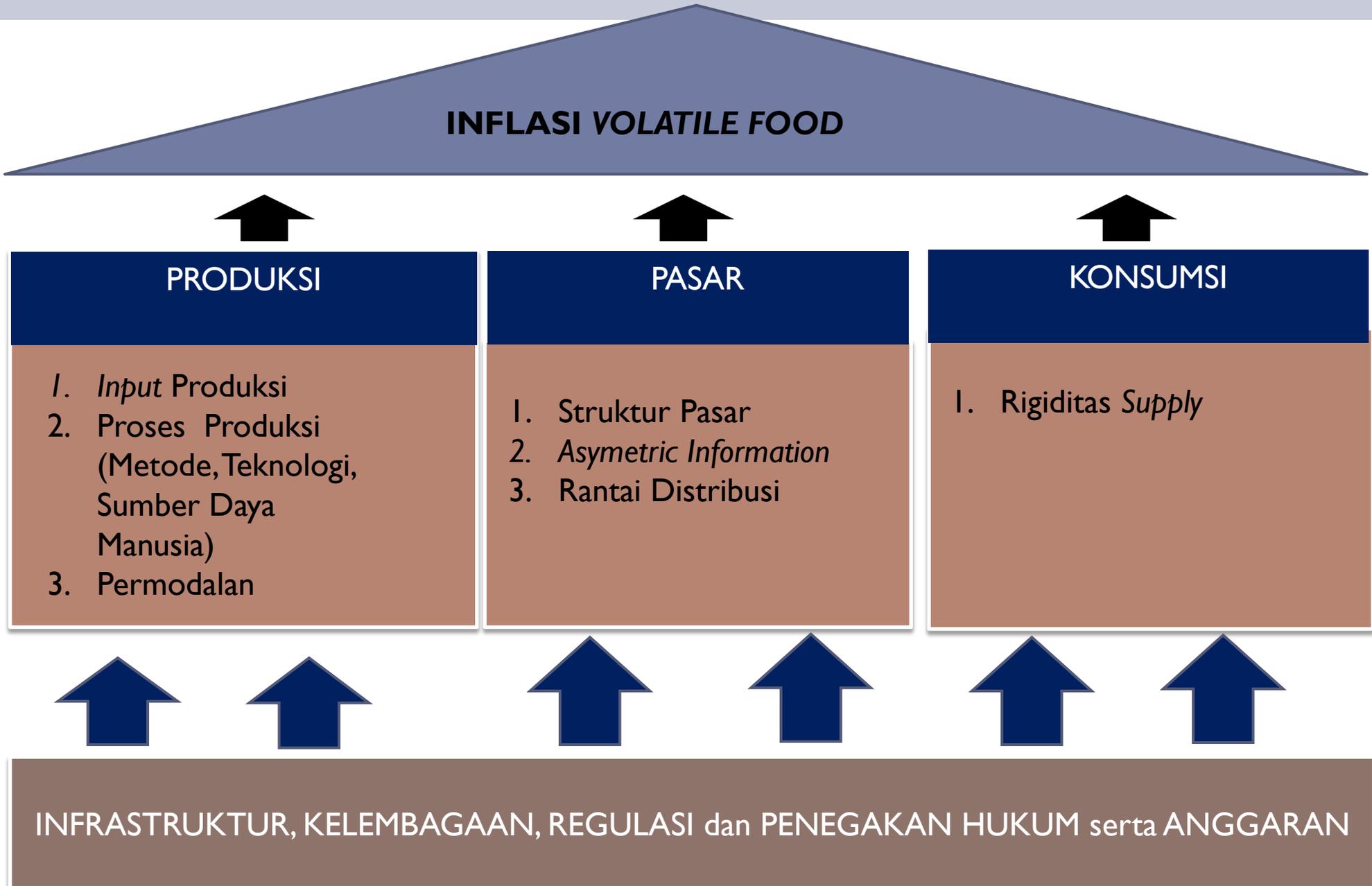
Fakta

1. Tingginya **risiko-risiko** produksi pertanian (musim, hama, keamanan)
2. **Infrastruktur:** sarana dan prasarana pertanian relatif kurang memadai (bendungan, irigasi, jalan, pupuk, alsintan/saprodi)
3. **Produksi:** Pengolahan produksi bahan pangan dan pertanian dilakukan secara tradisional oleh tenaga kerja yang mayoritas berusia kurang produktif.
4. **Akses:** Ketergantungan petani kepada tengkulak baik terkait pemasaran maupun permodalan
5. **Pasar** produksi pangan dan pertanian kurang menghasilkan pasar yang fair bagi produsen dan konsumen
6. **Regulasi** dan penegakan hukum terkait tataniaga, perijinan, keamanan kurang memberi insentif produksi.

Kondisi Ideal

1. Termitigasinya risiko-risiko produksi pertanian melalui langkah-langkah yang sistematis
2. Tersedianya sarana dan prasarana produksi pertanian yang layak
3. Pertanian dan produksi pangan dilakukan secara modern sehingga dihasilkan proses yang efisien dan *output* yang optimal
4. Pasar produk pangan dan pertanian memberikan keadilan bagi petani, pedagang/distributor dan konsumen
5. Ketersediaan pembiayaan bagi investasi pertanian
6. Adanya regulasi yang *fair*, khususnya terkait produksi, pasar dan investasi
7. Adanya intervensi pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*



Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Beras (I)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi	<ul style="list-style-type: none"> Gejolak harga dan produksi dampak El-Nino Gejolak harga dan produksi dampak La-Nina Belum optimalnya distribusi pupuk dan Alsintan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan Pertanian: Ketergantungan pembiayaan petani kepada tengkulak/rentenir dan kurang optimalnya dukungan perbankan Rendahnya teknologi pengolahan dan penyimpanan Penurunan kualitas/kesuburan lahan pertanian Alih Fungsi lahan SDM pertanian terbatas 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
Struktur Pasar	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tersedianya informasi produksi dan stok 	<ul style="list-style-type: none"> Posisi tawar petani dan konsumen cenderung lemah: Petani dan konsumen sebagai <i>price taker</i> Dugaan adanya kartel dalam penyediaan pupuk dan alsintan 	
Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan penyaluran raskin dan operasi pasar 	<ul style="list-style-type: none"> Validitas data penduduk miskin Tidak ada informasi akurat mengenai estimasi kebutuhan/permintaan Tidak ada data yang akurat mengenai ketersediaan produksi dan stok Manajemen <i>buffer stock</i> yang belum optimal 	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Beras (2)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Infrastruktur dan Logistik	<ul style="list-style-type: none">• Kenaikan biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM dan biaya suku cadang	<ul style="list-style-type: none">• Keterbatasan sarana irigasi dan bendungan• Jalan dan sarana transportasi• Tidak optimalnya fungsi jembatan timbang dan uji kelayakan moda transportasi• Gangguan keamanan dan Pungutan liar terhadap angkutan barang	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya fungsi Gapoktan dan Lembaga-lembaga pendamping pertanian	<ul style="list-style-type: none">• TPID hanya bersifat forum koordinasi dan tidak memiliki sumber daya yang fokus memastikan seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat dijalankan• Kurang optimalnya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam stabilisasi harga pangan daerah	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Beras (3)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Regulasi dan Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya tindakan hukum bagi pelanggaran RTRW• Belum optimalnya tindakan hukum bagi oknum yang menyelewengkan distribusi pupuk, dan saprodi• Belum ada insentif untuk mendorong investasi di bidang pertanian• Belum kondusifnya kemandirian		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
Anggaran	<ul style="list-style-type: none">• Keterbatasan kapasitas fiskal Pemerintah pusat dan daerah		

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Cabai Merah (I)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi	<ul style="list-style-type: none">• Dampak El-Nino di Pulau Jawa• Dampak La-Nina• Perdagangan ke luar wilayah	<ul style="list-style-type: none">• Ketergantungan terhadap cabai dari Jawa• Alih Fungsi lahan• SDM bidang pertanian yang terbatas• Pembiayaan Pertanian: Ketergantungan pembiayaan petani kepada tengkulak/rentenir dan kurang optimalnya dukungan perbankan	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Cabai Merah (2)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Struktur Pasar	<ul style="list-style-type: none">Tidak tersedianya informasi produksi dan stok	<ul style="list-style-type: none">Posisi tawar petani dan konsumen cenderung lemah: Petani dan konsumen sebagai <i>price taker</i>	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
Konsumsi	<ul style="list-style-type: none">Tidak tersedianya gudang penyimpanan dan ketergantungan terhadap komoditi cabai segarTidak ada informasi akurat mengenai estimasi kebutuhan/permintaan khususnya pada moment-moment tertentuTidak ada data yang akurat mengenai ketersediaan produksi dan stokManajemen <i>buffer stok</i> yang belum optimal		

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Cabai Merah (3)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Infrastruktur dan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM, avtur dan biaya suku cadang 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan sarana irigasi dan bendungan Jalan dan sarana transportasi Tidak optimalnya fungsi jembatan timbang dan uji kelayakan moda transportasi Gangguan keamanan dan Pungutan liar terhadap angkutan barang 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan benih, pupuk, dan obat-obatan Belum optimalnya fungsi Gapoktan dan Lembaga-lembaga pendamping pertanian TPID hanya bersifat forum koordinasi dan tidak memiliki sumber daya yang fokus memastikan seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat dijalankan Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam stabilisasi harga pangan daerah Lemahnya implementasi program ketahanan pangan (konsistensi pelaksanaan, evaluasi, dan standardisasi program) 		

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Cabai Merah (4)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Regulasi dan Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya tindakan hukum bagi pelanggaran RTRW• Belum ada tindakan hukum bagi pelaku penimbun/kartel pupuk, saprodi dan kartel saprodi• Belum ada insentif untuk mendorong investasi berskala besar di bidang pertanian• Belum kondusifnya keamanan jalan• Pungutan liar terhadap angkutan barang		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
Anggaran	<ul style="list-style-type: none">• Keterbatasan kapasitas fiskal pusat dan daerah		

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Daging Ayam Ras (I)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan harga DOC, vaksin, dan obat-obatan terkait dengan depresiasi rupiah Kenaikan harga jagung, pakan ternak ayam dan pembatasan impor DOC 	<ul style="list-style-type: none"> Ketergantungan pasokan DOC, vaksin, obat-obatan dan pakan ternak dari beberapa perusahaan besar Minimnya pembiayaan bagi peternak berskala kecil 	Sumatera Utara
Struktur Pasar	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tersedianya informasi produksi dan stok 	<ul style="list-style-type: none"> Minimnya industri peternakan ayam domestik berskala besar Minimnya persaingan industri peternakan ayam Tidak ada data yang akurat mengenai ketersediaan produksi dan stok 	
Konsumsi		<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada informasi akurat mengenai estimasi kebutuhan/permintaan 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Daging Ayam Ras (2)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Infrastruktur dan Logistik	<ul style="list-style-type: none">• Kenaikan biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM, avtur dan biaya suku cadang	<ul style="list-style-type: none">• Keterbatasan sarana air bersih• Jalan-jalan pedesaan dan sarana transportasi komoditas pertanian• Tidak optimalnya fungsi jembatan timbang dan uji kelayakan moda transportasi• Pungutan liar terhadap angkutan barang• Gangguan keamanan• Tidak terintegrasinya sistem transportasi angkutan barang	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Daging Ayam Ras (2)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Kelembagaan		<ul style="list-style-type: none">• TPID hanya bersifat forum koordinasi dan tidak memiliki sumber daya yang fokus memastikan seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat dijalankan• Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam stabilisasi harga pangan daerah	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
Regulasi dan Penegakan Hukum		<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya tindakan hukum bagi pelanggaran RTRW• Belum ada insentif untuk mendorong investasi di bidang pertanian• Belum kondusifnya kemandirian	
Anggaran		<ul style="list-style-type: none">• Keterbatasan kapasitas fiskal pusat dan daerah	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Daging Sapi (3)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan biaya logistik impor, pakan, vaksin, dan obat-obatan akibat depresiasi rupiah Pembatasan impor sapi Minimnya pembiayaan bagi peternakan sapi rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada insentif untuk mengembangkan ras sapi lokal Pembibitan sapi lokal tidak efisien: Harga bibit sapi lokal lebih mahal daripada harga impor 	<i>Feedloter</i> terbesar: Sumut, Lampung, Sumsel Peternakan Rakyat : Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
Struktur Pasar		<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan <i>feedloter</i> terindikasi melakukan praktik kartel Tidak ada data yang akurat mengenai ketersediaan produksi dan stok yang <i>reliable</i> 	
Konsumsi		<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada informasi akurat mengenai estimasi kebutuhan/permintaan 	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Daging Sapi (4)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Infrastruktur dan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM, avtur dan biaya suku cadang 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan sarana air bersih Jalan-jalan pedesaan dan sarana transportasi komoditas pertanian Tidak optimalnya fungsi jembatan timbang dan uji kelayakan moda transportasi Pungutan liar terhadap angkutan barang Gangguan keamanan Tidak terintegrasinya sistem transportasi angkutan barang 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak optimalnya pemanfaatan riset peternakan Kewenangan dan tanggung jawab lembaga yang bertindak sebagai <i>buffer stock</i> 		
Regulasi dan Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Revisi peraturan Nomor 42/Permentan/PP.040/7/2015 yang melarang impor sapi siap potong dan Kenaikan bea masuk daging-dagingan yang diolah dari 5% menjadi 30% 	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada insentif untuk mendorong investasi domestik berskala besar di bidang industri peternakan Gangguan keamanan 	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Daging Sapi (5)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Anggaran	<ul style="list-style-type: none">Keterbatasan kapasitas fiskal pusat dan daerah		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Bawang Merah (I)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi	<ul style="list-style-type: none"> Dampak El-Nino di Pulau Jawa Dampak La-Nina Ketergantungan terhadap musim Perdagangan ke luar wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Ketergantungan terhadap cabai dari Jawa Ketidaksesuaian kualitas/varietas dengan kondisi lahan SDM bidang pertanian yang terbatas Lemahnya inovasi produksi dan pengolahan pertanian 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
Struktur Pasar	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya stasiun terminal agribisnis Tidak ada data yang akurat mengenai ketersediaan produksi dan stok yang <i>reliable</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Rantai distribusi yang panjang Posisi tawar petani: Petani sebagai price taker Disparitas harga komoditi antar wilayah Belum terjadinya pola hubungan yang saling menguntungkan/<i>fair</i> antara petani, distributor, pedagang besar, dan end user Tidak tersedianya informasi produksi dan stok 	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Bawang Merah (2)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tersedianya gudang penyimpanan bawang yang memadai Tidak ada informasi akurat mengenai estimasi kebutuhan/permintaan Manajemen <i>buffer stock</i> yang belum optimal Rendahnya teknologi pengolahan dan penyimpanan 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
Infrastruktur dan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM, avtur dan biaya suku cadang 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan-jalan pedesaan dan sarana transportasi komoditas pertanian Tidak optimalnya fungsi jembatan timbang dan uji kelayakan moda transportasi Pungutan liar terhadap angkutan barang Gangguan keamanan Konektivitas antar wilayah belum terjadi Tidak terintegrasinya sistem transportasi angkutan barang 	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Bawang Merah (3)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">• Ketersediaan lembaga penyedia benih, pupuk, dan obat-obatan di sentra-sentra produksi• TPID hanya bersifat forum koordinasi dan tidak memiliki sumber daya yang fokus memastikan seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat dijalankan• Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam stabilisasi harga pangan daerah• Lemahnya implementasi program ketahanan pangan (konsistensi pelaksanaan, evaluasi, dan standarisasi program)		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Bawang Merah (4)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Regulasi dan Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya tindakan hukum bagi pelanggaran RTRW• Belum ada tindakan hukum bagi pelaku penimbun/kartel pupuk, saprodi dan kartel saprodi• Belum ada insentif untuk mendorong investasi berskala besar di bidang pertanian• Belum kondusifnya keamanan jalan		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
Anggaran	<ul style="list-style-type: none">• Keterbatasan kapasitas fiskal pusat dan daerah		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Administered Prices*

Fakta

1. Tingginya pengaruh eksternal dan politik terhadap kebijakan harga komoditi-komoditi yang harganya ditetapkan oleh pemerintah
2. Kebijakan kenaikan harga *administered prices* meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap meningkatnya inflasi
3. Kenaikan harga komoditi *administered prices* menjadi komponen utama peningkatkan harga komoditi-komoditi pada kelompok lainnya
4. Kebijakan subsidi harga pada komoditi-komoditi *administered prices* seringkali kurang mengenai sasaran

Kondisi Ideal

1. Adanya *public acceptance* serta termitigasinya risiko politik dan ekonomi pra dan paska pentapan harga
2. Terkelolanya ekspektasi inflasi sesuai dengan ekspektasi inflasi pemerintah
3. Kebijakan harga *administered prices* mendorong efisiensi produksi dan konsumsi
4. Kebijakan harga komoditi *administered prices* menjadi sarana pemerataan kegiatan ekonomi dan pendapatan

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Administered Prices*



Identifikasi Permasalahan Inflasi Administered Prices

Bensin			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> Harga minyak dunia dan kurs yang bergejolak, berpengaruh besar terhadap harga BBM domestik. 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
Produksi	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan harga minyak menurunkan minat eksplorasi 	<ul style="list-style-type: none"> Minimnya investasi untuk eksplorasi 	
Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> Pengurangan subsidi BBM dan <i>downward rigidity</i> harga BBM 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan PSC (<i>Production Sharing Contract</i>) dianggap kurang menarik Aturan perijinan dan perpajakan pusat dan daerah 	
Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan kendaraan pribadi yang relatif tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tersedianya transportasi publik yang memadai 	
Struktur Anggaran Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sumber penerimaan dan pembiayaan pemerintah Penentuan besaran subsidi dan proses penyusunan APBN sangat dipengaruhi dinamika politik 		

Identifikasi Permasalahan Inflasi Administered Prices

Tarif Listrik			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> Berlanjutnya depresiasi nilai tukar 	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan tarif listrik kemungkinan akan terus terjadi bila menggunakan 3 komponen (nilai tukar, inflasi, harga minyak) 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
Produksi	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya jumlah pembangkit listrik Keterbatasan anggaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan Penggunaan listrik secara illegal 		
Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan tarif listrik bulan Juni 2015 Penetapan tarif dasar listrik berdasarkan indikator kurs, harga minyak, dan inflasi 	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada skema pembebanan tarif yang mendorong efisiensi penggunaan listrik Ketidaksesuaian data rumah tangga miskin dan pengguna tarif listrik rumah tangga golongan 450 VA dan 900 VA Penggunaan listrik ilegal 	
Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan/konsumsi listrik yang tidak produktif 		
Struktur Anggaran Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya beban subsidi listrik golongan 450VA dan 900VA 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sumber penerimaan dan pembiayaan pemerintah Alokasi subsidi listrik tidak tepat sasaran 	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Administered Prices*

Angkutan Dalam Kota			Provinsi
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	
Eksternal			Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
Biaya Produksi			
Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian tarif angkutan kota seiring kenaikan harga BBM Rigiditas penurunan tarif angkutan dalam kota di saat terjadi penurunan harga BBM 	<ul style="list-style-type: none"> Aturan ijin trayek angkutan belum sepenuhnya dijalankan 	
Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tersedianya transportasi publik dalam kota yang murah dan layak 		
Struktur Anggaran Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan fiskal daerah untuk menyediakan sarana transportasi publik yang murah dan layak 		

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Administered Prices*

Angkutan Udara			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Eksternal			
Biaya Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Depresiasi nilai tukar rupiah meningkatkan biaya sewa pesawat, perawatan. • Tingginya harga avtur di bandara-bandara di wilayah Sumatera 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan kilang minyak Pertamina dalam memproduksi Avtur • Biaya logistik/angkut avtur ke sejumlah bandara 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kenaikan tarif batas atas dan batas bawah 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Concession fee</i>, PPN yang harus dibayarkan Pertamina ke pengelola bandara dan BPH Migas 	
Konsumsi			
Struktur Anggaran Pemerintah			

2.3 *Roadmap* Pengendalian Inflasi – Sumatera

Roadmap Pengendalian Inflasi Inti

Jangka Pendek

- Mendorong ekspektasi yang wajar seiring dengan peningkatan inflasi melalui peningkatan intensitas sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat
- Menyiapkan berbagai *enabler* pendukung dalam rangka penyusunan kebijakan terkait produksi, investasi, kelembagaan, dan infrastruktur (data dan informasi)

Jangka Menengah

- Mendorong ekspektasi positif mengenai perekonomian daerah
- Mendorong terciptanya inovasi terkait dengan kebijakan dan insentif dalam rangka meningkatkan investasi di daerah
- Pembangunan sarana dan prasarana dasar dan memberi dukungan maksimal bagi pembangunan infrastruktur nasional

Jangka Panjang

- Meningkatkan daya saing daerah

Roadmap Pengendalian Inflasi Inti

Sewa dan Kontrak Rumah (I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Ekspektasi Inflasi				
a. Kenaikan biaya hidup di pusat-pusat ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi TPID dalam upaya mencapai inflasi yang rendah dan stabil 		Standardisasi desain dan pola kerja, kewenangan dan koordinasi TPI/TPID	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
Regulasi				
a. Pertumbuhan ekonomi tidak merata b. <i>Financial deepening, financial inclusion, financial literacy</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pembangunan ekonomi daerah yang inklusif melalui program-program pemberdayaan sektor riil dan UMKM pengembangan ekonomi pedesaan pengembangan pertanian dan peternakan Mendorong peningkatan <i>financial literacy</i> dan aksesibilitas keuangan masyarakat Sosialisasi instrumen-instrumen keuangan 		Koordinasi BI dan OJK dalam program-program terkait <i>financial inclusion</i> dan <i>financial literacy</i>	
Konsumsi				
a. Tingginya permintaan rumah				

Roadmap Pengendalian Inflasi Inti

Sewa dan Kontrak Rumah (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Struktur Anggaran Pemerintah				
a. Keterbatasan keuangan daerah untuk menyediakan sarana perumahan dan transportasi publik yang murah dan layak	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong keterlibatan swasta dalam penyediaan sarana transportasi publik dan pemukiman• Pemetaan pengembangan wilayah yang melanggar RTRW			Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Jangka Pendek

- Mengantisipasi peningkatan risiko-risiko produksi akibat pengaruh musim dan gangguan alam lainnya
- Mengoptimalkan kelembagaan yang telah ada
- Menyiapkan berbagai *enabler* pendukung dalam rangka penyusunan kebijakan terkait produksi, investasi, kelembagaan, dan infrastruktur

Jangka Menengah

- Mendorong koordinasi pusat dan daerah dalam memitigasi risiko-risiko pertanian/pangan
- Penguatan kelembagaan yang telah ada
- Pembangunan sarana dan prasarana dasar dan memberi dukungan maksimal bagi pembangunan infrastruktur nasional

Jangka Panjang

- Evaluasi/penyempurnaan berbagai inisiatif dan kebijakan yang telah dihasilkan
- Mendorong peningkatan produksi pangan yang tidak hanya untuk menjaga stabilitas harga tetapi juga memberikan nilai tambah yang besar bagi perekonomian (hilirisasi produk pangan/pertanian)

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
a. Gejolak harga dan produksi dampak El-Nino	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program pompanisasi • Mendorong pembangunan Embung atau Dam Parit • Percepatan dan peningkatan intensitas operasi pasar BULOG dan distribusi raskin • Penyesuaian kalender tanam dan varietas yang digunakan • Perbaikan saluran irigasi • Memanfaatkan saluran komunikasi (radio, internet) untuk menyiarkan langkah taktis antisipasi dampak kekeringan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan gudang penyangga stok pangan (Lembaga Pangan Masyarakat/Gedung Pengendalian Inflasi) di wilayah-wilayah utama • Meningkatkan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka stabilisasi harga pangan (penyerapan dan distribusi beras DN) 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan realisasi impor beras dan peningkatan stok beras BULOG • Perbaikan mekanisme operasi pasar dan distribusi raskin • Pengembangan/penyediaan bibit dan benih padi unggul dan distribusi alsintan secara tepat waktu, tepat sasaran • Alokasi dana cadangan pangan bagi petani yang gagal panen akibat kekeringan. 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
b. Gejolak harga dan produksi dampak La-Nina	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pembangunan Embung atau Dam Parit Percepatan dan peningkatan intensitas operasi pasar BULOG dan distribusi raskin Penyesuaian kalender tanam dan varietas yang digunakan Perbaiki saluran irigasi Memanfaatkan saluran komunikasi (radio, internet) untuk menyiarkan langkah taktis antisipasi dampak banjir Alokasi dana cadangan pangan bagi petani yang mengalami gagal panen 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan gudang penyangga stok pangan (Lembaga Pangan Masyarakat/Gedung Pengendalian Inflasi) di wilayah-wilayah utama Meningkatkan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka stabilisasi harga pangan (penyerapan dan distribusi beras DN) Mendorong pola dan mekanisme mitigasi risiko pertanian, misalnya melalui pengkajian penerapan asuransi pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan realisasi impor beras dan peningkatan stok beras BULOG Perbaiki mekanisme operasi pasar dan distribusi raskin Pengembangan/penyediaan bibit dan benih padi unggul dan distribusi alsintan secara tepat waktu, tepat sasaran Alokasi dana cadangan pangan bagi petani yang gagal panen akibat banjir. 	

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (3)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
c. Belum optimalnya distribusi pupuk dan Alsintan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akurasi pendataan luas lahan pertanian, jumlah petani dan kelompok tani • Pelatihan penyusunan RDKK • Pendataan dan pemantauan agen-agen serta ketersediaan pupuk bersubsidi • Pelibatan TNI/Babinsa dalam pengawasan distribusi pupuk dan saprodi • Tindakan hukum bagi oknum yang menyelewengkan RDKK dan distribusi pupuk/alsintan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akurasi penyusunan RDKK • Standardisasi kelayakan gudang pupuk dan alsintan • Meningkatkan sistem pengawasan distribusi pupuk dan alsintan dengan melibatkan aparat TNI/babinsa • Meningkatkan sistem manajemen dan pengawasan terhadap Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), contoh melalui standardisasi dan audit prosedur layanan, kelayakan gudang, personil, dan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Akurasi penyusunan daftar acuan (<i>master list</i>) penyaluran pupuk dan alsintan • Peningkatan koordinasi antara Kementan, Pertani Persero, perusahaan alsintan dan Produsen Pupuk dalam menyusun mekanisme distribusi alsintan dan pupuk sehingga distribusi tepat waktu dan tepat sasaran 	

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (4)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
d. Pembiayaan Pertanian: Ketergantungan pembiayaan petani kepada tengkulak/rentenir dan kurang optimalnya dukungan perbankan	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi/legalisasi aset-aset pertanian Peningkatan <i>financial literacy</i>, akses keuangan petani termasuk terhadap KUR Pelatihan penyusunan proposal kredit pertanian bagi petani dan penyuluh pertanian (contoh pengembangan/<i>capacity building</i> bagi KKMB) Mendorong implementasi program kemitraan bisnis antara petani dan Perum BULOG 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya implementasi program kemitraan bisnis antara petani dengan Perum BULOG atau lembaga <i>buffer stock</i> lainnya secara optimal dan saling menguntungkan 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong jangkauan layanan perbankan dan sistem pembayaran Pengembangan skema pembiayaan yang tepat bagi petani (contoh menghidupkan kembali pola PHBK) Koordinasi antara BI dan OJK dalam kerangka program <i>financial inclusion</i> dan <i>financial literacy</i> 	

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (5)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
e. Rendahnya teknologi pengolahan dan penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Training of trainer</i> bagi tenaga penyuluh dan pendamping pertanian mengenai proses pengolahan dan penyimpanan produk pertanian serta mitigasi risiko pertanian • Pengenalan petani dan pendamping petani terhadap sistem, pertanian dan perlengkapan pertanian modern • Peningkatan <i>financial literacy</i> dan akses keuangan petani 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sistem manajemen dan pengawasan terhadap Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), contoh melalui standarisasi dan audit prosedur layanan, kelayakan gudang, personil, dan keuangan • Standardisasi gudang penyangga stok pangan (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat/Gedung Pengendalian Inflasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi penggunaan hasil riset pertanian domestik • Pengkajian kembali mengenai Rancangan Permentan mengenai keharusan divestasi asing hingga 30% untuk perusahaan hortikultura asing sebagai tindak lanjut UU No 13/2010 tentang hortikultura. 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (6)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
f. Penurunan kualitas /kesuburan lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan wilayah persawahan yang masih produktif dan tidak produktif • <i>Training of trainer</i> bagi tenaga penyuluh dan pendamping pertanian mengenai proses pengolahan dan penyimpanan produk pertanian serta mitigasi risiko pertanian • Optimalisasi Gapoktan/tenaga penyuluh dalam mengontrol penggunaan pupuk dan obat-obatan secara berlebihan 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Up-dating</i> RTRW • Mendorong pengembangan pertanian organik • Pengembangan kawasan pertanian modern terpadu (<i>farm estate</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan wilayah prioritas pengembangan sentra pertanian 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (7)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
g. Alih Fungsi lahan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fungsi rawa pasang surut dan lahan sawit tidak produktif Pemetaan wilayah persawahan yang masih produktif dan tidak produktif Mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mengalami alih fungsi lahan (peninjauan IMB individu/perusahaan yang disinyalir pelanggaran RT/RW) 	<ul style="list-style-type: none"> Tindakan hukum bagi pelanggaran RTRW <i>Up-dating</i> RTRW, disesuaikan dengan rencana pengembangan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Verifikasi prosedur peralihan fungsi lahan pertanian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 41/2009 dan PP. No. 1 2011 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (8)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
SDM pertanian terbatas tidak menariknya profesi di sektor pertanian serta kecilnya pendapatan petani	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi program SL-PTT • Pelibatan perguruan tinggi dalam mengevaluasi proses pengolahan pertanian dan penyimpanan hasil panen • Pengenalan petani dan pendamping petani terhadap sistem, pertanian dan perlengkapan pertanian modern • Sertifikasi/legalisasi aset-aset pertanian • Peningkatan <i>financial literacy</i> dan akses keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendirian sekolah-sekolah pertanian di sentra-sentra pertanian • Meningkatkan skala ekonomi produksi pertanian melalui peningkatan pembiayaan perbankan untuk investasi pertanian (perluasan lahan dan peralatan pertanian). • Membangun pola kemitraan yang saling menguntungkan antara petani, perusahaan hortikultura besar/asing dan lembaga <i>buffer stock</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong dan pemberian insentif bagi pelaku usaha pertanian • Penempatan sarjana penggerak pembangunan ke wilayah-wilayah yang menjadi sentra pertanian 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (9)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Struktur Pasar				
a. Tidak tersedianya informasi produksi dan stok	<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan/pendataan luas lahan produksi pertanian dan lahan siap panen, estimasi hasil panen secara berkala (bulanan) Pencatatan/pendataan stok cadangan beras BULOG/lembaga <i>buffer stock</i> lainnya dan distributor utama beras Membangun mekanisme pertukaran data dan informasi terkait produksi, stok dan konsumsi di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan data dan informasi mengenai produksi, stok, dan permintaan yang akurat dan <i>real time</i>. Publikasi data dan informasi mengenai produksi, stok, dan permintaan yang akurat dan <i>real time</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong Investigasi KPPU dan YLKI terhadap struktur pasar komoditi pertanian Pengayaan informasi PIHPS yang juga mencakup data produksi dan stok komoditi 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (10)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Struktur Pasar				
b. Posisi tawar petani dan konsumen cenderung lemah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan <i>financial literacy</i> dan akses keuangan petani • Pencatatan/pendataan stok cadangan beras BULOG/lembaga <i>buffer stock</i> lainnya dan distributor utama beras • Pemantauan ketersediaan stok di pasar-pasar, pelabuhan dan pergudangan utama secara periodik • Tindakan hukum bagi pelaku penimbunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya implementasi program kemitraan bisnis antara petani dengan Perum BULOG atau lembaga <i>buffer stock</i> lainnya secara optimal dan saling menguntungkan • Menciptakan sistem pemantauan terpadu mengenai ketersediaan stok barang di pelabuhan, pergudangan, distributor, dan pasar-pasar utama 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Investigasi KPPU dan YLKI terhadap struktur pasar komoditi pertanian • Pengayaan informasi PIHPS yang juga mencakup data produksi dan stok komoditi 	

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (I I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Struktur Pasar				
c. Dugaan adanya kartel dalam penyediaan pupuk dan alsintan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan dan pemantauan agen-agen dan ketersediaan pupuk bersubsidi • Pelibatan TNI/Babinsa dalam pengawasan distribusi pupuk dan saprodi • Memfasilitasi jaringan • Tindakan hukum bagi oknum yang menyelewengkan RDKK dan distribusi pupuk/alsintan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sistem manajemen dan pengawasan terhadap Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), contoh melalui standardisasi dan audit prosedur layanan, kelayakan gudang, personil, dan keuangan • Mendorong penyebaran keberadaan UPJA/Toko Tani di sentra-sentra produksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dan alsintan 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (12)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Konsumsi				
a. Keterlambatan penyaluran raskin dan operasi pasar	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan HPP Beras di awal tahun Peningkatan akurasi data penduduk miskin dalam rangka estimasi kebutuhan raskin Pelibatan Tim Koordinasi Raskin dalam TPID TPID memfasilitasi Unit Pengaduan sebagai bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat (TKRP) Meningkatkan akurasi estimasi kebutuhan beras sebagai dasar penyusunan SPA Pemprov/Pemkot/Pemkab mengalokasikan dana operasi pasar 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi gudang penyangga stok pangan (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat/Gedung Pengendalian Inflasi) dalam mendukung operasi pasar BULOG Meningkatkan kewenangan pemerintah daerah melalui Lembaga Pangan Masyarakat/Gedung pengendalian inflasi dalam rangka stabilisasi harga pangan (penyerapan dan distribusi beras DN) 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan dasar hukum yang menjamin kepastian hukum penggunaan APBD dalam rangka stabilisasi harga 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (13)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Konsumsi				
b. Validitas data penduduk miskin	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan basis data terpadu TNP2K untuk penyaluran raskin 	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi data kemiskinan untuk tujuan operasi Raskin dan program pengentasan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun basis data kemiskinan terpadu (antar K/L) yang menjadi dasar bagi semua program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan. 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
c. Tidak ada informasi akurat mengenai estimasi kebutuhan/permintaan beras	<ul style="list-style-type: none"> Membangun model estimasi kebutuhan beras bulanan yang didasari kondisi historis, perilaku, dan variabel-variabel ekonomi lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya model estimasi yang akurat mengenai kebutuhan pangan yang mampu mendeteksi kebutuhan secara periodik maupun musiman Penggunaan hasil estimasi sebagai dasar rencana distribusi maupun operasi pasar 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun sistem informasi kebutuhan pangan secara nasional 	

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (14)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Konsumsi				
d. Tidak ada data yang akurat mengenai ketersediaan produksi dan stok	<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan/pendataan luas lahan produksi pertanian dan lahan siap panen, estimasi hasil panen secara berkala (bulanan) Pencatatan/pendataan stok cadangan beras BULOG/lembaga <i>buffer stock</i> lainnya dan distributor utama beras Membangun mekanisme pertukaran data dan informasi terkait produksi, stok dan konsumsi di daerah Menyusun proyeksi produksi dan harga beras 	<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya informasi mengenai harga dan produksi yang dapat menjangkar perilaku konsumsi Diseminasi proyeksi produksi dan harga beras secara periodik 	Membangun sistem informasi terpadu pangan strategis yang mencakup produksi, stok, dan harga	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (15)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Konsumsi				
e. Fungsi <i>buffer stock</i> yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> Pemprov/Pemkot/Pemkab menganggarkan dana operasi pasar Optimalisasi penggunaan dana operasi pasar untuk mendukung operasi pasar BULOG Membangun mekanisme kerjasama teknis dan koordinasi antara pemerintah daerah dan BULOG dalam pelaksanaan operasi pasar Penguatan LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi gudang penyangga stok pangan (LDPM/Gedung Pengendalian Inflasi) dalam mendukung operasi pasar BULOG Meningkatkan kewenangan pemerintah daerah melalui Lembaga Pangan Masyarakat/ Gedung pengendalian inflasi dalam rangka stabilisasi harga pangan (penyerapan dan distribusi beras DN) 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan dasar hukum yang menjamin kepastian hukum penggunaan APBD dalam rangka stabilisasi harga 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (16)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Infrastruktur dan Logistik				
a. Kenaikan biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM dan biaya suku cadang	<ul style="list-style-type: none"> Mengalokasikan subsidi angkutan/transportasi bahan-bahan pangan Menjalin kerjasama dengan TNI untuk pendistribusian bahan-bahan kebutuhan pokok 		<ul style="list-style-type: none"> Stabilisasi nilai tukar rupiah Mendorong berkembangnya industri dan layanan suku cadang hingga ke daerah-daerah 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
b. Keterbatasan sarana irigasi dan bendungan	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pembangunan Embung atau Dam Parit Penggunaan anggaran secara optimal untuk pemeliharaan saluran irigasi Rehabilitasi saluran irigasi yang kurang optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana irigasi baru 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan waduk dan bendungan untuk mengairi daerah-daerah sentra produksi pangan sekaligus sebagai sumber energi. 	

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (17)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Infrastruktur dan Logistik				
c. Kelayakan jalan dan sarana transportasi komoditas pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong alokasi realisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur pedesaan Meningkatkan anggaran pemeliharaan dan pembangunan jalan Pemetaan regulasi pemerintah daerah yang menghambat pembangunan infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran produk pertanian Meningkatnya kualitas jalan desa, kota/kabupaten, dan Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan proses dan realisasi proyek-proyek infrastruktur nasional Realisasi Tol Laut Integrasi angkutan laut dengan transportasi kereta api Percepatan jalan tol trans Sumatera dan <i>double track</i> kereta 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
d. Tidak optimalnya fungsi jembatan timbang dan uji kelayakan moda transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan terhadap keberadaan jembatan timbang Penegakan hukum terhadap pelanggaran kapasitas muatan dan kelayakan kendaraan 			

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (18)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Infrastruktur dan Logistik				
d. Gangguan keamanan dan Pungutan liar terhadap angkutan barang	<ul style="list-style-type: none">Mengidentifikasi titik-titik rawan gangguan keamanan	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan dan Mendorong peningkatan jumlah aparat keamanan di wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai titik-titik rawan		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (19)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Kelembagaan				
a. Belum optimalnya fungsi Gapoktan dan Lembaga-lembaga pendamping pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kebutuhan <i>capacity building</i> petani dan kelompok petani (TNA) <i>Training of trainer</i> bagi tenaga penyuluh dan pendamping pertanian mengenai proses pengolahan dan penyimpanan produk pertanian serta mitigasi risiko pertanian Peningkatan <i>financial literacy</i>, akses keuangan petani termasuk terhadap KUR 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam pembinaan petani dan kelompok tani 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (20)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Kelembagaan				
b. TPID hanya bersifat forum koordinasi dan tidak memiliki sumber daya yang fokus memastikan seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat dijalankan	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi peran TPID sebagai sarana koordinasi rutin untuk mengevaluasi hasil pengendalian inflasi dan penyusunan langkah antisipasi ke depan Penyusunan program kerja TPID tahunan berdasarkan <i>roadmap</i> yang telah disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk pelaksana harian TPID yang di isi oleh tenaga-tenaga ahli dan bekerja secara penuh Penyusunan program kerja TPID tahunan berdasarkan <i>roadmap</i> yang telah disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan pencapaian inflasi dan pencapaian produksi sebagai <i>key performance indicator</i> keberhasilan pemerintah daerah 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
c. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam stabilisasi harga pangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Mengkaji payung hukum pelaksanaan operasi pasar pemerintah daerah. Mengkaji mekanisme dan mitigasi permasalahan pelaksanaan program cadangan pangan pemerintah 			

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (21)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Kelembagaan				
d. Lemahnya implementasi program ketahanan pangan (konsistensi pelaksanaan, evaluasi, dan standarisasi program)	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dan evaluasi program-program dan keberadaan kelembagaan ketahanan pangan yang telah dibentuk sebelumnya 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan penguatan kelembagaan yang telah ada dan secara konsisten menjalankan program-program ketahanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dan evaluasi program-program ketahanan pangan yang telah ada Pelaksanaan secara konsisten program-program ketahanan pangan 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (22)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Regulasi dan Penegakan Hukum				
a. Belum optimalnya tindakan hukum bagi pelanggaran RTRW	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mengalami alih fungsi lahan (peninjauan IMB individu/perusahaan yang disinyalir melanggar RTRW) 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong proses hukum pelanggaran RTRW 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
b. Belum optimalnya tindakan hukum bagi oknum yang menyelewengkan distribusi pupuk, dan saprodi	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan dan pemantauan agen-agen dan ketersediaan pupuk bersubsidi Pelibatan TNI/Babinsa dalam pengawasan distribusi pupuk dan saprodi Tindakan hukum bagi oknum yang menyelewengkan RDKK dan distribusi pupuk/alsintan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan agen-agen dan ketersediaan pupuk bersubsidi Pelibatan TNI/Babinsa dalam pengawasan distribusi pupuk dan saprodi Tindakan hukum bagi oknum yang menyelewengkan RDKK dan distribusi pupuk/alsintan 		

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (23)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Regulasi dan Penegakan Hukum				
c. Belum ada insentif untuk mendorong investasi di bidang pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan peraturan daerah yang menghambat investasi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan aturan perijinan dan perpajakan yang menjadi kewenangan daerah 	Sinkronisasi peraturan terkait perijinan diantara kementerian dan lembaga pusat dan daerah	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
d. Belum kondusifnya keamanan	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi titik-titik rawan gangguan keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan dan Mendorong peningkatan jumlah aparat keamanan di wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai titik-titik rawan 		

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (24)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Anggaran				
a. Keterbatasan kapasitas fiskal Pemerintah pusat dan daerah	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam pengendalian harga antar instansi di daerahMendorong partisipasi swasta dan instansi lainnya dalam upaya mendorong produksi dan stabilitas harga diantaranya melalui skema penyaluran CSR		<ul style="list-style-type: none">Optimalisasi penerimaan pajak dan sumber-sumber pembiayaan pembangunanPerbaiki struktur APBN yang masih didominasi oleh belanja pegawai	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
a. Dampak El-Nino	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program pompanisasi • Mendorong pembangunan Embung atau Dam Parit • Percepatan dan peningkatan intensitas operasi pasar BULOG/lembaga <i>buffer stock</i> lainnya • Penyesuaian kalender tanam dan varietas yang digunakan • Perbaiki saluran irigasi • Memanfaatkan saluran komunikasi (radio, internet) untuk menyiarkan langkah taktis antisipasi dampak kekeringan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan gudang penyangga stok pangan (Lembaga Pangan Masyarakat/Gedung Pengendalian Inflasi) di wilayah-wilayah utama • Meningkatkan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka stabilisasi harga pangan (penyerapan dan distribusi beras DN) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan cadangan stok termasuk melalui pelaksanaan impor • Tersedianya landasan hukum pelaksanaan operasi pasar BULOG untuk komoditas lain serta penguatan permodalan BULOG • Landasan hukum pelaksanaan operasi pasar oleh pemerintah daerah atau lembaga yang dibentuk pemerintah daerah 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
b. Dampak la Nina	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pembangunan Embung atau Dam Parit Percepatan dan peningkatan intensitas operasi pasar BULOG/lembaga <i>buffer stock</i> lainnya Penyesuaian kalender tanam dan varietas yang digunakan Perbaiki saluran irigasi Manfaatkan saluran komunikasi (radio, internet) untuk menyiarkan langkah taktis antisipasi dampak kekeringan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan gudang penyangga stok pangan (Lembaga Pangan Masyarakat/Gedung Pengendalian Inflasi) di wilayah-wilayah utama Meningkatkan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka stabilisasi harga pangan (penyerapan dan distribusi beras DN) 	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan cadangan stok termasuk melalui pelaksanaan impor Tersedianya landasan hukum pelaksanaan operasi pasar BULOG untuk komoditas lain serta penguatan permodalan BULOG Landasan hukum pelaksanaan operasi pasar oleh pemerintah daerah atau lembaga yang dibentuk pemerintah daerah 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (3)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
c. Perdagangan ke luar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Stasiun Terminal Agri (STA)/ pasar lelang agro • Memfasilitasi kemitraan petani cabai dengan distributor lokal • Membangun kerjasama antar TPID guna memfasilitasi kerjasama antar daerah dalam pemenuhan stok pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya pasokan dari petani-petani domestik 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur transportasi laut, darat, dan udara serta integrasi sistem angkutan barang 	Sumut, Bengkulu, Sumbar

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (4)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
d. Ketergantungan terhadap cabai dari Jawa	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan wilayah potensial untuk pengembangan cabai varietas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sumatera Pemetaan wilayah surplus-defisit cabai merah Pendataan importir (antar wilayah) dan distributor utama cabai di wilayah Sumatera Menjajaki kemungkinan kerjasama antara wilayah Jawa dan Sumatera dalam rangka penyediaan stok cabai Sumatera 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan varietas cabai yang sesuai dengan selera dan kesesuaian kondisi di Sumatera Pemantauan ketersediaan pasokan cabai 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sistem informasi stok pangan nasional yang akurat dan terkini Mempercepat proses <i>dwelling time</i> terutama untuk bahan kebutuhan pokok 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (5)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
e. Alih fungsi lahan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fungsi rawa pasang surut dan lahan sawit tidak produktif Pemetaan wilayah potensial untuk dikembangkan sebagai area pertanian Mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mengalami alih fungsi lahan (peninjauan IMB individu/perusahaan yang disinyalir pelanggaran RT/RW) 	<ul style="list-style-type: none"> Tindakan hukum bagi pelanggaran RTRW <i>Up-dating</i> RTRW, disesuaikan dengan rencana pengembangan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Verifikasi prosedur peralihan fungsi lahan pertanian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 41/2009 dan PP. No. 1 2011 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (6)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
f. SDM bidang pertanian yang terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi program SL-PTT • Pelibatan perguruan tinggi dalam mengevaluasi proses pengolahan pertanian dan penyimpanan hasil panen • Pengenalan petani dan pendamping petani terhadap sistem, pertanian dan perlengkapan pertanian modern • Sertifikasi/legalisasi aset-aset pertanian • Peningkatan <i>financial literacy</i> dan akses keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendirian sekolah-sekolah pertanian di sentra-sentra pertanian • Meningkatkan skala ekonomi produksi pertanian melalui peningkatan pembiayaan perbankan untuk investasi pertanian (perluasan lahan dan peralatan pertanian). • Membangun pola kemitraan yang saling menguntungkan antara petani, perusahaan hortikultura besar/asing dan lembaga <i>buffer stock</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong dan pemberian insentif bagi pelaku usaha pertanian • Penempatan sarjana penggerak pembangunan ke wilayah-wilayah yang menjadi sentra pertanian 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (7)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
g. Pembiayaan Pertanian: Ketergantungan pembiayaan petani kepada tengkulak/rentenir dan kurang optimalnya dukungan perbankan	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi/legalisasi aset-aset pertanian Peningkatan <i>financial literacy</i>, akses keuangan petani termasuk terhadap KUR Pelatihan penyusunan proposal kredit pertanian bagi petani dan penyuluh pertanian (contoh pengembangan/<i>capacity building</i> bagi KKMB) Mendorong implementasi program kemitraan bisnis antara petani dan Perum BULOG 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya implementasi program kemitraan bisnis antara petani dengan perum BULOG atau lembaga <i>buffer stock</i> lainnya secara optimal dan saling menguntungkan 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong jangkauan layanan perbankan dan sistem pembayaran Pengembangan skema pembiayaan yang tepat bagi petani (contoh menghidupkan kembali pola PHBK) Koordinasi antara BI dan OJK dalam kerangka program <i>financial inclusion</i> dan <i>financial literacy</i> 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (8)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Struktur Pasar				
a. Tidak tersedianya informasi produksi dan stok	<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan/pendataan luas lahan produksi pertanian dan lahan siap panen, estimasi hasil panen secara berkala (bulanan) Pencatatan/pendataan stok cadangan BULOG/lembaga <i>buffer stock</i> lainnya dan distributor utama Membangun mekanisme pertukaran data dan informasi terkait produksi, stok dan konsumsi di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan data dan informasi mengenai produksi, stok, dan permintaan yang akurat dan <i>real time</i>. Publikasi data dan informasi mengenai produksi, stok, dan permintaan yang akurat dan <i>real time</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengayaan informasi PIHPS yang juga mencakup data produksi dan stok komoditi 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (9)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Struktur Pasar				
b. Posisi tawar petani dan konsumen cenderung lemah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan <i>financial literacy</i> dan akses keuangan petani • Pencatatan dan pendataan hasil produksi secara akurat dan terkini • Pemantauan ketersediaan stok di pasar-pasar, pelabuhan dan pergudangan utama secara akurat dan terkini 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya implementasi program kemitraan bisnis antara petani dengan Perum BULOG atau lembaga <i>buffer stock</i> lainnya secara optimal dan saling menguntungkan • Menciptakan sistem pemantauan terpadu mengenai ketersediaan stok barang di pelabuhan, pergudangan, distributor, dan pasar-pasar utama 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Investigasi KPPU dan YLKI terhadap struktur pasar komoditi pertanian • Pengayaan informasi PIHPS yang juga mencakup data produksi dan stok komoditi 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi *Volatile Food*

Cabai Merah (10)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Konsumsi				
a. Ketergantungan terhadap komoditi cabai segar	<ul style="list-style-type: none"> Pengenalan dan pengadaan teknologi pengolahan cabai (abon, pengeringan cabai) Sosialisasi dan melaksanakan kawasan Rumah Pangan Lestari (RPL) 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan gudang penyangga stok pangan (Lembaga Pangan Masyarakat/Gedung Pengendalian Inflasi) di wilayah-wilayah utama Menetapkan standar minimal gudang penyimpanan bahan pangan Meningkatkan sistem manajemen dan pengawasan terhadap pergudangan lembaga <i>buffer stock</i> 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (II)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Konsumsi				
<p>b. Tidak ada informasi akurat mengenai estimasi kebutuhan/permintaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Membangun model estimasi kebutuhan beras bulanan yang didasari kondisi historis, perilaku, dan variabel-variabel ekonomi lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya model estimasi yang akurat mengenai kebutuhan pangan yang mampu mendeteksi kebutuhan secara periodik maupun musiman Penggunaan hasil estimasi sebagai dasar rencana distribusi maupun operasi pasar 	<p>Membangun sistem informasi terpadu pangan strategis yang mencakup produksi, stok, dan harga</p>	<p>Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung</p>

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (12)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Konsumsi				
c. Tidak ada data yang akurat mengenai ketersediaan produksi dan stok	<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan/pendataan luas lahan produksi pertanian dan lahan siap panen, estimasi hasil panen secara berkala (bulanan) Pencatatan/pendataan stok cadangan beras BULOG/lembaga <i>buffer stock</i> lainnya dan distributor utama cabai Membangun mekanisme pertukaran data dan informasi terkait produksi, stok dan konsumsi di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan data dan informasi mengenai produksi, stok, dan permintaan yang akurat dan <i>real time</i>. Publikasi data dan informasi mengenai produksi, stok, dan permintaan yang akurat dan <i>real time</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong Investigasi KPPU dan YLKI terhadap struktur pasar komoditi pertanian Pengayaan informasi PIHPS yang juga mencakup data produksi dan stok komoditi 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (13)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Konsumsi				
d. Fungsi <i>buffer stock</i> yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> Pemprov/Pemkot/Pemkab mengalokasikan dana operasi pasar Optimalisasi penggunaan dana operasi pasar untuk mendukung operasi pasar BULOG Membangun mekanisme kerjasama teknis dan koordinasi antara pemerintah daerah dan BULOG dalam pelaksanaan operasi pasar Penguatan LDPM (lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi gudang penyangga stok pangan (Lembaga Pangan Masyarakat/Gedung Pengendalian Inflasi) dalam mendukung operasi pasar BULOG Meningkatkan kewenangan pemerintah daerah melalui Lembaga Pangan Masyarakat/Gedung pengendalian inflasi dalam rangka stabilisasi harga pangan (penyerapan dan distribusi beras DN) 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (14)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Infrastruktur dan Logistik				
a. Kenaikan biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM dan biaya suku cadang	<ul style="list-style-type: none"> Mengalokasikan subsidi angkutan/transportasi bahan-bahan pangan Menjalin kerjasama dengan TNI untuk pendistribusian bahan-bahan kebutuhan pokok 		<ul style="list-style-type: none"> Stabilisasi nilai tukar rupiah Mendorong berkembangnya industri dan layanan suku cadang hingga ke daerah-daerah 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
b. Keterbatasan sarana irigasi dan bendungan	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pembangunan Embung atau Dam Parit Penggunaan anggaran secara optimal untuk pemeliharaan saluran irigasi Rehabilitasi saluran irigasi yang kurang optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana irigasi di tiap kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan waduk dan bendungan untuk mengairi daerah-daerah sentra produksi pangan sekaligus sebagai sumber energi. 	

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (15)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Infrastruktur dan Logistik				
c. Kelayakan jalan dan sarana transportasi komoditas pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong alokasi realisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur pedesaan Meningkatkan anggaran pemeliharaan dan pembangunan jalan Pemetaan regulasi pemerintah daerah yang menghambat pembangunan infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran produk pertanian Meningkatnya kualitas jalan desa, kota/kabupaten, dan Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan proses dan realisasi proyek-proyek infrastruktur nasional Realisasi Tol laut Integrasi angkutan laut dengan transportasi kereta api Percepatan jalan tol trans Sumatera dan <i>double track</i> kereta 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
d. Tidak optimalnya fungsi jembatan timbang dan uji kelayakan moda transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan terhadap keberadaan jembatan timbang Penegakan hukum terhadap pelanggaran kapasitas muatan dan kelayakan kendaraan 			

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (16)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Infrastruktur dan Logistik				
e. Gangguan keamanan dan Pungutan liar terhadap angkutan barang	<ul style="list-style-type: none">Mengidentifikasi titik-titik rawan gangguan keamanan	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan dan Mendorong peningkatan jumlah aparat keamanan di wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai titik-titik rawan		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (17)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Infrastruktur dan Logistik				
f. Konektivitas antar wilayah dan tidak terintegrasinya sistem transportasi angkutan barang			<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan proses dan realisasi proyek-proyek infrastruktur nasional • Realisasi Tol Laut • Integrasi angkutan laut dengan transportasi kereta api • Percepatan jalan tol trans Sumatera dan <i>double track</i> kereta 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (18)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Kelembagaan				
a. Ketersediaan lembaga penyedia benih, pupuk, dan obat-obatan di sentra-sentra produksi	<ul style="list-style-type: none">• Pendataan dan pemantauan agen-agen dan ketersediaan alsintan• Mendorong jangkauan distribusi alsintan (UPJA) ke sentra-sentra pertanian	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan sistem manajemen dan pengawasan terhadap Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), contoh melalui standardisasi dan pelatihan serta audit prosedur layanan, kelayakan gudang, personil, dan keuangan		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (19)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Kelembagaan				
b. Belum optimalnya fungsi Gapoktan dan Lembaga-lembaga pendamping pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kebutuhan capacity building petani dan kelompok petani (TNA) • <i>Training of trainer</i> bagi tenaga penyuluh dan pendamping pertanian mengenai proses pengolahan dan penyimpanan produk pertanian serta mitigasi risiko pertanian • Peningkatan <i>financial literacy</i>, akses keuangan petani termasuk terhadap KUR 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam pembinaan petani dan kelompok tani 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (20)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Kelembagaan				
c. TPID hanya bersifat forum koordinasi dan tidak memiliki sumber daya yang fokus memastikan seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat dijalankan	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi peran TPID sebagai sarana koordinasi rutin untuk mengevaluasi hasil pengendalian inflasi dan penyusunan langkah antisipasi ke depan • Penyusunan program kerja TPID tahunan berdasarkan <i>roadmap</i> yang telah disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk pelaksana harian TPID yang di isi oleh tenaga-tenaga ahli dan bekerja secara penuh • Penyusunan program kerja TPID tahunan berdasarkan <i>roadmap</i> yang telah disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan pencapaian inflasi dan pencapaian produksi sebagai <i>key performance indicator</i> keberhasilan pemerintah daerah 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
d. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam stabilisasi harga pangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji payung hukum pelaksanaan operasi pasar pemerintah daerah. • Mengkaji mekanisme dan mitigasi permasalahan pelaksanaan program cadangan pangan pemerintah 			

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (21)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Kelembagaan				
e. Lemahnya implementasi program ketahanan pangan (konsistensi pelaksanaan, evaluasi, dan standardisasi program)	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dan evaluasi program-program ketahanan pangan yang telah ada (LDPM) 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan secara konsisten program-program ketahanan pangan 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (22)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Regulasi dan Penegakan Hukum				
a. Belum optimalnya tindakan hukum bagi pelanggaran RTRW	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mengalami alih fungsi lahan (peninjauan IMB individu/perusahaan yang disinyalir melanggar RTRW) 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong proses hukum pelanggaran RTRW 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
b. Belum optimalnya tindakan hukum bagi oknum yang menyelewengkan distribusi pupuk, dan saprodi	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan dan pemantauan agen-agen dan ketersediaan pupuk bersubsidi Pelibatan TNI/Babinsa dalam pengawasan distribusi pupuk dan saprodi Tindakan hukum bagi oknum yang menyelewengkan RDKK dan distribusi pupuk/alsintan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan agen-agen dan ketersediaan pupuk bersubsidi Pelibatan TNI/Babinsa dalam pengawasan distribusi pupuk dan saprodi Tindakan hukum bagi oknum yang menyelewengkan RDKK dan distribusi pupuk/alsintan 		

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (23)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Regulasi dan Penegakan Hukum				
c. Belum ada insentif untuk mendorong investasi di bidang pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan peraturan daerah yang menghambat investasi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan aturan perijinan dan perpajakan yang menjadi kewenangan daerah 	Sinkronisasi peraturan terkait perijinan diantara kementerian dan lembaga	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
d. Belum kondusifnya keamanan	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi titik-titik rawan gangguan keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan dan mendorong peningkatan jumlah aparat keamanan di wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai titik-titik rawan 		

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah (24)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Anggaran				
a. Keterbatasan kapasitas fiskal Pemerintah pusat dan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam pengendalian harga antar instansi di daerah Mendorong partisipasi swasta dan instansi lainnya dalam upaya mendorong produksi dan stabilitas harga diantaranya melalui skema penyaluran CSR 		<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi penerimaan pajak dan sumber-sumber pembiayaan pembangunan Perbaikan belanja APBN yang masih didominasi oleh belanja pegawai 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
a. Peningkatan harga DOC, vaksin, dan obat-obatan terkait dengan depresiasi rupiah	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan kajian pengembangan budidaya ayam kampung • Pemanfaatan teknologi pembuatan pakan dan obat-obatan tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan <i>cluster</i> ayam kampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilisasi nilai tukar • Akurasi <i>timing</i> peluncuran kebijakan terkait impor bahan terkait pangan 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
b. Kenaikan harga jagung, pakan ternak ayam dan pembatasan impor DOC	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi pembuatan pakan dan obat-obatan tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi hubungan bisnis antara petani jagung dengan pengusaha pakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Akurasi <i>timing</i> peluncuran kebijakan terkait impor bahan terkait pangan 	
c. Ketergantungan pasokan DOC, vaksin, obat-obatan dan pakan ternak dari beberapa perusahaan besar	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji kelayakan usaha peternakan ayam dengan pola inti-plasma 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun pola kemitraan yang saling menguntungkan • Mendorong berkembangnya jumlah perusahaan inti peternakan ayam ras 	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilisasi nilai tukar • Mendorong berkembangnya industri peternakan ayam dalam negeri. 	Sumut

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
d. Minimnya pembiayaan bagi peternak berskala kecil	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi/legalisasi aset-aset pertanian Peningkatan <i>financial literacy</i>, akses keuangan petani termasuk terhadap KUR Pelatihan penyusunan proposal kredit pertanian bagi petani dan penyuluh pertanian (contoh pengembangan/<i>capacity building</i> bagi KKMB) Mendorong implementasi program kemitraan bisnis yang saling menguntungkan 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya implementasi program kemitraan bisnis antara petani dengan perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong jangkauan layanan perbankan dan sistem pembayaran Pengembangan skema pembiayaan yang tepat bagi petani (contoh menghidupkan kembali pola PHBK) Koordinasi antara BI dan OJK dalam kerangka program <i>financial inclusion</i> dan <i>financial literacy</i> 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Struktur Pasar				
a. Tidak tersedianya informasi produksi dan stok	<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan/pendataan produksi peternakan ayam ras Membangun mekanisme pertukaran data dan informasi terkait produksi, stok dan konsumsi di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan data dan informasi mengenai produksi, stok, dan permintaan yang akurat dan <i>real time</i>. Publikasi data dan informasi mengenai produksi, stok, dan permintaan yang akurat dan <i>real time</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengayaan informasi PIHPS yang juga mencakup data produksi dan stok komoditi 	Sumut
b. Minimnya industri peternakan ayam domestik berskala besar	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian dan kajian pengembangan budidaya ayam kampung Pemanfaatan teknologi pembuatan pakan dan obat-obatan tradisional Pemanfaatan teknologi pembuatan pakan dan obat-obatan tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan <i>cluster</i> ayam kampung 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (3)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Struktur Pasar				
c. Minimnya persaingan industri peternakan ayam	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan peraturan daerah yang menghambat investasi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan aturan perijinan dan perpajakan yang menjadi kewenangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi peraturan terkait perijinan diantara kementerian dan lembaga Investigasi struktur pasar industri peternakan Ayam ras di Indonesia (KPPU) 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (4)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Konsumsi				
a. Tidak ada informasi akurat mengenai estimasi kebutuhan/permintaan	<ul style="list-style-type: none"> Membangun dasar estimasi kebutuhan pangan yang akurat 	<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya model estimasi yang akurat mengenai kebutuhan pangan yang mampu mendeteksi kebutuhan secara periodik maupun musiman Penggunaan hasil estimasi sebagai dasar rencana distribusi maupun operasi pasar maupun kebijakan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun sistem informasi pangan nasional terpadu (Produksi, stok, harga) 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (5)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Infrastruktur dan Logistik				
a. Kenaikan biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM dan biaya suku cadang	<ul style="list-style-type: none"> Mengalokasikan subsidi angkutan/transportasi bahan-bahan pangan Menjalin kerjasama dengan TNI untuk pendistribusian bahan-bahan kebutuhan pokok 		<ul style="list-style-type: none"> Stabilisasi nilai tukar rupiah Mendorong berkembangnya industri dan layanan suku cadang hingga ke daerah-daerah 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
b. Keterbatasan sarana irigasi dan bendungan	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan anggaran secara optimal untuk pemeliharaan saluran irigasi Rehabilitasi saluran irigasi yang kurang optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana irigasi di tiap kecamatan Penyediaan sarana air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan waduk dan bendungan untuk mengairi daerah-daerah sentra produksi pangan sekaligus sebagai sumber energi. 	

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (6)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Infrastruktur dan Logistik				
c. Kelayakan jalan dan sarana transportasi komoditas pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong alokasi realisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur pedesaan Meningkatkan anggaran pemeliharaan dan pembangunan jalan Pemetaan regulasi pemerintah daerah yang menghambat pembangunan infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran produk pertanian Meningkatnya kualitas jalan desa, kota/kabupaten, dan Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan proses dan realisasi proyek-proyek infrastruktur nasional Realisasi Tol Laut Integrasi angkutan laut dengan transportasi kereta api Percepatan jalan tol trans Sumatera dan <i>double track</i> kereta 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
d. Tidak optimalnya fungsi jembatan timbang dan uji kelayakan moda transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan terhadap keberadaan jembatan timbang (sidak) Penegakan hukum terhadap pelanggaran kapasitas muatan dan kelayakan kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan terhadap keberadaan jembatan timbang (sidak) Penegakan hukum terhadap pelanggaran kapasitas muatan dan kelayakan kendaraan 		

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (7)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Infrastruktur dan Logistik				
e. Gangguan keamanan dan Pungutan liar terhadap angkutan barang	<ul style="list-style-type: none">Mengidentifikasi titik-titik rawan gangguan keamanan	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan dan mendorong peningkatan jumlah aparat keamanan di wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai titik-titik rawan		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (8)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Infrastruktur dan Logistik				
f. Konektivitas antar wilayah dan tidak terintegrasinya sistem transportasi angkutan barang			<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan proses dan realisasi proyek-proyek infrastruktur nasional • Realisasi Tol Laut • Integrasi angkutan laut dengan transportasi kereta api • Percepatan jalan tol trans Sumatera dan <i>double track</i> kereta 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (9)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Kelembagaan				
a. Belum optimalnya fungsi Gapoktan dan Lembaga-lembaga pendamping	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan <i>financial literacy</i>, akses keuangan peternak dan pendamping termasuk terhadap KUR 	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman yang komprehensif peternak, pendamping dan perbankan mengenai aspek teknis dan pembiayaan 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
b. TPID hanya bersifat forum koordinasi dan tidak memiliki sumber daya yang fokus memastikan seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat dijalankan	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi peran TPID sebagai sarana koordinasi rutin untuk mengevaluasi hasil pengendalian inflasi dan penyusunan langkah antisipasi ke depan Penyusunan program kerja TPID tahunan berdasarkan <i>roadmap</i> yang telah disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk pelaksana harian TPID yang di isi oleh tenaga-tenaga ahli dan bekerja secara penuh Penyusunan program kerja TPID tahunan berdasarkan <i>roadmap</i> yang telah disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan pencapaian inflasi dan pencapaian produksi sebagai <i>key performance indicator</i> keberhasilan pemerintah daerah 	

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (10)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Kelembagaan				
c. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam stabilisasi harga pangan daerah	<ul style="list-style-type: none">Mengkaji payung hukum pelaksanaan operasi pasar pemerintah daerah.Mengkaji mekanisme dan mitigasi permasalahan pelaksanaan program cadangan pangan pemerintah			Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (I I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Regulasi dan Penegakan Hukum				
a. Belum optimalnya tindakan hukum bagi pelanggaran RTRW	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mengalami alih fungsi lahan (peninjauan IMB individu/perusahaan yang disinyalir melanggar RTRW) 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong proses hukum pelanggaran RTRW 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
b. Belum ada insentif untuk mendorong investasi di bidang pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan peraturan daerah yang menghambat investasi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan aturan perijinan dan perpajakan yang menjadi kewenangan daerah 	Sinkronisasi peraturan terkait perijinan diantara kementerian dan lembaga	
c. Belum kondusifnya keamanan	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi titik-titik rawan gangguan keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan dan Mendorong peningkatan jumlah aparat keamanan di wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai titik-titik rawan 		

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (12)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Anggaran				
a. Keterbatasan kapasitas fiskal Pemerintah pusat dan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam pengendalian harga antar instansi di daerah Mendorong partisipasi swasta dan instansi lainnya dalam upaya mendorong produksi dan stabilitas harga diantaranya melalui skema penyaluran CSR 		<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi penerimaan pajak dan sumber-sumber pembiayaan pembangunan Perbaiki belanja APBN yang masih didominasi oleh belanja pegawai 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Sapi (I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
a. Kenaikan biaya impor sapi, pakan dan obat-obatan akibat depresiasi rupiah	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan kajian potensi pengembangan budidaya sapi lokal • Pemanfaatan teknologi pembuatan pakan dan obat-obatan 		<ul style="list-style-type: none"> • Stabilisasi nilai tukar 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
b. Pembatasan impor sapi	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Sentra-sentra Peternakan Rakyat (SPR) • <i>Mapping</i> wilayah-wilayah yang dapat dikembangkan sebagai SPR • Mendorong implementasi pola peternakan Sapi-Sawit 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan skema peternakan Sapi-Sawit • Mendorong berkembangnya usaha pembibitan sapi di sekitar SPR • Pengembangan SPR di wilayah-wilayah yang potensial 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan sistem sertifikasi sapi bibit 	

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Sapi (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
b. Minimnya pembiayaan sapi rakyat	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi/legalisasi aset-aset pertanian Peningkatan <i>financial literacy</i>, akses keuangan petani termasuk terhadap KUR Pelatihan penyusunan proposal kredit pertanian bagi petani dan penyuluh pertanian (contoh pengembangan/<i>capacity building</i> bagi KKMB) 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun pola peternakan sapi melalui skema CSR 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Sapi (3)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Struktur Pasar				
a. Perusahaan <i>feedloter</i> terindikasi melakukan praktik kartel	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan <i>monitoring</i> terhadap keberadaan <i>feedloter</i> Pendataan secara berkala stok dan proyeksi daging sapi yang dihasilkan 		<ul style="list-style-type: none"> Investigasi KPPU 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
b. Tidak ada data yang akurat mengenai ketersediaan produksi dan stok yang <i>reliable</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan/pendataan produksi peternakan Membangun mekanisme pertukaran data dan informasi terkait produksi, stok dan konsumsi di wilayah lain 	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan data dan informasi mengenai produksi, stok, dan permintaan yang akurat dan <i>real time</i>. Publikasi data dan informasi mengenai produksi, stok, dan permintaan yang akurat dan <i>real time</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengayaan informasi PIHPS yang juga mencakup data produksi dan stok komoditi 	

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Sapi (4)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Konsumsi				
a. Tidak ada data yang akurat mengenai ketersediaan produksi dan stok yang <i>reliable</i>	<ul style="list-style-type: none"> Membangun dasar estimasi kebutuhan pangan yang akurat 	<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya model estimasi yang akurat mengenai kebutuhan pangan yang mampu mendeteksi kebutuhan secara periodik maupun musiman Penggunaan hasil estimasi sebagai dasar rencana distribusi maupun operasi pasar serta kebijakan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun sistem informasi pangan nasional terpadu (produksi, stok, harga) 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Sapi (5)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Infrastruktur dan Logistik				
a. Kenaikan biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM dan biaya suku cadang	<ul style="list-style-type: none"> Mengalokasikan subsidi angkutan/transportasi bahan-bahan pangan Menjalin kerjasama dengan TNI untuk pendistribusian bahan-bahan kebutuhan pokok 		<ul style="list-style-type: none"> Stabilisasi nilai tukar rupiah Mendorong berkembangnya industri dan layanan suku cadang hingga ke daerah-daerah 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
b. Kelayakan jalan dan sarana transportasi komoditas pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong alokasi realisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur pedesaan Meningkatkan anggaran pemeliharaan dan pembangunan jalan Pemetaan regulasi pemerintah daerah yang menghambat pembangunan infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran produk pertanian Meningkatnya kualitas jalan desa, kota/ kabupaten, dan Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan proses dan realisasi proyek-proyek infrastruktur nasional Realisasi Tol Laut Integrasi angkutan laut dengan transportasi kereta api Percepatan jalan tol trans Sumatera dan <i>double track</i> kereta 	

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Sapi (6)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Infrastruktur dan Logistik				
c. Tidak optimalnya fungsi jembatan timbang dan uji kelayakan moda transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan terhadap keberadaan jembatan timbang (sidak) Penegakan hukum terhadap pelanggaran kapasitas muatan dan kelayakan kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan terhadap keberadaan jembatan timbang (sidak) Penegakan hukum terhadap pelanggaran kapasitas muatan dan kelayakan kendaraan 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
e. Gangguan keamanan dan Pungutan liar terhadap angkutan barang	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi titik-titik rawan gangguan keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan dan Mendorong peningkatan jumlah aparat keamanan di wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai titik-titik rawan 		

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Sapi (7)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Infrastruktur dan Logistik				
f. Konektivitas antar wilayah dan tidak terintegrasinya sistem transportasi angkutan barang			<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan proses dan realisasi proyek-proyek infrastruktur nasional • Realisasi Tol Laut • Integrasi angkutan laut dengan transportasi kereta api • Percepatan jalan tol trans Sumatera dan <i>double track</i> kereta 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Sapi (8)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Kelembagaan				
a. Belum optimalnya fungsi Gapoktan dan lembaga-lembaga pendamping	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan <i>financial literacy</i>, akses keuangan peternak dan pendamping termasuk terhadap KUR 	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman yang komprehensif peternak, pendamping dan perbankan mengenai aspek teknis dan pembiayaan 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
b. TPID hanya bersifat forum koordinasi dan tidak memiliki sumber daya yang fokus memastikan seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat dijalankan	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi peran TPID sebagai sarana koordinasi rutin untuk mengevaluasi hasil pengendalian inflasi dan penyusunan langkah antisipasi ke depan Penyusunan program kerja TPID tahunan berdasarkan <i>roadmap</i> yang telah disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk pelaksana harian TPID yang di isi oleh tenaga-tenaga ahli dan bekerja secara penuh Penyusunan program kerja TPID tahunan berdasarkan <i>roadmap</i> yang telah disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan pencapaian inflasi dan pencapaian produksi sebagai <i>key performance indicator</i> keberhasilan pemerintah daerah 	

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Sapi (9)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Kelembagaan				
c. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam stabilisasi harga pangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Mengkaji payung hukum pelaksanaan operasi pasar pemerintah daerah. Mengkaji mekanisme dan mitigasi permasalahan pelaksanaan program cadangan pangan pemerintah 			Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Sapi (10)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Regulasi dan Penegakan Hukum				
a. Revisi peraturan Nomor 42/Permentan/PP. 040/7/2015 yang melarang impor sapi siap potong dan Kenaikan bea masuk daging-dagingan yang diolah dari 5% menjadi 30%	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan kajian potensi pengembangan budidaya sapi lokal • Pemanfaatan teknologi pembuatan pakan dan obat-obatan • Optimalisasi Sentra-Pentra Peternakan Rakyat (SPR) • <i>Mapping</i> wilayah-wilayah yang dapat dikembangkan sebagai SPR • Mendorong implementasi pola peternakan Sapi-Sawit 			Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Sapi (I I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Regulasi dan Penegakan Hukum				
b. Belum ada insentif untuk mendorong pengembangan sapi lokal	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan peraturan daerah yang menghambat investasi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan aturan perijinan dan perpajakan yang menjadi kewenangan daerah 	Sinkronisasi peraturan terkait perijinan diantara kementrian dan lembaga	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
c. Belum kondusifnya kewanaman	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi titik-titik rawan gangguan keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan dan mendorong peningkatan jumlah aparat keamanan di wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai titik-titik rawan 		

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
a. Dampak El-Nino	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program pompanisasi • Mendorong pembangunan Embung atau Dam Parit • Percepatan dan peningkatan intensitas operasi pasar BULOG/lembaga <i>buffer stock</i> lainnya • Penyesuaian kalender tanam dan varietas yang digunakan • Perbaiki saluran irigasi • Memanfaatkan saluran komunikasi (radio, internet) untuk menyiarkan langkah taktis antisipasi dampak kekeringan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan gudang penyangga stok pangan (Lembaga Pangan Masyarakat/Gedung Pengendalian Inflasi) di wilayah-wilayah utama • Meningkatkan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka stabilisasi harga pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan cadangan stok termasuk melalui pelaksanaan impor • Tersedianya landasan hukum pelaksanaan operasi pasar BULOG untuk komoditas lain serta penguatan permodalan BULOG • Landasan hukum pelaksanaan operasi pasar oleh pemerintah daerah atau lembaga yang dibentuk pemerintah daerah 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
b. Dampak la Nina	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pembangunan Embung atau Dam Parit Percepatan dan peningkatan intensitas operasi pasar BULOG/lembaga <i>buffer stock</i> lainnya Penyesuaian kalender tanam dan varietas yang digunakan Perbaiki saluran irigasi Memanfaatkan saluran komunikasi (radio, internet) untuk menyiarkan langkah taktisantisipasi dampak kekeringan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan gudang penyangga stok pangan (Lembaga Pangan Masyarakat/Gedung Pengendalian Inflasi) di wilayah-wilayah utama Meningkatkan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka stabilisasi harga pangan (penyerapan dan distribusi beras DN) 	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan cadangan stok termasuk melalui pelaksanaan impor Tersedianya landasan hukum pelaksanaan operasi pasar BULOG untuk komoditas lain serta penguatan permodalan BULOG Landasan hukum pelaksanaan operasi pasar oleh pemerintah daerah atau lembaga yang dibentuk pemerintah daerah 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (3)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
d. Perdagangan ke luar wilayah	<ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi Stasiun Terminal Agri (STA)/ pasar lelang agro• Memfasilitasi kemitraan petani cabai dengan distributor lokal• Membangun kerjasama antar TPID guna memfasilitasi kerjasama antar daerah dalam pemenuhan stok pangan	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhinya pasokan dari petani-petani lokal	<ul style="list-style-type: none">• Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur transportasi laut, darat, dan udara	Sumut, Bengkulu, Sumbar

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (4)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
e. Ketergantungan terhadap wilayah lain	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan wilayah potensial untuk pengembangan bawang merah varietas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sumatera • Pemetaan wilayah surplus-defisit bawang merah • Pendataan importir (antar wilayah) dan distributor utama bawang di wilayah Sumatera • Menjajaki kemungkinan kerjasama antara wilayah Jawa dan Sumatera 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan varietas bawang yang sesuai dengan selera dan kesesuaian kondisi di Sumatera • Pemantauan ketersediaan pasokan cabai 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sistem informasi stok pangan nasional yang akurat dan terkini • Mempercepat proses <i>dwelling time</i> terutama untuk bahan kebutuhan pokok 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (5)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
f. Alih fungsi lahan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fungsi rawa pasang surut dan lahan sawit tidak produktif Pemetaan wilayah potensial untuk dikembangkan sebagai area pertanian Mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mengalami alih fungsi lahan (peninjauan IMB individu/perusahaan yang disinyalir pelanggaran RT/RW) 	<ul style="list-style-type: none"> Tindakan hukum bagi pelanggaran RTRW <i>Up-dating</i> RTRW, disesuaikan dengan rencana pengembangan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Verifikasi prosedur peralihan fungsi lahan pertanian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 41/2009 dan PP.No. 1 2011 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (6)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
g. SDM bidang pertanian yang terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi program SL-PTT • Pelibatan perguruan tinggi dalam mengevaluasi proses pengolahan pertanian dan penyimpanan hasil panen • Pengenalan petani dan pendamping petani terhadap sistem, pertanian dan perlengkapan pertanian modern • Sertifikasi/legalisasi aset-aset pertanian • Peningkatan <i>financial literacy</i> dan akses keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendirian sekolah-sekolah pertanian di sentra-sentra pertanian • Meningkatkan skala ekonomi produksi pertanian melalui peningkatan pembiayaan perbankan untuk investasi pertanian (perluasan lahan dan peralatan pertanian). • Membangun pola kemitraan yang saling menguntungkan antara petani, perusahaan hortikultura besar/asing dan lembaga <i>buffer stock</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong dan pemberian insentif bagi pelaku usaha pertanian • Penempatan sarjana penggerak pembangunan ke wilayah-wilayah yang menjadi sentra pertanian 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (7)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
h. Pembiayaan Pertanian: Ketergantungan pembiayaan petani kepada tengkulak/rentenir dan kurang optimalnya dukungan perbankan	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi/legalisasi aset-aset pertanian Peningkatan <i>financial literacy</i>, akses keuangan petani termasuk terhadap KUR Pelatihan penyusunan proposal kredit pertanian bagi petani dan penyuluh pertanian (contoh pengembangan/<i>capacity building</i> bagi KKMB) Mendorong implementasi program kemitraan bisnis antara petani dan perum BULOG 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya implementasi program kemitraan bisnis antara petani dengan perum BULOG atau lembaga <i>buffer stock</i> lainnya secara optimal dan saling menguntungkan 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong jangkauan layanan perbankan dan sistem pembayaran Pengembangan skema pembiayaan yang tepat bagi petani (contoh menghidupkan kembali pola PHBK) Koordinasi antara BI dan OJK dalam kerangka program <i>financial inclusion</i> dan <i>financial literacy</i> 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (8)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Struktur Pasar				
a. Tidak tersedianya informasi produksi dan stok	<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan/pendataan luas lahan produksi pertanian dan lahan siap panen, estimasi hasil panen secara berkala (bulanan) Pencatatan/pendataan stok cadangan BULOG/lembaga <i>buffer</i> stok lainnya dan distributor utama Membangun mekanisme pertukaran data dan informasi terkait produksi, stok dan konsumsi di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan data dan informasi mengenai produksi, stok, dan permintaan yang akurat dan <i>real time</i>. Publikasi data dan informasi mengenai produksi, stok, dan permintaan yang akurat dan <i>real time</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengayaan informasi PIHPS yang juga mencakup data produksi dan stok komoditi 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (9)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Struktur Pasar				
a. Tidak tersedianya informasi produksi dan stok	<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan/pendataan luas lahan produksi pertanian dan lahan siap panen, estimasi hasil panen secara berkala (bulanan) Pencatatan/pendataan stok cadangan BULOG/lembaga <i>buffer</i> stok lainnya dan distributor utama Membangun mekanisme pertukaran data dan informasi terkait produksi, stok dan konsumsi di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan data dan informasi mengenai produksi, stok, dan permintaan yang akurat dan <i>real time</i>. Publikasi data dan informasi mengenai produksi, stok, dan permintaan yang akurat dan <i>real time</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengayaan informasi PIHPS yang juga mencakup data produksi dan stok komoditi 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (10)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Struktur Pasar				
b. Posisi tawar petani dan konsumen cenderung lemah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan <i>financial literacy</i> dan akses keuangan petani • Pencatatan dan pendataan hasil produksi secara akurat dan terkini • Pemantauan ketersediaan stok di pasar-pasar, pelabuhan dan pergudangan utama secara akurat dan terkini 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya implementasi program kemitraan bisnis antara petani dengan perum BULOG atau lembaga <i>buffer stock</i> lainnya secara optimal dan saling menguntungkan • Menciptakan sistem pemantauan terpadu mengenai ketersediaan stok barang di pelabuhan, pergudangan, distributor, dan pasar-pasar utama 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Investigasi KPPU dan YLKI terhadap struktur pasar komoditi pertanian • Pengayaan informasi PIHPS yang juga mencakup data produksi dan stok komoditi 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (II)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Konsumsi				
a. Ketergantungan terhadap komoditi bawang merah segar	<ul style="list-style-type: none"> Pengenalan dan pengadaan teknologi pengolahan bawang merah Sosialisasi dan melaksanakan kawasan Rumah Pangan Lestari (RPL) 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan gudang penyangga stok pangan (Lembaga Pangan Masyarakat/Gedung Pengendalian Inflasi) di wilayah-wilayah utama Menetapkan standar minimal gudang penyimpanan bahan pangan Meningkatkan sistem manajemen dan pengawasan terhadap pergudangan lembaga <i>buffer stock</i> 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (12)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Konsumsi				
b. Tidak ada informasi akurat mengenai estimasi kebutuhan/permintaan	<ul style="list-style-type: none"> Membangun model estimasi kebutuhan beras bulanan yang didasari kondisi historis, perilaku, dan variabel-variabel ekonomi lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya model estimasi yang akurat mengenai kebutuhan pangan yang mampu mendeteksi kebutuhan secara periodik maupun musiman Penggunaan hasil estimasi sebagai dasar rencana distribusi maupun operasi pasar 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (13)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Konsumsi				
c. Tidak ada data yang akurat mengenai ketersediaan produksi dan stok	<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan/pendataan luas lahan produksi pertanian dan lahan siap panen, estimasi hasil panen secara berkala (bulanan) Pencatatan/pendataan stok cadangan beras BULOG/lembaga <i>buffer stock</i> lainnya dan distributor utama Membangun mekanisme pertukaran data dan informasi terkait produksi, stok dan konsumsi di daerah Menyusun proyeksi produksi dan harga 	<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya informasi mengenai harga dan produksi yang dapat menjangkar perilaku konsumsi Diseminasi proyeksi produksi dan harga beras secara periodik 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (14)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Konsumsi				
d. Fungsi <i>buffer stock</i> yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> Pemprov/Pemkot/Pemkab menganggarkan dana operasi pasar Optimalisasi penggunaan dana operasi pasar untuk mendukung operasi pasar BULOG Membangun mekanisme kerjasama teknis dan koordinasi antara pemerintah daerah dan BULOG dalam pelaksanaan operasi pasar Penguatan LDPM (lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi gudang penyangga stok pangan (Lembaga Pangan Masyarakat/Gedung Pengendalian Inflasi) dalam mendukung operasi pasar BULOG Meningkatkan kewenangan pemerintah daerah melalui Lembaga Pangan Masyarakat/Gedung pengendalian inflasi dalam rangka stabilisasi harga pangan (penyerapan dan distribusi beras DN) 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (15)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Infrastruktur dan Logistik				
a. Kenaikan biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM dan biaya suku cadang	<ul style="list-style-type: none"> Mengalokasikan subsidi angkutan/transportasi bahan-bahan pangan Menjalin kerjasama dengan TNI untuk pendistribusian bahan-bahan kebutuhan pokok 		<ul style="list-style-type: none"> Stabilisasi nilai tukar rupiah Mendorong berkembangnya industri dan layanan suku cadang hingga ke daerah-daerah 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
b. Keterbatasan sarana irigasi dan bendungan	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pembangunan Embung atau Dam Parit Penggunaan anggaran secara optimal untuk pemeliharaan saluran irigasi Rehabilitasi saluran irigasi yang kurang optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana irigasi di tiap kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan waduk dan bendungan untuk mengairi daerah-daerah sentra produksi pangan sekaligus sebagai sumber energi. 	

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (16)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Infrastruktur dan Logistik				
c. Kelayakan jalan dan sarana transportasi komoditas pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong alokasi realisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur pedesaan Meningkatkan anggaran pemeliharaan dan pembangunan jalan Pemetaan regulasi pemerintah daerah yang menghambat pembangunan infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran produk pertanian Meningkatnya kualitas jalan desa, kota/kabupaten, dan provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan proses dan realisasi proyek-proyek infrastruktur nasional Realisasi Tol Laut Integrasi angkutan laut dengan transportasi kereta api Percepatan jalan tol trans Sumatera dan <i>double track</i> kereta 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
d. Tidak optimalnya fungsi jembatan timbang dan uji kelayakan moda transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan terhadap keberadaan jembatan timbang (sidak) Penegakan hukum terhadap pelanggaran kapasitas muatan dan kelayakan kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan terhadap keberadaan jembatan timbang (sidak) Penegakan hukum terhadap pelanggaran kapasitas muatan dan kelayakan kendaraan 		

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (17)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Infrastruktur dan Logistik				
e. Gangguan keamanan dan pungutan liar terhadap angkutan barang	<ul style="list-style-type: none">Mengidentifikasi titik-titik rawan gangguan keamanan	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan dan mendorong peningkatan jumlah aparat keamanan di wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai titik-titik rawan		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (18)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Infrastruktur dan Logistik				
f. Konektivitas antar wilayah dan tidak ter-integrasinya sistem transportasi angkutan barang			<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan proses dan realisasi proyek-proyek infrastruktur nasional • Realisasi Tol Laut • Integrasi angkutan laut dengan transportasi kereta api • Percepatan jalan tol trans Sumatera dan <i>double track</i> kereta 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (19)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Kelembagaan				
a. Ketersediaan lembaga penyedia benih, pupuk, dan obat-obatan di sentra-sentra produksi	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan dan pemantauan agen-agen dan ketersediaan alsintan Mendorong jangkauan distribusi alsintan (UPJA) ke sentra-sentra pertanian melalui peningkatan peran KUD 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan sistem manajemen dan pengawasan terhadap Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), contoh melalui standarisasi dan pelatihan serta audit prosedur layanan, kelayakan gudang, personil, dan keuangan 		Sumut, Bengkulu, Sumbar

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (20)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Kelembagaan				
b. Belum optimalnya fungsi Gapoktan dan lembaga-lembaga pendamping pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kebutuhan <i>capacity building</i> petani dan kelompok petani (TNA) • <i>Training of trainer</i> bagi tenaga penyuluh dan pendamping pertanian mengenai proses pengolahan dan penyimpanan produk pertanian serta mitigasi risiko pertanian • Peningkatan <i>financial literacy</i>, akses keuangan petani termasuk terhadap KUR 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam pembinaan petani dan kelompok tani 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (21)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Kelembagaan				
b. TPID hanya bersifat forum koordinasi dan tidak memiliki sumber daya yang fokus memastikan seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat dijalankan	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi peran TPID sebagai sarana koordinasi rutin untuk mengevaluasi hasil pengendalian inflasi dan penyusunan langkah antisipasi ke depan Penyusunan program kerja TPID tahunan berdasarkan <i>roadmap</i> yang telah disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk pelaksana harian TPID yang di isi oleh tenaga-tenaga ahli dan bekerja secara penuh Penyusunan program kerja TPID tahunan berdasarkan <i>roadmap</i> yang telah disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan pencapaian inflasi dan pencapaian produksi sebagai <i>key performance indicator</i> keberhasilan pemerintah daerah 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
c. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam stabilisasi harga pangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Mengkaji payung hukum pelaksanaan operasi pasar pemerintah daerah. Mengkaji mekanisme dan mitigasi permasalahan pelaksanaan program cadangan pangan pemerintah 			

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (22)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Kelembagaan				
b. Lemahnya implementasi program ketahanan pangan (konsistensi pelaksanaan, evaluasi, dan standardisasi program)	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dan evaluasi program-program ketahanan pangan yang telah ada (LDPM) 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan secara konsisten program-program ketahanan pangan 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (23)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Regulasi dan Penegakan Hukum				
a. Belum optimalnya tindakan hukum bagi pelanggaran RTRW	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mengalami alih fungsi lahan (peninjauan IMB individu/perusahaan yang disinyalir melanggar RTRW) 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong proses hukum pelanggaran RTRW 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
b. Belum optimalnya tindakan hukum bagi oknum yang menyelewengkan distribusi pupuk, dan saprodi	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan dan pemantauan agen-agen dan ketersediaan pupuk bersubsidi Pelibatan TNI/Babinsa dalam pengawasan distribusi pupuk dan saprodi Tindakan hukum bagi oknum yang menyelewengkan RDKK dan distribusi pupuk/alsintan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan agen-agen dan ketersediaan pupuk bersubsidi Pelibatan TNI/Babinsa dalam pengawasan distribusi pupuk dan saprodi Tindakan hukum bagi oknum yang menyelewengkan RDKK dan distribusi pupuk/alsintan 		

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (24)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Regulasi dan Penegakan Hukum				
c. Belum ada insentif untuk mendorong investasi di bidang pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan peraturan daerah yang menghambat investasi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan aturan perijinan dan perpajakan yang menjadi kewenangan daerah 	Sinkronisasi peraturan terkait perijinan antara kementerian dan lembaga	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
d. Belum kondusifnya keamanan	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi titik-titik rawan gangguan keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan dan Mendorong peningkatan jumlah aparat keamanan di wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai titik-titik rawan 		

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (25)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Anggaran				
a. Keterbatasan kapasitas fiskal Pemerintah pusat dan daerah	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam pengendalian harga antar instansi di daerahMendorong partisipasi swasta dan instansi lainnya dalam upaya mendorong produksi dan stabilitas harga diantaranya melalui skema penyaluran CSR		<ul style="list-style-type: none">Optimalisasi penerimaan pajak dan sumber-sumber pembiayaan pembangunanPerbaikan belanja APBN yang masih didominasi oleh belanja pegawai	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Jangka Pendek

- Mendorong ekspektasi yang wajar seiring penetapan harga oleh pemerintah melalui peningkatan intensitas sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat
- Mengantisipasi peningkatan risiko-risiko ekonomi dan politik seiring dengan penetapan harga

Jangka Menengah

- Meningkatkan *public acceptance* terhadap kebijakan penyesuaian harga oleh pemerintah
- Mendukung proses penyusunan kebijakan penetapan harga
- Pembangunan sarana dan prasarana dasar dan memberi dukungan maksimal bagi pembangunan infrastruktur nasional

Jangka Panjang

- Mendorong efisiensi produksi dan konsumsi komoditi-komoditi yang harganya ditetapkan oleh pemerintah

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Bensin (I)				
Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Eksternal				
a. Harga minyak dunia dan kurs yang bergejolak,	<ul style="list-style-type: none"> Me-review kemungkinan kenaikan tarif PBBKB 	<ul style="list-style-type: none"> Insentif/penyederhanaan perizinan daerah terkait pembangunan infratrutur energi non-BBM. 	<ul style="list-style-type: none"> Stabilisasi nilai tukar rupiah 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
Produksi				
b. Penurunan harga minyak menurunkan minat eksplorasi c. Minimnya investasi untuk eksplorasi d. Ketentuan PSC dianggap kurang menarik e. Aturan pajak dan perijinan	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan peraturan daerah yang menghambat investasi 	<ul style="list-style-type: none"> Insentif/penyederhanaan perizinan daerah terkait pembangunan infratrutur energi 		Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Bensin (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Regulasi				
a. Pengurangan subsidi BBM dan <i>Downward rigidity</i> harga BBM	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung sosialisasi kebijakan harga BBM Pemerintah 			
b. Ketentuan PSC (<i>production sharing contract</i>) dianggap kurang menarik	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan peraturan daerah yang menghambat investasi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan aturan perijinan dan perpajakan yang menjadi kewenangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Studi mengenai durasi kontrak PSC Kajian dampak ekonomi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Migas 	

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Bensin (3)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Konsumsi				
a. Penggunaan kendaraan pribadi yang relatif tinggi b. Tidak tersedianya transportasi publik yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif bagi kendaraan pengguna BBG • Insentif pembangunan stasiun pengisian BBG • Mengintensifkan razia kendaraan • Mengkaji kemungkinan penerapan beberapa disinsentif penggunaan kendaraan pribadi seperti kenaikan tarif parkir, kewajiban kelaikan angkutan kota • Mengkaji kemungkinan penerapan sistem pengelolaan transportasi publik yang dimiliki oleh lembaga/bukan perorangan dan tidak berbasiskan setoran • Penyediaan layanan bus khusus siswa sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan harga BBG yang seragam secara nasional 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung	

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Bensin (4)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Anggaran				
a. Keterbatasan kapasitas fiskal Pemerintah pusat dan daerah	<ul style="list-style-type: none">Mendorong keterlibatan swasta dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana transportasi publikMengkaji kemungkinan menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor		<ul style="list-style-type: none">Optimalisasi penerimaan pajak dan sumber-sumber pembiayaan pembangunanPerbaikan belanja APBN yang masih didominasi oleh belanja pegawai	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Tarif Listrik (I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Eksternal				
a. Berlanjutnya depresiasi nilai tukar b. Kenaikan tarif listrik kemungkinan akan terus terjadi bila menggunakan 3 komponen (nilai tukar, harga minyak inflasi)	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga inflasi melalui optimalisasi peran TPID 		<ul style="list-style-type: none"> Stabilisasi nilai tukar 	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Tarif Listrik (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Produksi				
a. Terbatasnya jumlah pembangkit listrik	<ul style="list-style-type: none">Mempercepat dan mempermudah perizinan terkait dengan pembangunan pembangkit listrik			Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
b. Keterbatasan anggaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan	<ul style="list-style-type: none">Mendorong penggunaan sumber listrik biogas dan <i>micro hydro</i>Pemanfaatan cangkang sawit sebagai sumber energi listrikMendorong keterlibatan para pihak dalam pengembangan listrik perdesaan			

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Tarif Listrik (3)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Regulasi				
<p>a. Kenaikan tarif listrik bulan Juni 2015</p> <p>b. Penetapan tarif dasar listrik berdasarkan indikator kurs, harga minyak, dan inflasi</p> <p>c. Belum ada skema pembebanan tarif yang mendorong efisiensi penggunaan listrik</p> <p>d. Ketidaksesuian data rumah tangga miskin dan pengguna tarif listrik rumah tangga golongan 450 VA dan 900 VA</p> <p>e. Penggunaan listrik ilegal</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan dan tindakan hukum terhadap pencurian listrik• Mendorong penggunaan listrik paska bayar• Sosialisasi ketentuan pengenaan tarif listrik	<ul style="list-style-type: none">• Evaluasi skema kebijakan penentuan harga TDL• Alokasi subsidi listrik tepat sasaran	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung	

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Tarif Listrik (4)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Konsumsi Listrik				
a. Penggunaan/konsumsi listrik yang tidak produktif	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan dan tindakan hukum terhadap pencurian listrik• Mendorong penggunaan listrik paska bayar• Sosialisasi ketentuan pengenaan tarif listrik• Mengkaji pola penggunaan listrik rumah tangga di Sumatera sebagai bahan usulan penyempurnaan tarif listrik yang efisien• Mengaktifkan gerakan hemat listrik	<p>Evaluasi skema kebijakan penentuan harga TDL</p> <p>Alokasi subsidi listrik tepat sasaran</p>		

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Tarif Listrik (5)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Anggaran Pemerintah				
a. Masih tingginya beban subsidi listrik golongan 450VA dan 900VA	<ul style="list-style-type: none">• Sinergi dalam hal sosialisasi migrasi pelanggan dari 900VA menjadi 1300VA.• Sinkronisasi data jumlah penduduk miskin sebagai dasar pemberian subsidi listrik		<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi pusat dan daerah dalam pelaksanaan sosialisasi	
b. Alokasi subsidi listrik tidak tepat sasaran				

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Angkutan Kota (I)				
Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Regulasi				
<p>a. Penyesuaian tarif angkutan kota seiring kenaikan harga BBM</p> <p>b. Rigiditas penurunan tarif angkutan dalam kota di saat terjadi penurunan harga BBM</p> <p>c. Aturan ijin trayek angkutan belum sepenuhnya dijalankan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Besaran kenaikan tarif dengan mempertimbangkan daya beli pengguna Penerapan tarif batas atas dan batas bawah tarif angkutan kota Pendataan kembali usia trayek angkutan dalam kota Memproses pelanggaran usia ijin trayek angkutan kota 		<p>Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung</p>	

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Angkutan Kota (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Konsumsi				
a. Tidak tersedianya transportasi publik dalam kota yang murah dan layak	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong keterlibatan swasta dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik Mengkaji kemungkinan penerapan sistem pengelolaan transportasi publik yang dimiliki oleh lembaga/bukan perorangan dan tidak berbasiskan setoran Penyediaan layanan bus khusus siswa sekolah 			Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
III. Anggaran				
a. Keterbatasan fiskal daerah untuk menyediakan sarana transportasi publik yang murah dan layak				

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Angkutan Udara (3)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Biaya Produksi				
<p>a. Depresiasi nilai tukar rupiah meningkatkan biaya sewa pesawat dan perawatan.</p> <p>b. Harga avtur di bandara-bandara di wilayah Sumatera</p> <p>c. Keterbatasan kilang minyak Pertamina dalam memproduksi avtur</p> <p>d. Biaya logistik pengiriman avtur</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi Mengidentifikasi peraturan daerah yang menghambat perijinan dan menimbulkan inefisiensi 		Koordinasi antar pihak berwenang	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Angkutan Udara (4)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Regulasi				
<p>a. Kenaikan tarif batas atas dan batas bawah</p> <p>b. <i>Concession fee</i>, PPN yang harus dibayarkan Pertamina ke pengelola bandara dan BPH Migas</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi Mengidentifikasi peraturan daerah yang menghambat perijinan dan menimbulkan inefisiensi 		<p>Koordinasi antar pihak Angkasa Pura, Dephub, Pertamina, Menko Perekonomian</p>	<p>Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung</p>



Bagian III

Roadmap Pengendalian Inflasi Wilayah Jawa



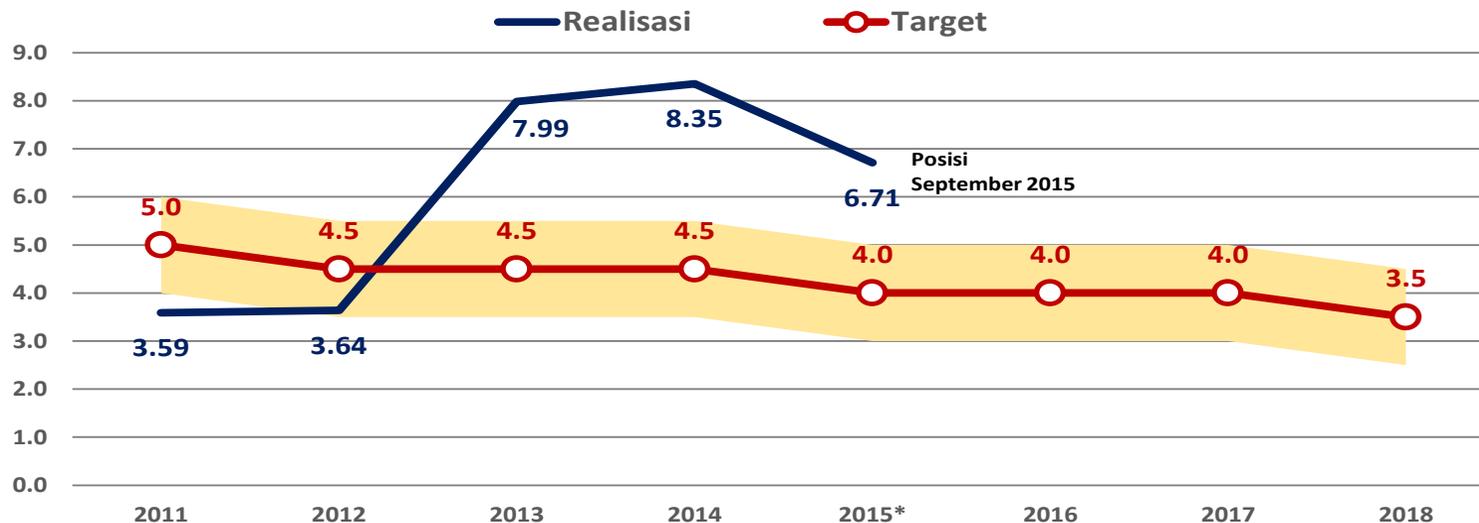
Halaman ini sengaja dikosongkan

3.1 *Pendahuluan*

Pendahuluan

Target inflasi yang semakin rendah dan stabil bertujuan untuk mendukung kesinambungan pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, perlu disusun suatu *roadmap* program pengendalian inflasi daerah yang terstruktur dan terencana

1. Pencapaian inflasi yang rendah dan stabil untuk kesinambungan perekonomian.
2. Untuk mencapai inflasi $3,5 \pm 1\%$ merupakan tantangan karena harus dicapai dalam waktu yang sangat singkat (2018).
3. Deviasi pencapaian inflasi dengan sasaran inflasi cukup jauh, dan target inflasi yang relatif rendah dan menurun (*challenging*), Pencapaian sasaran inflasi *).
4. Perlu ada *guideline* untuk pelaksanaan program pengendalian inflasi yang terstruktur.
5. Perlunya mengintegrasikan arahan Presiden dalam Rakornas VI TPID ke dalam *Roadmap* Pengendalian Inflasi.



*) Sasaran dan realisasi pencapaian inflasi Wilayah Jawa

Pendahuluan

Roadmap pengendalian inflasi untuk wilayah Jawa secara umum ditujukan untuk mengatasi beberapa permasalahan *cyclical* maupun struktural yang ada di masing-masing provinsi.



Inflasi Inti

Inflasi inti didorong oleh **kenaikan harga makanan jadi** yang merupakan bagian dari inflasi *volatile food* yang saat ini masih cukup *volatile*. Selain itu, **Inflasi sewa rumah** cukup tinggi mengingat lokasi wilayah Jawa yang merupakan tempat tujuan bekerja.



Inflasi Volatile Food

Tekanan inflasi untuk kelompok *volatile food* didorong oleh komoditas strategis seperti **beras**, **daging ayam ras** dan **cabai merah**. Masalah terjadi antara lain minimnya teknologi dan infrastruktur pertanian serta jadwal masa tanam yang belum tersinkronisasi serta masih lemahnya konektivitas antar daerah.



Inflasi Administered Prices

Penyesuaian **tarif listrik** masih menjadi komoditas utama penyumbang inflasi di Jawa dimana frekuensi kenaikannya hampir terjadi setiap bulannya. Sementara itu, cukai rokok masih memberikan tekanan inflasi dimana nilai konsumsi rokok kretek filter cukup besar.

Pendahuluan

Tantangan struktural yang dihadapi dalam pengendalian inflasi Wilayah Jawa terkait dengan produksi, konektivitas, struktur pasar, tata niaga, output gap dan *assymmetric information*.

1

Terbatasnya produksi akibat minimnya teknologi dan infrastruktur pertanian serta jadwal masa tanam yang belum tersinkronisasi

2

Masih lemahnya konektivitas antar daerah dan kerjasama antar daerah

3

Inefisiensi struktur mikro pasar

4

Masih panjang dan tidak efektifnya rantai distribusi pangan dari produsen kepada konsumen

5

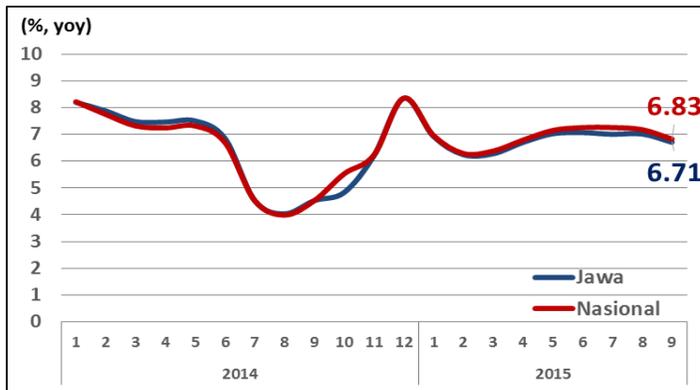
Ketergantungan terhadap barang-barang impor untuk input produksi pangan seperti pakan ternak

6

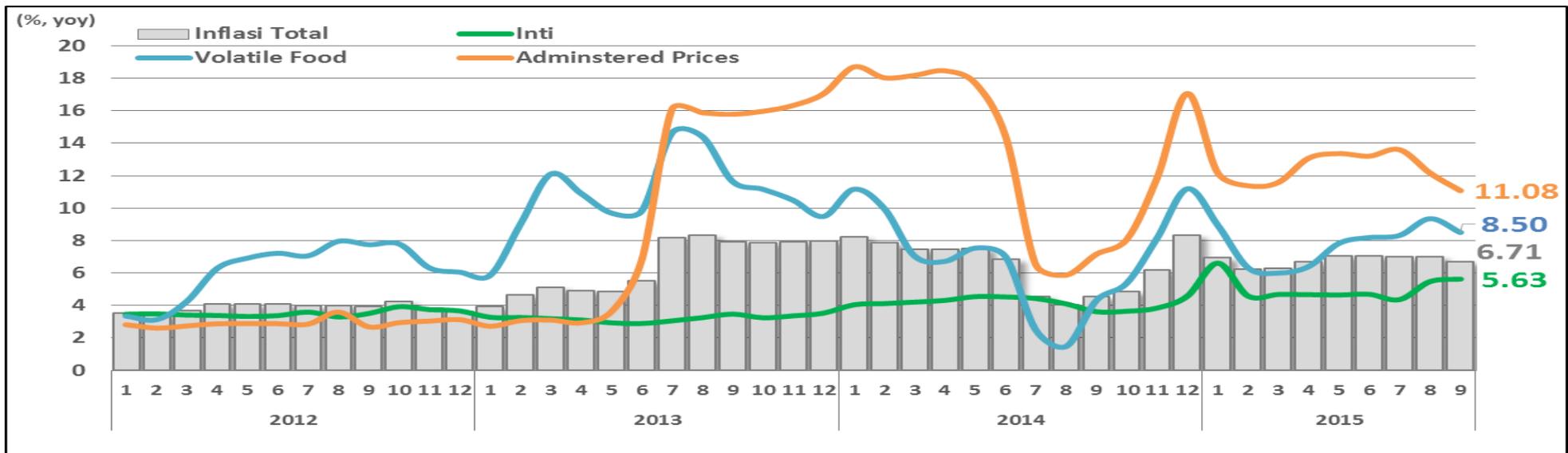
Terganggunya pasokan dan harga pangan akibat *assymmetric information*

Pendahuluan

Tingkat inflasi wilayah Jawa sejalan dengan angka inflasi nasional, dengan karakteristik pergerakan inflasi Jawa lebih disebabkan oleh kelompok *volatile food* dan *administered prices*.



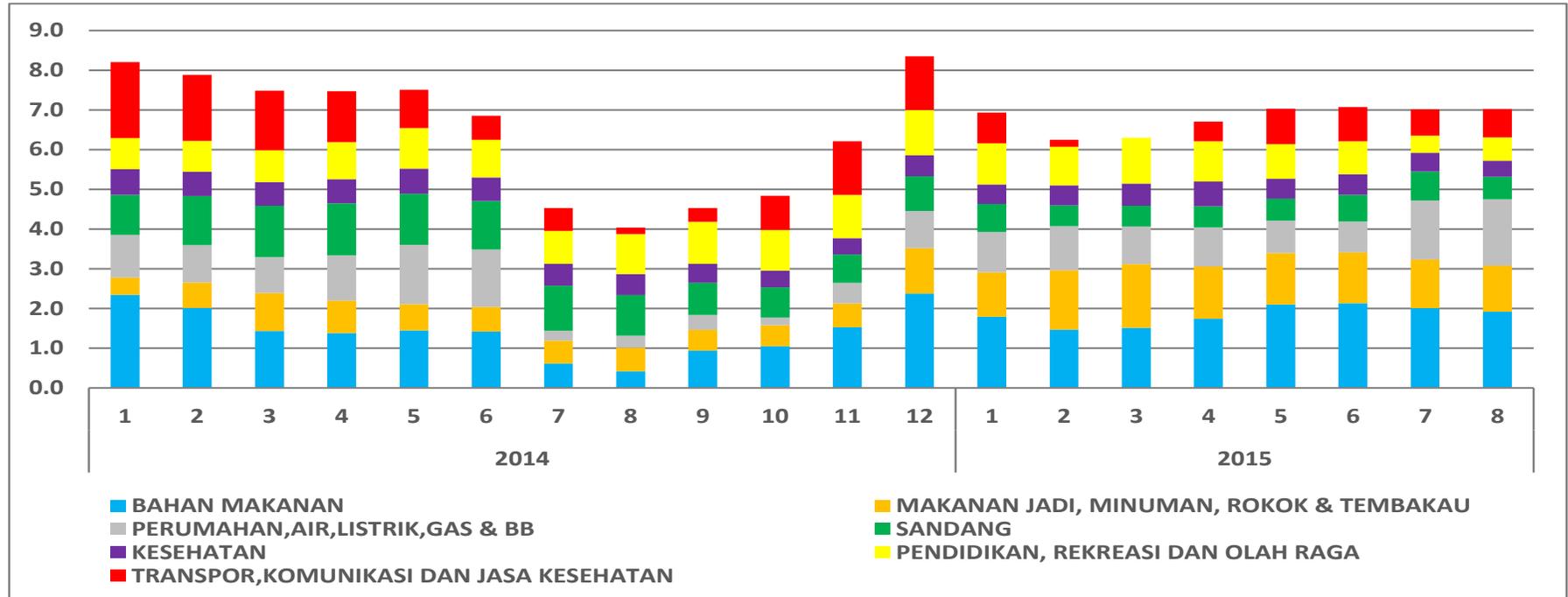
- ✓ Secara umum, inflasi wilayah Jawa dengan nasional cukup searah, dengan bobot inflasi Jawa yang mencapai 62% dari nasional. Tingkat inflasi wilayah Jawa relatif berada di bawah angka inflasi nasional.
- ✓ Sejak pertengahan 2013, inflasi untuk kelompok *administered prices* berada di atas *volatile food* dan pergerakan keduanya cukup searah. Sementara itu, inflasi inti relatif stabil.



Pendahuluan

Pergerakan tingkat inflasi di wilayah Jawa lebih banyak dipengaruhi oleh komoditas kelompok *volatile food* dan *administered prices*, sementara inflasi dari kelompok inflasi inti cenderung stabil.

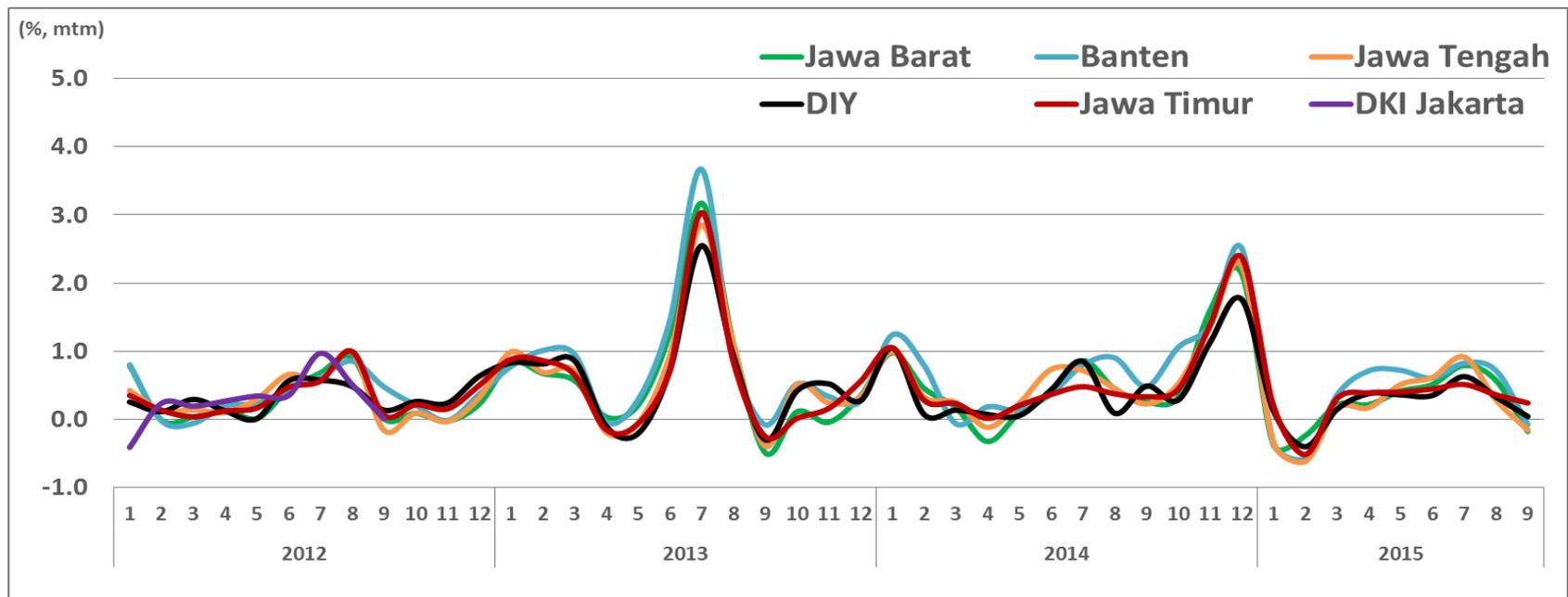
- ✓ Berdasarkan data historisnya, komoditas dari kelompok *volatile food* yang sering menyumbang inflasi adalah beras, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai dan bawang merah meski sentra produksi komoditas dimaksud berasal dari wilayah Jawa.
- ✓ Komoditas *administered prices* yang memberikan kontribusi terhadap inflasi Jawa adalah bensin, tarif angkutan dan tarif listrik. Pergerakan harga dari kelompok transport relatif lebih terkendali setelah ditetapkan harga BBM yang mengikuti harga minyak dunia.



Pendahuluan

Perubahan tingkat harga secara *month-to-month* di wilayah Jawa untuk seluruh provinsi tidak jauh berbeda antara satu sama lain meskipun memiliki karakteristik yang cukup berbeda.

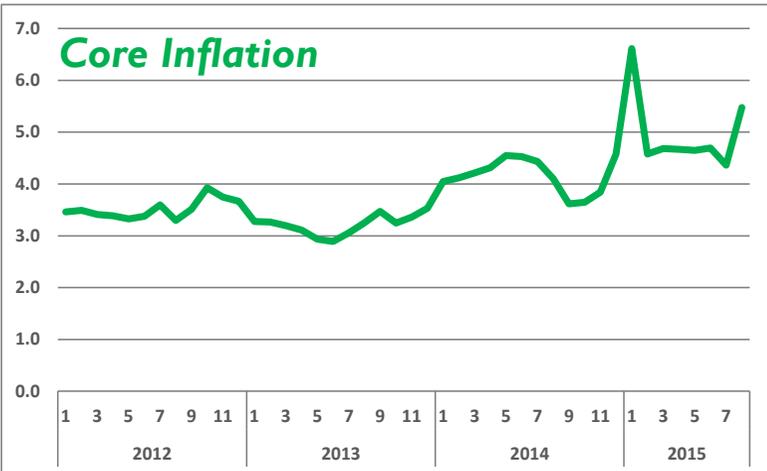
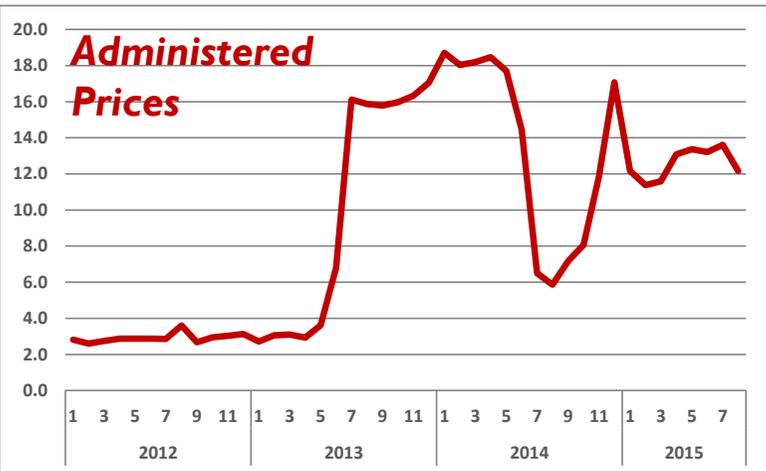
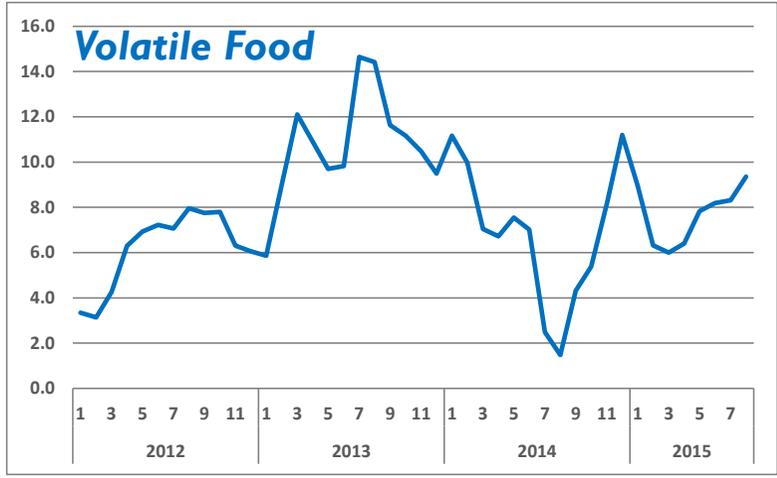
- ✓ Berdasarkan data historikal dari tahun 2012 hingga September 2015, dapat terlihat bahwa pergerakan inflasi provinsi di wilayah Jawa cukup sejalan, meskipun tingkat inflasi di provinsi Banten relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh resistensi harga kelompok *volatile food* dan *administered prices* yang cenderung sulit untuk turun.
- ✓ Tingginya tingkat inflasi pada beberapa waktu tertentu, lebih banyak disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang akhirnya berdampak pada komoditas-komoditas kelompok *volatile food*.



Pendahuluan

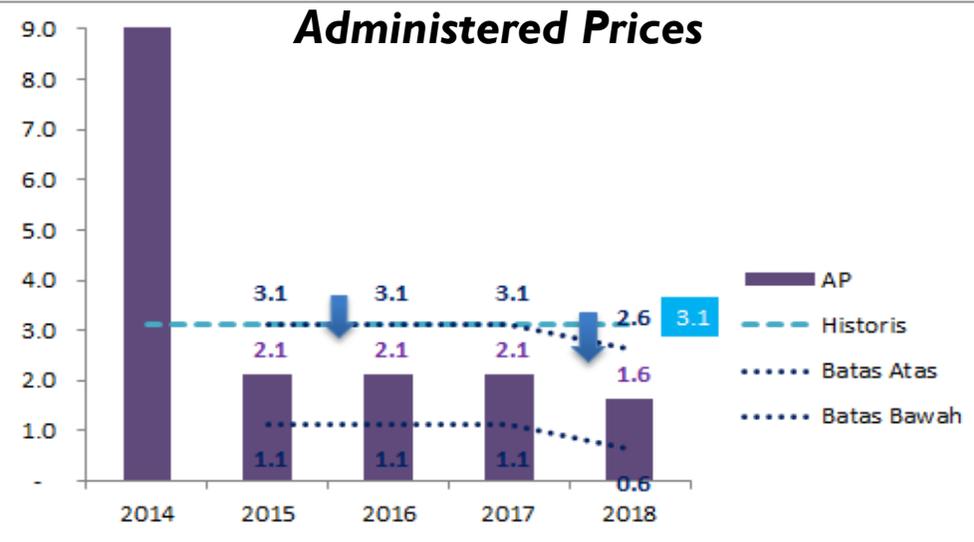
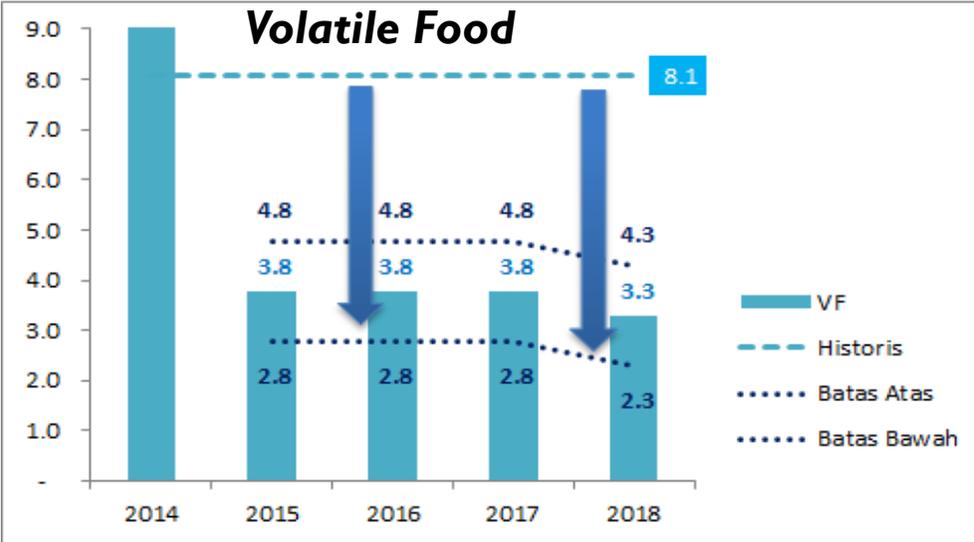
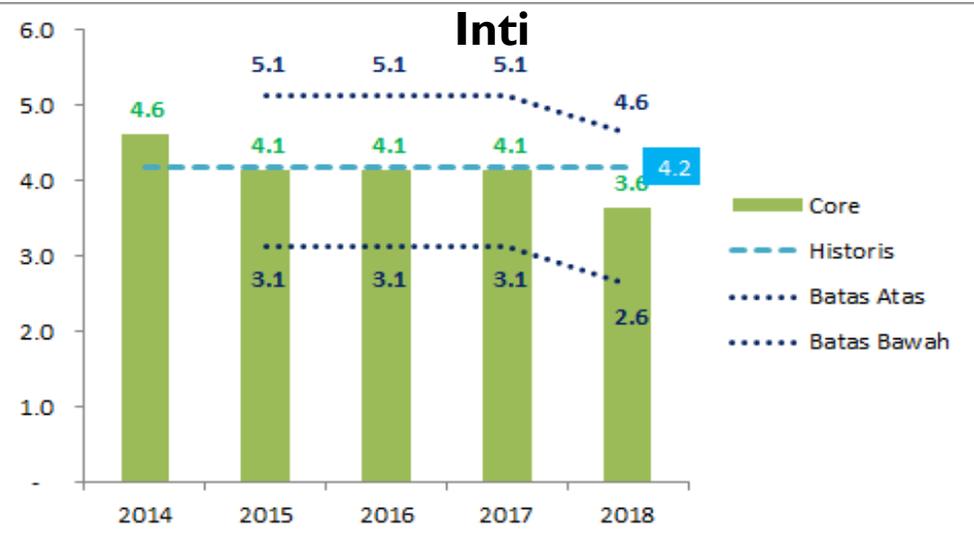
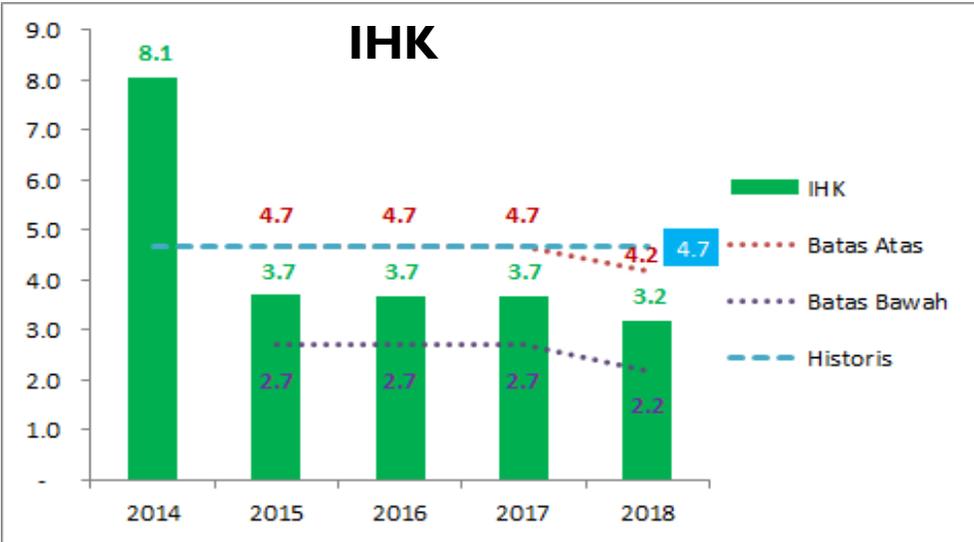
Tantangan pengendalian inflasi Jawa, tidak terbatas pada masalah *volatile food* yang bersifat *cyclical*. Namun juga terdapat permasalahan struktural (*core*) yang harus ditangani bersama-sama

- ✓ Permasalahan pada kelompok *volatile food* terutama karena permintaan yang melebihi produksi pada masa-masa tertentu (seperti saat panen raya atau Hari Besar Keagamaan Nasional). Disamping itu tidak ada pengaturan jadwal panen di setiap daerah yang menyebabkan permintaan melebihi produksi pada saat-saat tertentu.
- ✓ Inflasi dari kelompok *administered prices* terutama terkait dengan pergerakan harga BBM, walaupun sejak awal tahun 2015 penetapan harga sudah mengikuti harga minyak dunia.
- ✓ Tingkat inflasi inti relatif lebih tinggi terutama karena besarnya permintaan domestik dan dampak dari nilai tukar



Ke Depan Perlu *Extra Efforts*

Untuk mencapai sasaran inflasi, diperlukan extra effort terutama pada kelompok volatile food..



Historis 3 tahun (2010 – 2012)

3.2 Identifikasi Permasalahan Inflasi

Komoditas Utama Penyumbang Inflasi

No	Komoditas		2014	2015								Jumlah	Kategori
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug		
1	BERAS	VF	8	1	1	1			1	1	1	14	High
2	TARIP LISTRIK	AP	7		1			1	1			10	High
3	DAGING AYAM RAS	VF	5	1				1	1	1	1	10	High
4	ANGKUTAN UDARA	AP	4	1		1	1			1		8	High
5	CABAI MERAH	VF	4					1	1	1	1	8	High
6	TELUR AYAM RAS	VF	5					1	1		1	8	High
7	ROKOK KRETEK FILTER	AP	7		1							8	High
8	BAWANG MERAH	VF	4			1	1	1				7	High
9	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	AP	4	1		1	1					7	High
10	NASI DENGAN LAUK	CI	4			1	1				1	7	High
11	SEWA RUMAH	CI	3	1	1	1			1			7	High
12	BENSIN	AP	3			1	1		1			6	Med
13	CABAI RAWIT	VF	3							1	1	5	Med
14	SERAGAM SEKOLAH ANAK	CI	4		1							5	Med
15	ANGKUTAN ANTAR KOTA	AP	3							1		4	Med
16	TARIP KERETA API	AP	2	1			1					4	Med
17	MOBIL	CI	2		1			1				4	Med
18	BAWANG PUTIH	VF	2				1	1				4	Med
19	BAYAM	VF	2	1								3	Med
20	ANGKUTAN DALAM KOTA	AP	2				1					3	Med
21	AKADEMI/PERGURUAN TINGGI	CI	3									3	Med
22	TUKANG BUKAN MANDOR	CI	1	1		1						3	Med
23	EMAS PERHIASAN	CI	1	1	1							3	Med
24	DAGING SAPI	VF	2							1		3	Med
25	BAJU KAOS BERKERAH	CI	0	1				1		1		3	Med

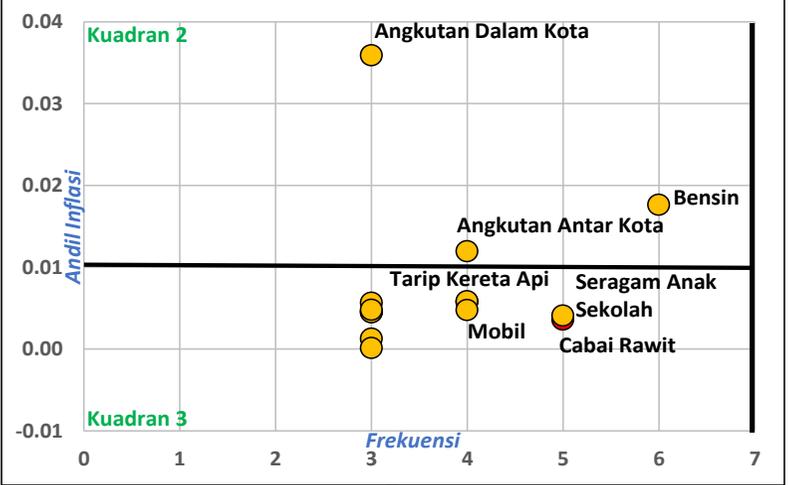


Pemetaan risiko inflasi berdasarkan komoditas yang memiliki Nilai Konsumsi di atas 0,10 dan dikatakan penyumbang inflasi apabila termasuk dalam 10 komoditas penyumbang inflasi terbesar pada bulan yang bersangkutan

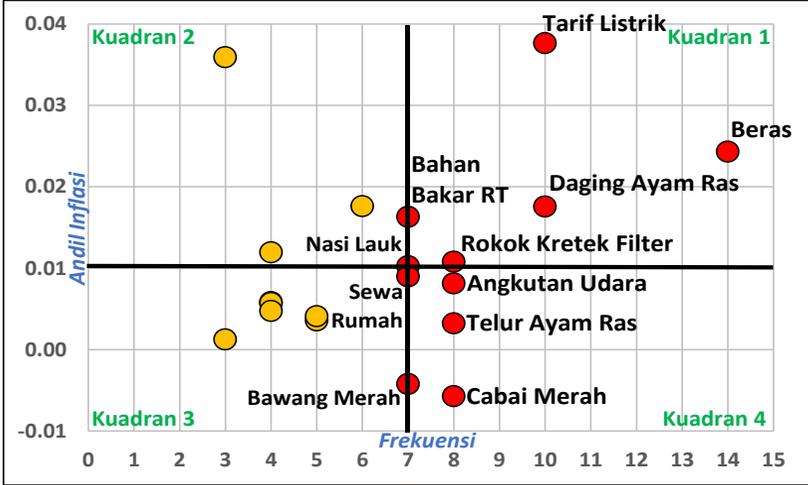
Komoditas Utama Penyumbang Inflasi

Lima komoditas dengan bobot tinggi dan frekuensi yang tinggi adalah beras, tarif listrik, daging ayam ras, bahan bakar RT dan rokok kretek filter

Potensi Risiko: Med



&



Potensi Risiko: HIGH

Volatile Food	
Komoditas	
Beras	
Daging Ayam Ras	
Cabai Merah	
Telur Ayam Ras	
Bawang Merah	

Administered Prices	
Komoditas	
Tarif Listrik	
Angkutan Udara	
Rokok Kretek Filter	
Bahan Bakar RT	
Bensin	

Core Inflation	
Komoditas	
Nasi Dengan Lauk	
Sewa Rumah	
Seragam Anak Sekolah	
Mobil	
Akademi	

Komoditas Utama Penyumbang Inflasi

5 Komoditas Penyumbang Inflasi Tertinggi per Kelompok Inflasi

Komoditas	Frekuensi Muncul	Rerata Sumbangan Inflasi
<i>Volatile Food</i>		
Beras	14	0.024
Daging Ayam Ras	10	0.018
Cabai Merah	8	-0.006
Telur Ayam Ras	8	0.003
Bawang Merah	7	-0.004
<i>Administered Prices</i>		
Tarif Listrik	10	0.038
Angkutan Udara	8	0.008
Rokok Kretek Filter	8	0.011
Bahan Bakar RT	7	0.016
Bensin	6	0.018
<i>Core Inflation</i>		
Nasi Dengan Lauk	7	0.010
Sewa Rumah	7	0.009
Seragam Anak Sekolah	5	0.004
Mobil	4	0.006
Akademi/Perguruan Tinggi	3	0.005

- Masih kurangnya konektivitas antar daerah
- Minimnya teknologi pertanian dan terbatasnya infrastruktur pertanian
- Masih panjangnya mata rantai distribusi pangan

- Belum terdapatnya batas atas dan bawah tarif angkutan udara
- Penyesuaian cukai rokok setiap tahunnya
- Penetapan HET LPG dan migrasi dari tabung 12 kg ke tabung 3 kg

- Semakin terbatasnya lahan yang tersedia untuk perumahan yang membuat biaya sewa rumah meningkat

Identifikasi Permasalahan Inflasi Inti

Sewa Rumah			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
I. Sewa Rumah			
	<ul style="list-style-type: none">• Keterbatasan suplai properti kontrak dan sewa yang <i>affordable</i>• Ekspektasi kenaikan harga kontrak/sewa yang dipicu oleh peningkatan harga barang dan jasa secara umum	<ul style="list-style-type: none">• Keterbatasan lahan disertai dengan perkembangan penduduk yang cepat• Terbatasnya peran Pemerintah dlm pembangunan rusunawa• Kenaikan tarif sewa seiring dengan peningkatan jumlah mahasiswa dan tarif listrik	<ul style="list-style-type: none">• DKI Jakarta• DIY

Identifikasi Permasalahan Inflasi Inti

Semen, Tukang Bukan Mandor, dan Nasi dengan Lauk			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
2. Semen			
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya permintaan semen akibat tingginya kebutuhan perumahan seiring peningkatan jumlah penduduk Melemahnya Rupiah terhadap Dollar yang berdampak pada harga semen 	<ul style="list-style-type: none"> Jawa Barat
3. Tukang Bukan Mandor			
	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan UMP berdampak pada upah tukang bukan mandor 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah tenaga kerja bangunan belum mencukupi 	<ul style="list-style-type: none"> Jawa Tengah Jawa Timur
4. Nasi dengan Lauk			
	<ul style="list-style-type: none"> Permintaan makanan jadi yang tinggi sehubungan dengan banyaknya pendatang untuk bekerja 	<ul style="list-style-type: none"> Rigiditas harga makanan jadi yang umumnya naik pada saat harga bahan baku naik tinggi namun tidak turun kembali ketika harga bahan baku turun. 	<ul style="list-style-type: none"> Banten

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Beras (I)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi gangguan cuaca (kekeringan maupun banjir) • Serangan organisme pengganggu tanaman padi • Ketergantungan terhadap pupuk kimia • Pola tanam yang belum terorganisir dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan pencetakan lahan baru dan derasnya alih fungsi lahan • Minimnya teknologi pertanian dan masih kurang efektifnya irigasi pertanian • Budidaya organik masih terbatas dan teknologi paska panen yang belum efisien • Harga benih unggul yang masih mahal bagi para petani 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur
SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Masih sedikitnya kelompok tani yang sudah terbentuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan petani yang masih lemah dan belum mengarah kepada akses modal • Kompetensi SDM petani yang belum optimal 	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Beras (2)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Tata Niaga	<ul style="list-style-type: none">• Stok beras dari Pemerintah yang terbatas• Peran BUMD yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya manajemen stok saat ini• Mata rantai distribusi yang masih terlalu panjang• Penentuan harga yang masih cenderung mengikuti <i>price setter</i>• Ketidakmerataan distribusi karena tidak tersedianya pasar induk di wilayahnya• Belum adanya perlindungan hasil produksi pertanian• Distribusi barang sepenuhnya mengikuti harga pasar sehingga seringkali terjadi <i>shortage</i>• Petani masih belum terlalu berminat terhadap sistem resi gudang	<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Beras (3)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Konsumsi	<ul style="list-style-type: none">Ekspektasi masyarakat akan konsumsi yang meningkat dalam hari-hari tertentu	<ul style="list-style-type: none">Tingginya konsumsi per kapita masyarakat yang melebihi nasionalBelum terdapat mekanisme pengendalian ekspektasi masyarakat yang optimal	<ul style="list-style-type: none">BantenJawa BaratDKI JakartaJawa TengahDIYJawa Timur
Distribusi	<ul style="list-style-type: none">Operasi pasar yang kurang optimal karena rendahnya penyerapan oleh masyarakatProduksi padi yang langsung diambil oleh pengepul di lokasi pertanian	<ul style="list-style-type: none">Kendala infrastruktur yang tidak efisien	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Daging Ayam Ras (I)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya harga pakan ternak yang sebagian besar merupakan impor (70% dari HPP) • Pasokan DOC dan pakan yang masih terkonsentrasi pada beberapa distributor saja • Kebijakan pembatasan DOC yang dirasa kurang tepat akan mendorong kenaikan harga • Kondisi cuaca yang dapat membuat ayam rentan terhadap penyakit • Pengajuan lokasi peternakan yang hanya 2 tahun sehingga menghambat para peternak 	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan harga DOC dan pakan ternak oleh hanya beberapa perusahaan besar saja dan saat ini cukup mahal • <i>Sub Divre</i> yang tidak memiliki gudang untuk stok ayam • Kecenderungan defisit produksi daging ayam ras untuk menjaga harga yang tinggi • Belum terdapatnya teknologi untuk meningkatkan kuantitas produksi • Keterbatasan lahan peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur
Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> • Lonjakan konsumsi pada hari-hari besar keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat arah substitusi masyarakat dari daging sapi ke daging ayam 	
Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan BBM yang akan berdampak pada biaya distribusi 		

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Daging Ayam Ras (2)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Tata Niaga	<ul style="list-style-type: none"> Operasi Pasar pada waktu tertentu, seperti pada saat mogok pedagang dll 	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pasokan dari daging ayam yang belum diatur dengan jelas dan kurangnya pasokan ke pasar Terdapat indikasi adanya permainan dari beberapa pedagang besar Peternak belum memiliki sistem yang terintegrasi dari tanam-jual hasil ternak 	<ul style="list-style-type: none"> Banten Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Tengah DIY Jawa Timur

Telur Ayam Ras (1)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> Lonjakan konsumsi pada hari-hari besar keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan telur melalui kerjasama dengan daerah surplus 	<ul style="list-style-type: none"> Banten Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Tengah DIY Jawa Timur
Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan BBM yang akan berdampak pada biaya distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> Memetakan jalur distribusi komoditas telur untuk pemerataan pasokan 	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Telur Ayam Ras (2)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya harga pakan ternak yang sebagian besar merupakan impor (70% dari HPP) • Pasokan DOC dan pakan yang masih terkonsentrasi pada beberapa distributor saja • Kebijakan pembatasan DOC yang dirasa kurang tepat akan mendorong kenaikan harga • Kondisi cuaca yang dapat membuat ayam rentan terhadap penyakit • Ayam petelur yang seringkali dialihkan menjadi ayam pedaging karena kebutuhan pasokan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan harga DOC dan pakan ternak oleh hanya beberapa perusahaan besar saja dan saat ini cukup mahal • Distribusi telur ayam yang tidak terstruktur • Kecenderungan defisit produksi daging ayam ras untuk menjaga harga yang tinggi • Belum terdapatnya teknologi untuk meningkatkan kuantitas produksi • Keterbatasan lahan peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur
Tata Niaga	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidak-cocokan produksi telur dengan kebutuhan konsumsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pasokan telur ayam yang belum diatur dengan jelas dan ketidak-pastian pasokan ke pasar • Terdapat indikasi adanya permainan dari beberapa pedagang besar 	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Cabai Merah (I)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi	<ul style="list-style-type: none">• Karakteristik cabai merah yang tidak tahan lama• Produksi cabai yang sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan OPT• Kurangnya penerapan teknologi tepat guna• Modal yang dibutuhkan petani cukup besar, sekitar 3 kali lebih mahal dari padi• Pembiayaan yang masih terbatas• Kesiambungan produksi yang belum teratur	<ul style="list-style-type: none">• Ketergantungan pada produsen yang terkonsentrasi di Jawa• Fasilitas <i>cold storage</i> yang masih sangat terbatas	<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur
SDM	<ul style="list-style-type: none">• Masih sedikitnya Gapoktan dan ketergantungan kepada tengkulak• Kecenderungan para petani untuk serentak dalam menanam maupun tidak menanam	<ul style="list-style-type: none">• Ilmu budidaya tanam cabai yang masih kurang• Petani belum sepenuhnya paham akan pedoman <i>Goods Handling Product (GHP)</i>	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Cabai Merah (2)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Tata Niaga	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakpastian harga jual cabai merah • Pihak pasar tidak bisa melakukan sistem <i>buffer stock</i> karena pasokan yang tidak teratur 	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur tata niaga yang masih cenderung panjang • Pembentukan harga yang tergantung oleh para pedagang besar • Hasil produksi cabai selalu dibeli oleh ibukota 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur
Konsumsi		<ul style="list-style-type: none"> • Pola konsumsi masyarakat yang menyukai cabai merah segar 	
Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem <i>packaging</i> yang kurang memadai untuk penyimpanan yang tahan lama 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terkonsentrasi pada moda transportasi darat dan belum menggunakan kereta api 	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Bawang Merah (I)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> • Pola konsumsi yang meningkat menjelang hari besar keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tinggi preferensi masyarakat terhadap produk segar 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur
Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan kebijakan harga referensi dalam rangka memprioritaskan produksi dalam negeri • Kurangnya penerapan teknologi terapan • Kondisi cuaca dan serangan OPT yang sangat berpengaruh pada produksi • Modal tanam yang lebih mahal dibandingkan padi dengan tingkat risiko yang lebih tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesadaran terkait pengaturan pola tanam • Tingginya tingkat alih lahan pertanian • Keterbatasan pembiayaan mengingat kebutuhan dana yang besar • Terbatasnya ketersediaan dan lokasi gudang yang layak untuk produk pertanian. Penanganan pasca panen menggunakan <i>cold storage</i> masih terbatas jumlahnya. 	
SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Masih sedikitnya Gapoktan dan ketergantungan kepada tengkulak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan belum mengarah pada akses modal pembiayaan • Ilmu budidaya yang masih rendah dan pemahaman GHP yang masih rendah 	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Bawang Merah (2)			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Tata Niaga		<ul style="list-style-type: none">• Mata rantai yang masih panjang dan <i>price setting</i> yang cenderung mengikuti harga tertinggi (pasar induk di kota besar)	
Distribusi	<ul style="list-style-type: none">• Sistem <i>packaging</i> yang kurang memadai untuk penyimpanan yang tahan lama	<ul style="list-style-type: none">• Banyaknya akses jalan ke sentra produksi yang rusak atau belum tersedia.• Terbatasnya alternatif moda transportasi barang dari sentra produksi.	<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Identifikasi Permasalahan Inflasi Administered Prices

Angkutan Dalam dan Luar Kota dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
I. Angkutan Dalam dan Luar Kota			<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Timur
	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan kuantitas transportasi angkutan • Fluktuasi harga BBM yang mengikuti harga minyak dunia yang merupakan komponen biaya terbesar • Cukup tingginya biaya <i>sparepart</i> yang mayoritas merupakan barang impor • Peningkatan ekspektasi yang memicu kenaikan harga 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi infrastruktur yang belum baik sehingga menyebabkan kemacetan • Tantangan dalam pengalihan ke BBG • Kondisi di lapangan harga tarif angkutan tidak sesuai dengan ketentuan. Bersifat responsif terhadap kenaikan harga BBM. • Pertumbuhan jumlah kendaraan yang lebih tinggi dari pembangunan jalan baru 	
2. Bahan Bakar Rumah Tangga			<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • Jawa Timur • DIY
	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko kenaikan harga gas LPG 3kg pada momen hari besar keagamaan • Meningkatkan permintaan gas LPG 3kg paska kenaikan gas LPG 12kg • Distribusi LPG 3 kg yang belum dikelola dengan baik dan masih bersifat terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> • Tata niaga komoditas strategis yang pengaturannya sulit diaplikasikan. • Kekurangan SDM mengakibatkan pengisian ulang gas memakan waktu lama, dan mempengaruhi kelangsungan stok gas • Pengawasan pemerintah terhadap agen penjual masih belum optimal 	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Administered Prices*

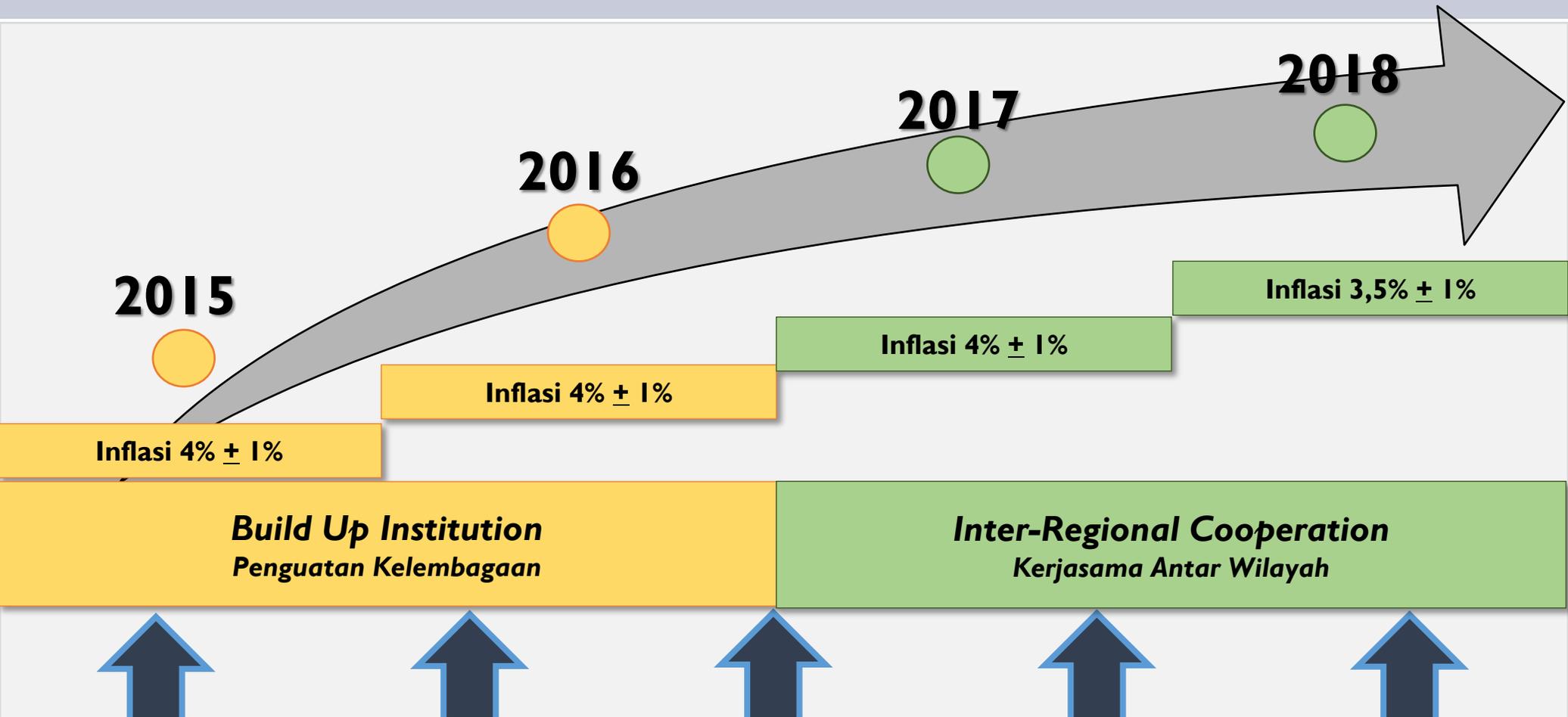
Rokok Kretek Filter dan Tarif Listrik			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
3. Rokok Kretek Filter			
	<ul style="list-style-type: none">• Perubahan harga rokok terjadi di tingkat pedagang eceran• Terus meningkatnya cukai rokok		<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Tengah
4. Tarif Listrik			
	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan kenaikan tarif tenaga listrik• Belum terdapat mekanisme pengendalian ekspektasi masyarakat yang optimal.	<ul style="list-style-type: none">• Rasio elektrifikasi yang masih cukup rendah• Besaran subsidi listrik yang turut andil dalam lonjakan harga dimana sebagian besar masyarakat masih merasakan manfaat subsidi• Penggunaan variabel inflasi dalam penetapan tarif berpotensi menimbulkan efek spiral inflasi	<ul style="list-style-type: none">• Jawa Tengah• Jawa Timur• DIY

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Administered Prices*

Bensin			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
5. Bensin			
	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan harga harga BBM domestik mengacu pada harga minyak dunia dan dipengaruhi kurs• Masyarakat cukup responsif dengan kenaikan harga BBM	<ul style="list-style-type: none">• Besarnya ketergantungan BBM oleh moda transportasi darat yang mendominasi moda transportasi di Jawa• Belum terdapat transportasi publik yang tertata rapi dengan frekuensi yang terjadwal	<ul style="list-style-type: none">• Jawa Timur• DIY

3.3 *Roadmap* Pengendalian Inflasi – Jawa

Roadmap Pengendalian Inflasi



Strategi Pengendalian Inflasi TPID Kawasan Jawa

Penguatan Fungsi Kelembagaan dan Regulasi (s.d level Kab/Kota)

1

Produksi, Distribusi dan Konektivitas

2

Kerjasama dan Sinergi Antar Daerah (Pusat, Provinsi dan Kab/Kota)

3

Riset dan Informasi

4

Ekspektasi Masyarakat (Komunikasi dan Edukasi)

5

Roadmap Pengendalian Inflasi Inti

Sewa Rumah

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang Diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Keterbatasan lahan disertai dengan perkembangan penduduk yang cepat	<ul style="list-style-type: none">▪ Mendorong pemerintah daerah dalam pembenahan <i>property residential</i>▪ Mendorong pemerintah daerah dalam memanfaatkan lahan tidak produktif	<ul style="list-style-type: none">▪ Mendorong pemerintah dalam edukasi pemanfaatan bangunan/ rumah <i>second</i> untuk hunian▪ Mendorog pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah rusunawa		<ul style="list-style-type: none">• DKI Jakarta• DIY
Kenaikan tarif sewa seiring dengan peningkatan jumlah mahasiswa dan tarif listrik	<ul style="list-style-type: none">▪ Sosialisasi hemat energi	<ul style="list-style-type: none">▪ Sosialisasi hemat energi		<ul style="list-style-type: none">• DKI Jakarta• DIY

Roadmap Pengendalian Inflasi Inti

Semen

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang Diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Meningkatnya permintaan semen akibat tingginya kebutuhan perumahan seiring peningkatan jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none">▪ Pemenuhan kebutuhan semen dari pabrik▪ Koordinasi dengan produsen untuk menjaga pasokan semen	<ul style="list-style-type: none">▪ Inisiasi penyediaan rumah murah bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyediaan rumah murah	<ul style="list-style-type: none">• Jawa Barat

Roadmap Pengendalian Inflasi Inti

Tukang Bukan Mandor (I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang Diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Kenaikan UMP berdampak pada upah tukang bukan mandor	<ul style="list-style-type: none">▪ Edukasi metode perhitungan upah menggunakan pendekatan produktivitas▪ Sosialisasi penerapan metode perhitungan upah menggunakan pendekatan produktivitas	<ul style="list-style-type: none">▪ Penentuan upah ditetapkan menggunakan produktivitas		<ul style="list-style-type: none">• Jawa Tengah• Jawa Timur
Jumlah tenaga kerja bangunan belum mencukupi	<ul style="list-style-type: none">▪ Identifikasi kebutuhan tenaga kerja bangunan tukang bukan mandor dalam jumlah mencukupi▪ Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tukang bukan mandor 50% dari total kebutuhan	<ul style="list-style-type: none">▪ Tersedianya tenaga kerja bangunan sesuai kebutuhan		<ul style="list-style-type: none">• Jawa Tengah• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Inti

Tukang Bukan Mandor (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang Diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Permintaan makanan jadi yang tinggi sehubungan dengan banyaknya pendatang untuk bekerja	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengelolaan ekspektasi konsumen	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengelolaan ekspektasi konsumen		<ul style="list-style-type: none">• Jawa Tengah• Jawa Timur
Rigiditas harga makanan jadi yang umumnya naik pada saat harga bahan baku naik tinggi namun tidak turun kembali ketika harga bahan baku turun.	<ul style="list-style-type: none">▪ Peningkatan program pengendalian harga pangan▪ Pengelolaan ekspektasi pedagang	<ul style="list-style-type: none">▪ Peningkatan program pengendalian harga pangan▪ Pengelolaan ekspektasi pedagang		<ul style="list-style-type: none">• Jawa Tengah• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang Diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>Permasalahan Produksi</p> <p>a. Potensi gangguan cuaca (kekeringan maupun banjir)</p> <p>b. Serangan organisme pengganggu tanaman padi</p> <p>c. Harga benih unggul yang masih mahal bagi para petani</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembukaan waduk untuk pompanisasi pengairan sawah ▪ Normalisasi jaringan irigasi ▪ Penyediaan pompa-pompa air ▪ Melakukan operasi giring gilir air ▪ Peningkatan sarana produksi padi serta percepatan penanaman padi ▪ Percepatan penanaman padi ▪ Sekolah Lapang Pertanian Terpadu ▪ Pengembangan bibit padi amfibi yang menggunakan sedikit air ▪ Perbaiki irigasi dan pembuatan sumur pantek 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemakaian dan pengembangan bibit padi amfibi yang menggunakan sedikit air ▪ Inisiasi program <i>urban farming</i> ▪ Peningkatan produktivitas melalui peningkatan teknologi ▪ Teknologi Irigasi Interminten (SRI) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diseminasi proyeksi cuaca selama setahun per bulan. ▪ Pembuatan <i>Early Warning System</i> (EWS) cuaca ekstrim ▪ Mengantisipasi kekeringan akibat El Nino yang dapat menyebabkan gagal panen dan terhambatnya pasokan 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang Diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>Permasalahan Produksi</p> <p>a. Potensi gangguan cuaca (kekeringan maupun banjir)</p> <p>b. Serangan organisme pengganggu tanaman padi</p> <p>c. Harga benih unggul yang masih mahal bagi para petani</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi penanaman palawija pada saat El Nino ▪ Peningkatan stok dalam menghadapi kendala mundurnya panen raya maupun kesulitan distribusi akibat cuaca ▪ Pengembangan benih label putih menjadi label ungu ▪ Teknologi Irigasi Intermitten (SRI) ▪ Optimalisasi kecukupan pemenuhan air menggunakan air tanah ▪ Pemanfaatan gudang milik Pemerintah maupun swasta untuk penyimpanan 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membantu pembuatan bendungan, embung-embung dan sumur bor ▪ Membangun tempat penampungan air ▪ Subsidi pupuk dan benih unggul 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (3)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang Diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>Permasalahan Produksi</p> <p>a. Potensi gangguan cuaca (kekeringan maupun banjir)</p> <p>b. Serangan organisme pengganggu tanaman padi</p> <p>c. Harga benih unggul yang masih mahal bagi para petani</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Sekolah Lapang Petani▪ Penguatan logistik serta implementasi sistem manajemen stok, termasuk melalui kerjasama dengan daerah lain			<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (4)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Pola tanam yang belum terorganisir dengan baik	<ul style="list-style-type: none">▪ Pemetaan pola tanam di tiap sentra produksi komoditas pertanian di Jawa Tengah .▪ Penyuluhan Gapoktan di sentra produksi mengenai pengaturan pola tanam.▪ Kerja sama dan koordinasi antar kabupaten/kota terkait pembagian pola tanam.▪ Melanjutkan penyuluhan dan pembinaan Gapoktan di sentra produksi mengenai pengaturan pola tanam.▪ Pembentukan peraturan pola tanam berkesinambungan.▪ Implementasi pengaturan pola tanam berkesinambungan.	<ul style="list-style-type: none">▪ Ketersediaan stok terjaga secara terus menerus dengan pengaturan pola tanam.▪ Seluruh Gapoktan di sentra produksi mengimplementasikan pola tanam yang berkesinambungan.	<ul style="list-style-type: none">▪ Penentuan pengaturan pola tanam dalam skala nasional	<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (5)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Pola tanam yang belum terorganisir dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komunikasi dan sosialisasi kebijakan kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota terkait pola tanam. ▪ Pengawasan pola tanam. 			<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur
Operasi pasar yang kurang optimal karena rendahnya penyerapan oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usulan pembentukan BULOG <i>Divre</i> Provinsi ▪ Bekerjasama dengan BULOG untuk melakukan Operasi Pasar Beras ▪ Standarisasi kualitas beras operasi pasar ▪ Peningkatan koordinasi dengan LDPM/ Gapoktan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi standar kualitas beras operasi pasar ▪ Penguatan koordinasi dengan LDPM/ Gapoktan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan struktur organisasi BULOG sehingga memiliki <i>divre</i> di setiap Provinsi. 	

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (6)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Keterbatasan pencetakan lahan baru dan derasnya alih fungsi lahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sinkronisasi rencana tata ruang pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian. ▪ Melakukan studi kelayakan dan pencetakan lahan sawah baru ▪ Pengaturan Tabulampot dan Penyisihan Lahan Pekarangan untuk ditanami sayuran dan buahbuahan sebagai wujud dari program pertanian dalam perkotaan terus digalakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak adanya pengalihan fungsi lahan pertanian. ▪ Pengaturan lahan yang hanya memperkenankan penjualan lahan pertanian ke petani. ▪ Pengaturan Tabulampot dan Penyisihan Lahan Pekarangan untuk ditanami sayuran dan buahbuahan sebagai wujud dari program pertanian dalam perkotaan terus digalakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penegakan hukum yang tegas terkait larangan alih fungsi lahan pertanian ▪ <i>Survey Investigasi Design (SID)</i> untuk cetak sawah baru di tahun 2016 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (7)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Keterbatasan pencetakan lahan baru dan derasnya alih fungsi lahan	<ul style="list-style-type: none">▪ Tercapainya jumlah penyuluh pertanian minimum 1 Desa = 1 Penyuluh▪ Edukasi kepada Gapoktan di sentra produksi terkait alih fungsi lahan pertanian▪ Pembuatan keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota mengenai alih fungsi lahan pertanian▪ Mengawasi pelaksanaan kebijakan terkait alih fungsi lahan pertanian▪ Mengaktifkan kembali lahan nonproduktif.▪ Melanjutkan edukasi kepada Gapoktan di sentra produksi terkait alih fungsi lahan pertanian.			<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (8)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>Minimnya teknologi pertanian dalam produksi maupun paska panen yang belum efisien</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tercapainya komitmen antara Dinas Pertanian, BMKG, konsultan, dan akademisi untuk fokus membantu peningkatan produksi pertanian. ▪ Merancang dan implementasi <i>pilot project</i> penggunaan teknologi modern dalam pertanian. ▪ Edukasi pentingnya pemanfaatan teknologi pertanian. ▪ Penggunaan bibit unggul ▪ <i>Pilot Project</i> metode budidaya mutakhir ▪ Terbentuknya minimum 1 kelurahan = 1 lumbung pangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh Gapoktan di sentra produksi menggunakan teknologi modern dalam bercocok tanam. ▪ Peningkatan produktivitas yang maksimal. ▪ Kehilangan paska panen dari GKG menjadi beras maksimum 5%. ▪ Pengadaan <i>Rice Milling Unit</i> berkapasitas besar ▪ Dukungan teknologi mencapai 40% dari operasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian bantuan mesin untuk mekanisasi pertanian Jawa Tengah. ▪ Peningkatan alokasi APBN untuk sektor pertanian. ▪ R&D benih tahan OPT 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (9)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Minimnya tekonologi pertanian dalam produksi maupun paska panen yang belum efisien	<ul style="list-style-type: none">▪ Peningkatan inovasi varietas unggul▪ Implementasi penggunaan teknologi modern dalam bercocok tanam (minimal 60%).▪ Pemberian bantuan mesin untuk mekanisasi pertanian.▪ Pelatihan peningkatan kompetensi Gapoktan di sentra produksi mengenai mekanisasi pertanian.▪ Penggunaan budidaya terkini			<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (10)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Kelembagaan petani yang masih lemah dan belum mengarah kepada akses modal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyuluhan keuangan inklusif kepada Gapoktan di sentra produksi ▪ Pelatihan pengelolaan keuangan serta sosialisasi skema kredit kepada Gapoktan di sentra produksi ▪ Membantu petani dalam mendapatkan fasilitasi pembiayaan atau menjadi <i>bankable</i> ▪ Keterlibatan Pemda (Pemprov dan Pemkab/kot) dan BPD dalam pembinaan usaha pertanian sehingga layak memperoleh pembiayaan (melalui <i>technical assistance</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menciptakan agar seluruh sektor usaha pertanian sudah <i>bankable</i> ▪ Pemanfaatan dan Revitalisasi Sistem Resi Gudang (RSG) di sentra produksi padi. ▪ Penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian mencapai 5% dari total kredit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan agar perbankan dapat menyalurkan pembiayaan kepada sektor pertanian ▪ Mendorong pemanfaatan dan peningkatan penyaluran kredit program (KKPE) ▪ Dukungan kebijakan dan dana dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (II)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Kelembagaan petani yang masih lemah dan belum mengarah kepada akses modal	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyaluran bantuan modal dan sosial melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat kepada Gapoktan binaan BKPP▪ Pemerintah pusat yang dikelola untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi▪ Memberikan bantuan dana dari Pemerintah pusat yang dikelola untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi▪ Pengenalan dan pembentukan kelembagaan petani (koperasi dan kluster)			<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (12)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Kelembagaan petani yang masih lemah dan belum mengarah kepada akses modal	<ul style="list-style-type: none">▪ Membentuk dan memperkuat lembaga pendamping (pola PHBK).▪ Penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian mencapai 3,5% dari total kredit.▪ Meningkatkan akses permodalan petani▪ Pelatihan manajemen keuangan			<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (13)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Mata rantai distribusi yang masih terlalu panjang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan rantai distribusi komoditas pangan strategis ▪ Inisiasi kerjasama antar daerah ▪ Rehabilitasi dan revitalisasi pasar ▪ Pemetaan produksi pangan dan pola perdagangan antar daerah. ▪ Terlaksananya operasi pasar (bantuan ongkos angkut) saat <i>peak season</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh sentra produksi telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memperpendek rantai distribusi. ▪ Seluruh sentra produksi memiliki pusat lelang komoditas baik secara fisik maupun <i>online</i>. ▪ Alternatif penggunaan jalur kereta api sebagai salah satu sistem logistik pangan. ▪ Pengintegrasian SRG untuk kemudahan informasi data stok produksi ▪ Pelaksanaan model kerjasama antar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gudang disediakan oleh Bappebti, <i>supply</i> data dari Disperindag, dan sistem informasi logistik dari PT POS ▪ Dukungan pengaturan dan dana dari APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (14)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Mata rantai distribusi yang masih terlalu panjang	<ul style="list-style-type: none">▪ Adanya kerjasama Gapoktan antar kabupaten/kota untuk mencukupi kebutuhan bahan pangan masing-masing, untuk memperpendek jalur distribusi▪ Penguatan LDPM dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat▪ Mendorong implementasi peraturan Mendag perihal penataan dan pembinaan gudang▪ Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperpendek rantai distribusi	<ul style="list-style-type: none">▪ Analisis pembentukan “rice estate” dan peningkatan peran BUMD dalam tata niaga beras.▪ Rehabilitasi dan revitalisasi pasar		<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (15)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Mata rantai distribusi yang masih terlalu panjang	<ul style="list-style-type: none">▪ Adanya kerjasama mengoptimalkan peran lelang komoditas baik secara fisik maupun <i>online</i>▪ Alternatif pemanfaatan jalur kereta api untuk memperpendek rantai distribusi▪ Mendorong BUMN untuk menunjang logistik pangan.			<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (16)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Peran BUMD yang belum optimal serta masih kurangnya kerjasama antar daerah	<ul style="list-style-type: none">▪ Penguatan peran BUMD dalam mendukung stabilisasi harga▪ Meningkatkan efektivitas BULOG dan Gapotan dalam menampung hasil panen petani▪ Penguatan fungsi LDPM sebagai cadangan beras masyarakat.▪ Identifikasi program TPID yang dapat diselaraskan dengan program kab/kota dan koordinasi antar TPID▪ Penyusunan model kerjasama antar daerah▪ Peningkatan koordinasi antar Gapoktan	<ul style="list-style-type: none">▪ Adanya kerjasama Gapoktan antar kabupaten/kota untuk mencukupi kebutuhan bahan pangan masing-masing, untuk memperpendek jalur distribusi▪ Penguatan LDPM dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat▪ Tersedianya informasi stok pangan di gudang swasta		<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (17)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Peran BUMD yang belum optimal serta masih kurangnya kerjasama antar daerah	<ul style="list-style-type: none">Adanya kerjasama Gapoktan antar kabupaten/kota untuk mencukupi kebutuhan bahan pangan masing-masing, untuk memperpendek jalur distribusi			<ul style="list-style-type: none">BantenJawa BaratDKI JakartaJawa TengahDIYJawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (18)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Kompetensi SDM petani yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan LDPM dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat dari sisi SDM ▪ Edukasi untuk peningkatan SDM petani 			<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur
Tingginya konsumsi per kapita masyarakat yang melebihi nasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program <i>one day no rice</i> ▪ Identifikasi substitusi beras ▪ Menjaga ekspektasi masyarakat agar belanja bijak pada saat <i>peak season</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program <i>one day no rice</i> ▪ Internaliasi konsumsi substitusi beras 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi substitusi beras berdasarkan preferensi konsumen pada saat program <i>one day no rice</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (19)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>a. Belum terdapat mekanisme pengendalian ekspektasi masyarakat yang optimal</p> <p>b. Penentuan harga yang masih cenderung mengikuti <i>price setter</i> dan juga asimetri harga</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan program pengelolaan ekspektasi masyarakat. ▪ Implementasi program pengelolaan ekspektasi masyarakat. ▪ Keterlibatan Gubernur dan Pemprov dalam berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat. ▪ Optimalisasi ketersediaan dan pengkinian data bagi Informasi harga pasar PIHPS ▪ <i>Tagline</i> info harga pasar melalui tv dan radio 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlibatan Camat dalam berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat. ▪ Informasi papan harga yang terintegrasi dengan PIHPS Provinsi dan PIHPS Nasional ▪ Penambahan informasi harga produsen pada PIHPS ▪ Terbentuknya <i>call center</i> terkait harga dan inflasi ▪ Optimalisasi ketersediaan dan pengkinian data bagi Informasi harga pasar PIHPS 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian informasi harga harian ▪ Kerjasama dalam pengendalian ekspektasi masyarakat ▪ Dana APBN/APBD untuk <i>collecting</i>, administrasi dan pengkinian data 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (20)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
a. Belum terdapat mekanisme pengendalian ekspektasi masyarakat yang optimal b. Penentuan harga yang masih cenderung mengikuti <i>price setter</i> dan juga asimetri harga	<ul style="list-style-type: none">▪ Perlu keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat.▪ Terciptanya mekanisme penanganan berita negatif media yang dapat meningkatkan ekspektasi			<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (21)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Kurangnya kajian dan informasi mengenai pertanian	<ul style="list-style-type: none">▪ Analisis surplus/defisit dan pola produksi▪ identifikasi karakteristik dan sumber inflasi▪ Menciptakan <i>early warning system</i>▪ Membentuk kelompok kerja kajian pertanian▪ Tersusunnya <i>mapping</i> distribusi komoditas antar provinsi▪ Mengefektifkan mekanisme <i>early warning system</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Kajian dan peta distribusi komoditas▪ Mekanisme <i>early warning system</i> secara otomatis		<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (22)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Kendala infrastruktur yang tidak efisien	<ul style="list-style-type: none">▪ Pemetaan kebutuhan infrastruktur pengairan dibandingkan areal tanam▪ Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier▪ Pembangunan waduk baru dan pengerukan waduk yang sudah ada▪ Memperbaiki dan menambah saluran irigasi▪ Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif▪ Reboisasi dalam rangka penghijauan lingkungan▪ Reservasi sumber mata air	<ul style="list-style-type: none">▪ Mengoptimalkan tersedianya irigasi bagi seluruh areal pertanian▪ Melanjutkan reboisasi dalam rangka penghijauan lingkungan▪ Reservasi sumber air untuk pertanian▪ Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	<ul style="list-style-type: none">▪ Melakukan pemetaan jalur irigasi dan merencanakan perbaikan infrastruktur pengairan▪ Memberikan dana untuk perbaikan dan penambahan infrastruktur irigasi	<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai (I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>Permasalahan Produksi:</p> <p>a. Produksi cabai yang sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan OPT</p> <p>b. Pasokan antar waktu cabai merah yang berfluktuasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan kerjasama antar dinas terkait untuk meningkatkan produksi ▪ Pemberian rekayasa kadar air sawah ▪ Pemberian bantuan selang/sarana penyimpanan air ▪ Mengembangkan perdagangan antar daerah dalam diversifikasi pasokan cabai ▪ Mendorong pemerintah dalam membangun gudang penyimpanan yang cocok untuk komoditas cabai ▪ Peningkatan jumlah kluster dan luas lahan bawang merah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan teknologi pertanian di berbagai daerah sentra produksi pangan ▪ Pemberian rekayasa kadar air sawah ▪ Pemberian bantuan selang/sarana penyimpanan air ▪ Mengembangkan perdagangan antar daerah dalam diversifikasi pasokan cabai ▪ Mendorong pemerintah dalam membangun gudang penyimpanan yang cocok untuk komoditas cabai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembiayaan dalam pencetakan tenaga penyuluh yang berkualitas ▪ Pengaturan irigasi ▪ Gerakan Tanam Cabai saat Kemarau ▪ Membentuk aturan dalam mempersingkat rantai perdagangan cabai melakukan pemetaan neraca bahan pangan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Permasalahan Produksi: a. Produksi cabai yang sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan OPT b. Pasokan antar waktu cabai merah yang berfluktuasi	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengembangan <i>urban farming</i>, pertanian perkotaan dengan pendekatan GPOP, Gerakan Tanam Cabai dalam pot, melibatkan KWT dan PKK,▪ Pemanfaatan teknologi budidaya pertanian▪ Perdagangan melalui sistem pasar lelang <i>forward</i>▪ Program Tanam Cabai di Pekarangan Rumah			<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai (3)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>a. Kurangnya penerapan teknologi tepat guna</p> <p>b. Ilmu budidaya tanam cabai yang masih kurang</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendampingan dalam proses produksi ▪ <i>Pilot Project</i> metode tanam mutakhir ▪ Bantuan sarana produksi padi ▪ Peningkatan rumah pangan tiap tahunnya ▪ peningkatan inovasi varietas unggulan ▪ Penambahan jumlah penyuluh ▪ Peningkatan rumah pangan tiap tahunnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan teknologi pengolahan cabai ▪ Dukungan teknologi mencapai 30-40% dari operasional ▪ Pengembangan Pertanian Hayati (<i>biofarming, zero waste, pertanian konservasi, hemat energi, Low External Input Sustainable Agriculture-LEISA</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan dan peningkatan akurasi data ketersediaan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai (4)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Modal yang dibutuhkan petani cukup besar, sekitar 3 kali lebih mahal dari padi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengenalan dan peningkatan akses pembiayaan melalui SRG dan perbankan ▪ Bantuan benih dan bibit ▪ Penyusunan program pengelolaan ekspektasi masyarakat ▪ Insentif modal Gapoktan ▪ Pemanfaatan kredit program ▪ Keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat ▪ Bantuan benih dan bibit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan kelembagaan koperasi tingkat petani ▪ Pengembangan kawasan Horitkultura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan gudang SRG di daerah baru/potensial ▪ Skema pinjaman lunak bagi permodalan petani 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai (5)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>a. Kurang kuatnya kelembagaan petani</p> <p>b. Ketergantungan pada tengkulak</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan peran BUMD mendukung stabilisasi harga ▪ Pemberian bantuan sarana produksi pertanian untuk memutus ketergantungan pada tengkulak ▪ Menginisiasi serta mengoptimisasi pembentukan lembaga penyangga bahan pangan strategis untuk mengatasi pasar oligopoli. ▪ Optimalisasi penggunaan gudang <i>pooling commodity</i> sebagai bagian dari rantai tata niaga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan peran BUMD mendukung stabilisasi harga ▪ Lembaga penyangga berperan aktif dalam menjaga kestabilan harga pangan strategis ▪ Penggunaan gudang telah dilaksanakan di berbagai daerah dan terintegrasi dalam satu sistem informasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kebijakan lembaga penyangga bahan pangan ▪ Penyediaan hibah kegiatan pertanian produktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai (6)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>a. Kecenderungan para petani untuk serentak dalam menanam maupun tidak menanam</p> <p>b. Kesiambungan produksi yang belum teratur</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan <i>sharing</i> informasi stok dan harga antar daerah ▪ Revitalisasi pasar ▪ Pembagian zona penanaman cabai ▪ Tercapainya jumlah penyuluh pertanian minimum 1 Desa = 1 Penyuluh ▪ Kestabilan data dan informasi stok barang di tiap daerah yang dibantu oleh pemerintah beserta <i>stakeholder</i> lain. ▪ Penerapan metode <i>off season</i> untuk seluruh wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan metode <i>off season</i> untuk seluruh wilayah ▪ Meningkatkan produktifitas melalui penciptaan bibit unggul yang tahan terhadap hama/penyakit dan curah hujan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revitalisasi pasar yang dikelola oleh pemerintah ▪ Dana untuk perbaikan dan penambahan infrastruktur dan permodalan pasar lelang ▪ Peningkatan implementasi jadwal tanam 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai (7)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
a. Kecenderungan para petani untuk serentak dalam menanam maupun tidak menanam b. Kesiambungan produksi yang belum teratur	<ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatkan produktifitas melalui penciptaan bibit unggul yang tahan terhadap hama/penyakit dan curah hujan			<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai (8)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>a. Ketidakpastian harga jual cabai merah</p> <p>b. Keberlanjutan kebijakan harga referensi dalam rangka memprioritaskan produksi dalam negeri</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Kemitraan dengan perusahaan (kerjasama penjualan kepada perusahaan pengolah)▪ Diversifikasi produk (cabai kering)▪ Penyelesaian sejumlah kendala terkait kerjasama antar daerah baik pada aspek institusional maupun teknis▪ Identifikasi pola produksi dalam mengatur pasokan cabai merah▪ <i>Channel of distribution</i> yang diperpendek untuk menjaga kualitas dan harga	<ul style="list-style-type: none">▪ Kerjasama antar daerah dalam identifikasi pola produksi dalam mengatur pasokan cabai merah▪ Mendorong pembenahan jalur distribusi vital melalui pembangunan infrastruktur strategis (pelabuhan, jalur kereta logistik)		<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai (9)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Jalur tata niaga yang masih cenderung panjang	<ul style="list-style-type: none">▪ Terlaksananya operasi pasar (bantuan ongkos angkut) saat <i>peak season</i>▪ Meningkatkan koordinasi dengan PD pasar dan asosiasi produsen▪ Kerjasama Gapoktan antar kabupaten/kota untuk mencukupi kebutuhan bahan pangan masing-masing, sehingga tidak melewati jalur distributor/pedagang▪ Terlaksananya operasi pasar (bantuan ongkos angkut) saat <i>peak season</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Terbentuknya sistem distribusi dan logistik yang efektif dan efisien (contoh: kereta api)	<ul style="list-style-type: none">▪ Dukungan regulasi untuk mengatasi masalah <i>channel of distribution</i>	<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai (10)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Jalur tata niaga yang masih cenderung panjang	<ul style="list-style-type: none">▪ Terciptanya kerjasama operasi pasar antara pelaksanan Pemerintah dengan klaster binaan SKPD▪ Pengaturan alokasi distribusi untuk meningkatkan fungsi <i>buffer</i>			<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai (II)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Pembentukan harga yang tergantung oleh para pedagang besar	<ul style="list-style-type: none">▪ Penguatan Pengetahuan Petani di bidang produksi, sistem perbenihan, sistem perlindungan, kawasan, GAP/GHP, pasar dan permodalan▪ Penguatan jejaring kerja intra dan antar pelaku usaha hortikultura▪ Penguatan koordinasi antar Gapoktan▪ Penetapan harga pokok perolehan (HPP) cabai.▪ Penguatan koordinasi antar Gapoktan	<ul style="list-style-type: none">▪ Program sertifikasi lahan▪ Pelatihan dan pengenalan pembiayaan pertanian▪ Penetapan harga pokok perolehan (HPP) cabai.▪ Informasi perkembangan harga pasar, produksi dan areal/masa tanam dan masa panen cabai melalui PIHPS		<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai (12)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Pembentukan harga yang tergantung oleh para pedagang besar	<ul style="list-style-type: none">▪ Penetapan harga pokok perolehan (HPP) cabai.▪ Informasi perkembangan harga pasar, produksi dan areal/masa tanam dan masa panen cabai melalui PIHPS			<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai (13)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Pola konsumsi masyarakat yang menyukai cabai merah segar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Edukasi kepada masyarakat untuk mengkonsumsi produk olahan cabai. ▪ Sosialisasi penggunaan produk cabe olahan ▪ Mendorong pembentukan industri pengolah cabai. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat menggunakan produk olahan cabai dalam konsumsi keseharian ▪ Sosialisasi penggunaan produk cabe olahan 		<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur
Kompetensi SDM petani yang masih perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kompetensi petani melalui pelatihan ▪ Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelanjutan peningkatan jumlah kualitas penyuluh pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan kurikulum penyuluh yang komprehensif ▪ Peningkatan anggaran pendidikan terkait pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai (14)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>a. Keterbatasan Transportasi dan Infrastruktur</p> <p>b. Terbatasnya ketersediaan dan lokasi gudang yang layak untuk produk pertanian</p> <p>c. Fasilitas <i>cold storage</i> yang masih sangat terbatas</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Penambahan alat angkut dan perbaikan jalan▪ Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	<ul style="list-style-type: none">▪ Penambahan alat angkut dan perbaikan jalan▪ Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif▪ Perbaikan fasilitas dan infrastruktur pasar▪ Pembuatan terminal agribisnis▪ Tersedianya gudang yang layak di seluruh sentra produksi		<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai (15)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>a. Keterbatasan Transportasi dan Infrastruktur</p> <p>b. Terbatasnya ketersediaan dan lokasi gudang yang layak untuk produk pertanian</p> <p>c. Fasilitas <i>cold storage</i> yang masih sangat terbatas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitasi/ perbaikan fasilitas dan merevitalisasi pasar demi mengoptimalkan potensi pasar untuk memenuhi kebutuhan pokok warga sekitar ▪ Pemetaan kebutuhan dan ketersediaan gudang yang layak di sentra produksi ▪ Edukasi mengenai manfaat dan pentingnya sistem resi gudang ▪ Pembangunan gudang logistik yang layak minimal di 80% sentra produksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem resi gudang sudah berjalan di seluruh sentra produksi ▪ Tersedianya gudang-gudang baik Pemerintah dan swasta dengan fasilitas <i>cold storage</i> yang memadai 		<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai (16)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
a. Keterbatasan transportasi dan infrastruktur b. Terbatasnya ketersediaan dan lokasi gudang yang layak untuk produk pertanian c. Fasilitas <i>cold storage</i> yang masih sangat terbatas	<ul style="list-style-type: none">▪ Melanjutkan edukasi mengenai manfaat dan pentingnya sistem resi gudang.▪ Pembentukan sistem resi gudang minimal di 80% sentra produksi			<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>Permasalahan Produksi:</p> <p>a. Produksi bawang merah yang sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan OPT</p> <p>b. Waktu pasokan yang berfluktuasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan kerjasama antar dinas terkait untuk meningkatkan produksi ▪ Pemberian rekayasa kadar air sawah ▪ Pemberian bantuan selang/sarana penyimpan air ▪ Mengembangkan perdagangan antar daerah dalam diversifikasi pasokan cabai ▪ Mendorong pemerintah dalam membangun gudang penyimpanan yang cocok untuk bawang merah ▪ Peningkatan jumlah kluster dan luas lahan bawang merah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan teknologi pertanian di berbagai daerah sentra produksi pangan ▪ Pemberian bantuan selang/sarana penyimpan air ▪ Mengembangkan perdagangan antar daerah dalam diversifikasi pasokan bawang ▪ Mendorong pemerintah dalam membangun gudang penyimpanan yang cocok untuk komoditas bawang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembiayaan dalam pencetakan tenaga penyuluh yang berkualitas ▪ Pengaturan irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (3)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Permasalahan Produksi: a. Produksi bawang merah yang sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan OPT b. Waktu pasokan yang berfluktuasi	<ul style="list-style-type: none">▪ Pemanfaatan teknologi budidaya pertanian▪ Perdagangan melalui sistem pasar lelang <i>forward</i>▪ Melakukan kerjasama dalam memasok bawang merah dengan daerah penghasil	<ul style="list-style-type: none">▪ Komoditas bawang▪ Melakukan pendataan pada daerah penghasil bawang merah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jalur distribusi		<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (4)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>a. Kurangnya penerapan teknologi tepat guna</p> <p>b. Ilmu budidaya tanam bawang merah yang masih kurang</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendampingan dalam proses produksi ▪ <i>Pilot Project</i> metode tanam mutakhir ▪ Bantuan sarana produksi padi ▪ Peningkatan rumah pangan tiap tahunnya ▪ Peningkatan inovasi varietas unggulan ▪ Penambahan jumlah penyuluh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan teknologi pengolahan cabai ▪ Dukungan teknologi mencapai 30-40% dari operasional ▪ Pengembangan Pertanian Hayati (<i>biofarming</i>, zero waste, pertanian konservasi, hemat energi, <i>Low External Input Sustainable Agriculture-LEISA</i>) 	<p>Pengembangan dan peningkatan akurasi data ketersediaan pangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (5)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>a. Kurang kuatnya kelembagaan petani</p> <p>b. Ketergantungan pada tengkulak</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan peran BUMD mendukung stabilisasi harga ▪ Diselaraskan dengan program kab/kota ▪ Optimalisasi fungsi lembaga yang ada ▪ Pemberian bantuan sarana produksi pertanian untuk memutus ketergantungan pada tengkulak ▪ Menginisiasi pembentukan dan mengoperasikan lembaga penyangga bahan pangan strategis untuk mengatasi pasar oligopoli. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan peran BUMD mendukung stabilisasi harga ▪ Lembaga penyangga berperan aktif dalam menjaga kestabilan harga pangan strategis ▪ Penggunaan gudang telah dilaksanakan di berbagai daerah dan terintegrasi dalam satu sistem informasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPID menjadi fasilitator inti plasma ▪ Adanya kebijakan lembaga penyangga bahan pangan ▪ Penyediaan hibah kegiatan pertanian produktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (6)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
a. Kurang kuatnya kelembagaan petani b. Ketergantungan pada tengkulak	<ul style="list-style-type: none">Optimalisasi penggunaan gudang <i>pooling commodity</i> sebagai bagian dari rantai tata niaga			<ul style="list-style-type: none">BantenJawa BaratDKI JakartaJawa TengahDIYJawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (7)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>a. Kecenderungan para petani untuk serentak dalam menanam maupun tidak menanam</p> <p>b. Kesiambungan produksi yang belum teratur</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan <i>sharing</i> informasi stok dan harga antar daerah ▪ Revitalisasi pasar ▪ Tercapainya jumlah penyuluh pertanian minimum 1 Desa = 1 Penyuluh ▪ Kestabilan data dan informasi stok barang di tiap daerah yang dibantu oleh pemerintah beserta <i>stakeholder</i> lain. ▪ Penerapan <i>metode off season</i> untuk seluruh wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan metode <i>off season</i> untuk seluruh wilayah ▪ Meningkatkan produktifitas melalui penciptaan bibit unggul yang tahan terhadap hama/penyakit dan curah hujan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revitalisasi pasar yang dikelola oleh pemerintah ▪ Dana untuk perbaikan dan penambahan infrastruktur dan permodalan pasar lelang ▪ Peningkatan implementasi jadwal tanam 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (8)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
a. Kecenderungan para petani untuk serentak dalam menanam maupun tidak menanam b. Kesiambungan produksi yang belum teratur	<ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatkan produktifitas melalui penciptaan bibit unggul yang tahan terhadap hama/penyakit dan curah hujan			<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (9)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Jalur tata niaga yang masih cenderung panjang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan pasar lelang bawang merah. ▪ Terlaksananya operasi pasar (bantuan ongkos angkut) saat <i>peak season</i> ▪ Pengembangan dan penguatan permodalan pasar lelang bawang merah ▪ Kerjasama Gapoktan antar kab/kota untuk mencukupi kebutuhan bahan pangan, sehingga tidak melewati jalur yang panjang ▪ Meningkatkan koordinasi dengan PD pasar dan asosiasi produsen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat suatu <i>distribution center</i> sebagai pemantau distribusi bawang merah ▪ Terbentuknya sistem distribusi dan logistik yang efektif dan efisien (contoh: kereta api) 	Dukungan regulasi untuk mengatasi masalah <i>channel of distribution</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (10)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Jalur tata niaga yang masih cenderung panjang	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembangunan pasar Terlaksananya operasi pasar (bantuan ongkos angkut) saat <i>peak season</i>▪ Terciptanya kerjasama operasi pasar antara pelaksanan Pemerintah dengan klaster binaan SKPD▪ Pengaturan alokasi distribusi untuk meningkatkan fungsi <i>buffer</i>			<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (II)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Pembentukan harga yang tergantung oleh para pedagang besar	<ul style="list-style-type: none">▪ Penguatan Pengetahuan Petani di bidang produksi, sistem perbenihan, sistem perlindungan, kawasan, GAP/GHP, pasar dan permodalan▪ Penguatan jejaring kerja intra dan antar pelaku usaha hortikultura▪ Penguatan koordinasi antar Gapoktan	<ul style="list-style-type: none">▪ Program sertifikasi lahan▪ Pelatihan dan pengenalan pembiayaan pertanian		<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (12)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Pola konsumsi masyarakat yang menyukai cabai merah segar	<ul style="list-style-type: none"> Edukasi kepada masyarakat untuk mengkonsumsi produk olahan bawang merah. Mendorong pembentukan industri pengolah bawang merah. 	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat menggunakan produk olahan bawang merah dalam konsumsi keseharian 		<ul style="list-style-type: none"> Banten Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Tengah DIY Jawa Timur
Kompetensi SDM petani yang masih perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi petani melalui pelatihan Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Kelanjutan peningkatan jumlah kualitas penyuluh pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kurikulum penyuluh yang komprehensif Peningkatan anggaran pendidikan terkait pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Banten Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Tengah DIY Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (13)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>a. Keterbatasan transportasi dan infrastruktur</p> <p>b. Terbatasnya ketersediaan dan lokasi gudang yang layak untuk produk pertanian</p> <p>c. Fasilitas <i>cold storage</i> yang masih sangat terbatas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penambahan alat angkut dan perbaikan jalan ▪ Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif ▪ Rehabilitasi/ perbaikan fasilitas dan merevitalisasi pasar demi mengoptimalkan potensi pasar untuk memenuhi kebutuhan pokok warga sekitar ▪ Pembangunan gudang logistik yang layak minimal di 80% sentra produksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penambahan alat angkut dan perbaikan jalan ▪ Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif ▪ Perbaikan fasilitas dan infrastruktur pasar ▪ Pembuatan terminal agribisnis ▪ Tersedianya gudang yang layak di seluruh sentra produksi ▪ Sistem resi gudang sudah berjalan di seluruh sentra produksi 		<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (14)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>a. Keterbatasan transportasi dan infrastruktur</p> <p>b. Terbatasnya ketersediaan dan lokasi gudang yang layak untuk produk pertanian</p> <p>c. Fasilitas <i>cold storage</i> yang masih sangat terbatas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melanjutkan edukasi mengenai manfaat dan pentingnya sistem resi gudang. ▪ Pemetaan kebutuhan dan ketersediaan gudang yang layak di sentra produksi ▪ Edukasi mengenai manfaat dan pentingnya sistem resi gudang ▪ Pembentukan sistem resi gudang minimal di 80% sentra produksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya gudang-gudang baik Pemerintah dan swasta dengan fasilitas <i>cold storage</i> yang memadai 		<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Tingginya harga pakan ternak yang sebagian besar merupakan impor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjajakan substitusi jagung impor bahan baku pakan ▪ Peningkatan produksi dan penyesuaian kualitas jagung lokal untuk bahan baku pakan ▪ Program peningkatan produksi jagung pipilan sebagai substitusi bahan baku pakan impor. ▪ Menjaga ketersediaan stok dan kestabilan harga melalui subsidi pemerintah ▪ TPID menjadi fasilitator petani jagung dengan perusahaan pakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan teknologi mencapai 40% dari operasional ▪ Terjaganya ketersediaan pakan ayam dan harga yang stabil ▪ Program peningkatan produksi jagung pipilan ▪ R&D substitusi pakan impor. ▪ Tersedianya kebutuhan pakan ternak dalam jumlah cukup dan harga yang terjangkau 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stabilitas Nilai Tukar yang terjaga dan Regulasi Pemerintah Pusat yang dapat menjamin kesinambungan pasokan GPS/DOC dan pakan ▪ Pemberian insentif bagi industri pakan ayam ▪ R&D substitusi pakan impor 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Tingginya harga pakan ternak yang sebagian besar merupakan impor	<ul style="list-style-type: none">▪ Dukungan teknologi mencapai 40% dari operasional▪ Mencari substitusi pakan ayam serta R&D substitusi pakan impor▪ Pembangunan industri pakan ternak			<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur
Distribusi, transportasi dan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">▪ Membangun jaringan toko tani Indonesia dan depo bahan kebutuhan pokok	<ul style="list-style-type: none">▪ Membangun jaringan toko tani Indonesia dan depo bahan kebutuhan pokok	Distribusi, transportasi dan infrastruktur	

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (3)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Kebijakan pembatasan DOC dan impor pakan ternak yang dirasa kurang tepat akan mendorong kenaikan harga	<ul style="list-style-type: none">▪ Jaminan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pakan ternak melalui peningkatan produksi dalam negeri	<ul style="list-style-type: none">▪ Jaminan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pakan ternak melalui peningkatan produksi dalam negeri▪ Mengatur jalur distribusi industri pakan. Khusus untuk penyediaan komoditas jagung sebagai bahan utama pakan ternak perlu ada perbaikan struktur pasar agar harga yang terbentuk lebih efisien.	Kebijakan pembatasan DOC dan impor pakan ternak yang dirasa kurang tepat akan mendorong kenaikan harga	<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (4)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Kebijakan pembatasan DOC dan impor pakan ternak yang dirasa kurang tepat akan mendorong kenaikan harga	<ul style="list-style-type: none">▪ Mekanisme pengendalian jumlah DOC yang saat ini diserahkan pada pengusaha unggas secara suka rela dikuatirkan menjadi sumber baru kartel dalam pengaturan harga (membutuhkan peran Pemerintah)▪ Percepatan penerbitan Permen turunan dari Perpres No. 71 tahun 2015 tentang penetapan kebijakan harga, termasuk penetapan harga acuan	<ul style="list-style-type: none">▪ Implementasi Perpres No.71 Tahun 2015 (antara lain penetapan harga, pengelolaan stok, pengendalian ekspor dan impor)▪ Sinkronisasi industri pakan ternak dalam negeri		<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (5)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Ekspektasi masyarakat dan lonjakan konsumsi pada hari-hari besar keagamaan	<ul style="list-style-type: none">▪ Pendekatan kepada masyarakat melalui forum/kegiatan tertentu untuk mencegah perilaku menimbun dan konsumsi secara berlebih (acara keagamaan)▪ Mensubstitusikan konsumsi ayam ke komoditas lain seperti kambing/domba dan atau ikan	<ul style="list-style-type: none">▪ Masyarakat lebih terkendali dan cerdas dalam mengkonsumsi daging ayam	<ul style="list-style-type: none">▪ Melakukan iklan yang mengkampanyekan substitusi daging ayam ke komoditas lain▪ Pemberian pendekatan melalui acara keagamaan	<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (6)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Masih terbatasnya produksi daging ayam ras	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan permasalahan di rantai pasok daging ayam ▪ Investigasi DOC untuk tidak membatasi pasokan bibit ▪ Menjaga kestabilan stok dan harga pakan ayam ▪ Forum diskusi rutin dengan pelaku daging ayam (peternak, pedagang,) ▪ Bantuan penyediaan air bagi peternak untuk menjaga suhu tubuh ayam ▪ Pemberian subsidi bagi 'produsen' bibit dan pakan ternak ayam ras 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forum diskusi rutin dengan pelaku daging ayam (peternak, pedagang,) ▪ Rantai tata niaga daging ayam telah dilakukan seefektif mungkin ▪ Ketersediaan pakan dan harga yang stabil ▪ Pembentukan kawasan ternak terintegrasi ▪ Pemberian subsidi bagi 'produsen' bibit dan pakan ternak ayam ras. ▪ Pengembangan industri peternakan pola perkotaan dengan pemanfaatan pekarangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan audit terhadap penyuplai DOC ▪ Investigasi di setiap rantai tata niaga daging ayam ▪ Subsidi untuk pakan ayam ▪ Pemerintah agar membangun <i>breeding farm</i> sendiri ▪ Pembangunan irigasi/saluran air 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (7)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Masih terbatasnya produksi daging ayam ras	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengembangan industri peternakan pola perkotaan dengan pemanfaatan pekarangan▪ Penyusunan mekanisme irigasi/saluran air untuk menjaga suhu tubuh ayam	<ul style="list-style-type: none">▪ Pemanfaatan lahan pekarangan. Dengan program P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) ; KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)		<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (8)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>a. Penentuan harga DOC dan pakan ternak oleh hanya beberapa perusahaan besar saja dan saat ini cukup mahal</p> <p>b. Terdapat indikasi adanya permainan dari beberapa pedagang besar</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Pemetaan jalur distribusi dan pasokan daging ayam milik pedagang besar▪ Bekerja sama dengan peternak dan pedagang daging ayam untuk menjaga rantai tata niaga tidak terlalu panjang▪ Bekerja sama dengan KPPU untuk investigasi kartel▪ Pemutusan mata rantai perdagangan oligopoli▪ Pengendalian harga melalui pengendalian harga bibit▪ Mengindikasikan permasalahan di setiap jalur distribusi	<ul style="list-style-type: none">▪ Menjaga stabilitas HPP ayam▪ Pengaturan jalur distribusi bagi peternak tradisional dan peternak yang terintegrasi▪ Pengendalian harga melalui pengendalian harga bibit	<ul style="list-style-type: none">▪ Kebijakan untuk HPP ayam▪ Investigasi di rantai tata niaga ayam▪ Pengaturan jadwal dan jumlah produksi yang tersentralisasi.	<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (9)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>a. Penentuan harga DOC dan pakan ternak oleh hanya beberapa perusahaan besar saja dan saat ini cukup mahal</p> <p>b. Terdapat indikasi adanya permainan dari beberapa pedagang besar</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Investigasi jalur distribusi pedagang besar▪ Kajian penetapan HPP ayam dibawah harga jual ayam hidup▪ DOC ditentukan melalui mekanisme pasar			<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (10)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Tingginya harga pakan ternak yang sebagian besar merupakan impor	<ul style="list-style-type: none">▪ Penjajakan substitusi jagung impor bahan baku pakan▪ Program peningkatan produksi jagung pipilan sebagai substitusi bahan baku pakan impor▪ Peningkatan produksi dan penyesuaian kualitas jagung lokal untuk bahan baku pakan▪ TPID menjadi fasilitator petani jagung dengan perusahaan pakan▪ Mencari substitusi pakan ayam serta R&D substitusi pakan impor▪ Menjaga ketersediaan stok dan kestabilan harga melalui subsidi pemerintah	<ul style="list-style-type: none">▪ Terjaganya ketersediaan pakan ayam dan harga yang stabil▪ Program peningkatan produksi jagung pipilan▪ R&D substitusi pakan impor.▪ Tersedianya kebutuhan pakan ternak dalam jumlah cukup dan harga yang terjangkau	<ul style="list-style-type: none">▪ Stabilitas Nilai Tukar yang terjaga dan Regulasi Pemerintah Pusat yang dapat menjamin kesinambungan pasokan GPS/DOC dan pakan▪ Pemberian insentif bagi industri pakan ayam▪ R&D substitusi pakan impor	<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (I I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Tingginya harga pakan ternak yang sebagian besar merupakan impor	<ul style="list-style-type: none">▪ Program peningkatan produksi jagung pipilan sebagai substitusi bahan baku pakan impor.▪ Pembangunan industri pakan ternak			<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Telur Ayam Ras (I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Tingginya harga pakan ternak yang sebagian besar merupakan impor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjajakan substitusi jagung impor bahan baku pakan ▪ Program peningkatan produksi jagung pipilan sebagai substitusi bahan baku pakan impor ▪ Peningkatan produksi dan penyesuaian kualitas jagung lokal untuk bahan baku pakan ▪ TPID menjadi fasilitator petani jagung dengan perusahaan pakan ▪ Mencari substitusi pakan ayam serta R&D substitusi pakan impor ▪ Menjaga ketersediaan stok dan kestabilan harga melalui subsidi pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjaganya ketersediaan pakan ayam dan harga yang stabil ▪ Program peningkatan produksi jagung pipilan ▪ R&D substitusi pakan impor. ▪ Tersedianya kebutuhan pakan ternak dalam jumlah cukup dan harga yang terjangkau 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stabilitas Nilai Tukar yang terjaga dan Regulasi Pemerintah Pusat yang dapat menjamin kesinambungan pasokan GPS/DOC dan pakan ▪ Pemberian insentif bagi industri pakan ayam ▪ R&D substitusi pakan impor 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Telur Ayam Ras (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Tingginya harga pakan ternak yang sebagian besar merupakan impor	<ul style="list-style-type: none">Program peningkatan produksi jagung pipilan sebagai substitusi bahan baku pakan impor.Pembangunan industri pakan ternak			<ul style="list-style-type: none">BantenJawa BaratDKI JakartaJawa TengahDIYJawa Timur
Distribusi, transportasi dan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">Membangun jaringan toko tani Indonesia dan depo bahan kebutuhan pokok	<ul style="list-style-type: none">Membangun jaringan toko tani Indonesia dan depo bahan kebutuhan pokok		

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Telur Ayam Ras (3)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Kebijakan pembatasan DOC dan impor pakan ternak yang dirasa kurang tepat akan mendorong kenaikan harga	<ul style="list-style-type: none">▪ Jaminan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pakan ternak melalui peningkatan produksi dalam negeri▪ Mekanisme pengendalian jumlah DOC yang saat ini diserahkan pada pengusaha unggas secara suka rela dikuatirkan menjadi sumber baru kartel dalam pengaturan harga (membutuhkan peran Pemerintah)▪ Percepatan penerbitan Permen turunan dari Perpres No. 71 tahun 2015 tentang penetapan kebijakan harga, termasuk penetapan harga acuan	<ul style="list-style-type: none">▪ Jaminan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pakan ternak melalui peningkatan produksi dalam negeri▪ Mengatur jalur distribusi industri pakan. Khusus untuk penyediaan komoditas jagung sebagai bahan utama pakan ternak perlu ada perbaikan struktur pasar agar harga yang terbentuk lebih efisien.▪ Implementasi Perpres No.71 Tahun 2015 (antara lain penetapan harga, pengelolaan stok,pengendalian ekspor dan impor)▪ Sinkronisasi industri pakan ternak dalam negeri		<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Telur Ayam Ras (4)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Ekspektasi masyarakat dan Lonjakan konsumsi pada hari-hari besar keagamaan	<ul style="list-style-type: none">▪ Pendekatan kepada masyarakat melalui forum/kegiatan tertentu untuk mencegah perilaku menimbun dan konsumsi secara berlebihan (acara keagamaan)▪ Himbauan melalui kolom khusus di media berita lokal▪ Menciptakan mekanisme penanganan berita negatif yang memicu ekspektasi negatif masyarakat	<ul style="list-style-type: none">▪ Masyarakat lebih efisien dalam mengkonsumsi telur ayam	<ul style="list-style-type: none">▪ Upaya pemenuhan kebutuhan melalui kerjasama antar daerah, baik dalam antar provinsi maupun antar pulau (misal Antara Jawa dengan Sumatera)	<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Tengah• DIY• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Telur Ayam Ras (5)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Masih terbatasnya produksi telur ayam ras	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan permasalahan di rantai pasok telur ayam ▪ Investigasi DOC untuk tidak membatasi pasokan bibit ayam petelur ▪ Menjaga kestabilan stok dan harga pakan ayam ▪ Forum diskusi rutin dengan pelaku daging ayam (peternak, pedagang,) ▪ Pemberian subsidi bagi 'produsen' bibit dan pakan ternak ayam ras petelur ▪ Penyusunan mekanisme irigasi/saluran air untuk menjaga suhu tubuh ayam ▪ Memberikan penyuluhan peternakan ayam petelur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forum diskusi rutin dengan pelaku daging ayam (peternak, pedagang,) ▪ Efektifitas rantai tata niaga telur ayam ▪ Ketersediaan pakan dan harga yang stabil ▪ Implementasi penyaluran air/irigasi untuk mendukung peternakan ayam petelur ▪ Pembentukan kawasan ternak terintegrasi ▪ Pemberian subsidi bagi 'produsen' bibit dan pakan ternak ayam ras. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan audit terhadap penyuplai DOC ▪ Investigasi di setiap rantai tata niaga telur ayam ▪ Subsidi untuk pakan ayam ▪ Pembangunan irigasi/saluran air ▪ Pemberian insentif bagi industri ayam petelur 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Telur Ayam Ras (6)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>a. Penentuan harga DOC dan pakan ternak oleh hanya beberapa perusahaan besar saja dan saat ini cukup mahal</p> <p>b. Terdapat indikasi adanya permainan dari beberapa pedagang besar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan jalur distribusi dan pasokan telur ayam milik pedagang besar ▪ Bekerja sama dengan peternak dan pedagang telur ayam untuk menjaga rantai tata niaga tidak terlalu panjang ▪ Mengutamakan pasokan untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebelum mendistribusikan ke daerah lain ▪ Pengendalian harga melalui pengendalian harga bibit dan pakan ayam petelur ▪ Mengindikasi permasalahan di setiap jalur distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga stabilitas HPP telur ayam ▪ Pengaturan jalur distribusi bagi peternak tradisional dan peternak yang terintegrasi ▪ Mengupayakan harga telur ayam ras berada pada level wajar ▪ Pengendalian harga melalui pengendalian harga bibit dan pakan ayam petelur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan untuk HPP ayam ▪ Investigasi di rantai tata niaga telur ayam ▪ Pengaturan jadwal dan jumlah produksi yang tersentralisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Telur Ayam Ras (7)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>a. Penentuan harga DOC dan pakan ternak oleh hanya beberapa perusahaan besar saja dan saat ini cukup mahal</p> <p>b. Terdapat indikasi adanya permainan dari beberapa pedagang besar</p>	<ul style="list-style-type: none">Investigasi jalur distribusi pedagang besarDOC ditentukan melalui mekanisme pasar			<ul style="list-style-type: none">BantenJawa BaratDKI JakartaJawa TengahDIYJawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Angkutan Dalam Kota (I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Fluktuasi harga BBM yang mengikuti harga minyak dunia yang merupakan komponen biaya terbesar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan sarana transportasi massal yang murah ▪ Penetapan batas atas dan batas bawah tarif angkutan. ▪ Inisiasi pengayaan dan penggunaan energi alternatif pengganti BBM ▪ Penyusunan mekanisme penentuan harga dengan range kenaikan harga BBM tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengayaan dan penggunaan energi alternatif pengganti BBM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsistensi penyediaan energi alternatif dan terbarukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Timur
Kondisi infrastruktur yang belum baik sehingga menyebabkan kemacetan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaikan infrastruktur jalan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penambahan anggaran pembangunan jalan 	

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Angkutan Dalam Kota (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Tantangan dalam pengalihan ke BBG	<ul style="list-style-type: none"> Edukasi mengenai penggunaan BBG kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pemerintah dalam mengurangi kuota BBM dan dialihkan ke BBG 		<ul style="list-style-type: none"> Banten Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Timur
Kondisi di lapangan harga tarif angkutan tidak sesuai dengan ketentuan. Bersifat responsif terhadap kenaikan harga BBM.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengawasan penerapan tarif angkutan yang lebih melibatkan masyarakat 			
Pertumbuhan jumlah kendaraan yang lebih tinggi dari pembangunan jalan baru	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan moda transportasi umum Mendorong pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas dan kuantitas moda transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan batas usia kendaraan yang diikuti dengan pajak tinggi Mendorong pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur permanen yang dapat mengatasi masalah transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan transportasi umum yang memadai. Perbaikan kebijakan terkait dengan infrastruktur yang menjadi domain pusat 	

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Angkutan Dalam Kota (3)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Ekspektasi masyarakat meningkat paska penetapan Kebijakan kenaikan harga BBM	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Talkshow</i> melalui TV dan radio▪ Bekerjasama dengan aparat terkait untuk memastikan kelancaran distribusi BBM dan LPG	<ul style="list-style-type: none">▪ Terbentuknya <i>call center</i> terkait harga dan inflasi (pusat informasi, pengaduan)		<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• DKI Jakarta• Jawa Timur

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Bahan Bakar Minyak (I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Masyarakat cukup responsif dengan kenaikan harga BBM	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyusunan program pengelolaan ekspektasi masyarakat.▪ Implementasi program pengelolaan ekspektasi masyarakat.▪ Keterlibatan Gubernur dan Pemprov dalam berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat.▪ Melanjutkan berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">▪ Keterlibatan Camat dalam berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat.		<ul style="list-style-type: none">• Jawa Timur• DIY

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Bahan Bakar Minyak (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Besarnya ketergantungan BBM oleh moda transportasi darat yang mendominasi moda transportasi di Jawa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong penggunaan transportasi BBG antara lain dengan memberikan insentif (antara lain: keringanan pajak dan alat <i>converter</i> BBM ke BBG) kepada penyedia jasa transportasi umum dan pemberian <i>margin</i> tertentu kepada pemilik SPBG ▪ Penetapan harga BBG yang seragam secara nasional ▪ Meningkatkan jumlah SPBG ▪ Penyatuan Fasilitas pelayanan Vigas dengan SPBU yang sudah ada 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong penggunaan transportasi BBG antara lain dengan memberikan insentif (antara lain: keringanan pajak dan alat <i>converter</i> BBM ke BBG) kepada penyedia jasa transportasi umum dan pemberian <i>margin</i> tertentu kepada pemilik SPBG ▪ Penetapan harga BBG yang seragam secara nasional ▪ Meningkatkan jumlah SPBG ▪ Penyatuan Fasilitas pelayanan Vigas dengan SPBU yang sudah ada 		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Timur • DIY

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Tarif Tenaga Listrik (I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Kebijakan kenaikan tarif tenaga listrik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas. ▪ Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan (PLTS/PLTMH). ▪ Pengaturan izin operasi pembangkit tenaga listrik. ▪ <i>Hedging</i> kurs dan minyak oleh PLN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas. ▪ Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan (PLTS/PLTMH). ▪ Pengaturan izin operasi pembangkit tenaga listrik. ▪ <i>Hedging</i> kurs dan minyak oleh PLN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meniadakan variabel inflasi dari formula perhitungan <i>tariff adjustment</i> ▪ Menjaga stabilitas nilai tukar 	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Tengah • Jawa Timur • DIY
Ekspektasi masyarakat meningkat paska penetapan Kebijakan kenaikan harga BBM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Talk show</i> melalui TV dan radio ▪ Bekerjasama dengan aparat terkait untuk memastikan kelancaran distribusi BBM dan LPG 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbentuknya <i>call center</i> terkait harga dan inflasi (pusat informasi, pengaduan) 		

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Tarif Tenaga Listrik (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Rasio elektrifikasi yang masih cukup rendah	<ul style="list-style-type: none">▪ Pemberian kemudahan perizinan investasi pembangunan pembangkit listrik▪ Melakukan pembangunan pembangkit listrik baru	<ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya rasio elektrifikasi serta tersedianya kebutuhan listrik untuk jangka panjang		<ul style="list-style-type: none">• Jawa Tengah• Jawa Timur• DIY

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Bahan Bakar Rumah Tangga (I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>a. Meningkatkan permintaan gas LPG 3kg paska kenaikan gas LPG 12kg</p> <p>b. Harga LPG 3kg meningkat karena permintaan yang naik</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Penentuan harga elpiji dihitung berdasarkan satuan volume▪ Mempersiapkan mekanisme subsidi yang tepat asaran, antara lain dengan uji coba distribusi LPG 3 kg secara tertutup sesuai dengan harga keekonomian di Batam, Tarakan, dan Bali▪ Subsidi elpiji kepada masyarakat miskin dalam bentuk kartu	<ul style="list-style-type: none">▪ Elpiji tersedia di seluruh lapisan masyarakat dalam jumlah cukup dan harga terjangkau▪ Melanjutkan penerapan harga LPG 3 kg sesuai harga keekonomian ke kota lainnya secara bertahap dan tertutup. Untuk Rumah Tangga Sasaran dan Usaha Mikro diberikan kuota pemakaian LPG 3 kg dengan harga subsidi. Pemakaian di atas kuota akan dikenakan harga keekonomian.		<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• Jawa Timur• DIY

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Bahan Bakar Rumah Tangga (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>a. Meningkatkan permintaan gas LPG 3kg paska kenaikan gas LPG 12kg</p> <p>b. Harga LPG 3kg meningkat karena permintaan yang naik</p>	<ul style="list-style-type: none">Melanjutkan penerapan harga LPG 3 kg sesuai harga keekonomian ke kota lainnya secara bertahap dan tertutup. Untuk Rumah Tangga Sasaran dan Usaha Mikro diberikan kuota pemakaian LPG 3 kg dengan harga subsidi. Pemakaian di atas kuota akan dikenakan harga keekonomian.			<ul style="list-style-type: none">BantenJawa BaratJawa TimurDIY

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Bahan Bakar Rumah Tangga (3)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Risiko kenaikan harga gas LPG 3kg pada momen hari besar keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian ekspektasi ▪ Operasi Pasar LPG ▪ Penambahan kuota. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kartu kendali (kontrol) atas pembelian LPG 3kg yang seharusnya terbatas bagi usaha mikro dan rumah tangga sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009. 		<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • Jawa Timur • DIY
Penataan distribusi yang kurang merata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi dan Pengawasan kepada agen agar agen dan pangkalan menjalankan ketentuan HET terbaru. ▪ Monitor dan pembinaan penerapan HET terbaru oleh agen dan pangkalan 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan jaringan outlet dan meningkatkan promo LPG Non Subsidi untuk meminimalisir migrasi pengguna LPG Non Subsidi ke LPG Subsidi 	

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Bahan Bakar Rumah Tangga (4)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
			<ul style="list-style-type: none">▪ Koordinasi dengan SKPD terkait LPG 3 kg untuk penambahan pangkalan di daerah-daerah <i>urgent</i> untuk ditambah	

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Bahan Bakar Rumah Tangga (5)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Belum adanya ketentuan harga eceran di tingkat pengecer dan harga yang cenderung fluktuatif	<ul style="list-style-type: none">▪ Terciptanya komitmen pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjaga harga elpiji di tingkat pengecer▪ Pengumuman di SPBU : harga di <i>signboard</i> maupun surat edaran ke SPBU.▪ Pembuatan ketentuan harga eceran tertinggi di tingkat pengecer oleh tiap pemerintah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none">▪ Penerapan kebijakan harga elpiji di tingkat eceran		<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Barat• Jawa Timur• DIY

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Rokok Kretek Filter				
Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Jangka Pendek (2015-2016)	Jangka Menengah (2017-2018)		
Perubahan harga rokok terjadi di tingkat pedagang eceran	<ul style="list-style-type: none">▪ Terciptanya komitmen pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjaga harga rokok kretek filter di tingkat konsumen▪ Pembuatan ketentuan harga eceran tertinggi di tingkat pengecer oleh tiap pemerintah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none">▪ Penerapan harga rokok kretek filter di tingkat pengecer		<ul style="list-style-type: none">• Banten• Jawa Tengah
Terus meningkatnya cukai rokok	<ul style="list-style-type: none">▪ Kebijakan cukai rokok ditentukan satu kali untuk periode tahun yang panjang			

LAMPIRAN 3.A

Arahan Presiden RI dalam Rakornas VI TPID

Roadmap Pengendalian Inflasi dengan Arahan Presiden RI

Arahan Presiden RI

1 **Revitalisasi peran BULOG sebagai penyangga**, tidak hanya untuk komoditas beras tetapi juga untuk komoditas pangan lainnya

b,f,g

2 **Penguatan Peran KPPU di Pusat maupun Daerah** agar melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha komoditas pangan

c

3 **Kapolri dan Jaksa Agung agar memerintahkan jajaran dibawahnya untuk bekerjasama dengan TPID** untuk turut melakukan pengawasan dan mencegah aksi-aksi penimbunan atau spekulasi.

b

4 **Kejaksaaan Agung dan aparat penegak hukum lainnya agar tidak menjadikan kebijakan daerah dalam stabilisasi harga sebagai objek pemeriksaan hukum.**

d,h

5 **Pemerintah Pusat akan menginisiasi dan mengembangkan pasar lelang komoditas pangan di sejumlah daerah**

d,h

6 **Pemerintah Pusat akan menjajaki besaran penambahan transfer ke daerah yang dikaitkan dengan upaya daerah dalam menjaga stabilisasi harga mulai tahun 2016**

a,b,c,
e,h

Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah terkait Stabilisasi *Volatile Food*

a. Meningkatkan produksi pangan strategis*

b. Menjaga ketersediaan pasokan pangan antar waktu

c. Membenahi saluran distribusi pangan

d. Menstabilkan dan meningkatkan transparansi harga pangan strategis

e. Memperkuat kelembagaan petani*

f. Pendirian BULOG Divre Banten

g. Penguatan peran BUMD

h. Mendorong Realisasi Anggaran

Roadmap Pengendalian Inflasi dengan Arahan Presiden RI

Arahan Presiden RI



1 Pemerintah Daerah agar mendorong dan memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembangnya **hilirisasi/industrialisasi di daerah**. Peran daerah ini sangat diperlukan guna mengubah posisi Indonesia yang tergantung pada ekspor komoditas, menjadi negara yang berorientasi ekspor komoditas barang jadi/setengah jadi.



2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mendorong percepatan realisasi **APBN/APBD secara tepat dan efektif guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi, serta secara konsisten menempuh kebijakan reformasi energi**. Dalam konteks ini, menambah energi listrik sebesar 35.000 watt dalam 5 tahun merupakan kebutuhan, bukan target. Keberadaan listrik akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, ditengah perekonomian global yang melambat, sehingga Indonesia dapat terus menjaga dan memperbaiki peringkat investasinya.

Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah terkait Stabilisasi *Core Inflation*

- Permintaan domestik dan kapasitas ekonomi
- Stabilisasi nilai tukar rupiah
- Ekspektasi inflasi
- Penguatan peran pertanian dalam mendukung industrialisasi
- Meningkatkan produksi pangan strategis

Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah terkait Stabilisasi *Administered Prices*

- Reformasi subsidi energi
- Sosialisasi hemat listrik

Roadmap Pengendalian Inflasi dengan Arahan Presiden RI

Perkembangan tindak lanjut TPID Provinsi sesuai arahan Presiden pada Rakornas VI TPID 2015

No	Arahan Presiden	Banten	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur
1	Wajib membentuk TPID sebagai wadah koordinasi kebijakan untuk stabilisasi harga di daerah	Selesai 2015	Selesai 2015	Selesai 2015	Selesai 2015	Selesai 2015
2	Semakin cermat dalam mengidentifikasi komoditas yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong inflasi	Ditargetkan 2015	Ditargetkan 2015	Ditargetkan 2015	Ditargetkan 2015	Ditargetkan 2016
3	Memberikan dukungan penuh bagi percepatan pembangunan infrastruktur pangan seperti irigasi dan bendungan, serta infrastruktur distribusi	Berkelanjutan s.d. 2017	Berkelanjutan s.d. 2017	Berkelanjutan s.d. 2017	Berkelanjutan s.d. 2017	Ditargetkan 2015
4	Menggerakkan pertanaman cabai di pekarangan rumah	Berkelanjutan s.d. 2017				
5	Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk stabilisasi harga	Berkelanjutan s.d. 2017				
6	TPID bersama-sama dengan aparat penegak hukum agar secara intensif melakukan pemantauan langsung di lapangan	Berkelanjutan s.d. 2017				

Roadmap Pengendalian Inflasi dengan Arahan Presiden RI

Perkembangan tindak lanjut TPID Provinsi sesuai arahan Presiden pada Rakornas VI TPID 2015

No	Arahan Presiden	Banten	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur
7	Perlu memperkuat komunikasi dan kerja sama antar kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kab/kota	Berkelanjutan s.d. 2017				
8	Pemerintah Daerah agar mendorong dan memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembangnya hilirisasi/industrialisasi di daerah	Berkelanjutan s.d. 2017	Ditargetkan 2015	Berkelanjutan s.d. 2017	Berkelanjutan s.d. 2017	Ditargetkan 2015
9	Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mendorong percepatan realisasi APBN/APBD secara tepat dan efektif guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi, serta secara konsisten menempuh kebijakan reformasi energi.	Berkelanjutan s.d. 2017	Berkelanjutan s.d. 2017	Berkelanjutan s.d. 2017	Berkelanjutan s.d. 2017	Ditargetkan 2015

LAMPIRAN 3.B

Pengembangan Kerjasama Antar Daerah

Pengembangan Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah dilakukan oleh masing-masing Pemda (G to G), lalu mendorong BUMD masing-masing daerah untuk mempertimbangkan profit sisi bisnis (B to B). Saat ini sedang dibahas oleh Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat.

PT AGRO JABAR

KAWASAN PANGAN



- POKTAN
- GAPOKTAN
- KOPERASI
- PENGGILINGA PADI
- PEDAGANG PENGUMPUL

GKP, GKG,
BERAS

SENTRA PRODUKSI



BERAS

DISTRIBUTION CENTER



PT FOOD STATION

PASAR
INDUK

PASAR MODEREN

PASAR
TRADISIONAL

PASAR
INSTITUSI

PASAR
INDUSTRI

PASAR
ANTAR PULAU

BERAS

LAMPIRAN 3.C

**Alternatif Model Kerjasama
Antar Daerah yang Dapat
Dikembangkan
untuk Pengendalian Inflasi
Daerah**

Tataran Kerjasama (Partnership Level)

Tataran Pemerintah
(Government Level)



Tataran BUMD
(Quasi Government Level)



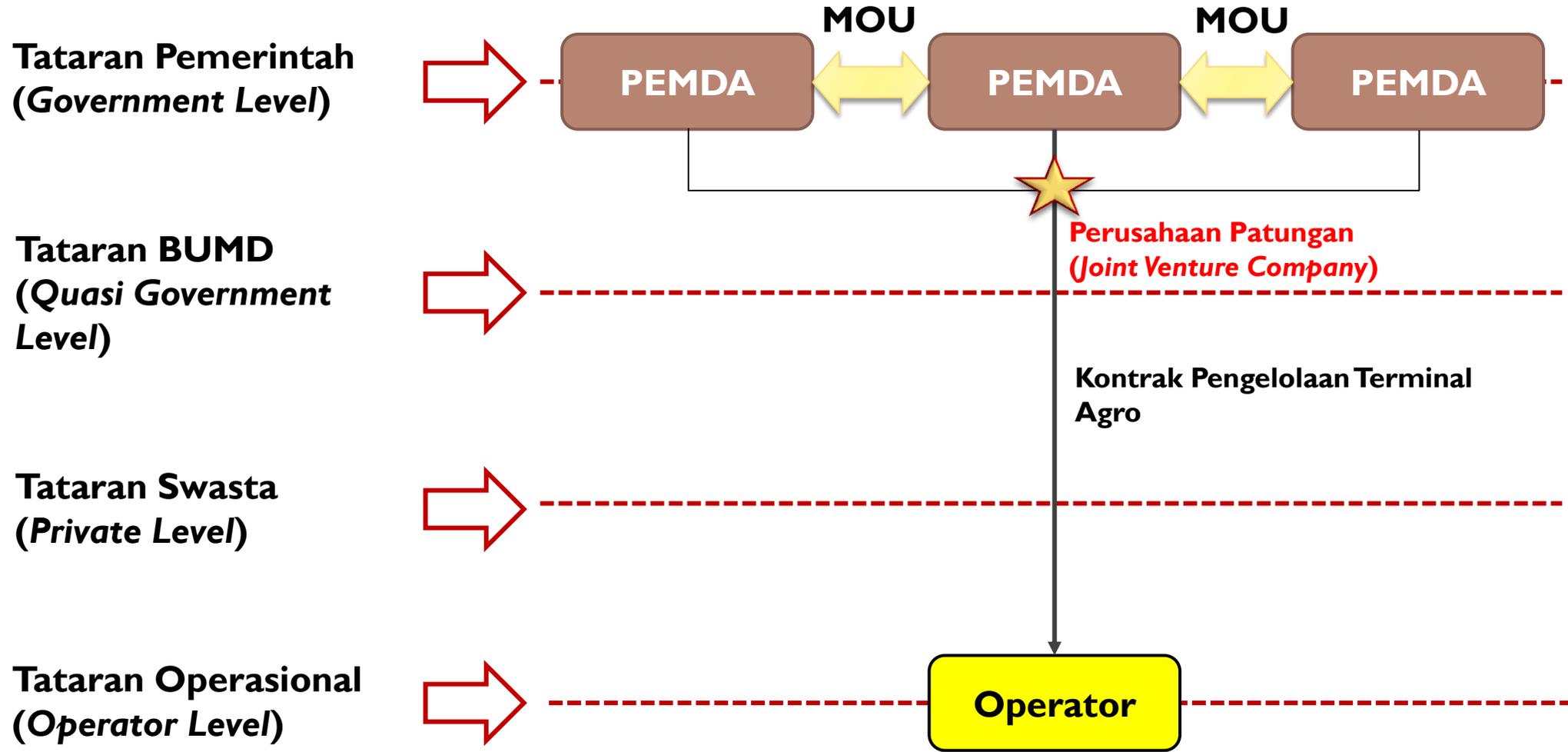
Tataran Swasta
(Private Level)



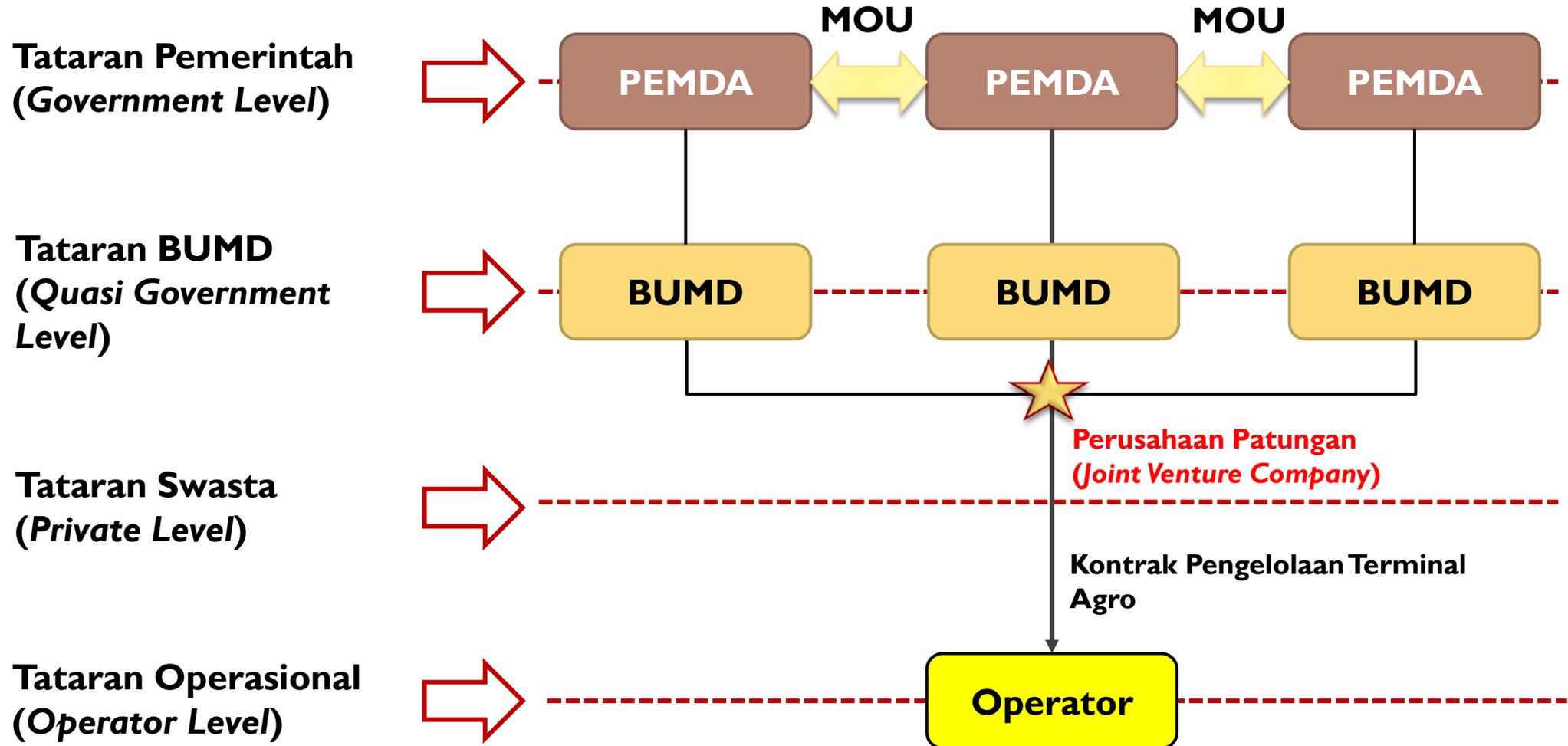
Tataran Operasional
(Operator Level)



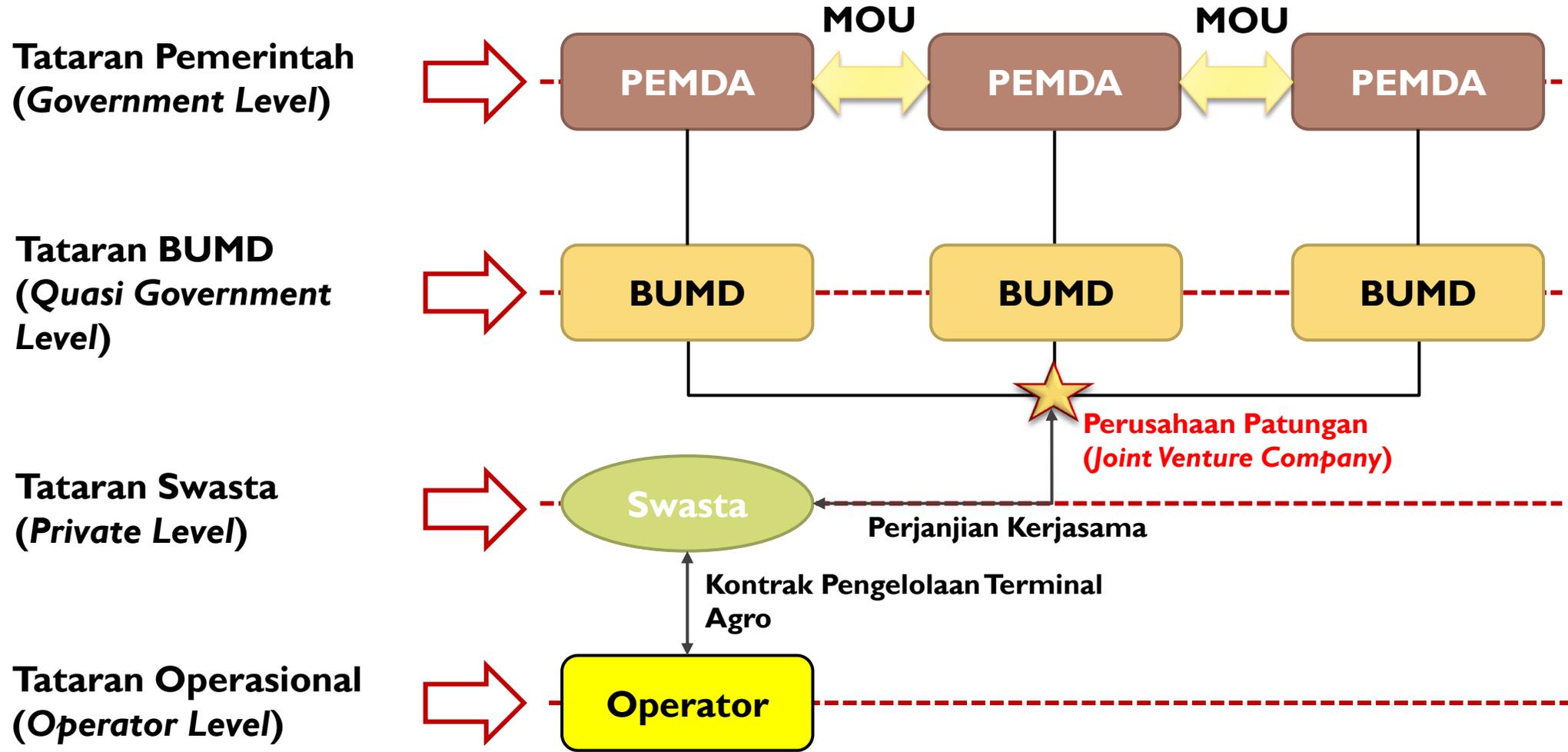
Kerjasama Pada Tataran Pemerintah



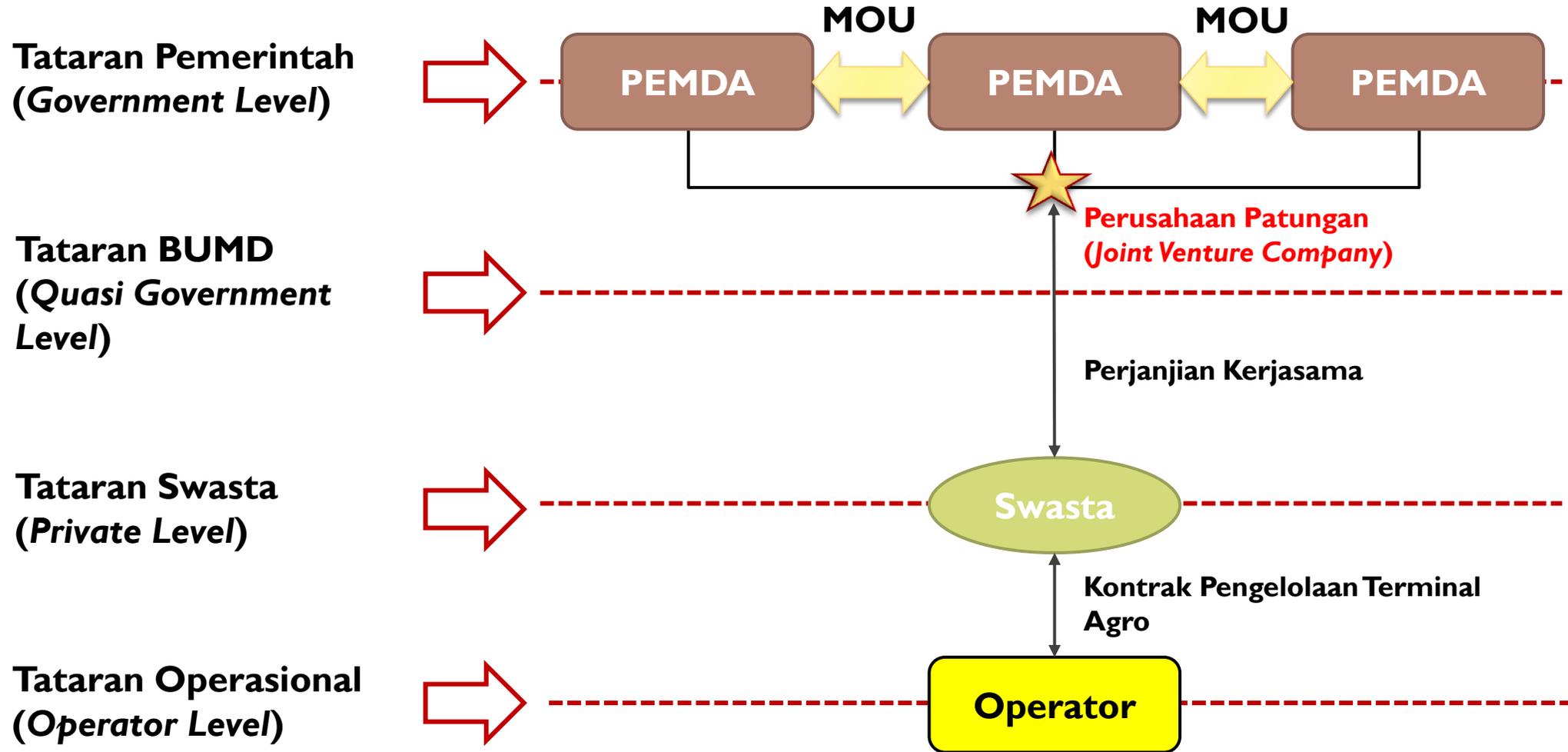
Kerjasama Pada Tataran Quasi Pemerintah



Kerjasama dengan Melibatkan Pihak Swasta



Kerjasama KPS (*Public Private Partnership*)



LAMPIRAN 3.D

Standard Operating Procedure Subsidi Ongkos Angkut dan Pasar Lelang dan *Trading House*

Bantuan Ongkos Angkut

Operasi Pasar - Bantuan Ongkos Angkut

- Memotong jalur distribusi dari produsen langsung ke konsumen dengan memberi bantuan dana APBD pada **biaya packaging, biaya transportasi dan ongkos tenaga kerja**



Directly to consumer...

Mekanisme Bantuan Ongkos Angkut

Pengajuan, persetujuan dan pencairan anggaran

- ✓ Penerima hibah mengajukan proposal-RAB ke Gubernur
- ✓ Verifikasi oleh SKPD pelaksana
- ✓ TAPD mengajukan ke DPRD
- ✓ Setelah disetujui, disusun SK Hibah dan akta integritas
- ✓ Pencairan oleh BPKAD melalui rekening Bank Jatim

Penyediaan komoditas Operasi Pasar

- ✓ Dibentuk panitia pelaksana Operasi Pasar
- ✓ Panitia memilih produsen dan nego harga beli.
- ✓ Ttd MoU panitia dan produsen tentang kuota dan distribusinya.

Rekomendasi

- ✓ Perlunya tambahan pengawasan dari pihak eksternal / independen / akademisi dalam mengawasi pelaksanaan pemberian bantuan ongkos angkut
- ✓ Publikasi kepada media terkait telah terlaksananya bantuan ongkos angkut dalam memberikan informasi adanya upaya pengendalian inflasi

Evaluasi dan Monitoring

- ✓ Dibentuk tim *monitoring* dan evaluasi
- ✓ Pengawasan dari tim audit inspektorat daerah
- ✓ Memantau pelaksanaan Operasi Pasar
- ✓ Mengevaluasi kinerja produsen dan penyalur
- ✓ Menyusun laporan ke Gubernur

Pembayaran dan Pertanggungjawaban

- ✓ Produsen mengajukan blanko berita acara penjualan yang di ttd petugas pasar kepada tim verifikator
- ✓ Verifikasi, kemudian diajukan ke penerima hibah
- ✓ Pembayaran oleh penerima hibah
- ✓ Penyusunan laporan ke SKPD dan Gubernur

Penyaluran komoditas Operasi Pasar

- ✓ Petugas pasar dan Disperindag kab/kota memverifikasi komoditas dari produsen
- ✓ Penyaluran di 2 titik pasar
- ✓ Komoditas yang tidak habis dikembalikan (tidak kumulatif)
- ✓ Disusun berita acara harian

Pasar Lelang dan *Trading House*

Mekanisme Pasar Lelang

Pendaftaran

- ❖ Pembeli dan penjual mendaftar keikutsertaan kepada pasar lelang



Pelaksanaan Lelang

- ❖ Lelang sesuai pembentukan harga
- ❖ Jumlah barang dan spesifikasi tanggung jawab penjual

Pembayaran

- ❖ Kesepakatan termin bayar
- ❖ Difasilitasi oleh BPD

Pengiriman Barang

- ❖ Tidak terdapat sortir dan standarisasi *packaging*
- ❖ Murni kesepakatan penjual-pembeli

Kelemahan Pasar Lelang

Terdapat potensi praktik permainan harga yang dilakukan oleh segelintir peserta lelang (pembeli) untuk dapat menekan harga, yang pada akhirnya akan merugikan petani sebagai produsen



Mekanisme *Trading House*

Pemasaran

- ❖ *Trading House* mencari pembeli (*end user*, a.l. pasar modern, hotel, restaurant, RS)

Pembelian ke Gapoktan

- ❖ *Trading House* memilih Gapoktan dan membeli secara *cash*
- ❖ Pelatihan *grading* dan *quality control*

Transporting

- ❖ Media pengiriman : kendaraan sendiri (4 unit) dan sewa (PT. Kantor Pos)

Grading, Packaging

- ❖ *Indirect* dilakukan di Gapoktan, jika *direct* di *Trading House* (secara manual)

Rekomendasi

Membangun sistem berbasis *website* guna mendukung kemudahan pelaksanaan *trading house*, seperti kemudahan bagi Gapoktan yang ingin mendaftar *online*, serta dapat mengetahui informasi profil Gapoktan dan jenis komoditas yang dijual oleh gapoktan.





Bagian IV

Roadmap Pengendalian Inflasi Wilayah Kalimantan

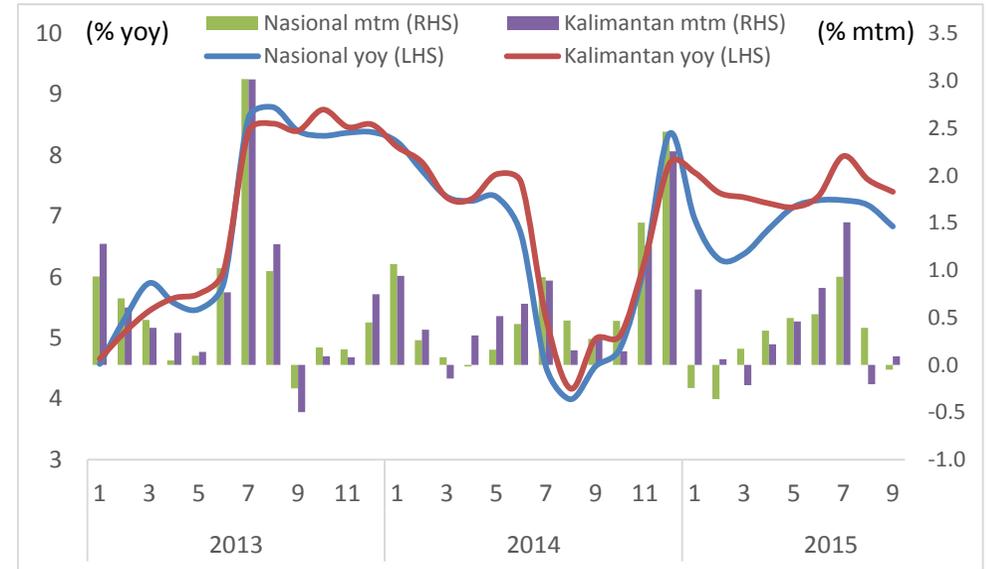
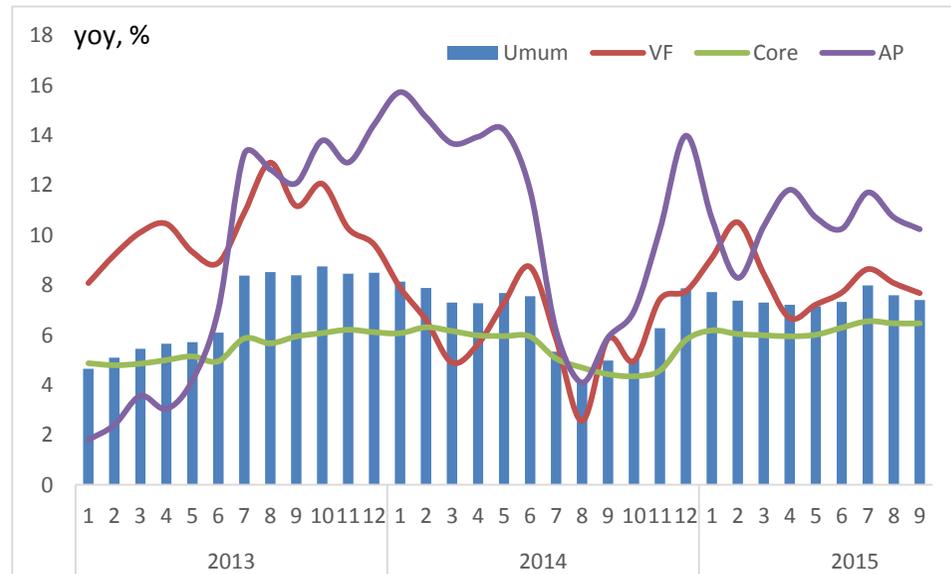


Halaman ini sengaja dikosongkan

4.1 **Pendahuluan**

Perkembangan Inflasi Kalimantan

Inflasi Kalimantan sampai dengan September 2015 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun 2014.

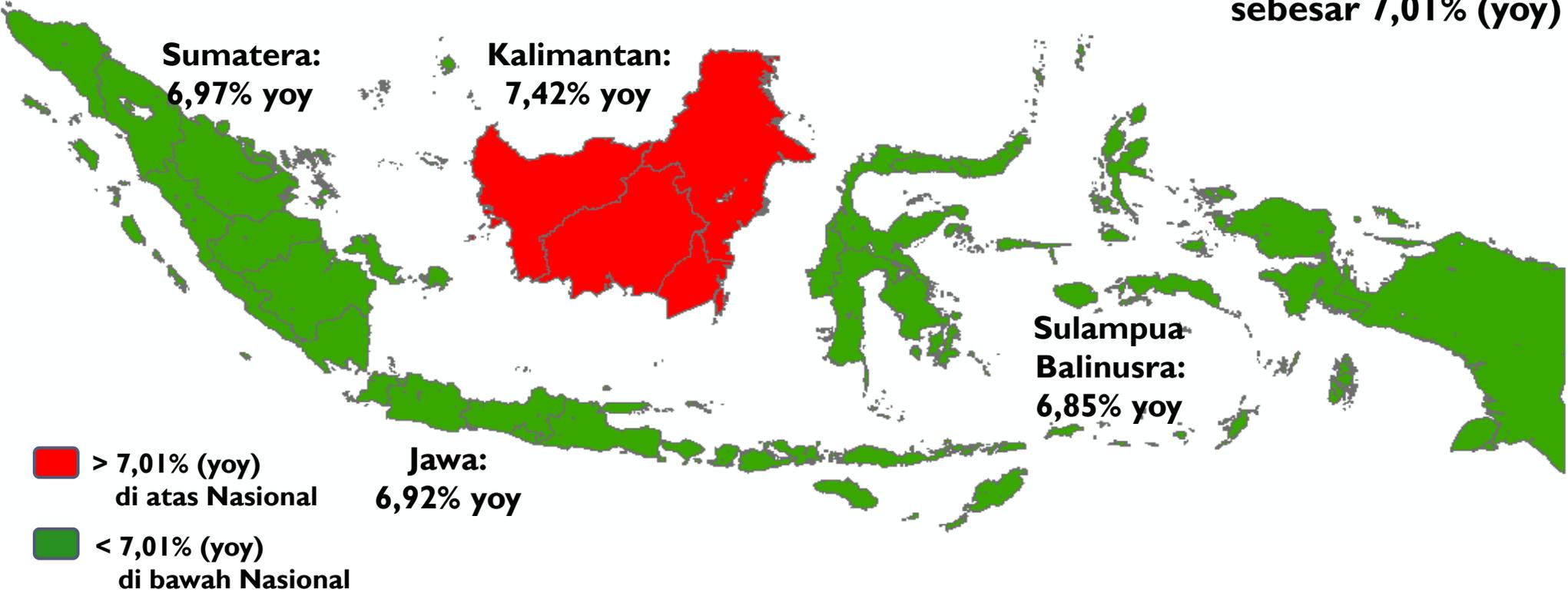


- Inflasi Kalimantan September 2015 7,40% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan inflasi 2015 sebesar 7,87% (yoy).
- Penurunan terbesar terjadi pada kelompok *administered prices* dari 13,99% (yoy) menjadi 10,24% (yoy), diikuti oleh kelompok *volatile food* dari 7,75% (yoy) menjadi 7,68% (yoy).
- Namun di sisi lain, capaian inflasi Kalimantan September 2015 sebesar 7,40% (yoy) masih lebih tinggi dibandingkan Nasional sebesar 6,83% (yoy).
- Dilihat dari provinsi-nya, hanya Kalteng yang tercatat lebih rendah, yaitu 5,75% (yoy), sementara Kaltim, Kalsel dan Kalbar tercatat lebih tinggi. Dimana inflasi Kalbar 8,84% (yoy), Kaltim 7,33% (yoy), dan Kalsel 7,04% (yoy)

Historis Inflasi Kalimantan

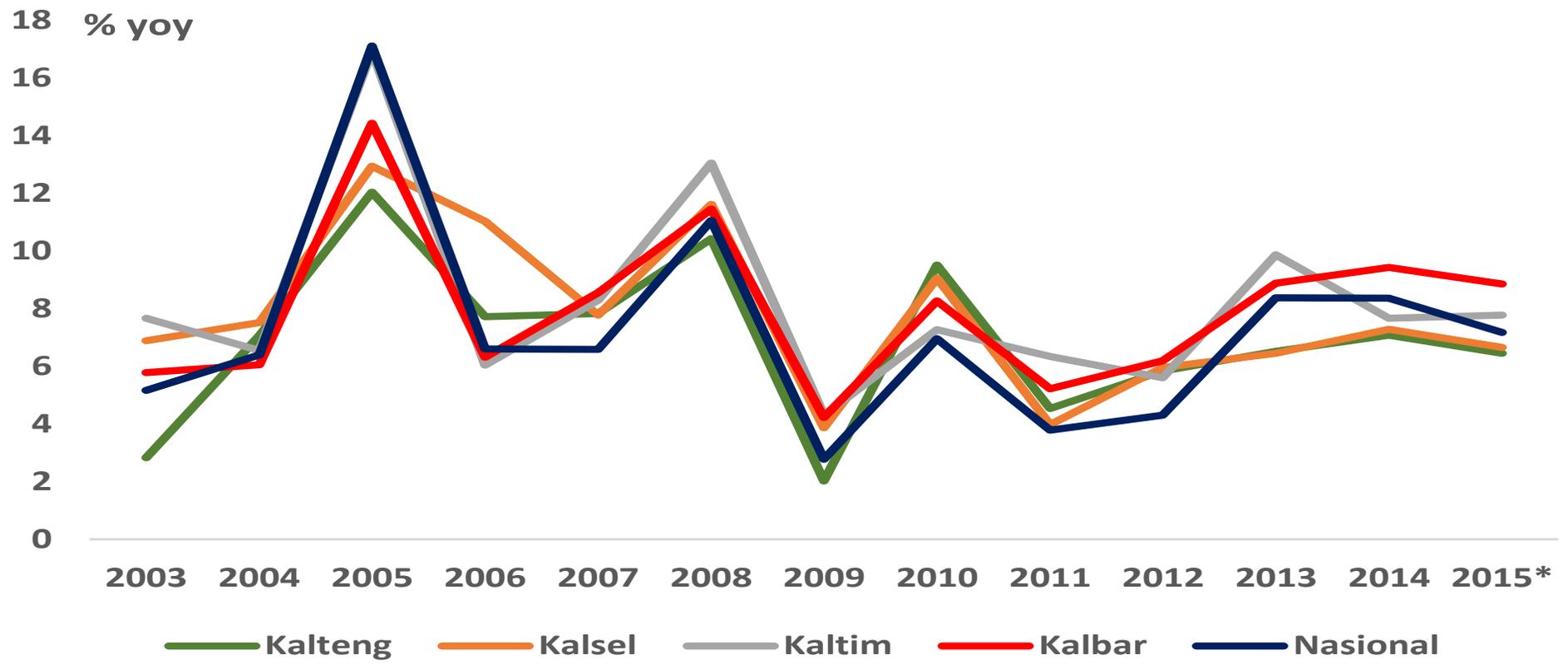
Secara historis rata-rata inflasi Kalimantan dalam 3 tahun terakhir berada di atas Nasional dan wilayah lain

Rata-rata inflasi Nasional tahun 2012-2014 sebesar 7,01% (yoy)



Berdasarkan data historis, rata-rata inflasi kawasan Kalimantan mencapai 7,42% (yoy), di atas Nasional 7,01% (yoy)

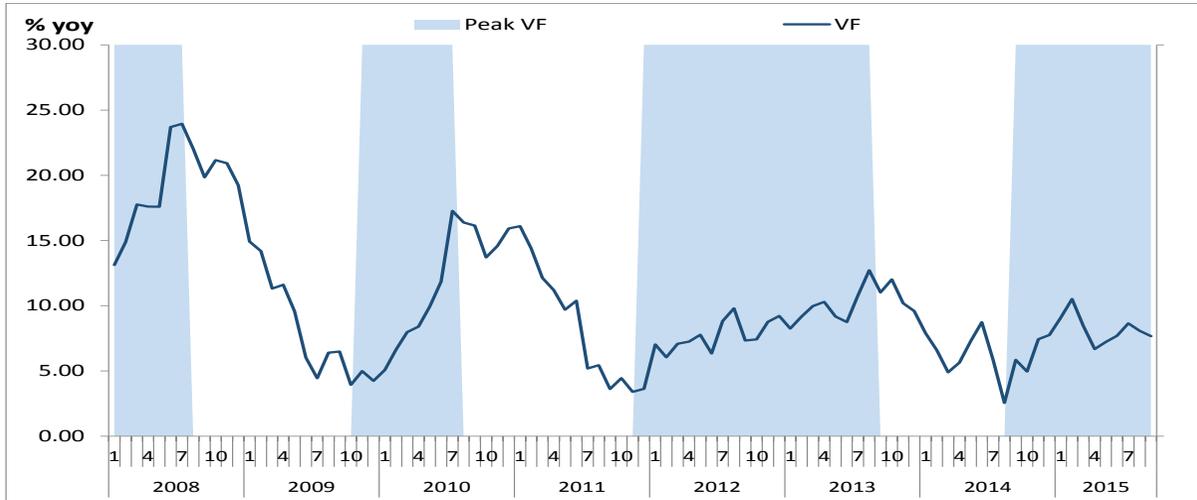
Inflasi Provinsi di Kalimantan



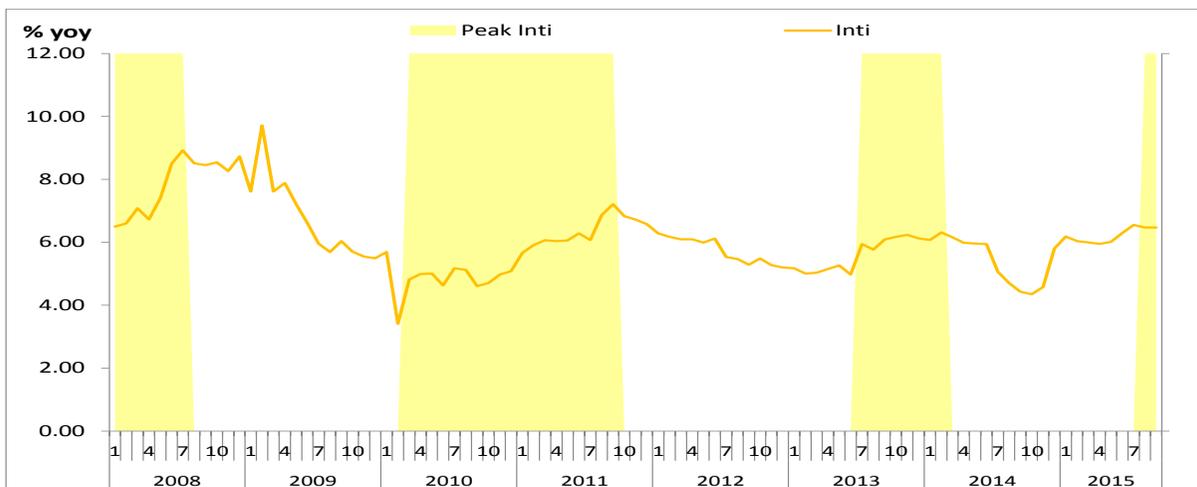
Hampir semua provinsi di Kalimantan masih secara konsisten berada di atas rata-rata inflasi Nasional, kecuali Kalsel dan Kalteng yang mulai berada di bawah level Nasional sejak akhir 2012.

Siklus Inflasi

Siklus Inflasi Volatile Food



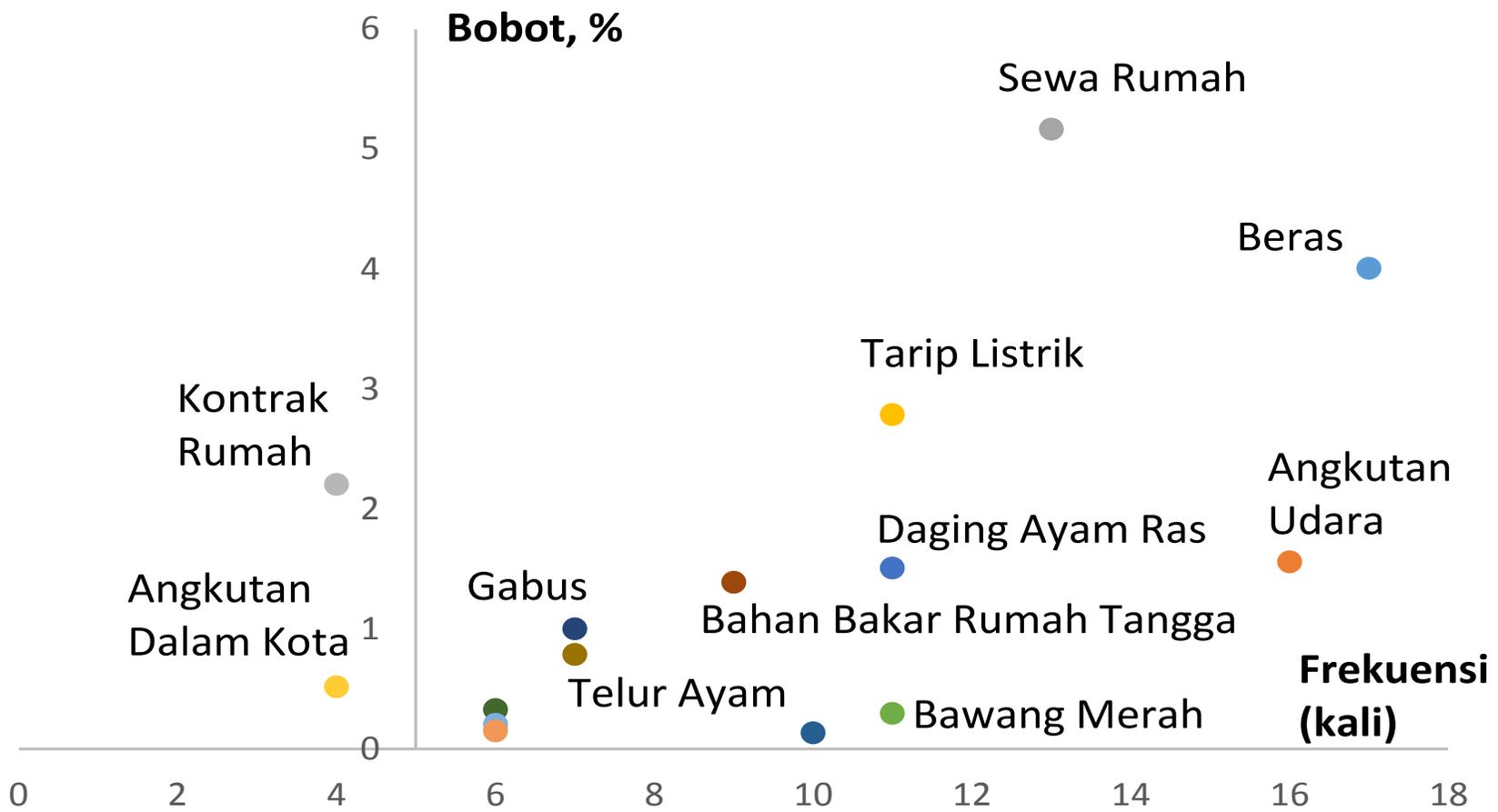
Siklus Inflasi Inti



- ❑ Inflasi Kalimantan yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional didorong fluktuasi inflasi kelompok *volatile food*.
- ❑ Inflasi *volatile food* sedang dalam fase ekspansi, sehingga diperlukan usaha khusus untuk mengendalikan inflasi *volatile food*.
- ❑ Pentingnya mengetahui komoditas yang memiliki bobot besar dan frekuensi yang sering menyumbang inflasi, untuk mengendalikan inflasi *volatile food*.
- ❑ Inflasi inti diperkirakan akan memulai siklus ekspansi nya di pertengahan 2015
- ❑ Namun pertumbuhan ekonomi yang melambat diperkirakan akan menahan inflasi inti Kalimantan
- ❑ Komoditas sewa rumah memiliki andil yang besar dalam inflasi inti di Kalimantan

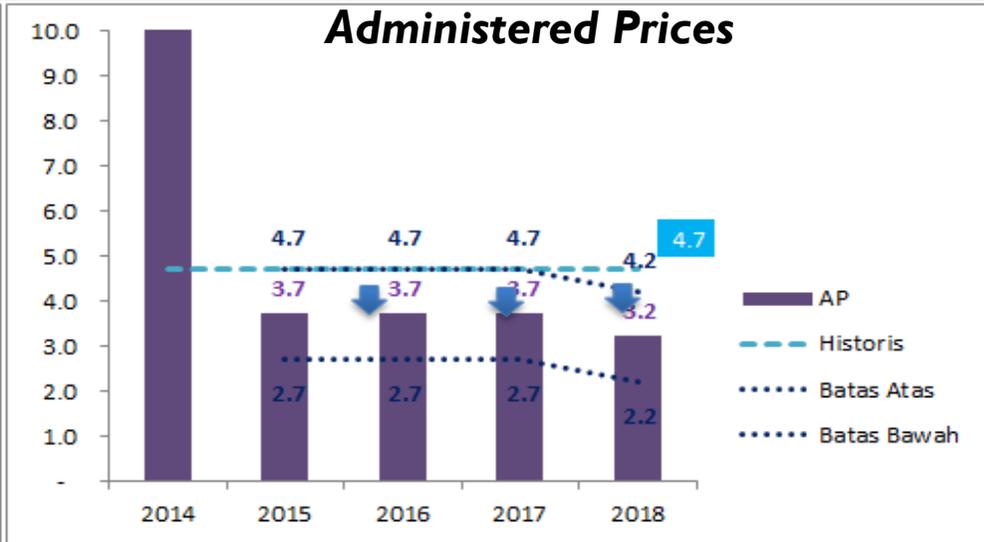
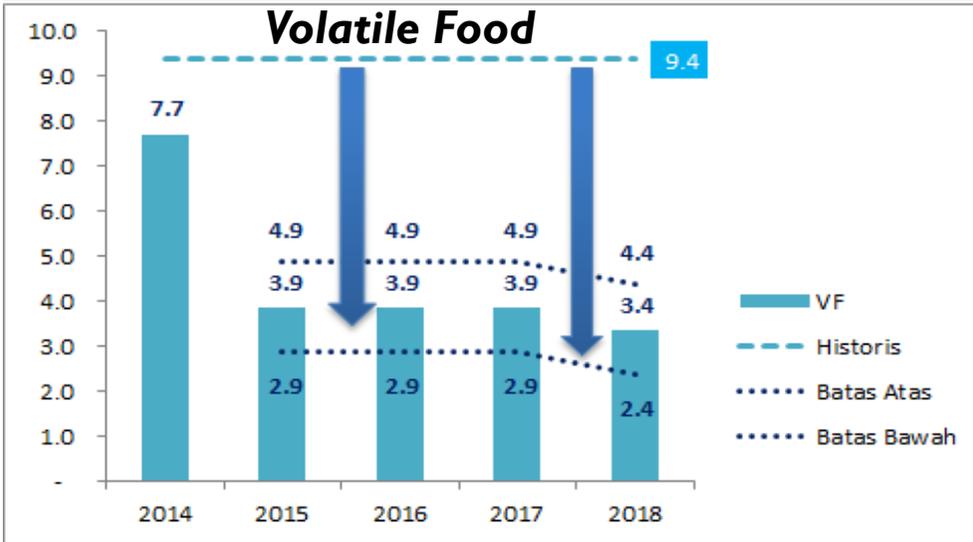
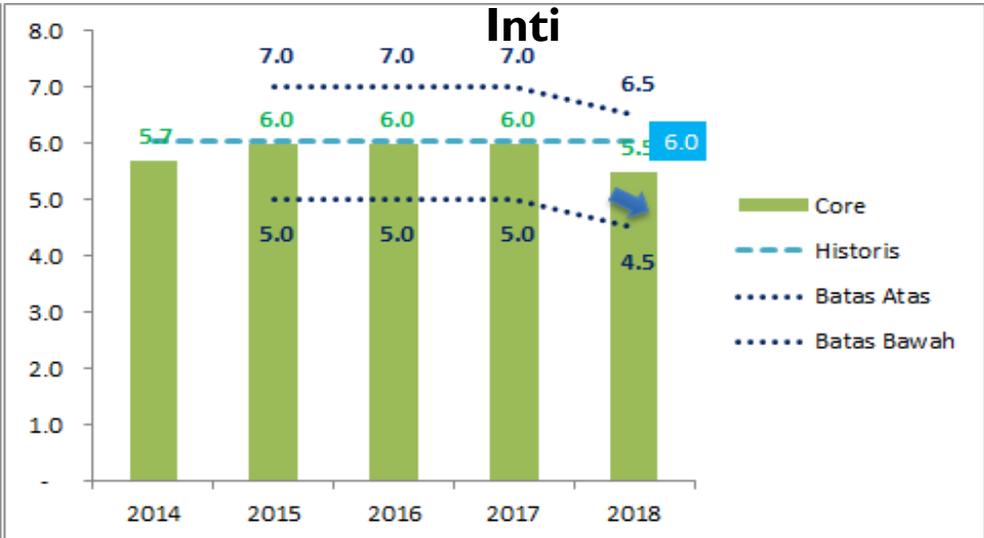
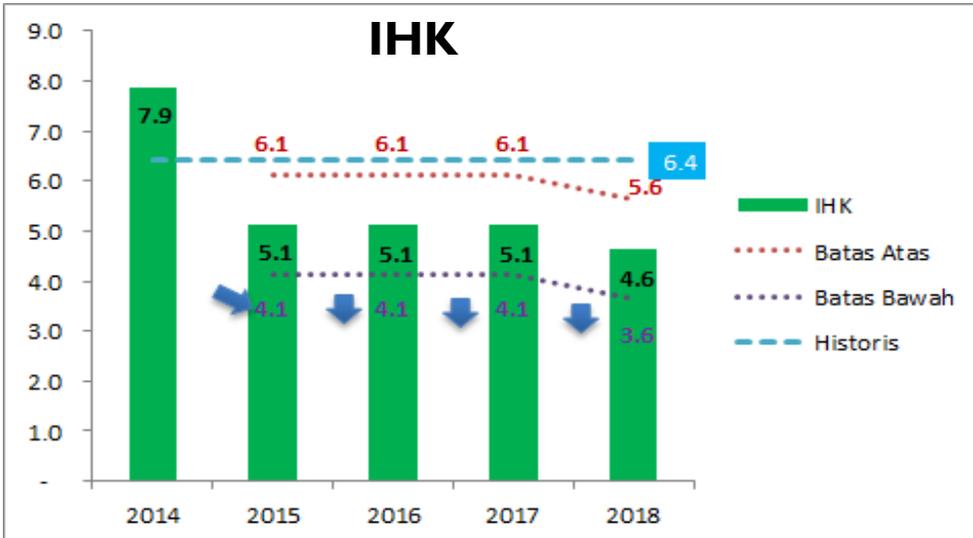
Bobot dan Frekuensi Komoditas Tertinggi

Lima komoditas sepanjang tahun 2013-2014 dengan bobot yang tinggi dan frekuensi yang sering diantaranya beras, angkutan udara, sewa rumah, tarip listrik, dan daging ayam ras ...



Perlu “Extra Effort”

Untuk mencapai sasaran inflasi, diperlukan extra effort terutama pada kelompok Volatile food..



4.2 Identifikasi Permasalahan Inflasi

Komoditas Utama Penyumbang Inflasi

Komoditas yang memiliki **bobot tinggi** dan **frekuensinya sering muncul** sebagai pemberi andil inflasi tinggi (2013-2014)

Volatile Food

- Beras
 - Cabai merah
 - Daging ayam ras
 - Daging sapi
 - Bawang merah
- Lainnya
- Ikan gabus
 - Cabai rawit
 - Ikan layang
 - Telur ayam ras

Administered Prices

- Bensin
- Tarif Listrik
- Bahan bakar rumah tangga
- Angkutan udara

Inti

- Sewa rumah
- Nasi dengan lauk

Identifikasi Permasalahan Inflasi Inti

Sewa Rumah			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi	<ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya <i>developer</i> properti• Terbatasnya lahan untuk membangun properti• Harga rumah dan tanah cukup mahal	<ul style="list-style-type: none">• Terbatas, karena harga rumah dan tanah mahal• Perizinan yang sulit untuk membangun properti• Biaya produksi properti yang cukup mahal	Wilayah Kalimantan
Tata Niaga	<ul style="list-style-type: none">• <i>Demand</i> yang tinggi menyebabkan ekspektasi harga masyarakat meningkat• Banyaknya pendatang ke Kalimantan , tidak disertai dengan jumlah properti yang mencukupi		Kalsel, Kaltim

Identifikasi Permasalahan Inflasi Inti

Nasi Lauk			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi	<ul style="list-style-type: none">• Produksi diturunkan, seiring dengan biaya bahan pokok yang meningkat• Mayoritas bahan pokok untuk nasi lauk didatangkan dari luar pulau	<ul style="list-style-type: none">• Inflasi bahan pokok meningkatkan harga nasi lauk• Bahan pokok untuk memproduksi nasi lauk masih bergantung pada daerah di luar provinsi yang bergantung pada faktor cuaca dan musim panen	Wilayah Kalimantan
Tata Niaga	<ul style="list-style-type: none">• Pembentukan harga terjadi berdasarkan ekspektasi pedagang yang selalu men-<i>setting</i> harga baru pada saat-saat tertentu (misal: lebaran, kenaikan harga BBM, kenaikan harga beras).• Psikologis masyarakat (konsumen) yang relatif toleran dengan kenaikan harga makanan jadi.	<ul style="list-style-type: none">• Pembentukan harga terjadi berdasarkan ekspektasi pedagang yang selalu men-<i>setting</i> harga baru pada saat-saat tertentu (misal: lebaran, kenaikan harga BBM, kenaikan harga beras).• Psikologis masyarakat (konsumen) yang relatif toleran dengan kenaikan harga makanan jadi.	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Beras			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Pupuk <ul style="list-style-type: none"> - Harga di atas HET karena ada biaya angkut tambahan - Kesulitan mendapat saat musim tanam • Bibit <ul style="list-style-type: none"> - Sulit mendapatkan - Kurangnya bibit varietas unggul yang cocok bagi lahan rawa • SDM <ul style="list-style-type: none"> - Semakin berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian - Ketergantungan tinggi terhadap tengkulak • Serangan hama/OPT yang sulit ditanggulangi 	<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas rendah akibat (i) masih bergantung air hujan, (ii) harga pupuk yang tinggi di Kalbar dan Kaltim, (iii) produktivitas tanah menurun di Kaltim, (iv) penggunaan teknologi masih rendah dan lemahnya riset pada proses produksi dan pasca panen. Seperti di Kalbar kapasitas mesin penggilingan gabah kecil dengan kualitas beras yang dihasilkan rendah. • Alih lahan dari pertanian ke sektor perkebunan • Lahan sawah rawa yang mendominasi • Kurang memadainya infrastruktur pertanian (seperti gudang, irigasi, jalan, RMU) • Pembiayaan masih rendah • Terbatasnya alsintan • Metode penanaman tradisional • Belum optimalnya kelembagaan petani dan peran Gapoktan 	Wilayah Kalimantan
Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang memadainya infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang memadainya infrastruktur • Pelabuhan dan pergudangan belum terintegrasi 	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Beras			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Tata Niaga	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat manajemen pasokan yang baik • Belum optimalnya peran sistem resi gudang • Penetapan harga dan pengaturan stok didominasi pedagang • Tidak ada pasar induk 	<ul style="list-style-type: none"> • Rantai distribusi yang panjang • Pola pembentukan harga tidak efisien • Pasar tidak sempurna, cenderung oligopoli • Penetapan harga dan pengaturan stok didominasi pedagang • Margin terbesar di pedagang • Terdapat disparitas harga antar pasar 	Wilayah Kalimantan
	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan penyaluran raskin 		<ul style="list-style-type: none"> • Kalteng • Kaltim
Lainnya (Konsumsi)	Ketergantungan pada beras yang tinggi		Wilayah Kalimantan
		Jenis beras yang diproduksi dan diminati masyarakat berbeda	<ul style="list-style-type: none"> • Kalbar • Kalteng • Kalsel
Lainnya (Informasi)	Keterbatasan akses informasi harga pada konsumen		Wilayah Kalimantan

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Cabai Merah

Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi	<ul style="list-style-type: none">• Produksi terbatas akibat: (i) lahan yang dapat ditanami terbatas, (ii) kurang minatnya petani dan keahlian yang terbatas, dan (iii) sangat tergantung pada cuaca/iklim	<ul style="list-style-type: none">• Belum terdapat pengembangan produksi cabe yang bersifat masif	<ul style="list-style-type: none">• Kalteng, Kalsel
Distribusi	<ul style="list-style-type: none">• Pasokan tergantung pada kondisi cuaca/gelombang laut/sungai	<ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">• Kalteng
Tata Niaga	<ul style="list-style-type: none">• Oligopoli• Penetapan harga dan pengaturan stok didominasi pedagang	<ul style="list-style-type: none">• Oligopoli• Rantai perdagangan cukup panjang karena sebagian besar pasokan berasal dari luar daerah/pulau	<ul style="list-style-type: none">• Kalteng• Kalteng, Kalsel
Lainnya (Konsumsi)		<ul style="list-style-type: none">• Tingginya preferensi masyarakat terhadap cabe segar dan makanan pedas.	<ul style="list-style-type: none">• Kalteng, Kalsel

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Daging Ayam Ras			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi	<ul style="list-style-type: none"> Pasokan yang kurang (Kalteng dan Kaltim) Fluktuasi dan monopoli harga DOC Terbatasnya <i>breeder</i> lokal Harga pakan tidak stabil dan masih bergantung pada daerah dan negara lain. Rentan serangan penyakit Produksi dipengaruhi oleh kondisi cuaca. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan pembibitan DOC broiler didominasi oleh 2 perusahaan besar (Kalbar) Peternak <ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan masih rendah Sebagian besar peternak merupakan mitra perusahaan besar sehingga sangat bergantung pada perusahaan besar dalam hal bibit, pakan dan obat-obatan. (Kalsel) Lemahnya kelembagaan (Kaltim) Minimnya riset 	<ul style="list-style-type: none"> Kaltim Kalsel Kalbar
Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya infrastruktur Mahalnya biaya transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya infrastruktur Mahalnya biaya transportasi 	
Tata Niaga	<ul style="list-style-type: none"> Pasar oligopoli (mendekati monopoli untuk Kalbar) Tidak ada manajemen ketersediaan komoditas antar waktu 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar oligopoli (mendekati monopoli untuk Kalbar) Tidak ada manajemen ketersediaan komoditas antar waktu Rantai distribusi yang panjang dan dikuasai pedagang besar/mitra peternak/perusahaan besar 	<ul style="list-style-type: none"> Kaltim Kalsel Kalbar

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Daging Sapi			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi	<ul style="list-style-type: none">• Produksi lokal tidak banyak sehingga belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">• Produksi banyak tergantung pada bibit sapi anakan dari luar daerah.	Kalsel
Distribusi	<ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya infrastruktur• Tergantung pada kondisi cuaca/gelombang laut/sungai.	
Tata Niaga	<ul style="list-style-type: none">• Rantai perdagangan cukup panjang karena sebagian besar pasokan bibit sapi hidup berasal dari luar daerah/pulau• Pembentukan harga ditentukan oleh pedagang.	<ul style="list-style-type: none">• Rantai perdagangan panjang• Pembentukan harga ditentukan oleh pedagang	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Bawang Merah

Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi terbatas akibat: (i) lahan yang terbatas, (ii) kurang minatnya petani dan keahlian yang terbatas, (iii) sangat tergantung pada cuaca/iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terdapat pengembangan produksi yang bersifat masif 	<ul style="list-style-type: none"> • Kalteng • Kalsel • Kaltim
Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Pasokan tergantung pada kondisi cuaca/gelombang laut/sungai 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya infrastruktur 	
Tata Niaga	<ul style="list-style-type: none"> • Oligopoli • Penetapan harga dan pengaturan stok didominasi pedagang 	<ul style="list-style-type: none"> • Oligopoli • Rantai perdagangan cukup panjang karena sebagian besar pasokan berasal dari luar daerah/pulau • Belum tersedianya lembaga yang berkompeten menampung hasil panen • Tidak ada manajemen stok dan tidak ada <i>cold storage</i> 	
Lainnya (Konsumsi)		<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya preferensi masyarakat terhadap bawang merah sebagai bumbu utama masakan. 	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Ikan Layang/Gabus			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi rendah dengan metode masih konvensional • Belum berkembangnya budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi rendah dan bergantung pada cuaca dan bulan • Terbatasnya pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaltim • Kalteng • Kalsel
Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi komoditas terbatas dikarenakan sifat komoditas yang tidak tahan lama • Lamanya proses distribusi menyebabkan kualitas komoditas tidak prima ketika sampai di konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi penyimpanan komoditas masih konvensional • Infrastruktur belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaltim • Kalteng • Kalsel • Kalbar
Tata Niaga	Kondisi cuaca mempengaruhi tata niaga	<ul style="list-style-type: none"> • Penjualan ikan terbatas pada pasar induk tertentu • Kondisi cuaca mempengaruhi tata niaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Kalsel • Kaltim
Lainnya	Sifat komoditas yang tidak tahan lama dengan teknik penyimpanan masih konvensional	Sifat komoditas yang tidak tahan lama dengan teknik penyimpanan masih konvensional	Kaltim
	Kebutuhan konsumsi cukup tinggi di setiap bulannya	Ketersediaan pasokan bervariasi tergantung akan musim	<ul style="list-style-type: none"> • Kaltim • Kalsel

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Cabai Rawit			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi	<ul style="list-style-type: none">• Produksi terbatas sehingga pasokan dipenuhi dari luar daerah• Sifat komoditas yang tidak tahan lama	<ul style="list-style-type: none">• Produktivitas rendah• Ketidakcocokan jenis tanah• Pola tanam masih konvensional• Belum adanya pengaturan pola tanam• Terbatasnya pembiayaan	<ul style="list-style-type: none">• Kaltim• Kalteng
Distribusi	<ul style="list-style-type: none">• Distribusi dari daerah penghasil membutuhkan waktu cukup lama dan sangat bergantung pada cuaca• Lamanya proses distribusi menyebabkan kualitas komoditas tidak prima ketika sampai di konsumen	<ul style="list-style-type: none">• Tingginya biaya distribusi• Infrastruktur belum memadai• Distribusi dipengaruhi kondisi cuaca dan gelombang laut	<ul style="list-style-type: none">• Kaltim• Kalteng
Tata Niaga	<ul style="list-style-type: none">• Rantai distribusi yang panjang	<ul style="list-style-type: none">• Belum tersedianya lembaga yang berkompeten menampung hasil panen	<ul style="list-style-type: none">• Kaltim• Kalteng
Konsumsi		Ketersediaan pasokan bervariasi tergantung akan musim panen	Kaltim

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Telur Ayam Ras			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Tata Niaga	<ul style="list-style-type: none">• Proses pembentukan harga lebih didominasi oleh pedagang besar• Rantai tata niaga yang panjang.• Monopoli di tingkat hulu		Kalbar
Distribusi	<ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya infrastruktur	

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Administered Prices*

Bensin			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> Mengandalkan pasokan dari Sumsel dengan ketahanan stok hanya mencapai 2-3 hari. Kondisi rentan menyebabkan kelangkaan apabila ada gangguan di pelabuhan dan gelombang tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Jam operasional SPBU di pedalaman relatif sebentar Distribusi BBM ke pedalaman menggunakan angkutan sungai rentan karam terutama pada musim kemarau 	Kalbar
	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur yang kurang memadai sehingga kondisi cuaca/gelombang laut/sungai sangat mempengaruhi distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur kurang memadai Distribusi tidak merata 	Wilayah Kalimantan
Tata Niaga	<ul style="list-style-type: none"> Kuota distribusi BBM bersubsidi dan non-subsidi ditentukan oleh Pertamina Pusat, dengan jatah yang terbatas SPBU yang kurang dan masih banyak penjual eceran khususnya di Kalteng Adanya penimbunan bensin oleh oknum tertentu Antrian yang panjang di SPBU khususnya di Kaltim 	<ul style="list-style-type: none"> Harga Pertamina relatif lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa 	Wilayah Kalimantan
Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian tarif angkutan yang tidak berjalan dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan kendaraan bermotor terus meningkat 	Wilayah Kalimantan

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Administered Prices*

Tarif Listrik

Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi/ Pasokan	<ul style="list-style-type: none">• Pembangkit dan transmisi listrik masih terbatas sehingga terjadi pemadaman bergilir. Serta banyaknya swasta menggunakan genset menyebabkan biaya tinggi• Sebagian besar pembangkit dari PLTD sehingga relatif lebih mahal	<ul style="list-style-type: none">• Pembangkit dan transmisi listrik masih terbatas	Wilayah Kalimantan
Distribusi	<ul style="list-style-type: none">• Distribusi listrik tidak merata	<ul style="list-style-type: none">• Jangkauan distribusi listrik belum merata• Infrastruktur belum memadai	Wilayah Kalimantan

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Administered Prices*

Bahan Bakar Rumah Tangga

Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi/ Pasokan	<ul style="list-style-type: none"> Pasokan yang terbatas berdasarkan kuota. Kebocoran pasokan LPG 3 kg akibat belum selesainya program konversi minyak tanah (Kalsel dan Kalteng) 	<ul style="list-style-type: none"> Pasokan tergantung pada kuota dari Pertamina 	<ul style="list-style-type: none"> Kalsel Kalbar Kalteng Kaltim
Tata Niaga	<ul style="list-style-type: none"> Harga cenderung di atas HET karena: (i) rantai distribusi setelah agen tidak terkontrol oleh Pertamina/Hiswana Migas, (ii) sistem perdagangan LPG 3 kg yang terbuka, serta (iii) tingginya permintaan akibat ada disparitas harga antara LPG 3 kg dan 12 kg 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem perdagangan LPG 3kg (subsidi) yang terbuka sehingga permintaan di atas kuota dan harga di atas HET ditingkat pengecer. Perbedaan harga antara LPG 3kg dengan 12kg 	
Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya infrastruktur 	

Identifikasi Permasalahan Inflasi Administered Prices

Angkutan Udara			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Produksi/ Kapasitas	<ul style="list-style-type: none">Bandar udara yang menjadi pintu gerbang penghubung ke daerah lain masih terbatas, sehingga menyebabkan konsentrasi pada bandara yang adaKapasitas bandara yang ada terbatasPilihan rute penerbangan masih terbatasPilihan maskapai masih terbatas	<ul style="list-style-type: none">-	<ul style="list-style-type: none">KaltimKalbar
Tata Niaga	<ul style="list-style-type: none">Terjadinya perang harga antar maskapai pada musim tertentu (Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru)Kurang optimalnya penerapan harga atasHarga tiket angkutan udara dari Kalbar lebih tinggi daripada menuju Kalbar pada saat rangkaian perayaan agenda rutin tahunan. Banyaknya agenda tahunan tersebut di Kalbar membuat inflasi pada komoditas ini lebih terasa di Kalbar.	<ul style="list-style-type: none">-	<ul style="list-style-type: none">KaltimKalbar

4.3 *Roadmap* Pengendalian Inflasi Kalimantan

Roadmap Pengendalian Inflasi Inti

Sewa Rumah

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>Jangka Pendek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya <i>developer</i> properti • Terbatasnya lahan untuk membangun properti <p>Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perizinan yang sulit untuk membangun properti • Biaya produksi properti yang cukup mahal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembenahan regulasi untuk pembangunan properti • Melakukan kajian untuk regulasi baru terkait pembangunan properti • Melakukan koordinasi dengan Pemda untuk memperlancar perizinan pembangunan properti 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan pembangunan properti berbasis <i>green-environment</i> • Menerapkan regulasi baru terkait pembangunan properti • Membenahi infrastruktur agar distribusi bahan bangunan lebih lancar dan dapat menekan biaya produksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata di tiap daerah • Bantuan pembangunan rumah susun sewa bagi mahasiswa. 	Kaltim

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (I)				
Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>I. Produksi Jangka Pendek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harga pupuk mahal <p>Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan pupuk • Program pemupukan berimbang dan pupuk organik • Pengembangan kawasan padi dengan peningkatan produktivitas (benih dan pengamanan produksi, teknologi pasca panen, dan pendampingan) • Pemberian bantuan dana untuk pembangunan irigasi tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki segala proses produksi (hulu) secara komprehensif dan integratif • Menjalankan program padi dengan metode Hazton di seribu desa di perbatasan • Mengkaji penggabungan penanaman padi dengan metode Hazton dan pupuk Alfaafa 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian dan penerapan <i>fixed subsidy</i> pada harga akhir bukan pada faktor produksi (pupuk). • Mendukung kajian penggabungan metode Hazton dan pupuk Alfaafa. Jika terbukti efisien, jadikan program Nasional. • Mempercepat realisasi program pembangunan bendungan. 	<p>Kalbar</p> <p>Kaltim</p> <p>Kalbar</p>

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (2)				
Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>I. Produksi Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan pembangunan waduk dan sistem irigasi. • Memastikan distribusi bibit, pupuk bersubsidi dan perlengkapan pertanian lainnya, serta pengembangannya • Pembangunan beberapa RMU • Meningkatkan peran kelembagaan petani 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan penggunaan waduk dan sistem irigasi untuk meningkatkan produksi beras lokal • Penelitian terhadap beras varietas lokal untuk memaksimalkan produksinya 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengendalian inflasi • Pengawasan dan percepatan pembangunan infrastruktur • Meningkatkan bantuan sarana pertanian untuk petani di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kalsel • Kalteng <p>Kalteng</p>

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (4)				
Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>2. Distribusi Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurang memadainya infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Lumbung dan Gudang 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pembangunan sarana distribusi, seperti kereta api Meningkatkan kapasitas pelabuhan 	<p>Pengawasan dan percepatan pembangunan infrastruktur</p> <p>Memasukkan rencana pembangunan area khusus untuk kawasan pergudangan bahan pangan strategis</p>	<p>Wilayah Kalimantan</p> <p>Kaltim</p> <p>Kalbar</p>

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (5)				
Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>3. Tata Niaga Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> Rantai distribusi/pasokan panjang Pola pembentukan harga tidak efisien Penetapan harga dan pengaturan stok didominasi pedagang 	<ul style="list-style-type: none"> Sanksi tegas pengusaha menimbun pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Memperpendek jalur distribusi dengan mengaktifkan fungsi pasar induk daerah Efisiensi tata niaga dengan mengaktifkan fungsi BULOG dalam stabilisasi harga Perbaiki pelaksanaan Operasi Pasar 	<p>Melakukan revitalisasi peran BULOG sebagai <i>buffer stock</i> pangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kaltim Kalsel Kaltim Kalsel Kalteng Kaltim Kalsel Kaltim

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (6)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>3. Tata Niaga Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan harga dan pengaturan stok didominasi pedagang 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendirikan Pusat Distribusi Regional di Banjarmasin sebagai penyangga pasokan Kalimantan • Membangun <i>early warning stock system</i> • Optimalisasi resi gudang • Mengkaji pola perilaku pedagang dalam menetapkan harga • Mengkaji efektivitas RMU dalam penetapan harga dan kualitas beras. • Perbaiki operasi pasar berbasis pengendalian risiko inflasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menginisiasi kerja sama antardaerah antarkabupaten atau provinsi • Revitalisasi pasar tradisional di pinggiran kota • Mengendalikan penentuan margin keuntungan setiap pelaku usaha di bagian hilir 	<p><i>Supply response</i> dari pemerintah dalam hal stabilitasi harga panen</p>	<p>Kalsel</p> <p>Kalbar</p>

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Merah				
Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>1. Produksi Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> Defisit cabai merah 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan benih Menambah proyek-proyek uji coba penanaman 	<ul style="list-style-type: none"> Pengoptimalan benih <p>Pembangunan gudang penyimpanan dan pasar induk</p>		Kalsel
<p>2. Distribusi Struktural</p> <p>Kurangnya infrastruktur</p>				Kalsel
<p>3. Tata Niaga Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> Penetapan harga dan pengaturan stok didominasi pedagang 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan harga batas atas Tindakan <i>preventive</i> sebelum kenaikan harga Mengoptimalkan peran PIHPS Menginisiasi kerja sama antardaerah, antarkabupaten atau provinsi 			

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>1. Produksi Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fluktuasi dan monopoli harga DOC • Terbatasnya <i>breeder lokal</i> <p>2. Tata Niaga Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan pembibitan DOC broiler didominasi oleh 2 perusahaan besar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan bibit unggul • Pembenahan dan evaluasi pola produksi • Program peningkatan produksi dan menjamin ketersediaan pakan/obat • Mengkaji kebijakan Pemprov yang memberikan kuota DOC dan standar khusus sebagai syarat masuk ke Kalbar. 	<p>Memberlakukan SNI bagi DOC di seluruh wilayah NKRI sehingga daerah tidak dapat lagi menahan masuknya DOC dari pemasok manapun yang sudah mendapat SNI dengan alasan penyebaran penyakit dsb.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan <i>parent stock</i> untuk produksi bibit DOC • Bantuan peningkatan kandang terintegrasi 	<p>Kaltim</p> <p>Kalsel</p> <p>Kalbar</p>

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>2. Tata Niaga Struktural</p> <p>Pasar oligopoli, dan tidak ada manajemen ketersediaan komoditas antar waktu</p>	<ul style="list-style-type: none">• Budidaya dan pemasaran ayam pedaging kerja sama TPID dengan pelaku usaha , dengan nama program “Kandang Penyangga” di Palangkaraya.• Pembuatan Kandang penyanggaa di kota Sampit• Optimalisasi PIHPS• Mengenalkan daging ayam beku sebagai alternatif (bekerja sama dengan pasar modern)• Menginisiasi kerja sama antardaerah, antarkabupaten atau provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Dibangun kandang penyangga di seluruh kabupaten/ kota		Kalteng

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Sapi				
Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>1. Produksi Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produksi masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan produksi melalui bantuan teknis di bidang peternakan. 			Kalsel
<p>2. Distribusi Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya infrastruktur 				<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas pelabuhan
<p>3. Tata Niaga Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan harga ditentukan oleh pedagang 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi PIHPS • Menginisiasi kerja sama antardaerah antarkabupaten atau provinsi • Penetapan harga atas 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki tata niaga daging sapi 		Kalsel

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>2. Distribusi Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimnya infrastruktur <p>3. Tata Niaga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rantai distribusi panjang • Ketersediaan komoditas antar waktu tidak terjaga • Pembentukan harga dikuasai oleh pedagang 	<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian kerja sama antar daerah • Pembangunan gudang • Optimalisasi PIHPS • Penetapan harga batas atas • Tindakan <i>preemptive</i> sebelum kenaikan harga terjadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun gudang • Meningkatkan konektivitas • Meningkatkan kerja sama antar daerah • Penggunaan <i>cold storage</i> 	<p>Percepatan pembangunan konektivitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kalsel • Kalsel • Kalteng • Kalteng • Kalbar • Kaltim Kalsel Kaltim Kalsel

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Ikan Layang				
Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
1. Produksi Struktural <ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari bibit unggul • Melakukan penelitian dan studi banding kepada produsen besar • Budidaya tambak 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produksi melalui pembudidayaan dalam skala yang lebih luas 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan anggaran dan tenaga ahli perikanan 	Kaltim
2. Lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong perubahan preferensi masyarakat melalui sosialisasi alternatif substitusi konsumsi ikan air tawar lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong perubahan preferensi masyarakat melalui sosialisasi alternatif substitusi konsumsi ikan air tawar lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan teknologi terbaru untuk budidaya ikan layang benggol yang efisien. 	Kaltim
<ul style="list-style-type: none"> • Sifat komoditas tidak tahan lama 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian pengadaan <i>cold storage</i> atau <i>Controlled Atmosphere Storage (CAS)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengadaan <i>cold storage</i> atau <i>Controlled Atmosphere Storage</i> 		Kaltim

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Ikan Gabus				
Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
1. Produksi Struktural <ul style="list-style-type: none">Sebagian besar produksi merupakan tangkapan 2. Lainnya <ul style="list-style-type: none">Preferensi masyarakat yang tinggi dalam mengkonsumsi ikan gabus	<ul style="list-style-type: none"><i>Pilot project</i> pembudidayaan ikan gabus.Mengubah preferensi masyarakat melalui sosialisasi mengenai alternatif substitusi konsumsi ikan air tawar lainnya.Pengembangan budidaya ikan lainnya sebagai alternatif pilihan	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan produksi melalui pembudidayaan dalam skala besarMenginisiasi kerja sama antardaerahMengubah preferensi masyarakat melalui sosialisasi mengenai alternatif substitusi konsumsi ikan air tawar lainnya.Pengembangan budidaya ikan lainnya sebagai alternatif pilihan konsumsi masyarakat.		Kalsel

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
2. Tata Niaga <ul style="list-style-type: none">Rantai distribusi panjangKetersediaan komoditas antar waktu tidak terjaga	<ul style="list-style-type: none">Perjanjian kerja sama antar daerahPengadaan <i>cold storage</i> atau <i>Controlled Atmosphere Storage</i>	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan kerja sama antar daerahPenggunaan <i>cold storage</i>Peningkatan produk olahan dalam bentuk <i>powder</i>		Kaltim

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

BBM (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribusi tidak lancar • Kuota yang minim meski menghasilkan minyak 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan distribusi BBM bersubsidi dan non subsidi dengan PT Pertamina setempat • Menginisiasi pertemuan antara pengusaha dan PT Pertamina untuk meningkatkan jumlah SPBU • Pemerataan pasokan dan kontribusi yang lebih adil terhadap daerah lumbung minyak. • Mengkoordinasikan distribusi BBM dengan PT Pertamina <i>Marketing</i> setempat • Menambah lokasi SPBU untuk Kendaraan Berat • Mendukung kegiatan <i>car free day</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan distribusi BBM bersubsidi dan nonsubsidi dengan PT Pertamina setempat • Menginisiasi pertemuan antara pengusaha dan PT Pertamina untuk meningkatkan jumlah SPBU • Semakin terbukanya alternatif jalur darat, dan laut untuk pendistribusian bensin. • Pembinaan dan pengawasan sektor hilir migas 	<p>Pemerataan pasokan dan kontribusi yang lebih adil terhadap daerah lumbung minyak</p>	<p>Kalbar</p> <p>Kalteng</p> <p>Kaltim</p>

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

BBM (3)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Struktural <ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian tarif angkutan yang tidak berjalan dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perubahan tarif transportasi umum mengacu pada SE Menhub secara cepat. • Mempublikasikan SK Kepala Daerah terkait penyesuaian tarif transportasi umum. • Merumuskan dan menetapkan kebijakan tarif angkutan <i>automatic adjustment</i> • Merumuskan komponen dan struktur tarif untuk angkutan barang serta mekanisme penetapannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perubahan tarif transportasi umum mengacu pada SE Menhub secara cepat. • Mempublikasikan SK Kepala Daerah terkait penyesuaian tarif transportasi umum 		<ul style="list-style-type: none"> Kalbar Kalbar • Kalteng • Kalsel Kalsel

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

BBM (4)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya penimbunan oleh oknum tertentu • Pertumbuhan kendaraan bermotor terus meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM. • Penindaktegasan kepada oknum yang melakukan penimbunan bekerja sama dengan aparat hukum • Melakukan penelitian sumber energi alternatif seperti tenaga air, uap air, angin, matahari, panas bumi, pasang surut air laut, gelombang laut, nuklir untuk menjadi biomassa 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM. • Penindaktegasan kepada oknum yang melakukan penimbunan bekerja sama dengan aparat hukum • Penggunaan bahan bakar yang bersumber dari energi terbarukan • Penyediaan jalur sepeda untuk mendukung program kendaraan ramah lingkungan 		<p>Wilayah Kalimantan</p> <p>Kaltim</p>

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Tarif Listrik

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Struktural <ul style="list-style-type: none">• Sumber pembangkit listrik dan transmisi masih terbatas	<ul style="list-style-type: none">• Mempermudah regulasi terkait investasi dalam pembangunan pembangkit listrik (swasta atau pemerintah)• Studi banding kepada negara yang memiliki industri pembangkit listrik tenaga alternatif	<ul style="list-style-type: none">• Menemukan sumber bahan bakar alternatif untuk pembangkit listrik di Kaltim• Melakukan pembangunan infrastruktur yang mendukung terbentuknya pembangkit listrik energi terbarukan• Meningkatkan peran swasta dalam penyediaan tenaga listrik• Pembangunan PLTN di Kalimantan• Penyediaan jalur sepeda untuk mendukung program kendaraan ramah lingkungan	Kebijakan pemerintah pusat untuk segera menyediakan listrik yang tidak bergantung pembangkit berbahan bakar migas.	Wilayah Kalimantan

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Bahan Bakar Rumah Tangga

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>Jangka Pendek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebocoran pasokan LPG 3 kg akibat belum selesainya program konversi minyak tanah • Harga di atas HET akibat sistem perdagangan LPG yang terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg • Menerbitkan SE Kepala Daerah untuk menindak pelaku usaha yang menggunakan LPG 3 kg tidak sesuai aturan 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Monitoring</i> penyaluran LPG 3kg • Mengimplementasikan pola distribusi tertutup di daerah • Jaringan pipa gas Trans Kalimantan, dimulai dari Kaltim • Studi kelayakan jaringan gas kota di Kalsel 	<p>Percepatan konversi ke LPG 3 kg</p> <p>Koordinasi yang baik dlm implementasi pola distribusi tertutup</p> <p>Mengawal dan mempercepat jaringan pipa gas Trans Kalimantan</p>	<p>Kalteng dan Kalsel</p> <p>Kalbar</p> <p>Kaltim dan Kalsel</p>

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Angkutan Udara

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p>Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> Kapasitas bandara yang tidak memadai 	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Angkasa Pura II untuk segera mengoperasikan gedung terminal baru Menjalin komunikasi dengan pihak maskapai untuk mencari <i>win-win solution</i> terkait inflasi angkutan udara. 	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Angkasa Pura II untuk mengkaji penambahan area <i>apron</i> pesawat sehingga jumlah maskapai angkutan udara yang melayani dapat bertambah. 	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan kantor pusat maskapai penerbangan melalui Kementerian Perhubungan untuk meninjau kembali proses penetapan harga terutama menjelang agenda tahunan (Hari Raya Idul Fitri, Imlek, Cap Go Meh, Sembahyang Kubur, dan Natal) Dukungan dana untuk pembangunan area <i>apron</i> pesawat. 	Kalbar

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Angkutan Udara (I)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Struktural <ul style="list-style-type: none">• Kapasitas bandara yang tidak memadai• Terbatasnya bandar udara	<ul style="list-style-type: none">• Memulai pembangunan terminal bandara Tjilik Riwut untuk peningkatan kapasitas penumpang• Berkoordinasi dengan Angkasa Pura II untuk segera mengoperasikan Bandara Samarinda			Kalteng Kaltim

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Angkutan Udara (2)

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Struktural • Kapasitas bandara	<ul style="list-style-type: none">Berkoordinasi dengan Angkasa Pura II untuk segera mengoperasikan Bandara SamarindaMemulai pembangunan terminal bandara Tjilik Riwut untuk peningkatan kapasitas penumpang			Kaltim Kalteng

Roadmap Pengendalian Inflasi Secara Umum

PENGENDALIAN INFLASI KOMODITAS SECARA UMUM

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
Infrastruktur kurang memadai	<ul style="list-style-type: none">• Adanya pembangunan 2 pelabuhan baru• Peningkatan kapasitas pelabuhan Kumai• Pembangunan jalur kereta api barang dari Puruk cahu –Batanjung dan Banjarmasin-Palangka Raya• Jumlah jalan rusak 20%• Pasar Penyeimbang akan terbentuk di 14 kabupaten/ kota• Pembangunan Pasar Penyeimbang permanen• Terbentuk Pasar Penyeimbang <i>Mobile</i> di 2 kota (Palangka Raya dan Sampit)	<ul style="list-style-type: none">• 2 Pelabuhan baru di Kalimantan Tengah sudah selesai• Pembangunan jalur kereta api Banjarmasin – Palangka Raya akan selesai• Pembangunan jalur kereta api Puruk cahu – Batanjung akan memasuki tahap 2• Telah tersedia jalan raya yang mampu• Pasar Penyeimbang <i>Mobile</i> akan terbentuk di seluruh kabupaten/ kota• Bangunan permanen Pasar Penyeimbang akan dibuat diseluruh kabupaten/ kota	<ul style="list-style-type: none">•Dukungan anggaran•Pengawasan	Kalteng

Roadmap Pengendalian Inflasi Secara Umum

PENGENDALIAN INFLASI KOMODITAS SECARA UMUM

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
2. Distribusi, tata niaga, pasar yang cenderung oligopoli dan tidak ada manajemen stok	Mendirikan Pusat Distribusi Regional di Banjarmasin sebagai penyangga pasokan	<ul style="list-style-type: none">• Membangun <i>early warning stock system</i> sebagai tindakan <i>preemptive</i> sebelum kenaikan harga terjadi• Menginisiasi kerja sama antardaerah antar Kabupaten atau Provinsi• Penyelesaian permasalahan struktural daerah melalui kemandirian kewenangan dan anggaran	Memperpendek jalur distribusi antara lain melalui pembangunan pasar induk.	Kalsel

Roadmap Pengendalian Inflasi Secara Umum

PENGENDALIAN INFLASI KOMODITAS SECARA UMUM

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
2. Distribusi, tata niaga, pasar	<ul style="list-style-type: none">• Evaluasi seluruh jalur transportasi darat (2015)• Meningkatkan fungsi aparatur dalam penertiban pungli (2015)• Perbaiki jalur transportasi darat (2016)• Mengevaluasi fungsi aparatur dalam penertiban pungli (2016)• Peninjauan ulang biaya kelebihan muatan pada jembatan timbang yang sesuai (2016)• Pengaktifan di tahun 2015 dan evaluasi di tahun 2016 fungsi pasar induk (sebagai satu-satunya gerbang masuk dan keluar bagi komoditas inti) dan pengaktifan pencatatan <i>input-output</i> komoditas	<ul style="list-style-type: none">• Penambahan jalur alternatif darat, laut maupun udara• Pencatatan <i>input-output</i> komoditas menggunakan sistem informasi yang terintegrasi	Perimbangan keuangan untuk daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur	Kaltim

Roadmap Pengendalian Inflasi Secara Umum

PENGENDALIAN INFLASI KOMODITAS SECARA UMUM

Permasalahan	Peran TPID		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
3. Peningkatan produksi pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Inisiasi ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian melalui Upsus dan program tanam diluar masa tanam (tahun 2015) • Melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian melalui Upsus dan program tanam diluar masa tanam (tahun 2016) 	Pengendalian alih fungsi lahan dan sertifikasi lahan abadi pertanian		Kaltim
4. Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Press confercence</i> TPID thn 2015, dan bijak berbelanja pada saat hari besar keagamaan • Integrasi PIHPS MAHAKAM, SAHABAT, dsn Tarakan serta sosialisasi penggunaannya tahun 2015 • Operasi pasar tahun 2015 • Pasar murah 30 x setahun tahun 2016 			Kaltim, Kalsel Kaltim

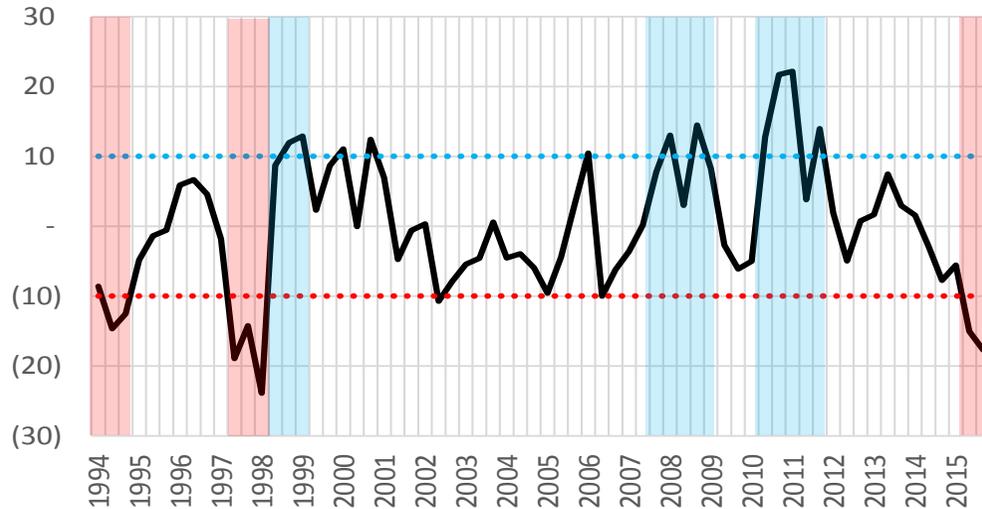
LAMPIRAN 4.A

Isu Strategis

El Nino dan La Nina

Histori El Nino dan La Nina

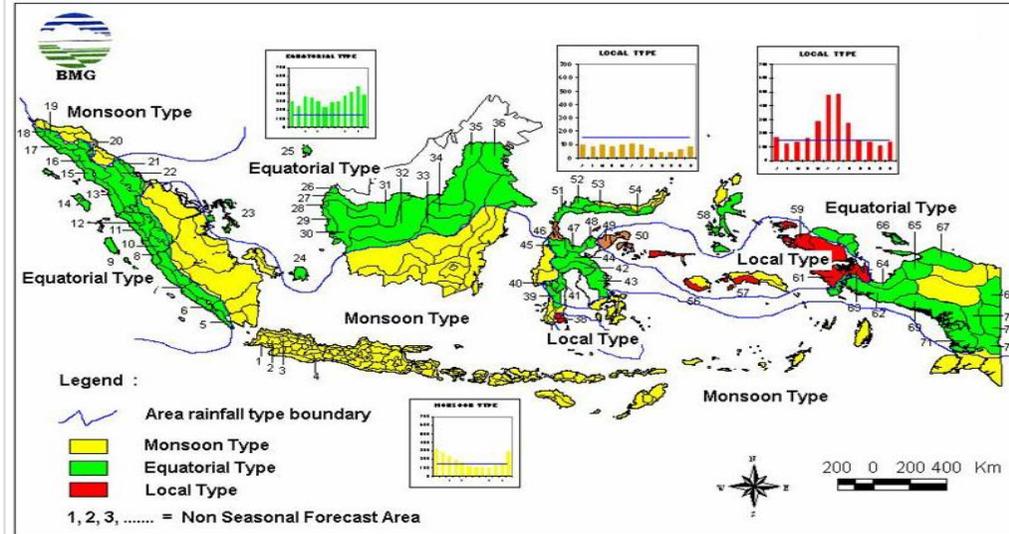
Historis El Nino dan La Nina



■ La Nina ■ El Nino

Sumber : Australian Bureau of Meteorology, diolah

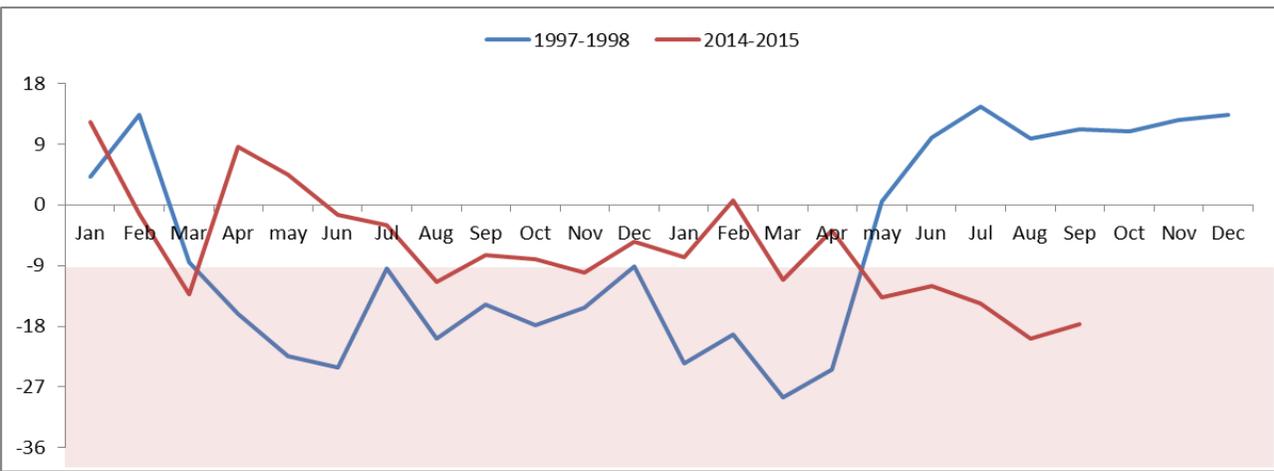
Pembagian Karakteristik Iklim di Indonesia



- Fenomena El Nino/La Nina atau ENSO (*El-Nino Southern Oscillation*) yaitu sebuah kanal dari suhu air laut anomali hangat yang berkembang di lepas pantai barat daya Amerika dan dapat menyebabkan perubahan iklim di Samudera Pasifik.
- Diukur menggunakan indikator *Southern Oscillation Index* (SOI). Apabila $SOI > 10$ maka dipastikan terjadi La Nina dan apabila $SOI < -10$ dipastikan terjadi fenomena El Nino (Fox, 2000).
- Sejak Mei 2015, SOI di bawah batas bawah dan data rilis terakhir (16 Agustus 2015) menunjukkan SOI yang kembali turun tajam.
- Kondisi geografis Kalsel dan Kalteng berada pada wilayah iklim muson (*monsoon*) sehingga dampak El Nino dan La Nina akan berdampak cukup kuat, sementara Kaltim dan Kalbar berada pada iklim ekuator (*equator*) yang relatif kecil dampaknya.

El Nino dan Produksi Padi

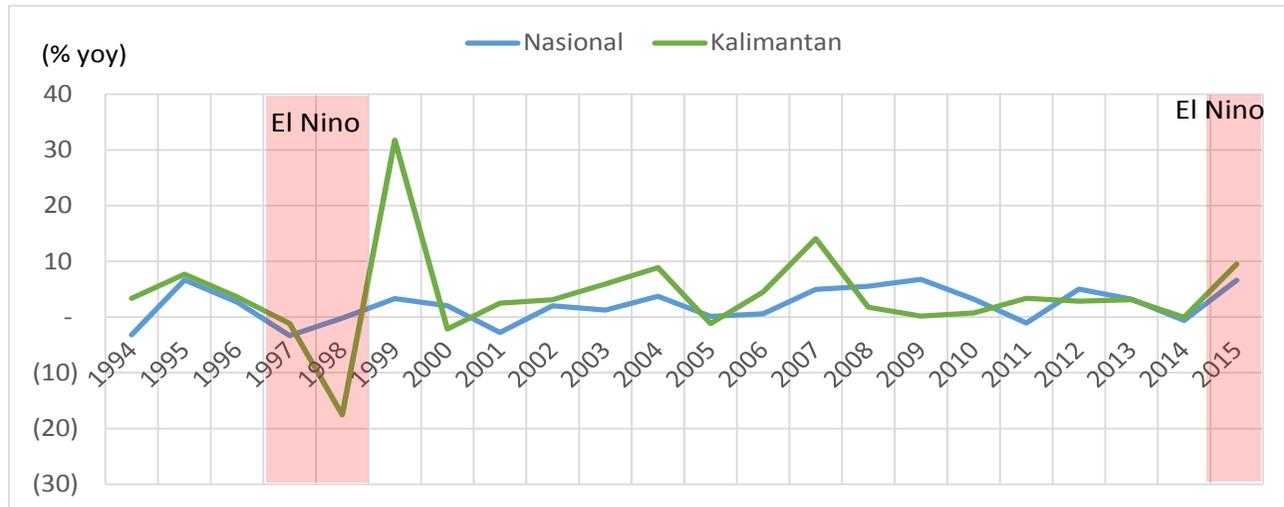
Perbandingan SOI Level 1997-1998 dan 2014-2015



- Dilihat berdasarkan SOI level nya, kondisi El Nino yang terjadi pada tahun 2015 tidak separah yang terjadi pada tahun 1997-1998
- Pada tahun 2015 titik SOI level terendah berada pada titik -19.8 yang berlangsung pada bulan Agustus
- Disisi lain pada El Nino yang berlangsung pada rentang tahun 1997-1998 titik SOI level terendah mencapai -28.5 yang terjadi pada bulan Maret 1998

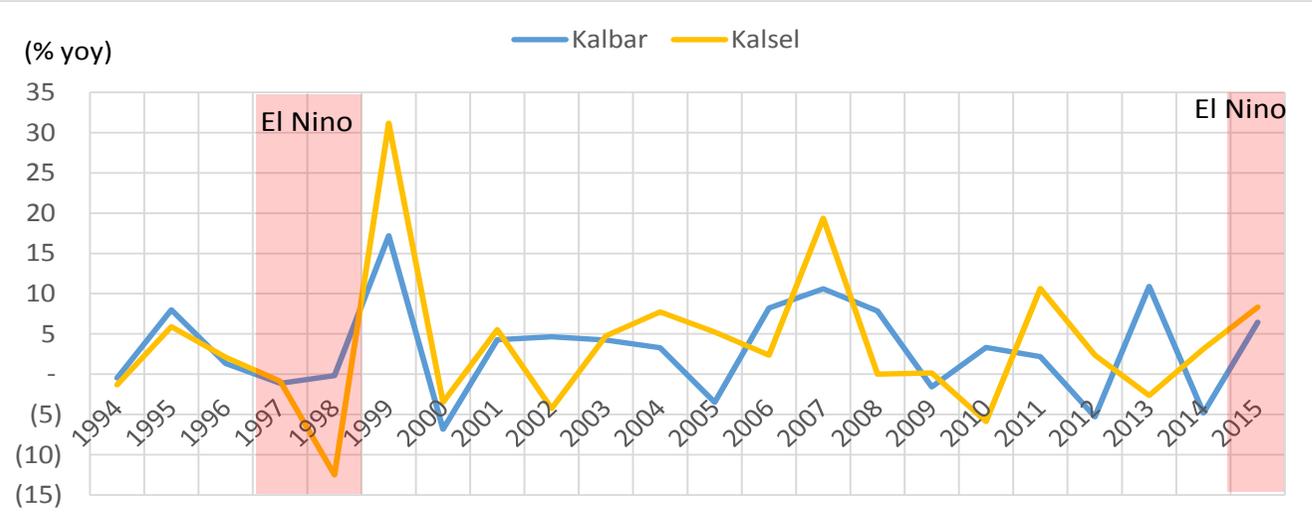
- Produksi nasional padi pada tahun 1997 dan 1998 mengalami penurunan 3,37% dan 3,65% dibanding tahun 1996.
- Sementara Produksi Padi Kalimantan di tahun 1997 hanya turun -1,19%, namun pada tahun 1998 turun semakin dalam mencapai 17,57%.

Historis Produksi Padi Pada El Nino



El Nino dan Produksi Padi

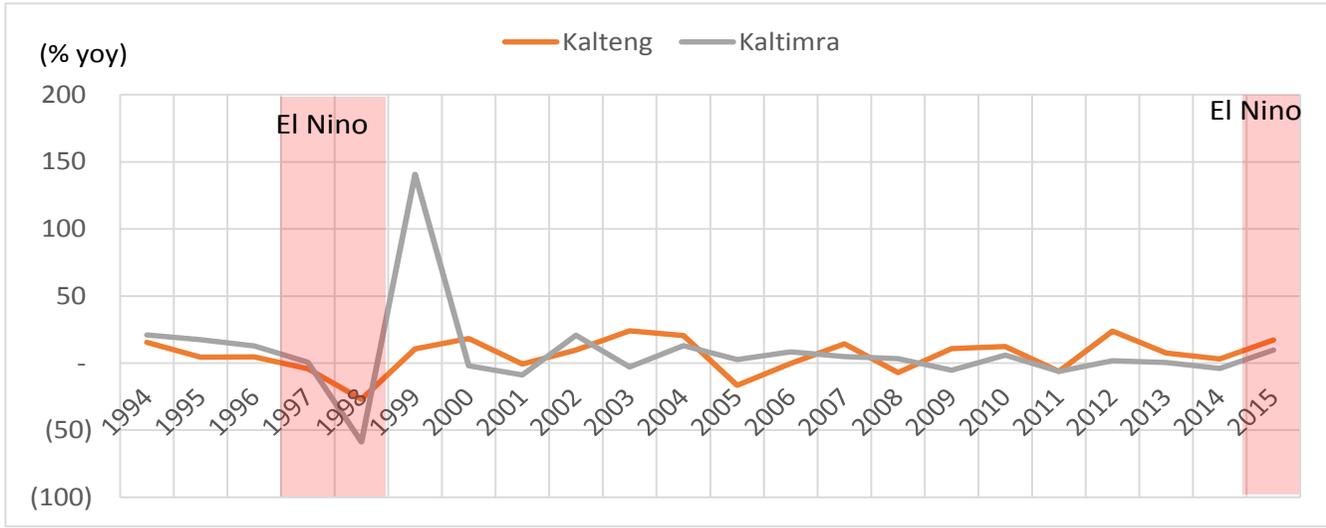
Historis Produksi Padi Pada El Nino di Kalsel dan Kalbar



- Produksi padi di Kalimantan didominasi Kalsel (43,2%), Kalbar (28,3%) dan Kalteng (17,3%), sementara Kaltimra cenderung paling rendah (11,2%).
- Produksi padi di Kalsel cenderung mengalami penurunan, terutama setahun paska El Nino. Pada tahun 1998 mengalami penurunan 13,3% dibandingkan 1996.
- El Nino di Kalbar juga menurunkan produksi padi, tetapi tidak sedalam Kalsel karena iklim ekuator. Pada 1998 produksi padi turun -1,3% dibandingkan tahun 1996.

- Penurunan produksi yang dalam juga terjadi di Kalimantan Tengah dan Timur pada tahun kedua El Nino.
- Pada tahun 1998, produksi Kalteng mengalami penurunan -30% dibandingkan 1996.
- Demikian pula Kaltim mengalami penurunan produksi -58,4% pada 1998 dibandingkan tahun 1996.

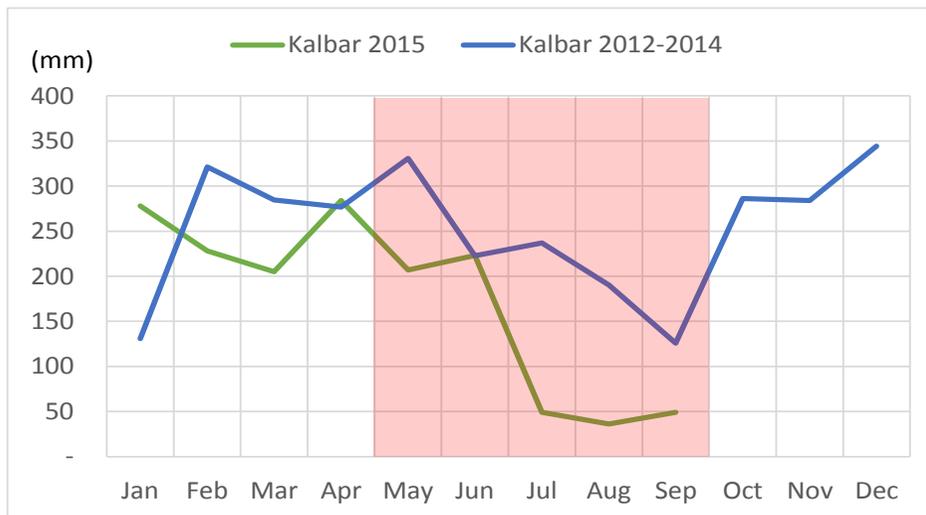
Historis Produksi Padi Pada El Nino di Kalteng dan Kaltimra



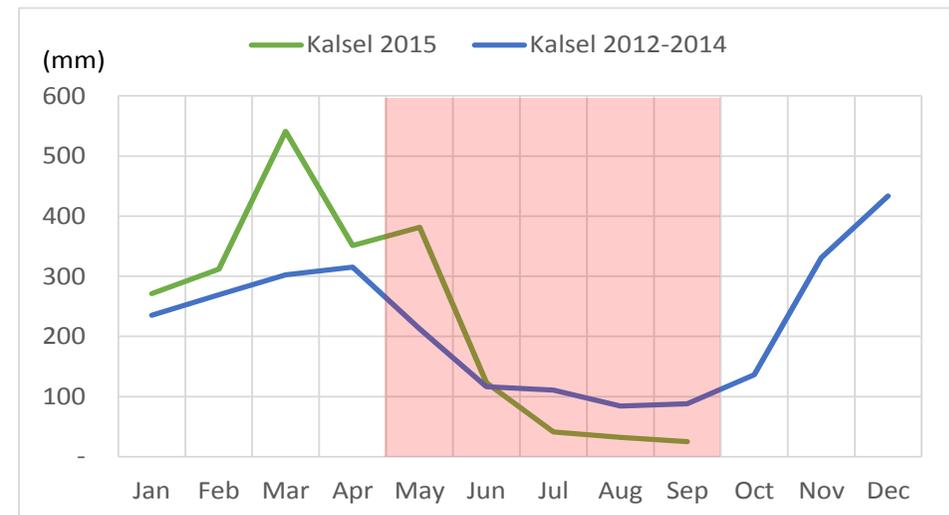
Dampak El Nino Terhadap Curah Hujan 2015

- Secara bulanan, SOI memasuki level yang konsisten di bawah -7 (indikasi El Nino) sejak bulan Mei 2015.
- Hal tersebut berdampak pada rendahnya curah hujan 2015 dibandingkan dengan kondisi normal 2012-2015 (tahun tanpa indikasi El Nino dan La Nina).
- Rendahnya curah hujan terjadi di semua provinsi di Kalimantan.
- Sejak bulan Juli 2015, curah hujan di Kalsel, Kalbar dan Kalteng bahkan sudah berada di bawah 50 mm, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pola normalnya pada kisaran 85–230 mm.

Curah Hujan Kalbar

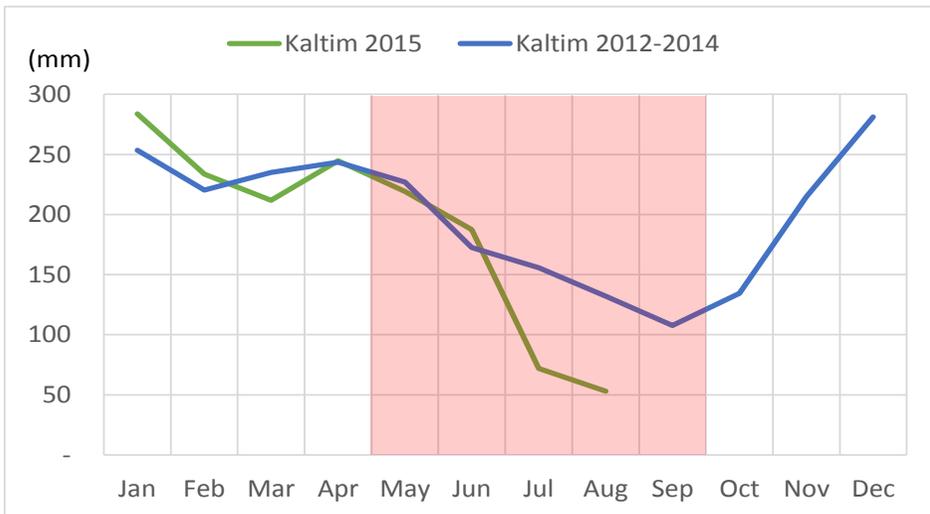


Curah Hujan Kalsel

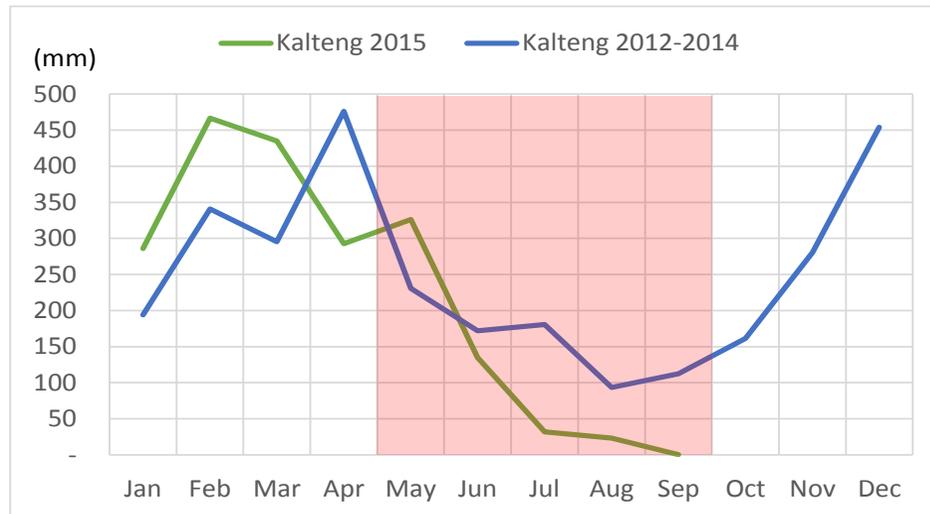


Dampak El Nino Terhadap Curah Hujan 2015

Curah Hujan Kaltim

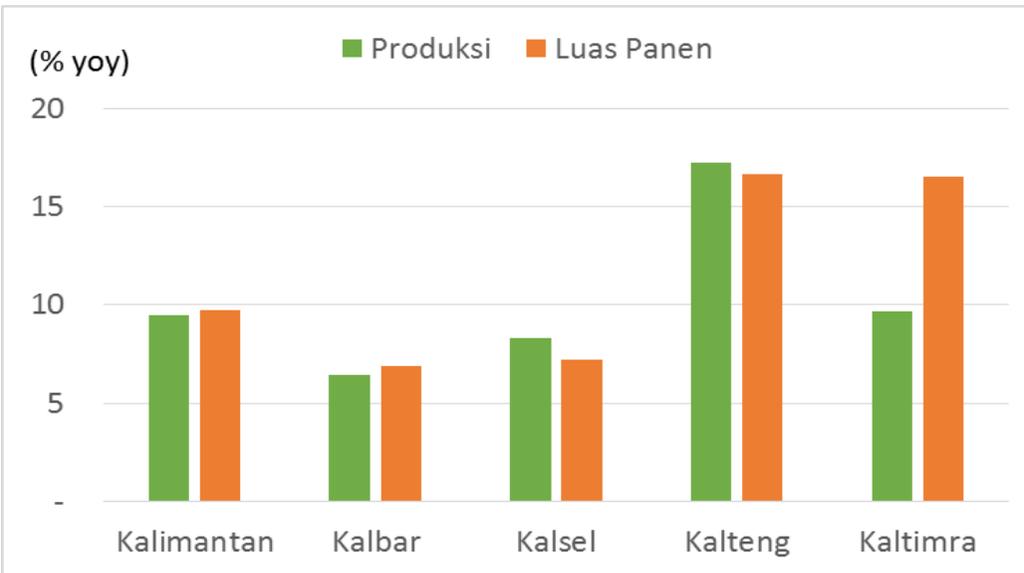


Curah Hujan Kalteng



Dampak El Nino Terhadap Produksi Padi 2015

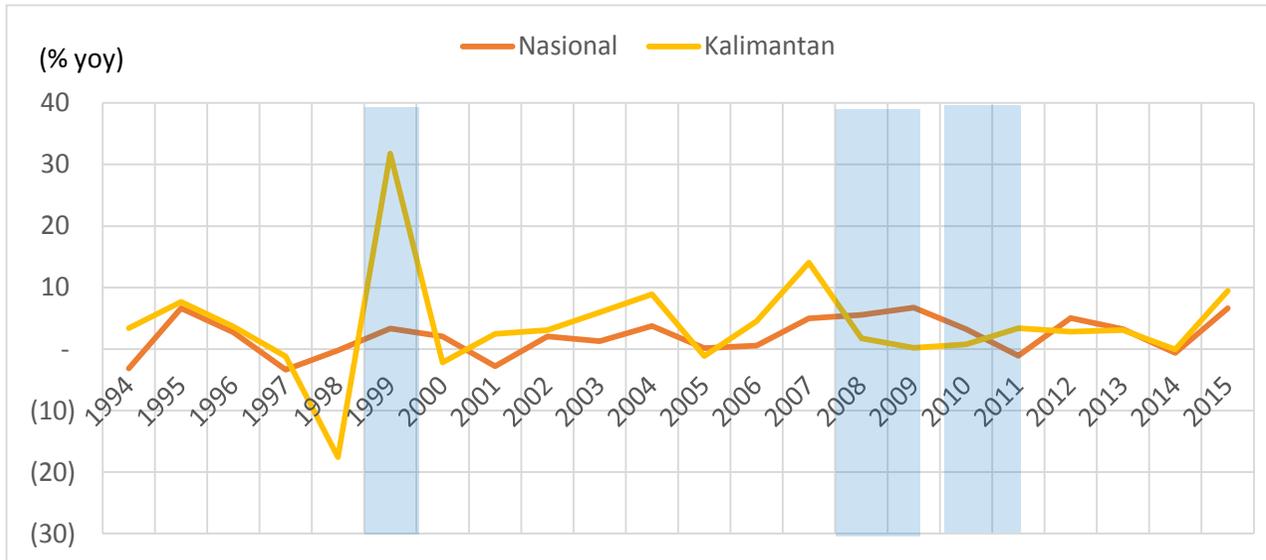
ARAM 2015



- Berdasarkan hasil asesmen sebelumnya, dampak El Nino diperkirakan belum akan terasa di tahun 2015.
- Pada tahun 2015, diperkirakan produksi padi masih akan tumbuh 9,49% atau berproduksi 5,31 juta ton.
- Tingkat pertumbuhan tersebut berada di atas pola historis tanpa ada El Nino dan La Nina (3,74%).
- Pertumbuhan produksi padi lebih didorong oleh ekspansi lahan melalui program upaya khusus (upsus) dari 1,32 juta hektar pada tahun 2014 menjadi 1,45 juta hektar pada tahun 2015.
- Di sisi lain, produktivitas diproyeksi masih akan konstan 3,65 ton/ha.

Historis La Nina dan Produksi Padi

Produksi Padi



	g. Produksi Padi			
	1999	2008	2010	Normal
Nasional	3.31	5.54	3.22	2.37
Kalimantan	31.76	1.75	0.75	3.36
Kalbar	17.18	7.85	3.31	2.09
Kalteng	10.62	(7.07)	12.38	4.59
Kalsel	31.16	0.02	(5.87)	5.07
Kaltimra	140.75	3.27	6.00	0.35

- Momen La Nina terjadi pada tahun 1999, tahun 2008 sampai dengan pertengahan 2009 dan 2010 sampai dengan pertengahan 2011.
- Produksi Padi di Kalimantan relatif tidak terlalu berpengaruh terhadap momen La Nina, namun ada kecenderungan tumbuh lebih rendah dibandingkan pola normalnya apabila tidak ada momen El Nino maupun La Nina.
- Hal tersebut disebabkan Kalsel yang merupakan produsen padi utama Kalimantan didominasi oleh lahan rawa sehingga La Nina menyebabkan lahan yang bisa ditanami semakin sedikit.
- Di sisi lain, Kaltim yang banyak ditemukan tanah non rawa terdampak positif oleh fenomena La Nina.
- Penelitian oleh Bambang Irawan (2006) menjelaskan bahwa pada secara umum momen La Nina dan El Nino dapat berdampak negatif pada produksi pangan. Namun demikian, untuk kasus tanah kering, momen La Nina dapat berimplikasi positif.

Isu Strategis Khusus: Upaya TPID Mengahdapi El Nino dan La Nina

Kalsel

- Mengoptimalkan *comparative advantage* yang dimiliki Kalsel dengan mengupayakan peningkatan luas lahan tanam baik dari lahan rawa lebak maupun lahan rawa pasang surut.
- Tetap menjaga kesinambungan produksi padi yang berasal dari lahan irigasi teknis melalui perbaikan saluran irigasi atau penggunaan pompa air untuk melancarkan pengairan.
- Agenda ke depan sejalan dengan Upaya Khusus (Upsus), peningkatan luas lahan tanam dapat dilakukan melalui berbagai langkah:
 - a. Mendorong peningkatan Indeks Pertanaman (IP) lahan rawa agar dapat ditanami minimal 2x setahun.
 - b. Bantuan teknis berupa penyuluhan untuk memanfaatkan lahan rawa yang belum optimal
 - c. Bantuan teknis bibit khusus lahan rawa dan pengembangannya
 - d. Bantuan alat pertanian dan penyempurnaan infrastruktur pertanian.
- Koordinasi yang kuat antar pihak terkait dalam rangka mengawal kesuksesan program Upsus peningkatan produksi tanaman pangan untuk menuju swasembada pangan

Kaltim

- Menyebarluaskan informasi prakiraan kondisi iklim dari BMKG, agar Petani dan Masyarakat untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipatif,
- Mengaktifkan program bantuan pembuatan sumur dangkal, sumur dalam dan kolam penampungan air,
- Mencegah alih fungsi lahan dengan memberikan insentif kepada petani yang dapat mempertahankan produktivitas lahan,
- Menyiapkan saprodi cadangan (terutama benih varietas tahan kekeringan) bagi pertanaman yang mengalami kekeringan,
- Meneruskan program kerja sama antar TPID untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok,
- Menjajaki kemungkinan kerja sama dengan daerah produsen terdekat, misalnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser,
- Pemupukan cadangan beras BULOG,
- Mengusulkan peningkatan peran BULOG sebagai penyangga harga pangan daerah, tidak terbatas pada beras saja.
- Memperkuat koordinasi TPID dan unsur pendukung lainnya untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dengan harga wajar.

Isu Strategis Khusus: Upaya TPID Mengahdapi El Nino dan La Nina

Kalteng

- Bantuan peralatan pertanian
- Mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian
- Penyuluhan terhadap petani mengenai penanaman saat El Nino dan La Nina
- Penyesuaian kalender tanam
- Mengoptimalkan peran kandang penyangga dan kolam penyangga
- Menjaga ekspektasi masyarakat dengan press rilis, operasi pasar dan pasar penyeimbangan

Kalbar

- Penyediaan pompa air khususnya untuk daerah produsen guna menjaga pasokan air.
- Terus menjalankan Upaya Khusus (Upsus) dalam hal bantuan saluran irigasi tersier dan alsintan berupa traktor tangan serta bantuan bimbingan teknis penerapan metode Hazton. Selain itu, Upsus juga fokus peningkatan luas lahan tanam sehingga diharapkan akan semakin banyak lahan yang dapat ditanami 2x setahun.

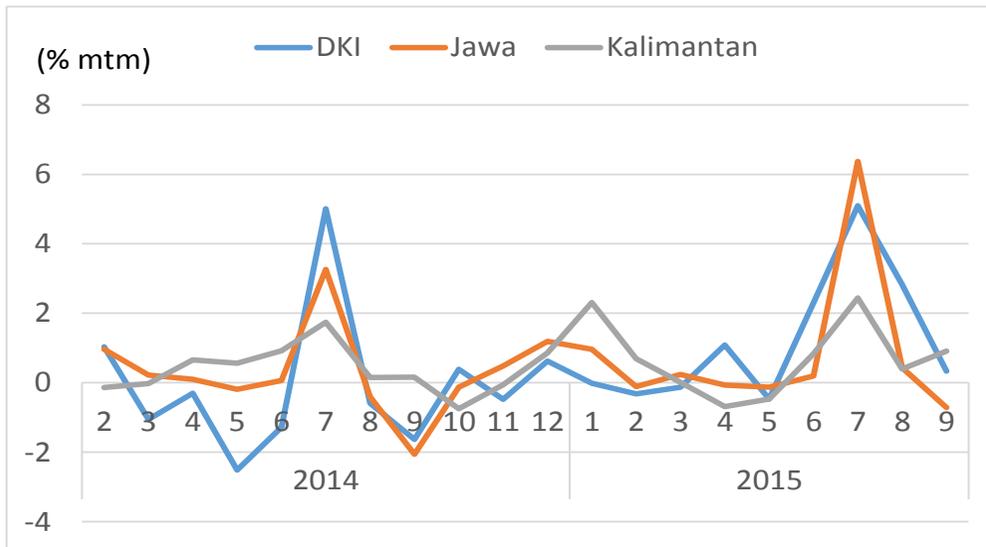
LAMPIRAN 4.B

Isu Strategis Daging Sapi

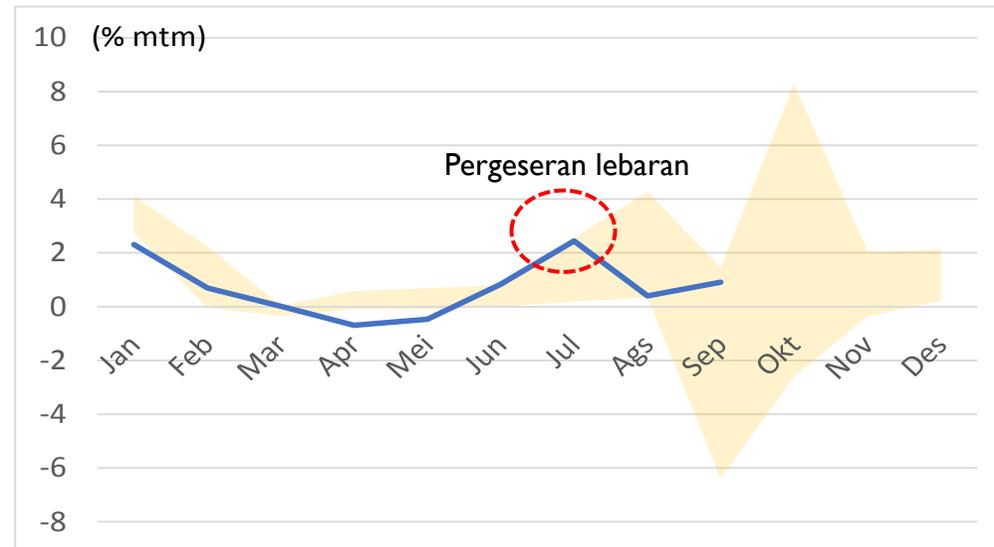
Gejolak Harga Daging Sapi

- Kenaikan harga daging sapi yang terjadi di Jabodetabek memiliki dampak terutama kepada provinsi di Jawa, sementara provinsi di Kalimantan dampaknya relatif lebih rendah.
- Hal tersebut terindikasi dari lebih rendahnya korelasi inflasi daging sapi Jakarta dengan Kalimantan (0,47) dibandingkan Jakarta dengan Jawa (0,78).
- Sepanjang tahun 2015 pola inflasi daging sapi di Kalimantan juga masih berada dalam range historisnya dan tidak terdapat indikasi perubahan pola ataupun *magnitude* inflasi daging sapi.
- Hal serupa juga terjadi di seluruh provinsi dalam regional Kalimantan.

Inflasi Daging Sapi

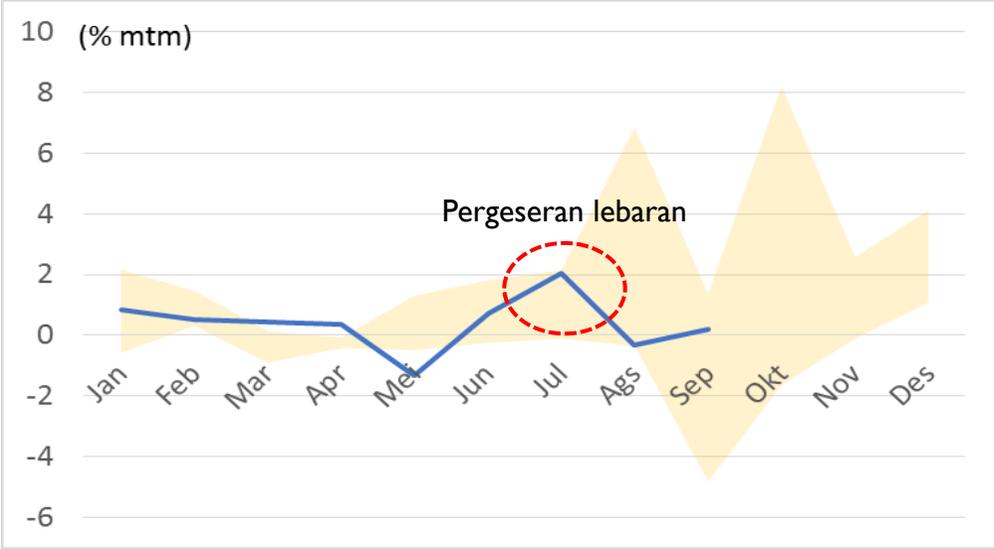


Pola Inflasi Daging Sapi di Kalimantan

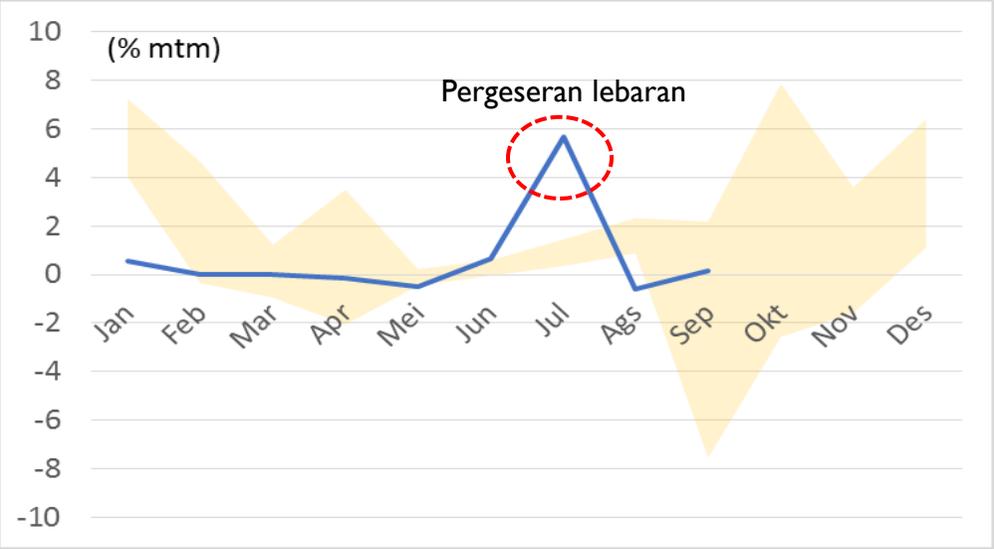


Gejolak Harga Daging Sapi

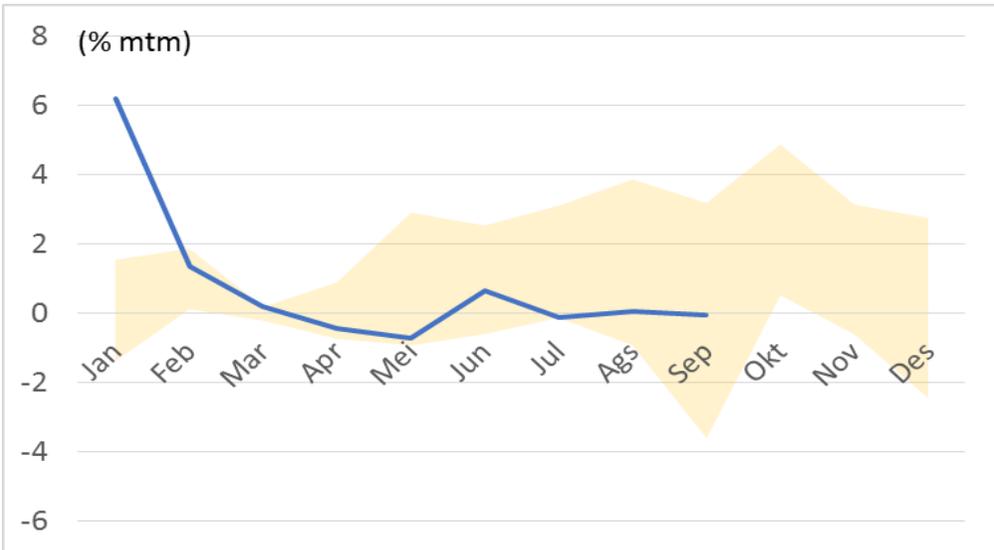
Pola Inflasi Daging Sapi di Kalbar



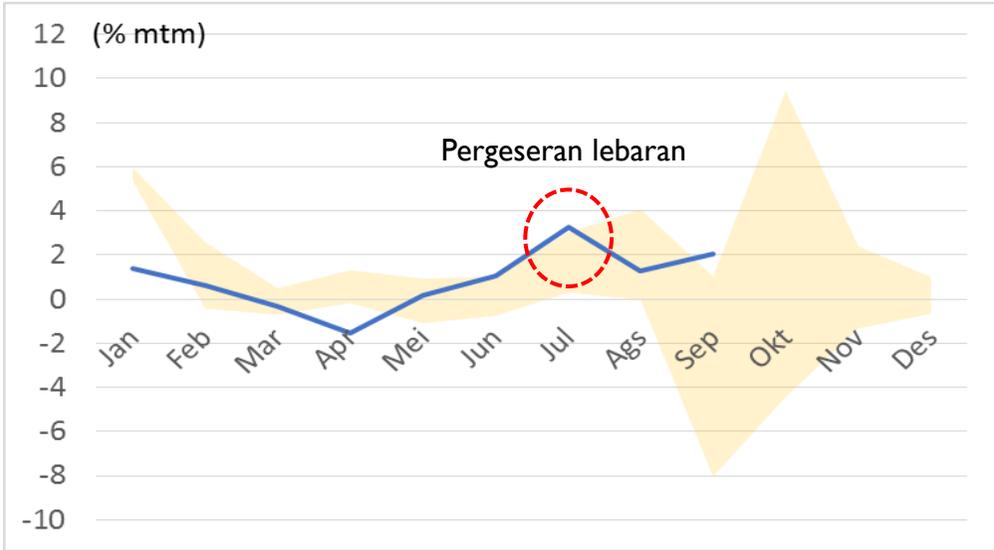
Pola Inflasi Daging Sapi di Kalteng



Pola Inflasi Daging Sapi di Kalsel



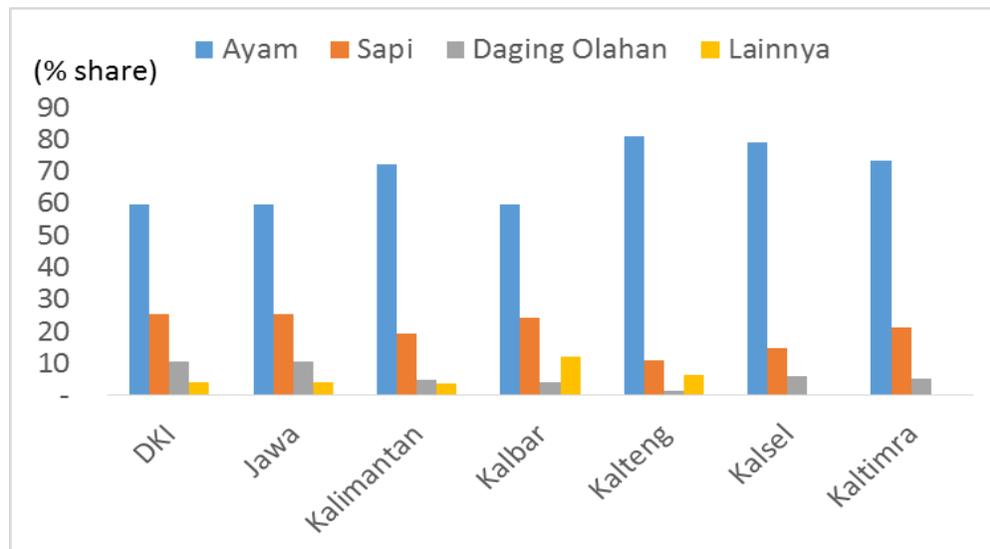
Pola Inflasi Daging Sapi di Kaltimra



Gejolak Harga Daging Sapi

- Salah satu penyebab rendahnya dampak terhadap Kalimantan adalah karena relatif lebih rendahnya permintaan yang terindikasi dari nilai konsumsi daging sapi.
- Masyarakat Kalimantan lebih banyak mengonsumsi daging ayam dan ikan dibandingkan dengan daging sapi.
- Selain lebih rendahnya tingkat konsumsi, daging sapi di Kalimantan juga lebih banyak didatangkan dari NTB dan Madura (Jatim) dibandingkan dari DKI Jakarta.
- Hal tersebut terindikasi dari lebih tingginya korelasi inflasi daging sapi antara Kalimantan dengan NTB dan Jatim dibandingkan dengan DKI.

NK Kelompok Daging



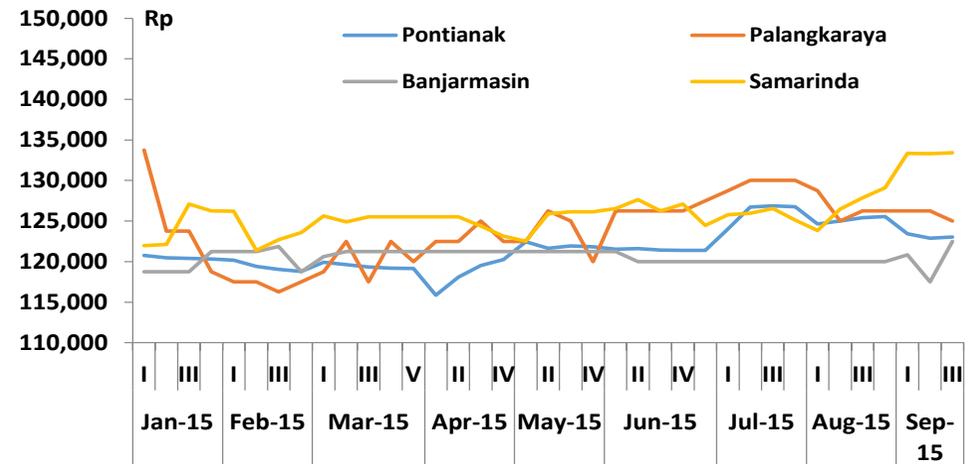
Korelasi inflasi Daging Sapi

Pemasok	Kalimantan
DKI	0,47
NTB	0,54
Jawa Timur	0,62

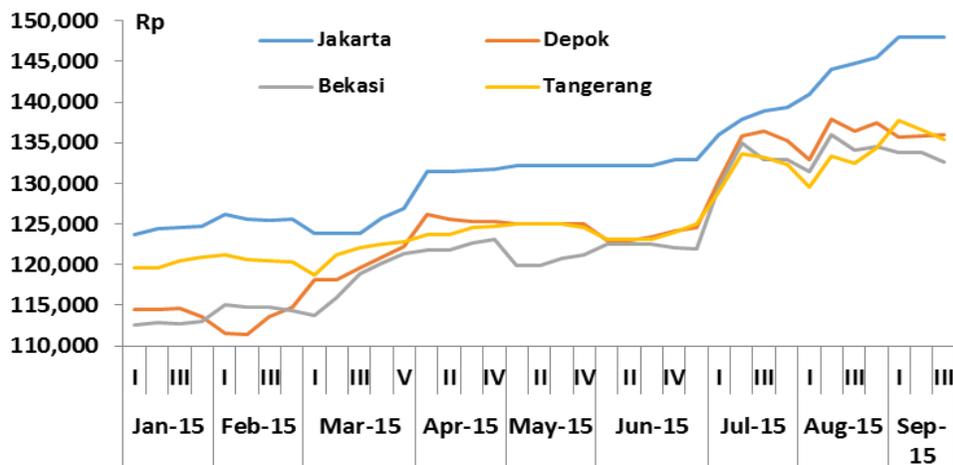
Gejolak Harga Daging Sapi

- Pantauan SPH juga mengindikasikan rendahnya korelasi antara harga daging sapi di Kalimantan dengan di Jabodetabek.
- Peningkatan harga terus terjadi sejak bulan Juli 2015 di Jabodetabek dan Bandung.
- Sementara itu, harga di Kalimantan cenderung tetap stabil.
- Pergerakan harga di Kalimantan cenderung searah dengan Surabaya yang merupakan pintu ekspor daging dari Madura ke Kalimantan.

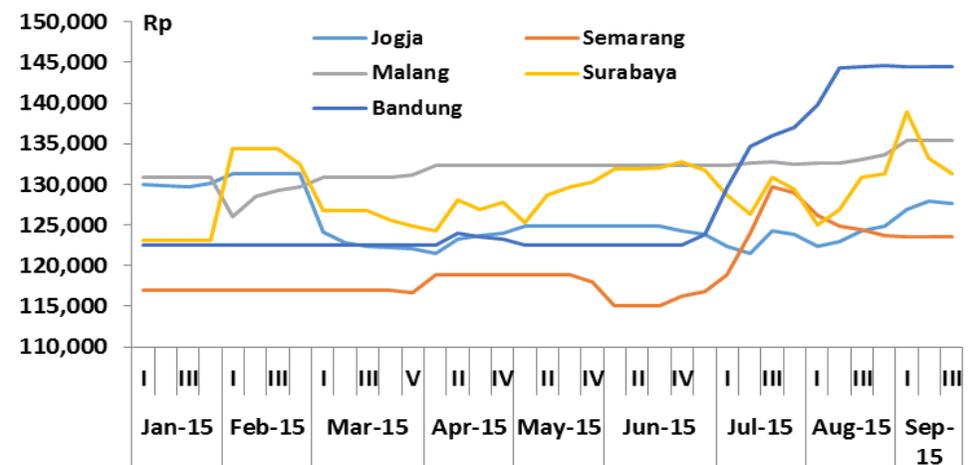
SPH Daging Sapi Kalimantan



SPH Daging Sapi Jabodetabek



SPH Daging Sapi Jawa



LAMPIRAN 4.C

Pendalaman Produksi Padi “Menata Hulu, Mengatur Hilir”

Latar Belakang



Permasalahan Produksi hulu

TERBATASNYA SAPRODI : PUPUK Pasokan pupuk subsidi ke Kalimantan hanya 2,41% dibandingkan total nasional dimana mayoritas petani membayar di atas HET dan kesulitan mendapatkannya. **BIBIT** sulit mendapatkan dan kurangnya bibit varietas unggul untuk lahan gambut

INFRASTRUKTUR: Minimnya irigasi. Lahan sawah Irigasi (3,39% total Nas).

TEKNOLOGI: Produktivitas dan (IP) rendah mengindikasikan penggunaan teknologi yang rendah dan belum optimal teknologi untuk pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian

SDM: Berkurangnya RT yang bekerja di sektor pertanian, jmlh tenaga PPL kurang, belum optimalnya kelembagaan petani

PEMBIAYAAN: Pembiayaan yang rendah dan tingkat ketergantungan yang tinggi pada rentenir



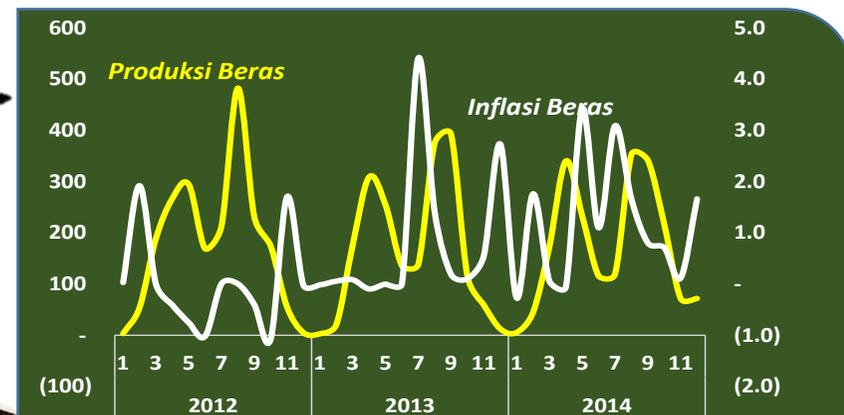
Permasalahan Produksi hilir



INFRASTRUKTUR: Minimnya gudang dan belum efisiennya fasilitas penggilingan (RMU)

MANAJEMEN STOK : Belum terdapat manajemen stok yang baik, terjadi inflasi beras yang cukup tinggi di saat tidak ada panen

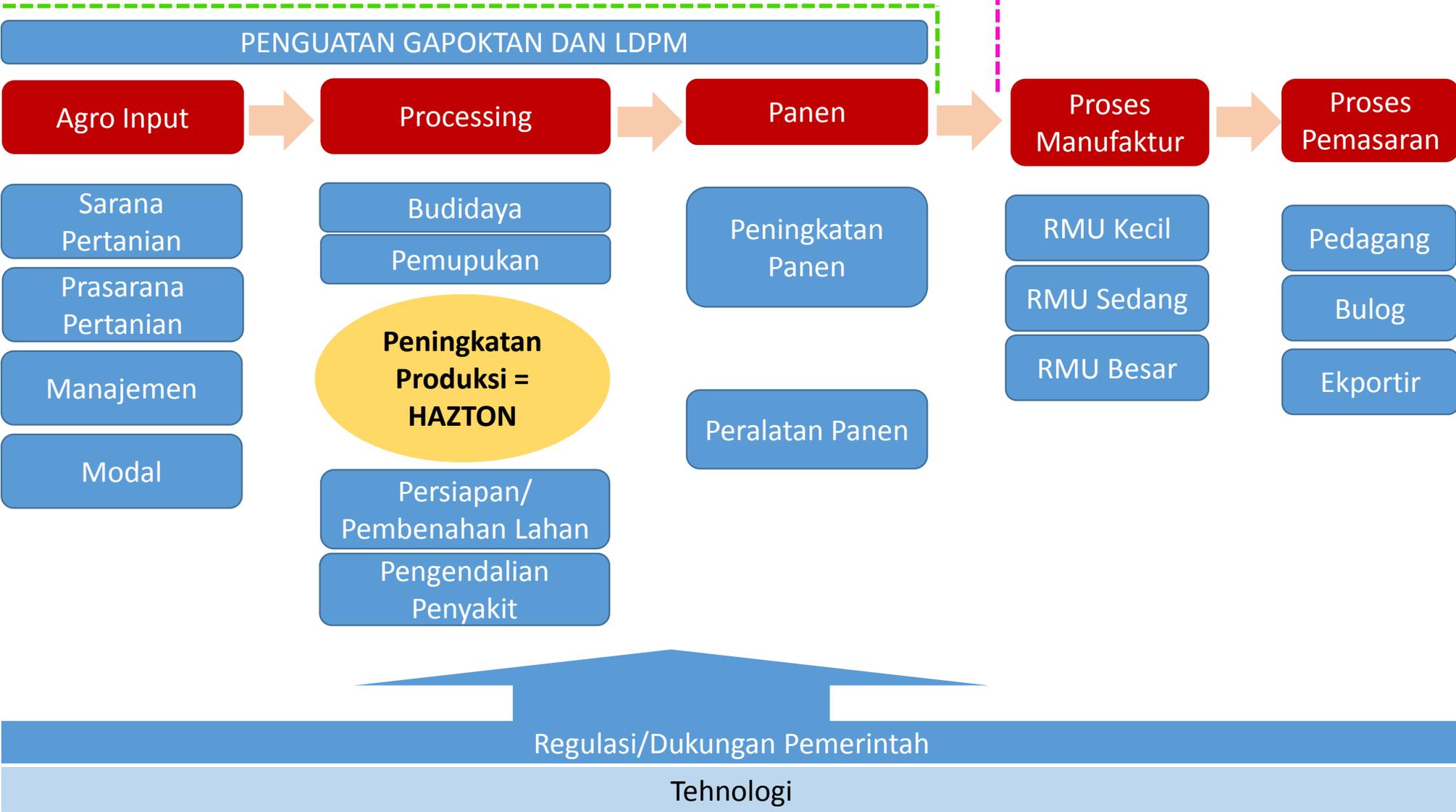
Inflasi vs Produksi Beras



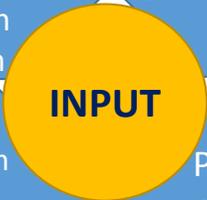
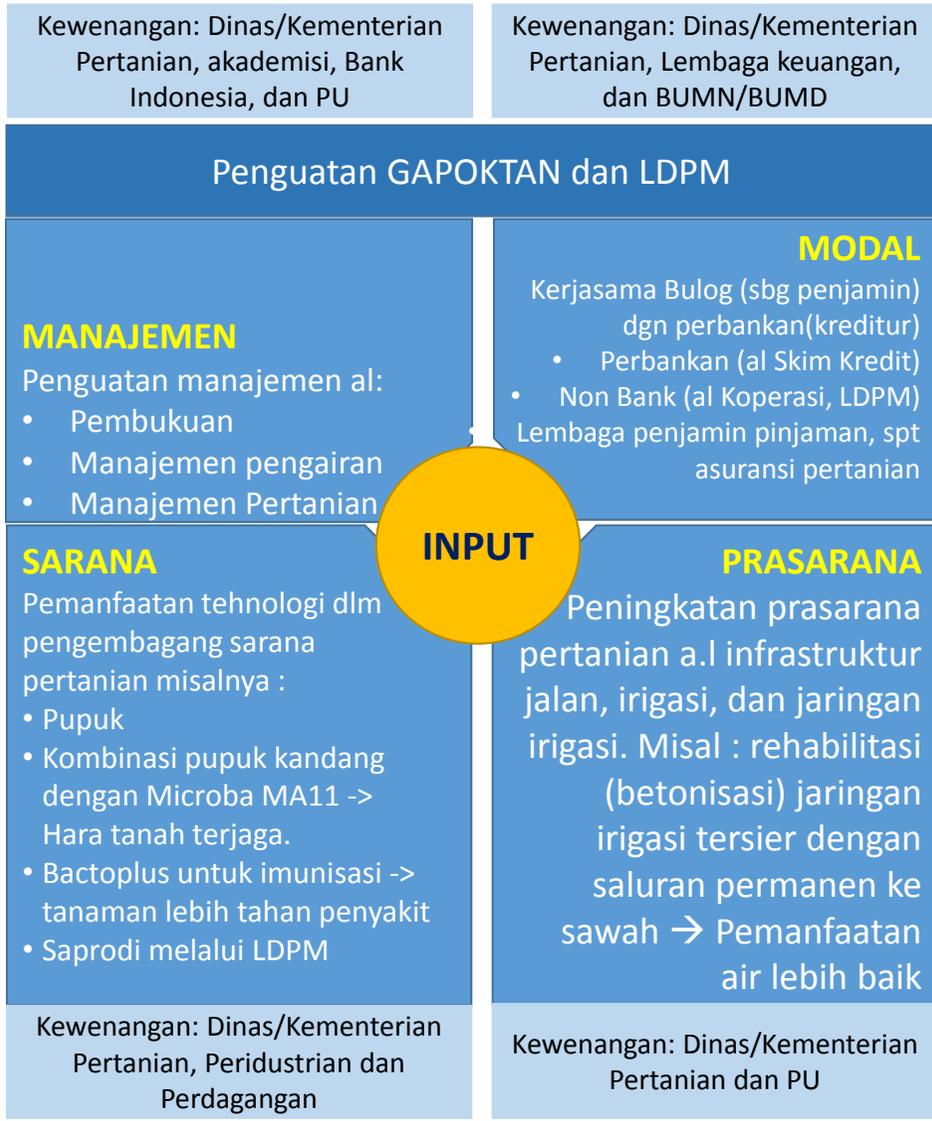
Skema “Menata Hulu, Mengatur Hilir”

MENATA HULU

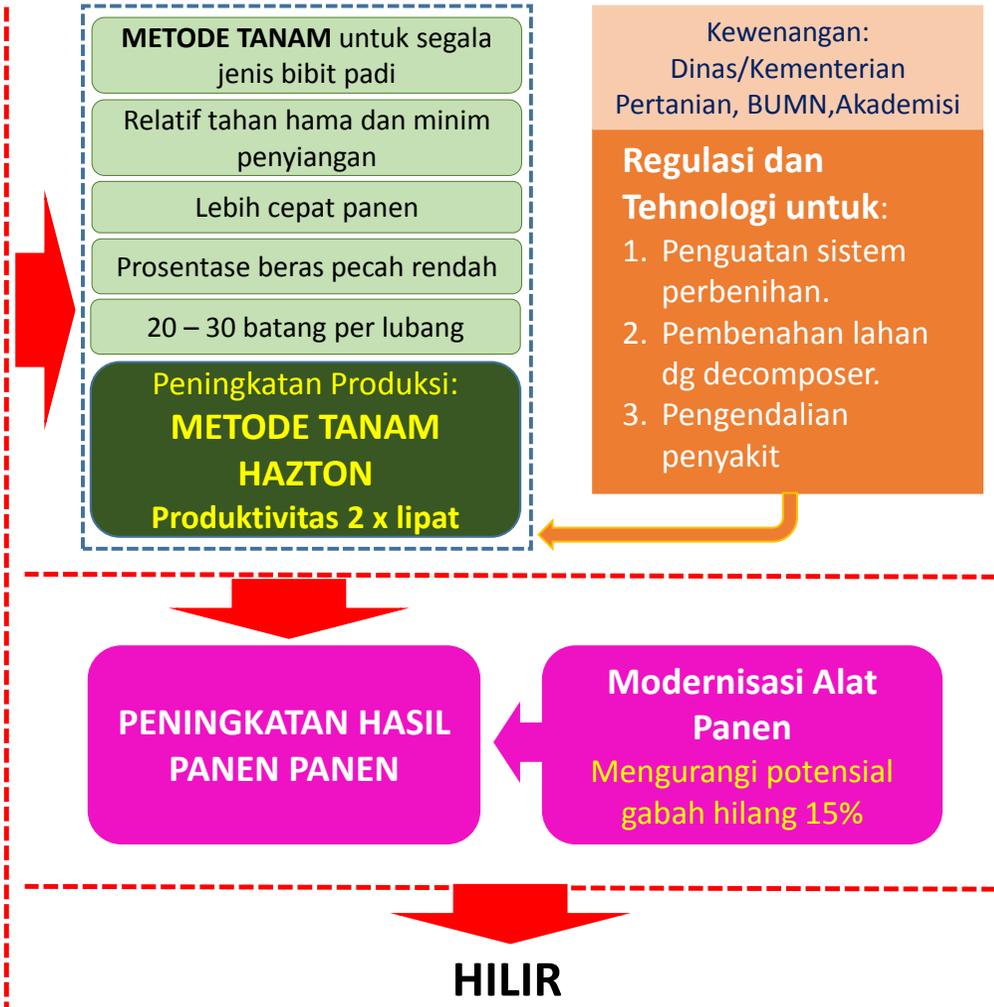
MENGATUR HILIR



Penjelasan “Menata Hulu”

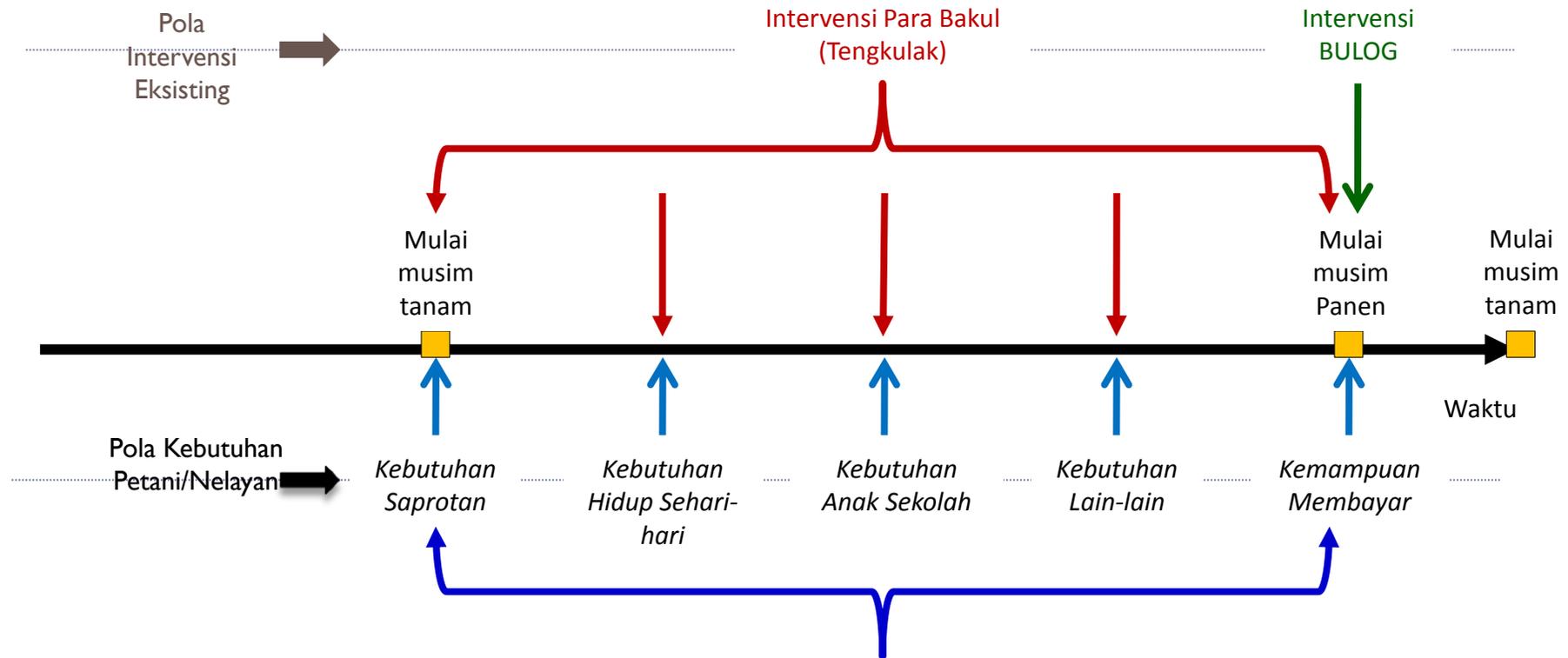


MENATA HULU



Penjelasan “Menata Hulu”, Penguatan Pembiayaan

Intervensi BULOG saat ini hanya pada saat musim panen, padahal kebutuhan para petani berada pada pra-panen



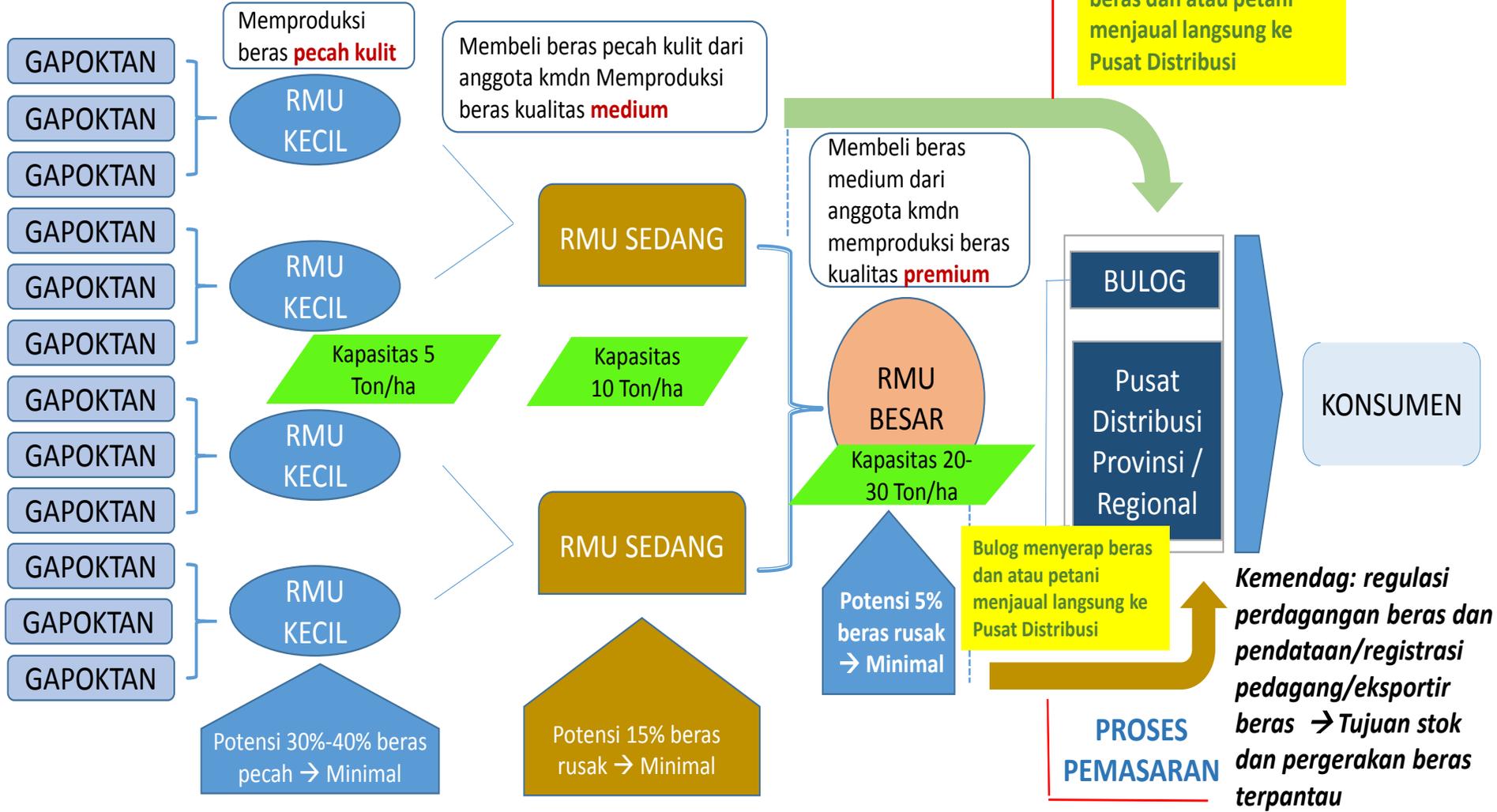
BULOG dapat menggantikan peran bakul (tengkulak) sehingga petani dapat memenuhi kebutuhannya pada periode musim tanam sampai dengan periode musim panen. Dari pembiayaan, BULOG bekerja sama dengan perbankan, BULOG sebagai penjamin, perbankan sebagai kreditur. Didukung sistem asuransi gagal panen dan pembangunan gudang di sentra produksi kerja sama BULOG dengan Pemda

Sumber : Anggadinata, 2010 – diskusi internal CLOCS ITB; TPID Sumatera Selatan

Penjelasan “Mengatur Hilir”

PROSES PENGOLAHAN

Kementan, Perindustrian, Perdagangan : Regulasi (aturan penggilingan) dan pendataan RMU → Tujuan mengurangi potensi beras rusak



Tantangan “Menata Hulu, Mengatur Hilir”

Kurang nya dukungan pemerintah pusat pada pengembangan metode peningkatan produksi yang dikembangkan daerah, sprt metode HAZTON

Masih kurangnya infrastruktur pertanian, sementara rencana pembangunan juga relatif sedikit dibandingkan dengan wilayah lain

Belum diterapkannya Rencana Tata Ruang dan Wilayah di sebagian besar provinsi Wilayah Kalimantan

LAMPIRAN 4.D

Pendalaman Distribusi “Manajemen Rantai Pasok Komoditas Pokok”

Permasalahan Tata Niaga di Kalimantan

RANTAI PERDAGANGAN PANJANG

Pedagang besar memiliki peran signifikan dalam penentuan harga

(sumber: Riset Ketahanan Pangan)

TERCIPTANYA PASAR OLIGOPOLI

Akibat penentuan harga oleh beberapa pihak saja

(sumber: Riset Struktur Pasar)

INFRASTRUKTUR YANG MASIH BELUM MEMADAI

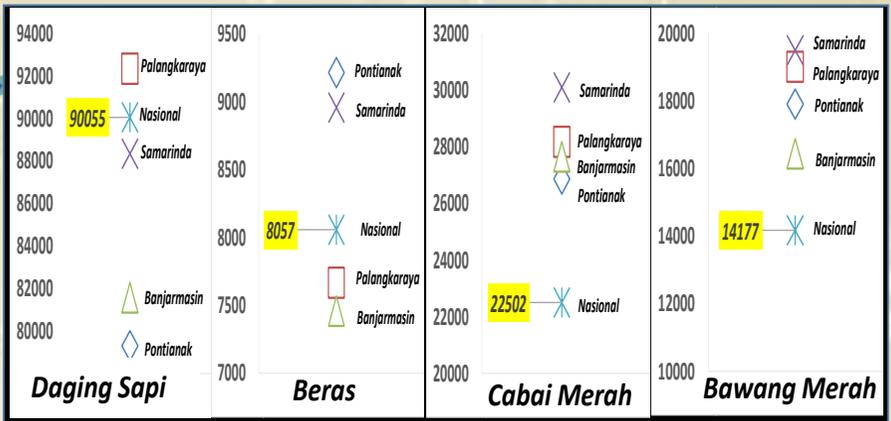
(sumber: Riset Struktur Pasar)

DISPARITAS HARGA

ANTAR PELAKU USAHA DAN ANTAR KOTA

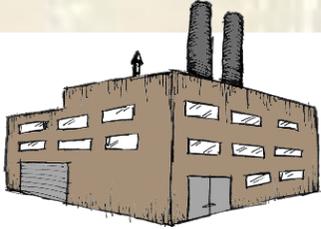
Disparitas Harga Kalimantan dan Nasional

Disparitas harga beras relatif tidak jauh dari harga rata-rata nasional, sedangkan Cabai Merah, Daging Sapi dan Bawang Merah memiliki disparitas cukup lebar.



Upaya TPID dlm Mengatasi

- Efektivitas Pengendalian Harga
- Pasar Penyeimbang dan kolam+kandang penyangga
- Revitalisasi Pasar Tradisional
- Kajian efektivitas RMU dan Pola Perilaku Pedagang



PDR

Pusat Distribusi Regional



1. Sebagai jaringan penyeimbang
2. Akan dibangun di Banjarmasin untuk Wilayah Kalimantan

Pasar Penyeimbang

Latar Belakang

- Kenaikan harga sejumlah bahan pangan strategis selalu menjelang hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru.
- Kajian komoditas utama penyumbang inflasi bulanan yang dilakukan BI dan BPS serta analisis penyebab kenaikan harganya yang dibahas dalam rapat TPID.

Pemda :



- PU menyiapkan bangunan pasar, PDAM menyiapkan air bersih, Distamber melalui PLN menyiapkan listrik.
- SKPD teknis mencari pasokan komoditas dari produsen binaan dan distributor terdaftar.
- Bekerja sama dengan BI utk sosialisasi kepada masyarakat.

Pasar penyeimbang:



- ✓ Pasar alternatif yang memberikan harga normal di saat harga pasar tradisional meningkat.
- ✓ Membentuk ekspektasi masyarakat sehingga harga di pasar tradisional akan menyesuaikan.
- ✓ Berlokasi di sekitar pasar tradisional yang sering dikunjungi masyarakat.
- ✓ Dilaksanakan 1 bulan sebelum dan 1 minggu sesudah hari H.

Produsen & Distributor:



- ✓ Menjual komoditasnya dengan harga normal + biaya angkut ke lokasi Pasar Penyeimbang. Harga normal karena biaya sewa lapak, air, dan listrik sudah ditanggung Pemda.

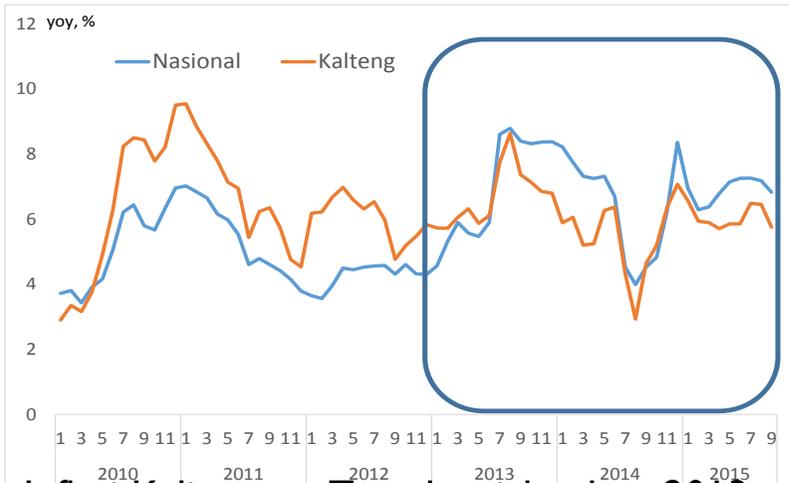


Inflasi Kalteng Selalu di bawah Nasional

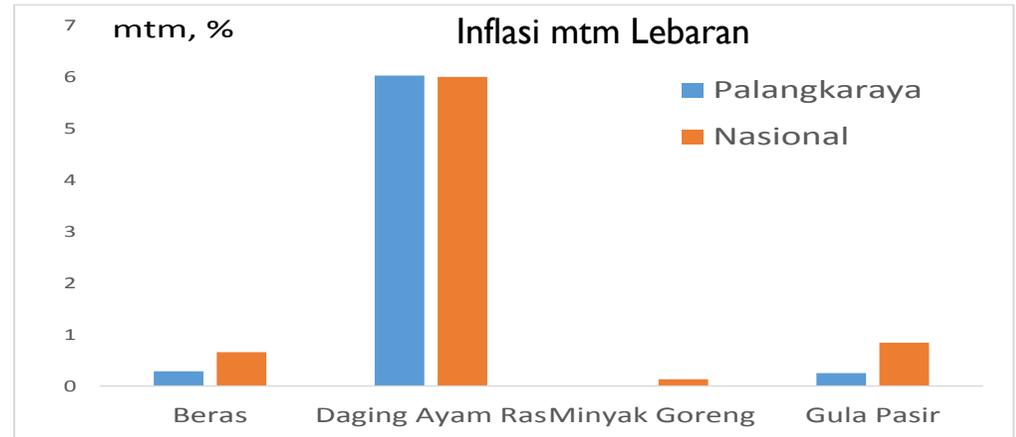
Pasar Penyeimbang

Inflasi Kalimantan Tengah sejak tahun 2013, tercatat mulai di bawah inflasi Nasional

Historis Inflasi Tahunan

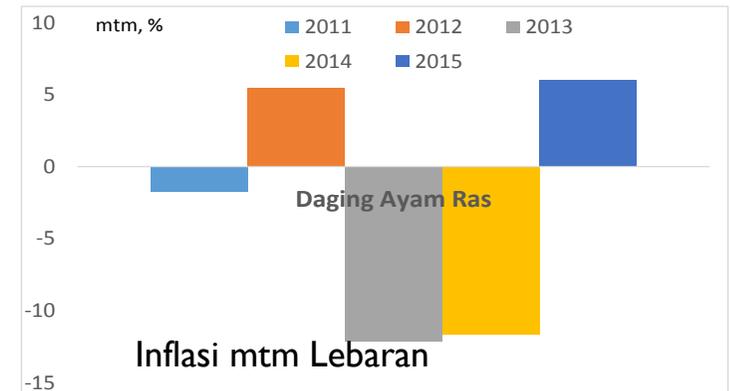
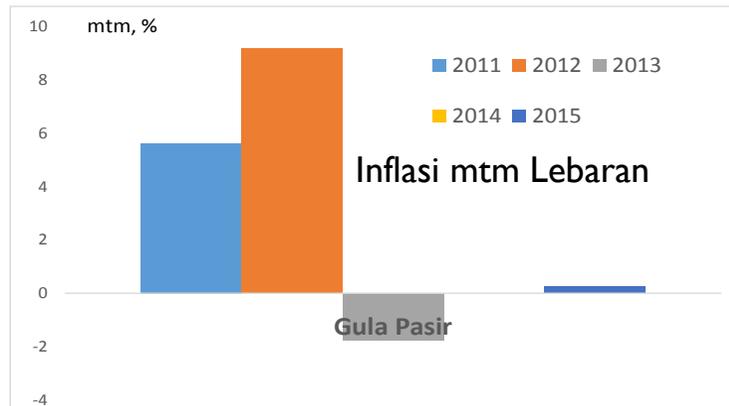


Inflasi Kalimantan Tengah sejak tahun 2013, tercatat mulai di bawah inflasi Nasional, salah satu pendukungnya adalah mulai diberlakukannya pasar penyeimbang di tahun 2013

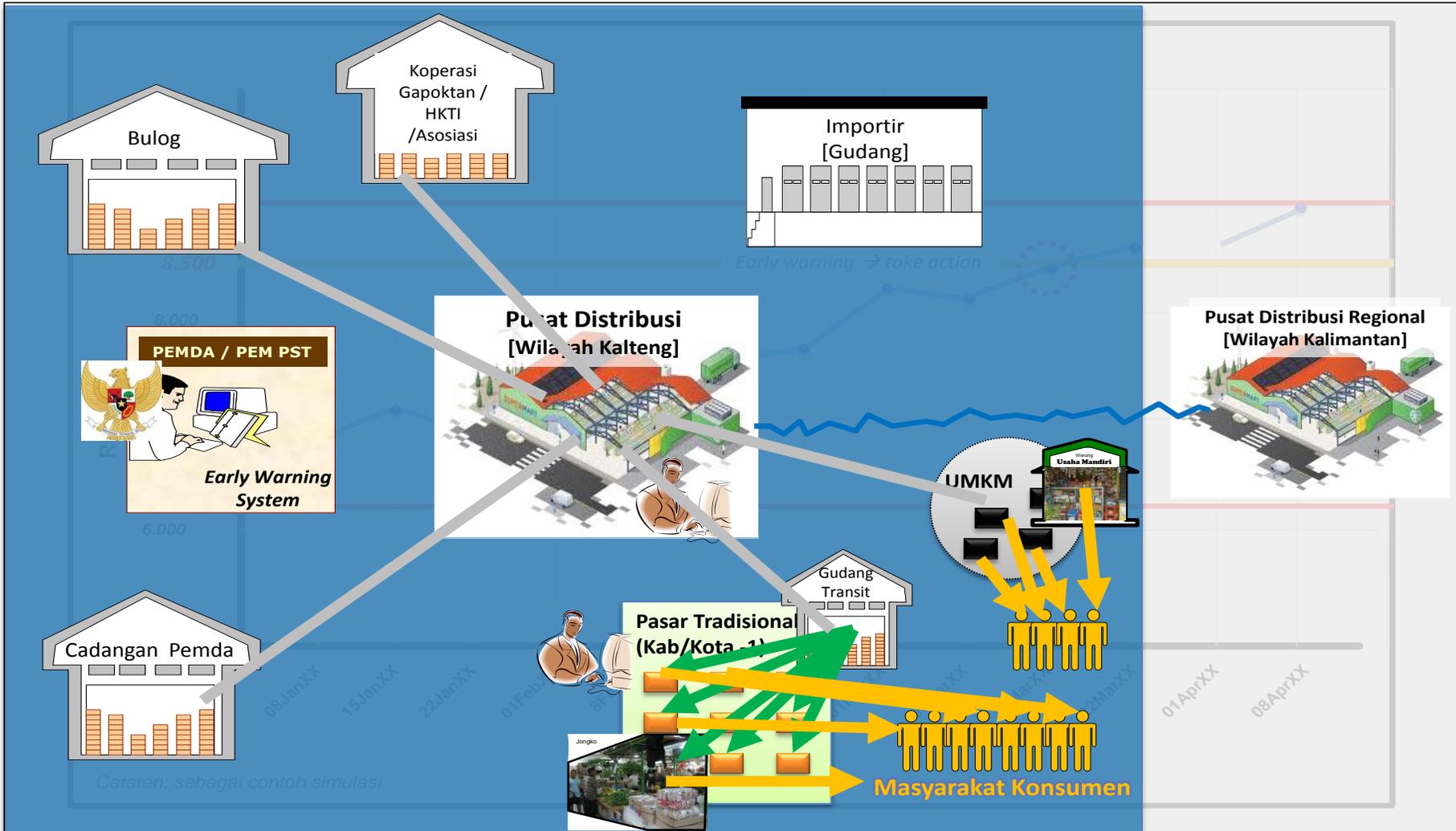


Pasar penyeimbang efektif menjaga harga bahan makanan, utamanya pada saat Hari Besar Keagamaan, seperti pada saat Lebaran 2015, inflasi bulanan beberapa komoditas pangan di Palangka Raya pada saat Ramadhan dan Lebaran tercatat lebih rendah dibandingkan dengan Nasional

Paska dioperasikannya pasar penyeimbang inflasi bulanan beberapa komoditas di bawah rata-rata nya

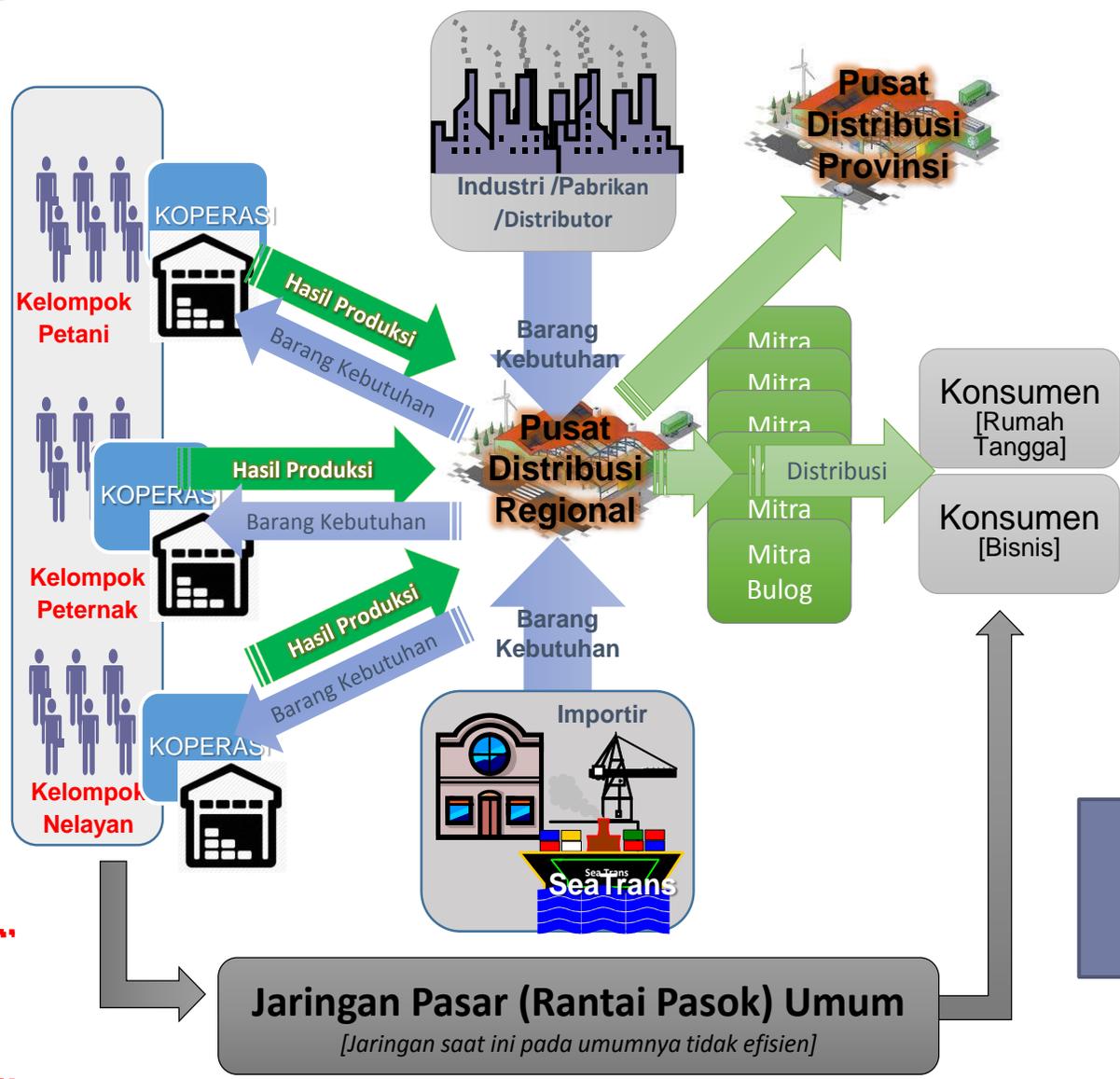


Pasar Penyeimbang sebagai Cikal Bakal PDP

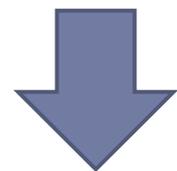


Pusat Distribusi Regional

Organized Market & Distribution System
Free Market System



- ### Tantangan Implementasi :
- Komitmen anggaran Pemerintah Pusat.
 - Model bisnis pengelolaan PDR (dikelola Pemerintah, BUMN/D, atau swasta).
 - Penetapan lokasi PDR di suatu regional terhadap jarak ke pusat ekonomi di provinsi lain.



Dibutuhkan Komitmen Kuat Pemerintah Pusat dan Daerah

LAMPIRAN 4.E

Tindak Lanjut Rakornas TPID

Tindak Lanjut Rakornas TPID – Provinsi Kalbar (I)

No.	Arahan Presiden	Agenda Kerja TPID/ <i>Deliverables</i>	Waktu/Target Pelaksanaan			Keterangan
			2015	2016	2017	
1	Wajib membentuk TPID sebagai wadah koordinasi kebijakan untuk stabilisasi harga di daerah	1.1. Melakukan sosialisasi kepada Pemda Kabupaten dan Kota 1.2. Menyampaikan surat Gubernur Provinsi kepada Bupati/Walikota	V			Pada semester I 2015, TPID telah berhasil terbentuk di seluruh Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat.
2	Semakin cermat dalam mengidentifikasi komoditas yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong inflasi	2.1. Melakukan kajian identifikasi komoditas utama penyumbang inflasi 2.2. Melakukan kajian rantai produksi dan distribusi 2.3. Melakukan FGD dengan pelaku usaha dan asosiasi 2.4. Menginisiasi kerja sama perdagangan antar daerah 2.5. Mendorong sisi produksi dengan bersinergi bersama pemangku kepentingan dan pelaku usaha	V	V	V	Berkelanjutan
3	Memberikan dukungan penuh bagi percepatan pembangunan infrastruktur pangan seperti irigasi dan bendungan, serta infrastruktur distribusi	3.1. Mendorong realisasi pembangunan infrastruktur melalui rapat koordinasi khusus	V	V	V	Berkelanjutan
4	Menggerakkan pertanaman cabai di pekarangan rumah	4.1. Program gerakan tanam sayur di pekarangan dengan media pot 4.2. Kelurahan percontohan dan pembagian benih kepada masyarakat		V		

Tindak Lanjut Rakornas TPID – Provinsi Kalbar (2)

No.	Arahan Presiden	Agenda Kerja TPID/ Deliverables	Waktu/Target Pelaksanaan			Keterangan
			2015	2016	2017	
5	Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk stabilisasi harga	5.1. Pasar murah jelang lebaran 5.2. Mendorong BUMN untuk menggelar subsidi paket lebaran	V	V	V	Berkelanjutan
6	TPID bersama-sama dengan aparat penegak hukum agar secara intensif melakukan pemantauan langsung di lapangan	6.1. Sidak ke gudang-gudang distributor 6.2. Sidak ke pasar tradisional dan pasar swalayan	V	V	V	Berkelanjutan
7	Perlu memperkuat komunikasi dan kerja sama antar kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kab/kota	7.1. Menyelenggarakan Rakorda TPID 7.2. Melakukan kerja sama perdagangan antar daerah	V	V	V	Berkelanjutan
8	Pemerintah Daerah agar mendorong dan memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembangnya hilirisasi/industrialisasi di daerah	8.1. Mendorong investasi dengan berbagai kemudahan perizinan 8.2. Pembebasan bea impor barang modal 8.3. Membantu investor dalam pembebasan lahan	V	V	V	Berkelanjutan
9	Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mendorong percepatan realisasi APBN/APBD secara tepat dan efektif guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi, serta secara konsisten menempuh kebijakan reformasi energi.	9.1. Mendorong pembangunan infrastruktur energi listrik dengan membantu dalam pembebasan lahan	V	V	V	Berkelanjutan

Tindak Lanjut Rakornas TPID – Provinsi Kalbar (3)

No	Agenda Kerja TPID / Deliverables	Tindak Lanjut dan Hambatan		
		Telah Dilaksanakan	Rencana Tindak Lanjut	Hambatan dan Rekomendasi Solusi
1.1	Melakukan sosialisasi kepada Pemda Kabupaten dan Kota	√		
1.2	Menyampaikan surat Gubernur Provinsi kepada Bupati/Walikota	√		
2.1	Melakukan kajian identifikasi komoditas utama penyumbang inflasi	√		
2.2	Melakukan kajian rantai produksi dan distribusi			Kurangnya ketersediaan data
2.3	Melakukan FGD dengan pelaku usaha dan asosiasi	√		
2.4	Menginisiasi kerja sama perdagangan antar daerah	√		
2.5	Mendorong sisi produksi dengan bersinergi bersama pemangku kepentingan dan pelaku usaha	√		
3.1	Mendorong realisasi pembangunan infrastruktur melalui rapat koordinasi khusus	√		
4.1	Program gerakan tanam sayur di pekarangan dengan media pot			Perlu kampanye yang efektif
4.2	Kelurahan percontohan dan pembagian benih kepada masyarakat		Sinergi dengan PSBI	
5.1	Pasar murah jelang Lebaran	√		
5.2	Mendorong BUMN untuk menggelar subsidi paket lebaran	√		
6.1	Sidak ke gudang-gudang distributor	√		
6.2	Sidak ke pasar tradisional dan pasar swalayan	√		
7.1	Menyelenggarakan Rakorda TPID	√		
7.2	Melakukan kerja sama perdagangan antar daerah		Penandatanganan Nota Kesepahaman	

Tindak Lanjut Rakornas TPID – Provinsi Kalbar (4)

No	Agenda Kerja TPID / <i>Deliverables</i>	Tindak Lanjut dan Hambatan		
		Telah Dilaksanakan	Rencana Tindak Lanjut	Hambatan dan Rekomendasi Solusi
8.1	Mendorong investasi dengan berbagai kemudahan perizinan	√		
8.2	Pembebasan bea impor barang modal	√		
8.3	Membantu investor dalam pembebasan lahan	√		
9.1	Mendorong pembangunan infrastruktur energi listrik dengan membantu dalam pembebasan lahan	√		

Tindak Lanjut Rakornas TPID – Provinsi Kalteng (I)

No	Arahan Presiden	Agenda Kerja TPID/ <i>Deliverables</i>	Waktu/Target Pelaksanaan			Keterangan
			2015	2016	2017	
1	Wajib membentuk TPID sebagai wadah koordinasi kebijakan untuk stabilisasi harga di daerah	1.1. Pembentukan TPID di Kabupaten/Kota seluruh Kalimantan Selatan	V			Pada Tahun 2014 telah terbentuk TPID di seluruh Kabupaten/ Kota di Kalimantan Tengah
2	Semakin cermat dalam mengidentifikasi komoditas yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong inflasi	2.1. Melakukan kajian dengan menggunakan data historis bulanan untuk komoditas penyumbang inflasi utama setiap bulannya	V	V	V	Telah dibuat buku panduan pengendalian inflasi untuk kabupaten/ kota. Didalam buku tersebut dijelaskan program kerja TPID didasarkan pada kajian historis inflasi.
3	Memberikan dukungan penuh bagi percepatan pembangunan infrastruktur pangan seperti irigasi dan bendungan, serta infrastruktur distribusi	3.1. Program ketahanan pangan provinsi Kalimantan Tengah yakni “Kalteng Besuh” yang dalam rincian program kerjanya tercantum peningkatan luas lahan pertanian dan pembenahan infrastruktur pertanian 3.2 Direncanakan Pergub <i>Roadmap</i> pengembangan bawang merah di Kalimantan Tengah	V	V	V	Untuk Roadmap Pengembangan Bawang Merah direncanakan pada tahun 2018 Kalimantan Tengah akan mampu mencukupi setengah kebutuhan bawang merahnya

Tindak Lanjut Rakornas TPID – Provinsi Kalteng (2)

No	Arahan Presiden	Agenda Kerja TPID/ Deliverables	Waktu/Target Pelaksanaan			Keterangan
			2015	2016	2017	
4	Menggerakkan pertanaman cabai atau komoditas strategis di pekarangan rumah	4.1 Instruksi Gubernur yang mewajibkan seluruh PNS di provinsi Kalimantan Tengah untuk menanam cabai 4.2 Pembangunan Kandang dan kolam Penyangga	V	V	V	Berkelanjutan
5	Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk stabilisasi harga	5.1. Mulai dilaksanakannya PERGUB pengendalian inflasi dimana PERGUB ini digunakan sebagai dasar masing-masing SKPD untuk perencanaan anggaran pengendalian inflasi	V	v	v	Sudah dilakukan pada tahun 2015 dan akan terus berkelanjutan

Tindak Lanjut Rakornas TPID – Provinsi Kalteng (3)

No	Arahan Presiden	Agenda Kerja TPID/ Deliverables	Waktu/Target Pelaksanaan			Keterangan
			2015	2016	2017	
6	TPID bersama-sama dengan aparat penegak hukum agar secara intensif melakukan pemantauan langsung di lapangan	6.1. koordinasi dengan kepolisian untuk antisipasi monopoli harga dan penimbunan BBM	V	V	V	Telah dilakukan, terutama menjelang momen perayaan hari besar dan menjelang kenaikan harga BBM
7	Perlu memperkuat komunikasi dan kerja sama antar kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kab/kota	7.1. Telah dilakukan kerja sama perdagangan antar daerah provinsi Kalimantan Tengah dan Jawa Tengah 7.2 sedang dirintis kerja sama daerah dengan provinsi NTB	V	V	V	Berkelanjutan
8	Pemerintah Daerah agar mendorong dan memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembangnya hilirisasi/industrialisasi di daerah	8.1. Direncanakan akan dibangun kawasan industri Bangkanai	V	V	V	target proyek 2030
9	Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mendorong percepatan realisasi APBN/APBD secara tepat dan efektif guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi, serta secara konsisten menempuh kebijakan reformasi energi.	9.1. Telah dibentuk tim penyerapan dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA)	V	V	V	dimulai tahun 2013

Tindak Lanjut Rakornas TPID – Provinsi Kalteng (4)

No	Agenda Kerja TPID / <i>Deliverables</i> *)	Tindak Lanjut dan Hambatan		
		Telah Dilaksanakan	Rencana Tindak Lanjut	Hambatan dan Rekomendasi Solusi
1.1.	1.1. Pembentukan TPID di Kabupaten/Kota seluruh Kalimantan Tengah	V	Telah terbentuk di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2014. Saat ini direncanakan replikasi program unggulan TPID Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pasar penyeimbang dan kandang penyangga di seluruh kabupaten kota	
2.1	2.1. Melakukan kajian dengan menggunakan data historis bulanan untuk komoditas penyumbang inflasi utama setiap bulannya	V	Direncanakan akan membentuk tim evaluasi dan pemantauan harga sehingga pergerakan harga akan dipantau harian	-
3.1	3.1. Program ketahanan pangan provinsi Kalimantan Tengah yakni “Kalteng Besuh” yang dalam rincian program kerjanya tercantum peningkatan luas lahan pertanian dan pembenahan infrastruktur pertanian 3.2 Direncanakan Pergub <i>Roadmap</i> pengembangan bawang merah di Kalimantan Tengah	V	Untuk di <i>roadmap</i> program kerjanya akan dilakukan pada tahun depan	Keseriusan dan komitmen dari SKPD terkait

Tindak Lanjut Rakornas TPID – Provinsi Kalteng (5)

No	Agenda Kerja TPID / Deliverables *)	Tindak Lanjut dan Hambatan		
		Telah Dilaksanakan	Rencana Tindak Lanjut	Hambatan dan Rekomendasi Solusi
4.1	4.1 Instruksi Gubernur yang mewajibkan seluruh PNS di provinsi Kalimantan Tengah untuk menanam cabai 4.2 Pembangunan Kandang dan Kolam Penyangga	V	Direncanakan untuk kandang dan kolam penyangga akan direplikasi di seluruh kabupaten/kota	Perlu adanya penyempurnaan jadwal panen yang kolam dan kandang penyangga dengan tekanan inflasi komoditas
5.1.	5.1. Mulai dilaksanakannya PERGUB pengendalian inflasi dimana PERGUB ini digunakan sebagai dasar masing-masing SKPD untuk perencanaan anggaran pengendalian inflasi	V	Mulai tahun 2015 dilakukan penganggaran dan pada tahun 2016 akan dilakukan penyesuaian anggaran antar SKPD	
6.1.	6.1. Koordinasi dengan kepolisian untuk antisipasi monopoli harga dan penimbunan BBM	V	Memasukan aparat penegak hukum dalam TPID, dan ke depan menjelang momen hari besar pengawasan dan sidak akan dilakukan setiap hari	-
7.1.	7.1. Telah dilakukan kerja sama perdagangan antar daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Jawa Tengah 7.2 Sedang dirintis kerja sama daerah dengan provinsi NTB	V	Ke depan akan dikembangkan komoditas yang akan dikerja samakan	-

Tindak Lanjut Rakornas TPID – Provinsi Kalteng (6)

No	Agenda Kerja TPID / <i>Deliverables</i> *)	Tindak Lanjut dan Hambatan		
		Telah Dilaksanakan	Rencana Tindak Lanjut	Hambatan dan Rekomendasi Solusi
8.1.	8.1. Direncanakan akan dibangun kawasan industri Bangkanai	V	Akan disusun Pergub pembangunan kawasan industri	-
9.1.	9.1. Telah dibentuk tim penyerapan dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA)	V	Akan direplikasi pada 14 kabupaten/kota	-

Tindak Lanjut Rakornas TPID – Provinsi Kalsel (I)

No	Arahan Presiden	Agenda Kerja TPID/ Deliverables	Waktu/Target Pelaksanaan			Keterangan
			2015	2016	2017	
1	Wajib membentuk TPID sebagai wadah koordinasi kebijakan untuk stabilisasi harga di daerah	1.1. Pembentukan TPID di Kabupaten/Kota seluruh Kalimantan Selatan				TPID telah terbentuk di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan
2	Semakin cermat dalam mengidentifikasi komoditas yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong inflasi	2.1. Koordinasi dengan PERTAMINA terkait pembelian langsung LPG 3kg di agen.	V	V		Telah dilaksanakan. Bagi agen yang tidak menjual LPG 3kg sesuai HET, ijin penjualannya akan dicabut.
3	Memberikan dukungan penuh bagi percepatan pembangunan infrastruktur pangan seperti irigasi dan bendungan, serta infrastruktur distribusi	3.1. Rencana pembangunan Pusat Distribusi Regional (PDR)	V	V	V	Berkelanjutan
4	Menggerakkan pertanaman cabai atau komoditas strategis di pekarangan rumah	4.1 Membangun kolam rakyat untuk antisipasi kelangkaan ikan haruan sebagai salah satu penyumbang inflasi terbesar	V			Dimulai di Kab.Tanah Laut
5	Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk stabilisasi harga	5.1. Melaksanakan penyaluran raskin di beberapa kecamatan	V			Monitoring bersama BULOG dan mengatasi kendala yang ada
6	TPID bersama-sama dengan aparat penegak hukum agar secara intensif melakukan pemantauan langsung di lapangan	6.1. Koordinasi dengan kepolisian untuk antisipasi penimbunan BBM	V	V	V	Level Provinsi. Berkelanjutan

Tindak Lanjut Rakornas TPID – Provinsi Kalsel (2)

No	Arahan Presiden	Agenda Kerja TPID/ <i>Deliverables</i>	Waktu/Target Pelaksanaan			Keterangan
			2015	2016	2017	
7	Perlu memperkuat komunikasi dan kerja sama antar kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kab/kota	7.1. Inisiasi kerja sama antara Kab. Tanah Laut dengan Kab. Barito Kuala	V	V	V	Berkelanjutan
8	Pemerintah Daerah agar mendorong dan memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembangnya hilirisasi/industrialisasi di daerah	8.1. Telah dibahas dalam beberapa rapat koordinasi TPID	V			
9	Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mendorong percepatan realisasi APBN/APBD secara tepat dan efektif guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi, serta secara konsisten menempuh kebijakan reformasi energi.	9.1. Gubernur telah menghimbau kepada setiap dinas-dinas untuk melakukan penyerapan anggaran se-optimal mungkin.	V			

Tindak Lanjut Rakornas TPID – Provinsi Kalsel (3)

No	Agenda Kerja TPID / <i>Deliverables</i> *)	Tindak Lanjut dan Hambatan		
		Telah Dilaksanakan	Rencana Tindak Lanjut	Hambatan dan Rekomendasi Solusi
1.1.	1.1. Pembentukan TPID di Kabupaten/Kota seluruh Kalimantan Selatan	√	Terus melakukan koordinasi dan pelaksanaan program secara rutin	
2.1	2.1. koordinasi dengan PERTAMINA terkait pembelian langsung LPG 3kg di agen.	√	Terus melakukan koordinasi dan pelaksanaan program secara rutin	-
3.1	3.1. Rencana pembangunan Pusat Distribusi Regional (PDR)	-	Membentuk panitia pembangunan PDR	Anggaran Pemerintah Pusat/
4.1	4.1 Membangun kolam rakyat untukantisipasi kelangkaan ikan haruan sebagai salah satu penyumbang inflasi terbesar	√	Membimbing Anggota RT melalui pelatihan	-
5.1.	5.1. Melaksanakan penyaluran raskin di beberapa kecamatan	√	Secara tepat waktu menyalurkan Raskin	Penyaluran Dana Pemda/Meghimbau Pemda untuk menyalurkan dana secara cepat.
6.1.	6.1. Koordinasi dengan kepolisian untuk antisipasi penimbunan BBM	√	Dilakukan secara terus menerus, khususnya periode menjelang kenaikan harga BBM	-

Tindak Lanjut Rakornas TPID – Provinsi Kalsel (4)

No	Agenda Kerja TPID / <i>Deliverables</i> *)	Tindak Lanjut dan Hambatan		
		Telah Dilaksanakan	Rencana Tindak Lanjut	Hambatan dan Rekomendasi Solusi
7.1.	7.1. Inisiasi kerja sama antara Kab. Tanah Laut dengan Kab. Barito Kuala	√	Jual/beli sapi dilakukan secara rutin	-
8.1.	8.1. Telah dibahas dalam beberapa rapat koordinasi TPID	√	Diskusi intensif hilirisasi dalam aspek pengendalian inflasi.	-
9.1.	9.1. Gubernur telah menghimbau kepada setiap Dinas untuk melakukan penyerapan anggaran se optimal mungkin.	√	Gubernur meminta laporan realisasi bulanan dari dinas-dinas	-

Tindak Lanjut Rakornas TPID – Provinsi Kaltim (I)

No.	Arahan Presiden	Agenda Kerja TPID/ <i>Deliverables</i>	Waktu/Target Pelaksanaan			Keterangan
			2015	2016	2017	
1	Wajib membentuk TPID sebagai wadah koordinasi kebijakan untuk stabilisasi harga di daerah	1.1. Penyampaian surat Gubernur Provinsi kepada Bupati/Walikota 1.2. Sosialisasi kepada Pemda kab/kota	V	V	V	
2	Semakin cermat dalam mengidentifikasi komoditas yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong inflasi	2.1. Survei Pemetaan Surplus Defisit Komoditas utama 2.2. Kajian strategis mengenai sumber inflasi <i>volatile food</i> 2.3. FGD dengan Asosiasi	V	V		Dimulai di 2015
3	Memberikan dukungan penuh bagi percepatan pembangunan infrastruktur pangan seperti irigasi dan bendungan, serta infrastruktur distribusi	3.1. Penyampaian surat rekomendasi Gubernur Provinsi kepada Bupati/Walikota	V	V	V	Berkelanjutan
4	Menggerakkan pertanaman cabai di pekarangan rumah	4.1. Gerakan tanam cabai di pekarangan rumah 4.2. Pembentukan dan Pemberdayaan klaster cabai	V	V		
5	Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk stabilisasi harga	5.1. Penyampaian surat rekomendasi Gubernur Provinsi kepada Bupati/Walikota	V	V	V	
6	TPID bersama-sama dengan aparat penegak hukum agar secara intensif melakukan pemantauan langsung di lapangan	6.1. Sidak dan operasi pasar 6.2. Operasi gudang dan stok komoditas 6.3. Pengamanan dan operasi jalur distribusi	V	V		
7	Perlu memperkuat komunikasi dan kerja sama antar kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kab/kota	7.1. Penyampaian surat rekomendasi Gubernur Provinsi kepada Bupati/Walikota 7.2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi TPID Provinsi/Kab/Kota	V	V	V	
8	Pemerintah Daerah agar mendorong dan memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembangnya hilirisasi/industrialisasi di daerah	8.1. Penyampaian surat rekomendasi Gubernur Provinsi kepada Bupati/Walikota	V	V	V	
9	Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mendorong percepatan realisasi APBN/APBD secara tepat dan efektif guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi, serta secara konsisten menempuh kebijakan reformasi energi.	9.1. Penyampaian surat rekomendasi Gubernur Provinsi kepada Bupati/Walikota	V	V	V	

Tindak Lanjut Rakornas TPID – Provinsi Kaltim (2)

No	Agenda Kerja TPID / Deliverables *)	Tindak Lanjut dan Hambatan		
		Telah Dilaksanakan	Rencana Tindak Lanjut	Hambatan dan Rekomendasi Solusi
1.1.	Penyampaian surat Gubernur Provinsi kepada Bupati/Walikota	sudah	-	-
1.2.	Sosialisasi kepada Pemda kab/kota	Sudah (di Kabupaten Kutai Timur)	Sosialisasi di Kutai Barat dan Mahakam Hulu	Jalur transportasi ke daerah tersebut cukup susah.
2.1.	Survei Pemetaan Surplus Defisit Komoditas utama	Sedang berjalan		
2.2.	Kajian strategis mengenai sumber inflasi <i>volatile food</i>	belum	Agustus-September	
2.3.	FGD dengan Asosiasi	belum	Triwulan IV 2015	Terbatasnya asosiasi yang terkait dengan pengendalian inflasi
3.1.	Penyampaian surat rekomendasi Gubernur Provinsi kepada Bupati/Walikota	Sudah		
4.1.	Gerakan tanam cabai di pekarangan rumah	Sedang berjalan		
4.2.	Pembentukan dan Pemberdayaan klaster cabai	Sedang berjalan		
5.1.	Penyampaian surat rekomendasi Gubernur Provinsi kepada Bupati/Walikota	Sudah		
6.1.	Sidak dan operasi pasar	Sudah		
6.2.	Operasi gudang dan stok komoditas	Sudah		
6.3.	Pengamanan dan operasi jalur distribusi	Sudah		

Tindak Lanjut Rakornas TPID – Provinsi Kaltim (3)

No	Agenda Kerja TPID / Deliverables *)	Tindak Lanjut dan Hambatan		
		Telah Dilaksanakan	Rencana Tindak Lanjut	Hambatan dan Rekomendasi Solusi
6.3.	Pengamanan dan operasi jalur distribusi	Sudah		
7.1.	Penyampaian surat rekomendasi Gubernur Provinsi kepada Bupati/Walikota	Sudah		
7.2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi TPID Provinsi/Kab/Kota	belum	Triwulan III/IV 2015	
8.1.	Penyampaian surat rekomendasi Gubernur Provinsi kepada Bupati/Walikota	sudah		
9.1.	Penyampaian surat rekomendasi Gubernur Provinsi kepada Bupati/Walikota	Sudah.		



Bagian V

Roadmap Pengendalian Inflasi Wilayah Sulawesi-Maluku-Papua Bali-Nusa Tenggara



Halaman ini sengaja dikosongkan

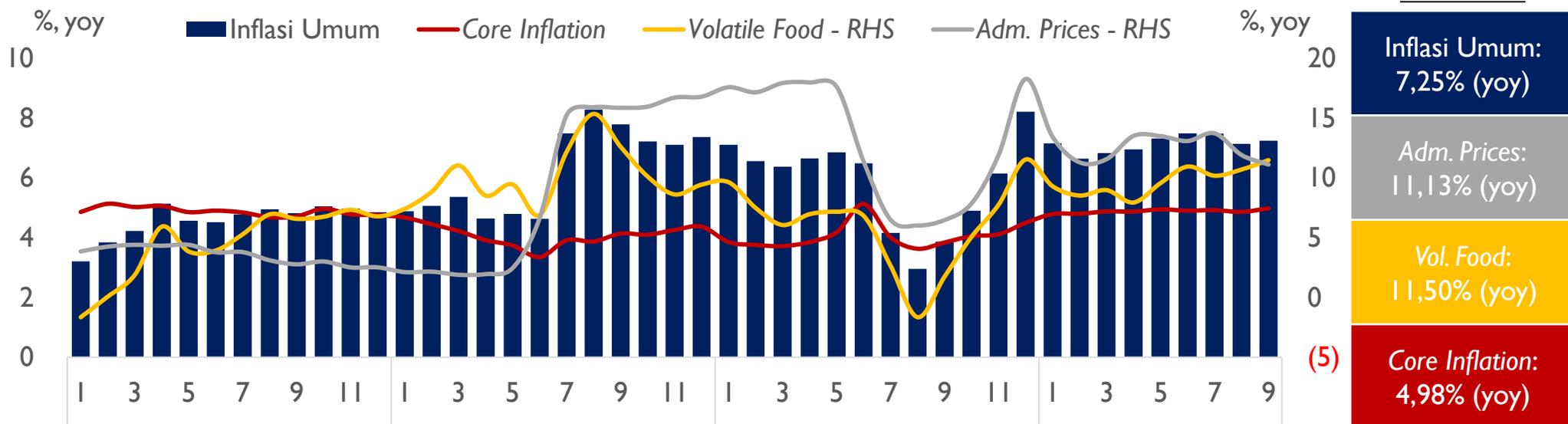
5.1 **Pendahuluan**

Perkembangan Inflasi Sulawesi-Maluku-Papua-Bali-Nusa Tenggara

Hingga periode September 2015, inflasi di Sulawesi-Maluku-Papua-Bali-Nusa Tenggara (Sulampua-Bali-Nusra) berada dalam menurun dari inflasi akhir 2014 meski komponen administered prices dan volatile food relatif masih berada pada regime inflasi moderat*

- **Inflasi inti** berada pada **regime inflasi rendah** dan perlu dijangkar ke tingkat yang lebih rendah dan stabil di tengah tren kenaikan inflasi inti untuk kelompok barang sandang dan pangan di Sulampua-Bali-Nusra.
- **Inflasi volatile food** masih berada pada **regime inflasi moderat** sehingga upaya yang lebih besar diperlukan untuk menurunkan inflasi terutama pada komoditas beras, bumbu, ikan, dan daging.
- **Inflasi administered prices** juga dalam kisaran **regime inflasi moderat** yang dipengaruhi oleh beberapa kebijakan pemerintah terhadap komoditas strategis (BBM, TDL, dan tarif angkutan).

Perkembangan Inflasi Sulampua-Bali-Nusra

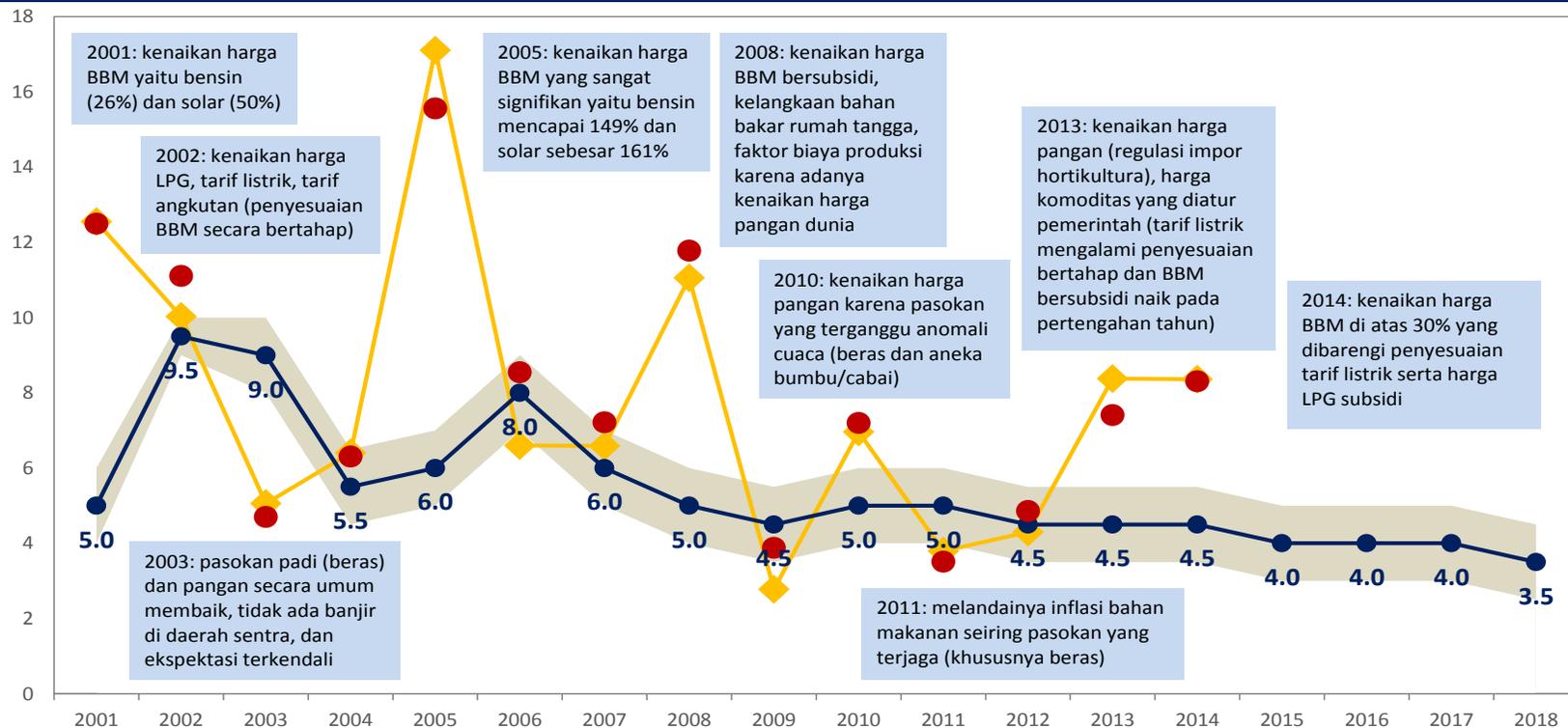


*) DAIN telah mengidentifikasi REGIME INFLASI NASIONAL. Untuk core inflation, LOW REGIME: 4,4%, MODERATE REGIME: 6,7%, HIGH REGIME: 9,7%. Untuk volatile food, LOW REGIME: 4,9%, MODERATE REGIME: 12,0%, HIGH REGIME: 18,5%. Untuk administered prices, LOW REGIME: 3,5%, MODERATE REGIME: 14,6%, HIGH REGIME: 32,9%.

Kinerja Capaian Inflasi Sulampua-Bali-Nusra vs. Sasaran Inflasi Nasional

Secara historis, shock administered prices dan volatile food cenderung menjadi sumber utama deviasi dari sasaran...

Event Analysis: Historis Inflasi Sulampua-Bali-Nusra, Inflasi Nasional, serta Sasaran Inflasi Nasional

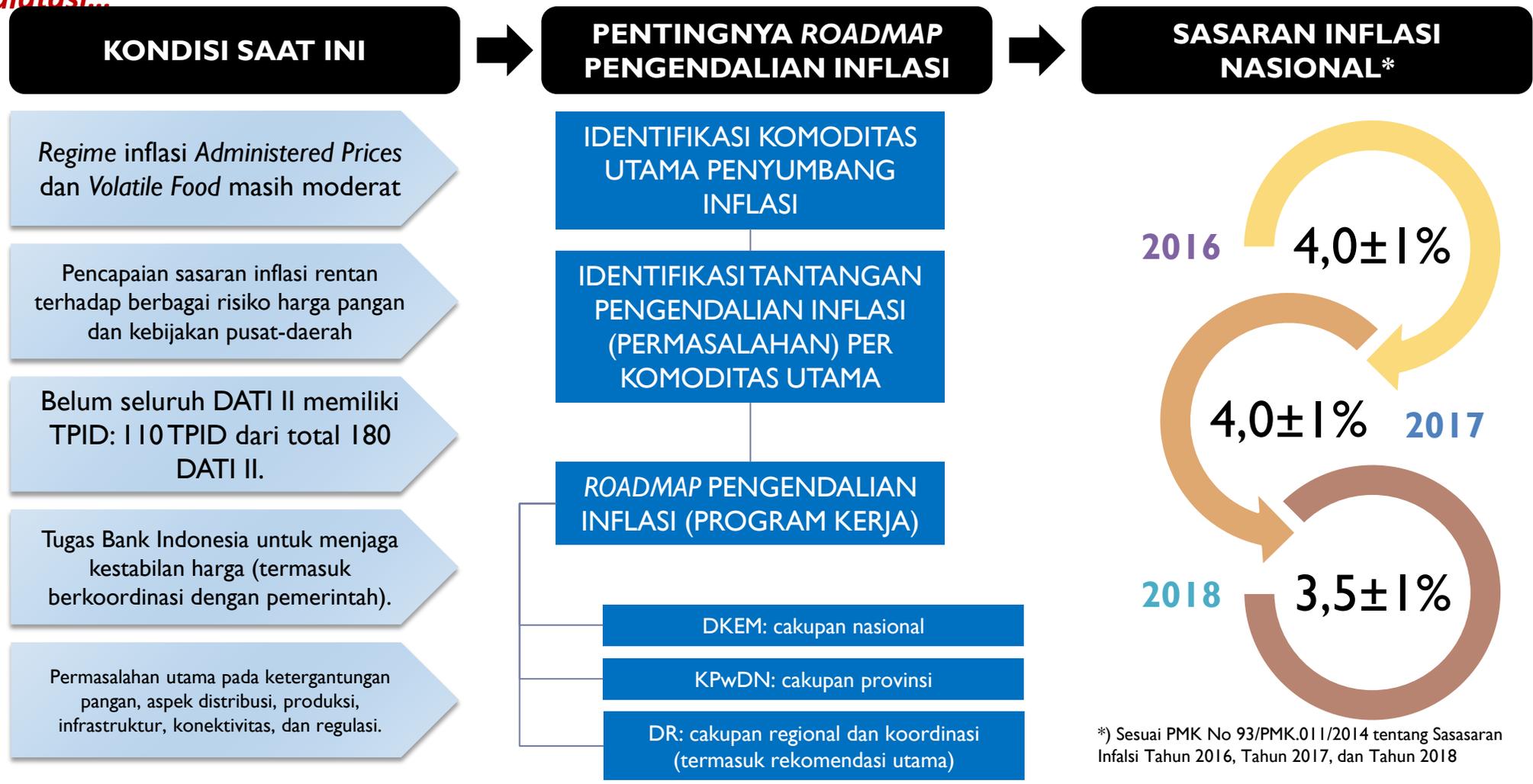


Tahun	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Realisasi Inflasi KTI	12.50	11.11	4.70	6.31	15.56	8.55	7.22	11.78	3.88	7.20	3.51	4.86	7.41	8.31
Realisasi Inflasi Nasional	12.55	10.03	5.06	6.40	17.11	6.60	6.59	11.06	2.78	6.96	3.79	4.30	8.38	8.36

Data realisasi inflasi bersumber dari BPS, realisasi untuk Sulampua-Bali-Nusra sebelum tahun 2008 menggunakan bobot kota SBH 2002 sesuai dengan ketersediaan data yang ada. Data sasaran inflasi nasional bersumber dari Bank Indonesia.

Sasaran Inflasi Jangka Menengah yang Ingin Dicapai

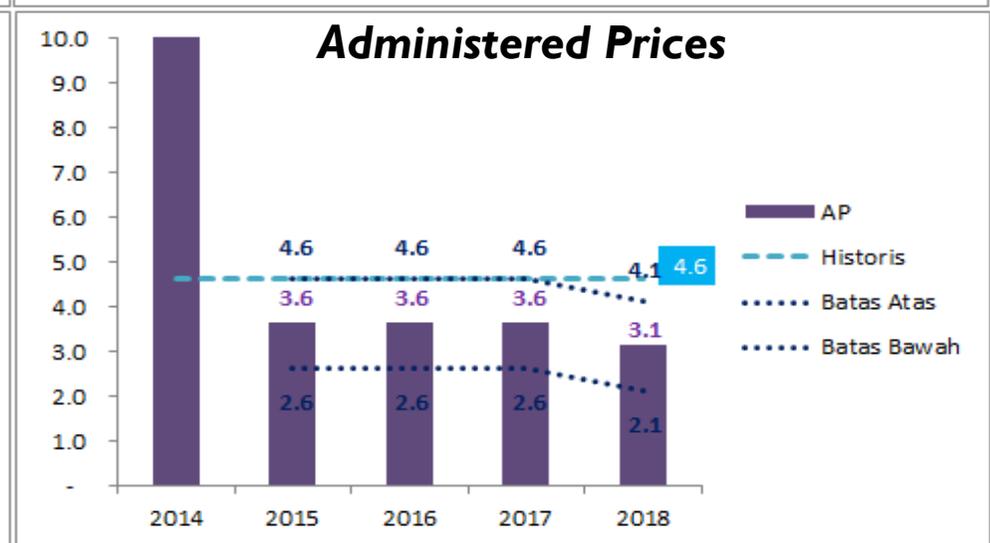
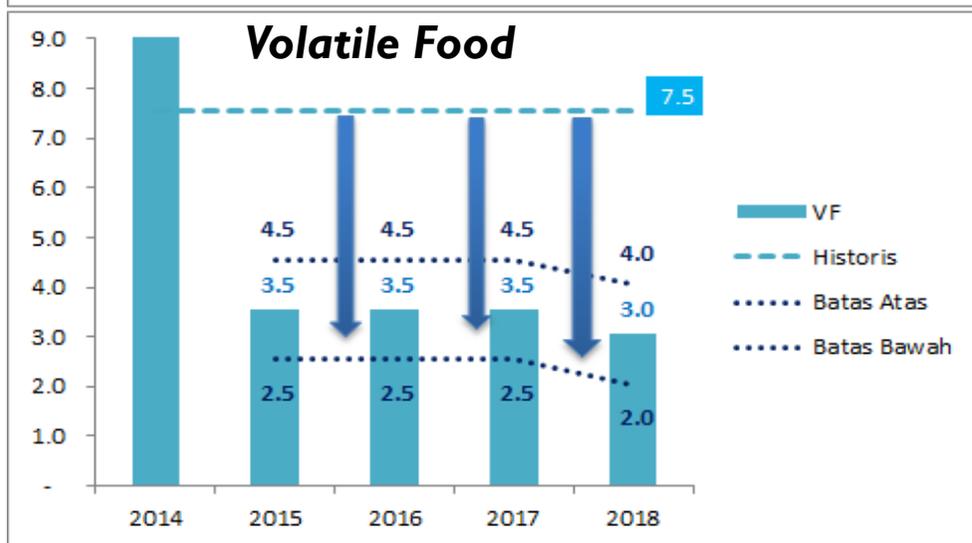
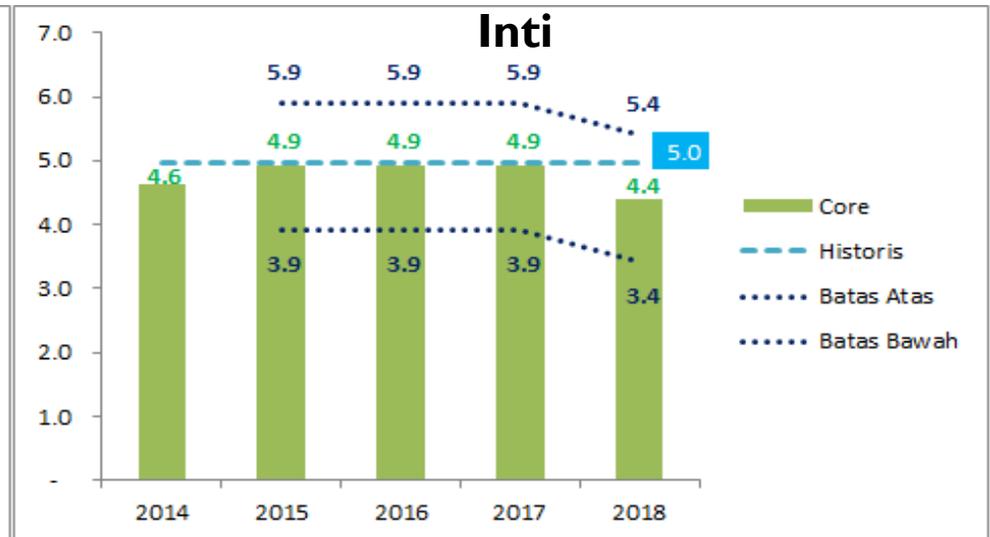
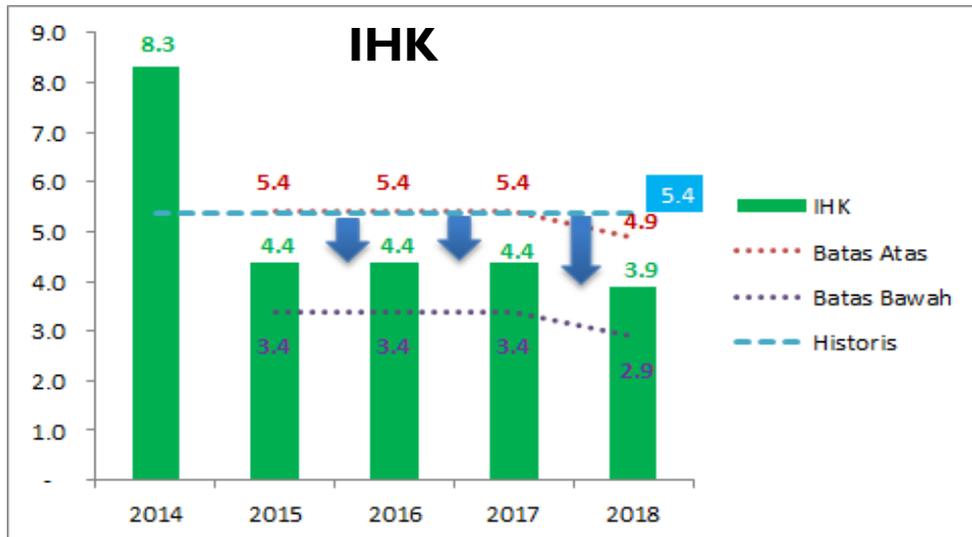
Dengan kondisi inflasi yang dinilai rentan terhadap risiko volatile food dan administered prices di Sulampua-Bali-Nusra, pencapaian inflasi jangka menengah tentunya menghadapi tantangan yang perlu diatasi...



*) Sesuai PMK No 93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Infalsi Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018

Ke Depan Perlu *Extra Effort*

Untuk mencapai sasaran inflasi, diperlukan extra effort terutama pada kelompok Volatile food..



5.2 Identifikasi Permasalahan Inflasi

Identifikasi Komoditas: Bobot Nilai Konsumsi

Beras, kelompok perumahan, serta komoditas energi memiliki bobot yang tinggi dalam struktur nilai konsumsi di Sulampua-Bali-Nusra...



Komoditas

Agregat



$$\text{BOBOT NILAI KONSUMSI (NK)} = \frac{\text{NK KOMODITAS}}{\text{NK TOTAL}}$$

NK yang digunakan adalah rata-rata NK Januari 2012 s.d. Desember 2012 dan NK Januari 2014 s.d. September 2015.

TOP 20 KOMODITAS DI Sulampua-Bali-Nusra

Komoditas	Klasifikasi
BERAS	Volatile Food
SEWA RUMAH	Core Inflation
BENSIN	Administered Prices
KONTRAK RUMAH	Core Inflation
TARIP LISTRIK	Administered Prices
MOBIL	Core Inflation
TUKANG BUKAN MANDOR	Core Inflation
TARIP PULSA PONSEL	Core Inflation
SEPEDA MOTOR	Core Inflation
NASI DENGAN LAUK	Core Inflation
ROKOK KRETEK FILTER	Administered Prices
BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	Administered Prices
ANGKUTAN DALAM KOTA	Administered Prices
AKADEMI/PERGURUAN TINGGI	Core Inflation
ANGKUTAN UDARA	Administered Prices
SEMEN	Core Inflation
DAGING AYAM RAS	Volatile Food
TARIP TELEPON	Core Inflation
MINYAK GORENG	Volatile Food
MIE	Core Inflation

Identifikasi Komoditas: Frekuensi Penyumbang Inflasi

Komoditas pangan yang harganya bergejolak cenderung menjadi penyumbang inflasi utama di setiap bulan meski angkutan udara, sewa rumah, dan rokok kretek filter juga memiliki frekuensi tinggi...



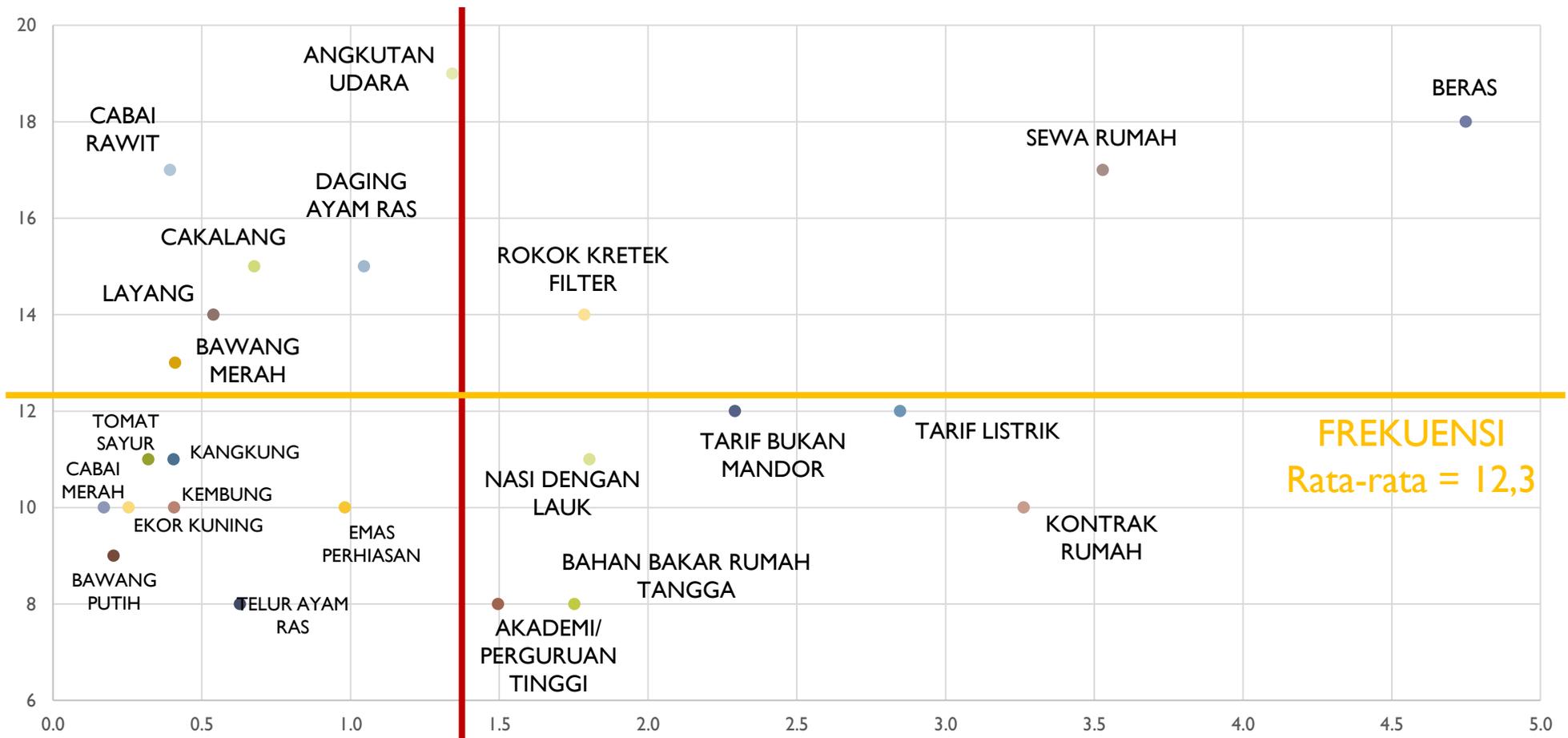
TOP 20 KOMODITAS DI Sulampua-Bali-Nusra

Komoditas	Frekuensi	Klasifikasi
ANGKUTAN UDARA	19	Administered Prices
BERAS	18	Volatile Food
CABAI RAWIT	17	Volatile Food
SEWA RUMAH	17	Core Inflation
DAGING AYAM RAS	15	Volatile Food
CAKALANG/SISIK	15	Volatile Food
LAYANG/BENGGOL	14	Volatile Food
ROKOK KRETEK FILTER	14	Administered Prices
BAWANG MERAH	13	Volatile Food
TUKANG BUKAN MANDOR	12	Core Inflation
TARIP LISTRIK	12	Administered Prices
KANGKUNG	11	Volatile Food
TOMAT SAYUR	11	Volatile Food
NASI DENGAN LAUK	11	Core Inflation
EKOR KUNING	10	Volatile Food
KEMBUNG/GEMBUNG	10	Volatile Food
CABAI MERAH	10	Volatile Food
KONTRAK RUMAH	10	Core Inflation
EMAS PERHIASAN	10	Core Inflation
BAWANG PUTIH	9	Volatile Food

*) Perhitungan frekuensi berdasarkan daftar komoditas penyumbang inflasi tertinggi pada periode Januari 2012 s.d. Desember 2012 dan Januari 2014 s.d. September 2015.

Identifikasi Komoditas: Matriks Bobot-Frekuensi

Dari komoditas yang tergolong sebagai top 20 dalam aspek bobot inflasi dan banyaknya frekuensi menjadi penyumbang inflasi, komoditas beras, sewa rumah, dan rokok kretek filter menjadi komoditas yang memiliki karakteristik di atas rata-rata dibandingkan komoditas yang lain...



BOBOT
Rata-rata = 1,4



Berdasarkan matriks di atas, DR dapat mengidentifikasi lebih jauh komoditas yang menjadi fokus dalam roadmap yang disusun.

Identifikasi Komoditas: Filter Komoditas Volatile Food

Dalam memilih komoditas yang menjadi fokus roadmap di regional, dibuat filter, yaitu (1) Komoditas dengan bobot di atas rata-rata seluruh komoditas (0,02); (2) Komoditas dengan frekuensi penyumbang inflasi lebih dari tujuh kali; serta (3) Komoditas yang beririsan dengan fokus nasional serta KPwDN di regional...

No	Komoditas	Fokus DR Saat Ini	Pertimbangan
1	Beras	IYA	Bobot dan frekuensi yang jauh lebih tinggi dari komoditas lain
2	Daging Ayam Ras	IYA	Bobot dan frekuensi relatif tinggi, fokus nasional, fokus KPwDN
3	Ikan Cakalang	IYA	Bobot dan frekuensi relatif tinggi, fokus KPwDN
4	Ikan Ekor Kuning	IYA	Terwakili ikan cakalang (untuk semua aneka ikan tangkap)
5	Ikan Kembung/Gembung	IYA	Terwakili ikan cakalang (untuk semua aneka ikan tangkap)
6	Ikan Layang/Benggol	IYA	Terwakili ikan cakalang (untuk semua aneka ikan tangkap)
7	Kangkung	TIDAK	Bobot tidak setinggi komoditas yang lain
8	Tomat Sayur	TIDAK	Bobot tidak setinggi komoditas yang lain
9	Bawang Merah	IYA	Bobot dan frekuensi relatif tinggi, fokus nasional, fokus KPwDN
10	Bawang Putih	TIDAK	Belum menjadi fokus di KPwDN
11	Cabai Rawit	IYA	Frekuensi yang jauh lebih tinggi dari komoditas lain, fokus KPwDN
12	Cabai Merah	IYA	Terwakili cabai rawit (untuk semua aneka cabai)
13	Telur Ayam Ras	TIDAK	Bobot dan frekuensi tidak setinggi komoditas yang lain

Identifikasi Komoditas: Filter Komoditas Core dan Administered Prices

Pada komponen non-volatile food, komoditas yang dipilih terutama yang menjadi fokus di KPwDN karena upaya pengendalian pada dasarnya bersifat seragam dan bertumpu pada kebijakan harga pemerintah di level nasional...

No	Komoditas	Fokus DR Saat Ini	Pertimbangan
<i>Core Inflation</i>			
1	Nasi dengan Lauk	TIDAK	Belum menjadi fokus KPwDN dan terwakili oleh pangan
2	Sewa Rumah	IYA	Bobot dan frekuensi yang jauh lebih tinggi dari komoditas lain
3	Kontrak Rumah	TIDAK	Belum menjadi fokus KPwDN maupun fokus nasional
4	Tukang Bukan Mandor	TIDAK	Belum menjadi fokus KPwDN maupun fokus nasional
5	Emas Perhiasan	TIDAK	Belum menjadi fokus KPwDN dan bergantung pada kondisi global
6	Akademi/Perguruan Tinggi	TIDAK	Belum menjadi fokus KPwDN maupun fokus nasional
<i>Administered Prices</i>			
1	Rokok Kretek Filter	TIDAK	Kenaikan cukai rokok berdasarkan kebijakan pusat
2	Tarif Listrik	TIDAK	Penyesuaian tarif berdasarkan kebijakan di pusat
3	Bahan Bakar Rumah Tangga	TIDAK	Frekuensi tidak sebanyak komoditas yang lain
4	Angkutan Udara	IYA	Fokus KPwDN dan frekuensi paling tinggi

Komoditas Utama Penyumbang Inflasi

Volatile Food

Top 5 komoditas yang memiliki **bobot tinggi** dan **frekuensinya sering muncul** sebagai pemberi andil inflasi pada periode analisis

- Beras, frekuensi 18 kali
- Cabai rawit,* frekuensi 17 kali
- Ikan cakalang**, frekuensi 15 kali
- Daging ayam ras, frekuensi 15 kali
- Bawang merah, frekuensi 13 kali

Administered Prices

Komoditas *Administered Prices* spesifik daerah berdasarkan bobot dan frekuensi yang tinggi selama periode analisis

- Angkutan udara, frekuensi 19 kali

Inti

Komoditas Inti spesifik daerah berdasarkan bobot dan frekuensi pada periode analisis

- Sewa rumah, frekuensi 17 kali

*) Cakupan analisis tantangan pengendalian inflasi untuk komoditas cabai rawit pada dasarnya mencakup aneka cabai

***) Untuk ikan cakalang cakupan analisis termasuk beberapa komoditas ikan tangkap/segar

Matriks Pengendalian Permasalahan Inflasi Inti

Magnitude			
High	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hambatan distribusi akibat gangguan cuaca ✓ Tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah (bahan bangunan, gula pasir) ✓ Fluktuasi harga bahan baku akibat gangguan pasokan (ikan olahan) ✓ Dampak kenaikan harga BBM dan TTL terhadap biaya produksi dan transportasi (bahan bangunan) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingginya biaya distribusi dari luar daerah yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur. ✓ Tingginya kebutuhan tempat tinggal karena banyaknya pendatang (sewa rumah, kontrak rumah, bahan bangunan) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ekspektasi masyarakat terhadap harga cenderung meningkat dalam menyikapi situasi tertentu (sewa rumah, kontrak rumah, ikan olahan)
Med	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurangnya kebijakan yang mendukung investasi di daerah (semen, infrastruktur) ✓ Aktivitas perekonomian yang terpusat di wilayah tertentu (sewa rumah, kontrak rumah) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rendahnya ketersediaan tenaga kerja terampil (tukang bukan mandor) ✓ Tingginya permintaan pada periode tertentu (bahan bangunan) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lemahnya pemantauan dan pengawasan terhadap harga eceran (semen, gula pasir)
Low			
		Med	High
		Manageability	

Matriks Pengendalian Permasalahan Inflasi Volatile Food

Magnitude

High	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Faktor cuaca yang mempengaruhi ketersediaan pasokan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ekspektasi masyarakat ➤ Rantai tata niaga yang panjang dan kurang efisien ➤ Infrastruktur kurang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya produksi ➤ Ketergantungan komoditas pangan
Med		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kelembagaan petani yang lemah ➤ Kualitas SDM tidak merata dan terbatas ➤ Penerapan teknologi masih tradisional ➤ Kualitas produk kurang kompetitif dan tidak merata 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Akses pembiayaan petani/nelayan kurang optimal ➤ Faktor musiman yang mempengaruhi pasokan ➤ <i>Price setting</i> cenderung mengikuti harga tertinggi
Low	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Budaya masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Durabilitas komoditas 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyaluran Raskin tidak rutin ➤ Durabilitas komoditas
	Low	Med	High

Manageability

Matriks Pengendalian Permasalahan Inflasi Administered Prices

Magnitude

High

- ✓ Harga BBM yang fluktuatif cenderung naik, mendorong kenaikan harga tarif transportasi
- ✓ Suplai BBM dan LPG terbatas (*demand > supply*)

- ✓ Supply dan distribusi BBM dan LPG yang belum merata
- ✓ Disparitas harga LPG yang terlalu tinggi dari hulu ke hilir
- ✓ Kapasitas infrastuktur bandara belum optimal
- ✓ Aktivitas operasional di bandara masih terbatas (jam operasional, jumlah penerbangan, variasi maskapai)

- ✓ Pengawasan konsumsi dan distribusi bbm masih rendah
- ✓ Penurunan harga bbm tidak diikuti penurunan tarif angkutan darat (pengawasan pemda terhadap penetapan tarif masih rendah)

Med

- ✓ Harga listrik secara dominan dipengaruhi harga solar (PLTD)
- ✓ Proses pengolahan listrik belum efisien, menyebabkan tingkat harga yang cukup tinggi.
- ✓ Harga avtur terlalu tinggi mendorong kenaikan harga tiket pesawat
- ✓ Ketergantungan masyarakat sulampua-bali-nusra terhadap moda transportasi udara tinggi
- ✓ Harga tiket terlalu tinggi saat *peak season*, tidak ada intervensi pemerintah

- ✓ Rendahnya ketersediaan tenaga kerja terampil (tukang bukan mandor)
- ✓ Tingginya permintaan pada periode tertentu (bahan bangunan)

Permasalahan sosial terkait dengan masih banyaknya penjual bensin eceran

Low

- ✓ Minimnya informasi stok kecukupan BBM rumah tangga

Pengelolaan dan pengawasan transportasi darat belum optimal

Low

Med

High

Manageability

Identifikasi Permasalahan Inflasi Inti

Sewa/Kontrak Rumah			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Sewa Rumah	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya penduduk pendatang dari luar daerah• Terbatasnya ketersediaan rumah sewa layak huni	<ul style="list-style-type: none">• Maraknya pembangunan properti telah mendorong permintaan material bangunan, tenaga tukang, dan sewa rumah.	Bali, Maluku Utara, Sulteng, Papua

Identifikasi Permasalahan Inflasi Volatile Food

Beras			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Beras	<ul style="list-style-type: none">• Biaya transportasi• Inkonsistensi jadwal dan besaran pembagian Raskin• Faktor musiman (pergeseran musim tanam/panen; peningkatan permintaan pada saat hari raya)• Gagal panen akibat bencana alam (El Nino dan La Nina)• Tingginya <i>demand</i> pada saat hari besar dan perayaan keagamaan	<ul style="list-style-type: none">• Distribusi:<ul style="list-style-type: none">✓ Penyaluran keluar daerah✓ Gangguan distribusi (bongkar muat)• Posisi tawar petani• Terbatasnya sarana dan prasarana produksi fisik (irigasi, <i>rice milling unit</i>, dll)• Penguatan peran kelembagaan dan tata kelola pemerintahan• Konversi lahan (baik untuk industri maupun menjadi lahan hortikultura)• Preferensi konsumen terhadap beras dari luar daerah	Sulsel, Bali, NTB, Maluku, Sultra, Sulteng, Papua, NTT

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Cabai Rawit			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Cabai Rawit	<ul style="list-style-type: none">• Ketersediaan pasokan mengikuti musim dan rentan terhadap gangguan bencana El Nino dan La Nina• Sifat barang yang tidak tahan lama• Tingginya <i>demand</i> pada saat hari besar dan perayaan keagamaan• Minimnya pembiayaan di tingkat petani sehingga menjamurkan praktek ijon	<ul style="list-style-type: none">• Produktivitas rendah• Ketergantungan pasokan dari daerah lain• Keterbatasan sarana prasarana (SDM, saprodi, teknologi pasca panen)• Keterbatasan lahan pertanian cabai (alih fungsi lahan dan hak ulayat)• <i>Price setting</i> : pedagang besar lebih dominan, mengikuti harga tertinggi, serta rantai distribusi yang panjang• Infrastruktur pemasaran dan tata niaga komoditas cabai yang belum diatur.• Pola konsumsi masyarakat pada cabai segar.	Papua, Gorontalo, Maluku Utara, Sulteng, Sultra, Papua Barat, Maluku, NTB, Bali, Sulsel, NTT

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Ikan			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Ikan	<ul style="list-style-type: none">• Ketersediaan pasokan yang tidak menentu akibat cuaca• Jarak penangkapan ikan dengan pelabuhan yang relatif jauh (Sulsel)• Metode penangkapan ikan yang masih sederhana	<ul style="list-style-type: none">• Keterbatasan sarana dan prasarana fisik (jumlah perahu/kapal, teknologi pengolahan dan penyimpanan/<i>cold storage</i>, pelabuhan perikanan, stasiun pengisian bahan bakar dan industri pengolahan ikan)• Keterbatasan SDM (nelayan) dan rendahnya skill ABK.• Terbatasnya akses dan fasilitas pembiayaan bagi nelayan lokal• Pola konsumsi masyarakat lebih memilih ikan segar	NTT, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Maluku, Papua Barat, Maluku Utara, Sulsel,

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

Daging Ayam			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Daging Ayam	<ul style="list-style-type: none">• Keterbatasan jumlah peternak• Minimnya sumber pendanaan peternak	<ul style="list-style-type: none">• Impor bahan baku• Produksi bergantung pada DOC, pakan dan proses peternakan (penggemukan) yang dilakukan oleh peternak dikendalikan oleh beberapa perusahaan (oligopol).• Belum tersedianya pasar penampung khusus peternakan• Keterbatasan dan kondisi infrastruktur darat yang belum memadai meningkatkan <i>distribution cost</i>• Peternak masih bersifat tradisional (keterampilan budidaya masih minim)	Sulsel, Bali, Papua Barat, NTB, NTT

Identifikasi Permasalahan Inflasi *Volatile Food*

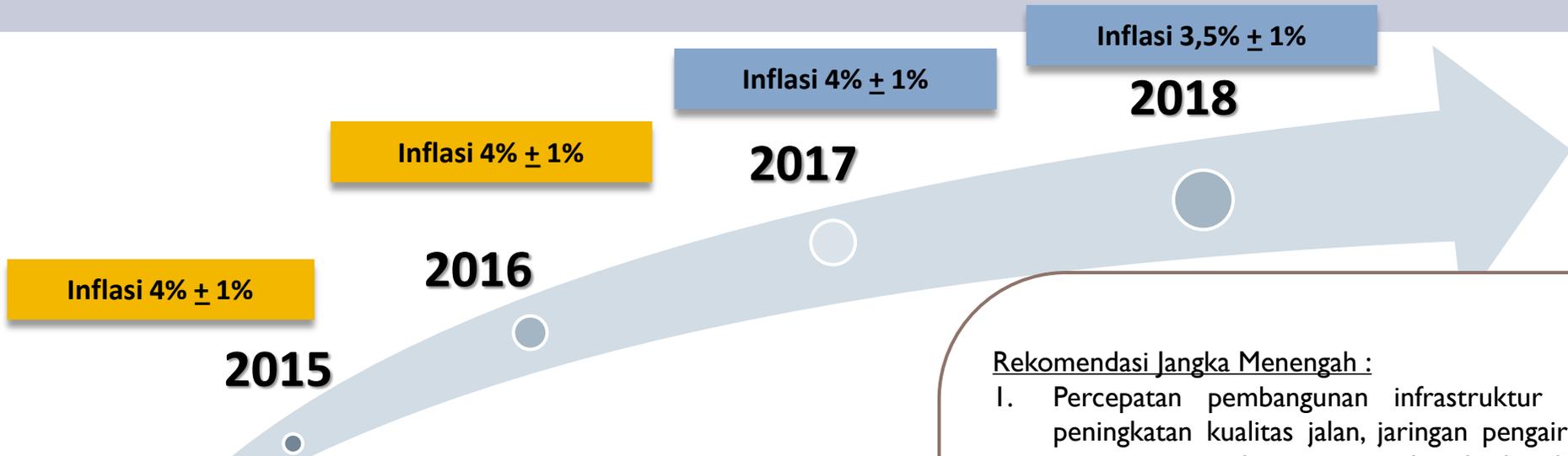
Beras			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Bawang Merah	<ul style="list-style-type: none">• Ketersediaan pasokan mengikuti musim (belum mampu mengelola pola tanam optimal)• Sifat barang yang tidak tahan lama• Tingginya <i>demand</i> pada saat hari besar dan perayaan keagamaan	<ul style="list-style-type: none">• Produktivitas rendah• Keterbatasan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran bawang merah• Infrastruktur pemasaran dan tata niaga komoditas yang belum diatur• Ketergantungan pasokan dari daerah lain	Sulsel, Bali, NTB, Maluku Utara, Maluku Papua Barat, Gorontalo, Sulteng, NTT

Identifikasi Permasalahan Inflasi Administered Prices

Tarif Angkutan Udara			
Komoditas	Identifikasi Permasalahan Jangka Pendek (2015-2016)	Identifikasi Permasalahan Jangka Menengah (2017-2018)	Provinsi
Tarif Angkutan Udara	<ul style="list-style-type: none">• Potensi cuaca dan bencana yang menyebabkan penutupan operasi sementara dari maskapai penerbangan• Kenaikan harga bahan bakar• Jumlah jadwal dan maskapai yang terbatas	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitas bandara yang masih terbatas• Kontinuitas maskapai yang tidak <i>sustainable</i> pada periode-periode tertentu menyebabkan penutupan rute perjalanan.	Bali, NTB, Maluku Utara, Maluku, Sultra, Papua, Gorontalo, NTT

5.3 *Roadmap* **Pengendalian Inflasi Sulawesi-Maluku- Papua-Bali-Nusa Tenggara**

Pengendalian Inflasi Inti



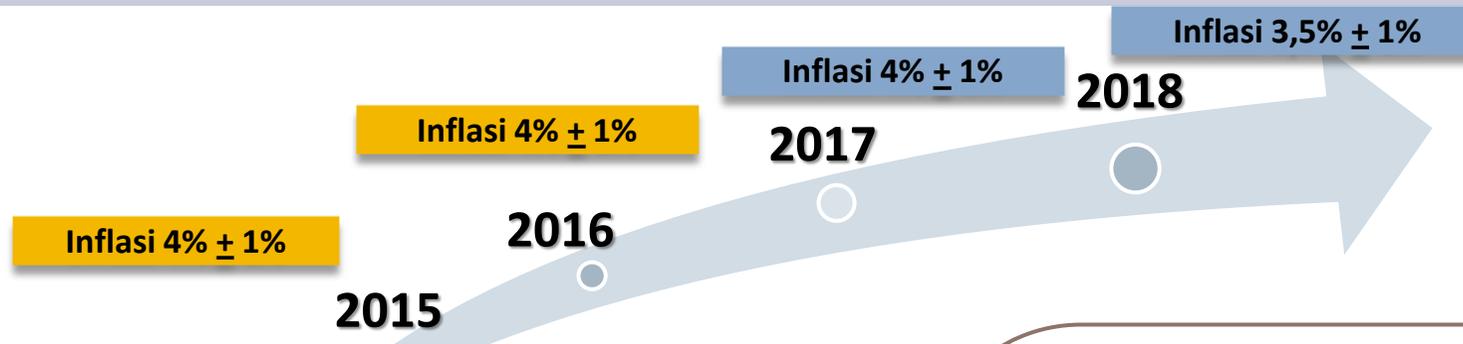
Rekomendasi jangka pendek:

1. Monitoring dan penyampaian informasi kepada publik mengenai pasokan dan harga komoditas secara rutin
2. Optimalisasi pemanfaatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)
3. Kajian struktur pasar, rantai distribusi dan komponen biaya bahan bangunan
4. Optimalisasi waktu bongkar muat di pelabuhan dan pergudangan
5. Mendorong percepatan realisasi anggaran pemerintah agar pelaksanaan proyek infrastruktur tidak terpusat di akhir tahun
6. Pembentukan koperasi nelayan dan industri ikan olahan
7. Pembentukan kelompok nelayan, guna penguatan permodalan lebih kuat untuk modernisasi pengolahan, serta efektifitas penyuluhan dan pelatihan
8. Menginisiasi mekanisme perdagangan antar daerah

Rekomendasi Jangka Menengah :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kualitas jalan, jaringan pengairan dan percepatan pembangunan pembangkit listrik
2. Pengembangan pelabuhan di NTB dan Sulawesi Tenggara, dan Papua untuk peningkatan kapasitas
3. Pengembangan kualitas dan kapasitas industri ikan olahan
4. Mendorong percepatan pendirian pabrik gula lokal dan pabrik semen lokal
5. Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) melalui pembangunan pusat pengolahan, distribusi, dan perdagangan ikan terpadu.
6. Peningkatan akses pembiayaan bagi nelayan (perbankan dan lembaga non-bank)
7. Pengembangan gudang BULOG sebagai *cold storage* komoditas ikan di Maluku Utara
8. Percepatan pemekaran Kota Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara diikuti dengan pembangunan infrastruktur dan perumahan

Pengendalian Inflasi Volatile Food



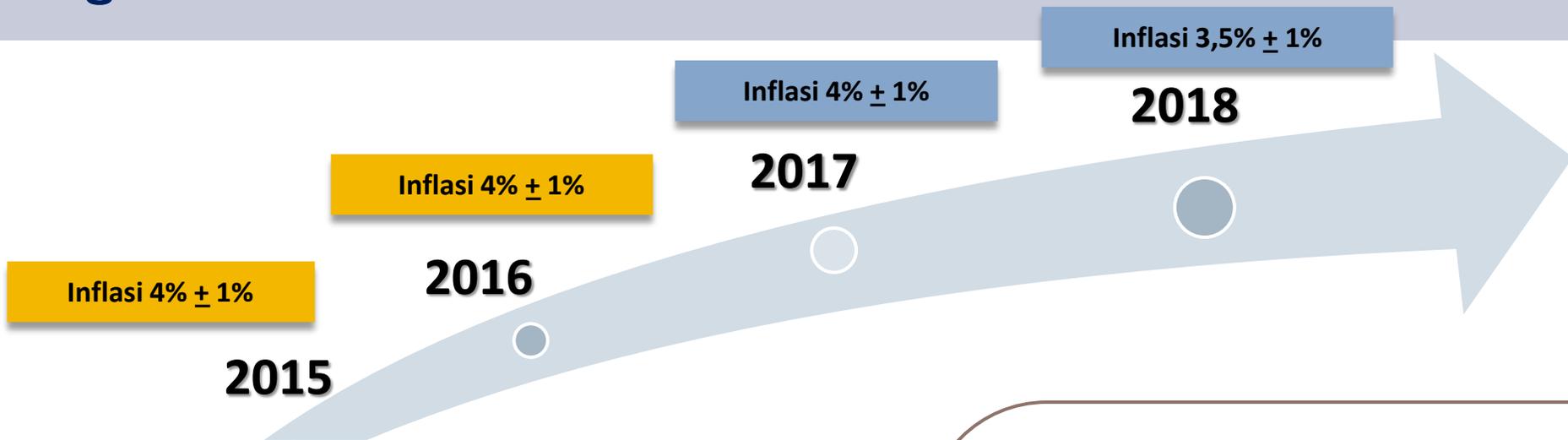
Rekomendasi Jangka Pendek :

- Peningkatan peran Pemerintah Daerah dan BULOG dalam Stabilisasi Harga, seperti pelaksanaan operasi pasar/pasar murah, penyaluran Raskin, perluasan lahan tani, pengaturan manajemen tanam dan peningkatan pengawasan tata niaga/distribusi/sidak pada saat adanya lonjakan harga komoditas
- Pelaksanaan program *Urban Farming*/Gerakan Rumah Pangan Lestari dengan mengoptimalkan peranan PKK untuk pemenuhan bumbu-bumbuan di RT
- Penyusunan Perda yang mendukung produksi dan stabilisasi harga seperti perda alih fungsi lahan dan harga referensi komoditas pada sentra produksi
- Mengoptimalkan penggunaan dan pembangunan/perbaikan infrastruktur seperti irigasi teknis, *cold storage*, gudang *pooling commodity*, tempat pelelangan ikan, pelabuhan dan jalan
- Penguatan database produksi seperti neraca surplus defisit, jumlah petani/peternak, pemetaan sentra produksi, serta pelaksanaan kerjasama perdagangan antar daerah
- Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM petani/peternak serta peningkatan dukungan implementasi teknologi tepat guna dan bantuan produksi seperti bibit, pupuk, alsintan, pakan dan lainnya
- Peningkatan komunikasi kepada masyarakat terkait kampanye perubahan pola konsumsi dan optimalisasi informasi harga pangan untuk transparansi dan pembentukan ekspektasi

Rekomendasi Jangka Menengah :

- Perbaiki pola tanam/manajemen tanam, perluasan lahan tanam dan peningkatan penggunaan teknologi pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pangan
- Perluasan program *Urban Farming*/Gerakan Rumah Pangan Lestari secara meluas di masyarakat
- Pengawasan terhadap pelaksanaan dan implementasi Perda alih fungsi lahan dan harga referensi komoditas pada sentra produksi
- Pembangunan infrastruktur yang mendukung pertanian dan distribusi seperti waduk dan saluran irigasi, jalur distribusi dan pelabuhan/dermaga
- Penguatan dan perluasan kerjasama antar daerah untuk mendukung kelancaran distribusi dan pemenuhan komoditas pangan
- Peningkatan akses dan sistem pembiayaan bagi petani dan nelayan, penguatan dan peningkatan peran kelembagaan kelompok tani dan nelayan
- Pengembangan dan optimalisasi informasi harga pangan sampai tingkat produsen untuk mendorong transparansi pembentukan harga dan ekspektasi konsumen

Pengendalian Inflasi Administered Prices



Rekomendasi jangka pendek:

1. Menyampaikan informasi dan data perkembangan komoditas secara komprehensif kepada pemerintah untuk mendukung efektifitas kebijakan penetapan harga pemerintah (penetapan tarif angkutan dan BBM).
2. Peningkatan komunikasi kepada masyarakat guna pengelolaan ekspektasi (ketersediaan pasokan BBM).
3. Peningkatan pengawasan terhadap ketersediaan pasokan BBM dan LPG.
4. Pengawasan kepatuhan operator transportasi umum terhadap aturan penetapan harga.
5. Perumusan dan penetapan HET di Kabupaten/Kota.
6. Penetapan SOP dan sanksi untuk mengoptimalkan pengawasan
7. Operasi pasar, tidak hanya terbatas pada sembako namun juga termasuk komoditas energi
8. Peningkatan komunikasi antara Pemerintah dan pelaku usaha (maskapai, oraganda dan distributor BBM).
9. Peningkatan operasional bandara (penambahan jadwal penerbangan, perbaikan infrastruktur bandara)
10. Perbaikan infrastruktur distribusi.

Rekomendasi Jangka Menengah :

1. Pembangunan infrastruktur pendukung distribusi dan transportasi baik darat, laut dan udara untuk menekan tingginya biaya transportasi antar daerah.
2. Memperkuat infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor energi.
3. Penetapan kebijakan kesetaraan biaya distribusi BBM khususnya avtur di bandara perintis.
4. Penyelesaian persoalan pembebasan lahan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.
5. Menerapkan sistem harga LPG 3 kg per wilayah
6. Fasilitasi dan pengembangan fungsi Forum Koordinasi Angkutan Umum Antar Kota/Kabupaten untuk standarisasi penetapan tarif angkutan.
7. Memberikan informasi ketersediaan stok gas LPG 3 kg kepada masyarakat secara jelas dan berkesinambungan, khususnya di daerah yang telah melaksanakan konversi energi.

Roadmap Pengendalian Inflasi Inti

Sewa Rumah

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Jangka Pendek:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya penduduk pendatang dari luar daerah• Terbatasnya ketersediaan rumah sewa layak huni <p><u>Permasalahan Struktural:</u></p> <p>Maraknya pembangunan properti telah mendorong permintaan material bangunan, tenaga tukang, dan sewa rumah.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi dengan pihak terkait untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam menekan inflasi di sektor perumahan• Penyediaan fasilitas asrama (mahasiswa) atau rumah dinas (pekerja) bagi penduduk pendatang	<p>Perbaiki tata ruang wilayah dengan membangun pusat ekonomi di daerah sub-urban</p>	<p>Kebijakan pengaturan pembukaan lahan areal perumahan</p>	<ul style="list-style-type: none">• Bali• Maluku Utara• Sulteng• Papua

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (I)				
Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Jangka Pendek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan rentang persentase dampak kenaikan/penurunan harga BBM pada tarif angkutan 	<p>Menetapkan rentang persentase dampak kenaikan/penurunan harga BBM pada tarif angkutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan sebagai <i>guidance</i> rentang persentase dampak fluktuasi harga BBM 	Sulsel
<ul style="list-style-type: none"> • Inkonsistensi jadwal dan besaran pembagian Raskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kerjasama dengan BULOG dalam penyaluran Raskin sesuai besaran dan waktu yang lebih terukur (antisipatif). • Memperkuat komunikasi kepada masyarakat mengenai ketersediaan beras 		<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan penguatan peran dan fungsi BULOG, strategi penetapan HPP dan aksi pembelian beras petani lebih antisipatif 	Sulsel

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (2)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Jangka Pendek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pergeseran musim tanam 	<ul style="list-style-type: none"> • Raskin • OP Khusus • Pasar Murah/Penyeimbang • Monitoring penimbunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan luas areal tanam • Penjadwalan masa tanam • Pembentukan sarana pergudangan sebagai <i>buffer stock</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung penyaluran Raskin dan penyelenggaraan pasar murah • Kemudahan dalam sertifikasi SRG 	<ul style="list-style-type: none"> • Sulsel • Bali • NTB • Maluku • Sultra • Sulteng • Papua • NTT
<ul style="list-style-type: none"> • Gagal panen akibat bencana alam Elnino/LaNina) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menginisiasi perdagangan antar daerah • Mendorong pemberian bantuan pompa air dan pasokan air oleh pemda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan kapasitas dan kualitas pergudangan • Perluasan kerjasama antar daerah 		<ul style="list-style-type: none"> • Papua • Maluku • NTB
<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya <i>demand</i> pada saat hari besar dan perayaan keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan data harga komoditas • Penjajakan kerjasama perdagangan antar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan data harga komoditas • Penjajakan kerjasama perdagangan antar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator kerjasama antar daerah 	NTB

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (3)				
Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Struktural:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribusi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyaluran keluar daerah ✓ Gangguan distribusi (bongkar muat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun update surplus/deficit beras • <i>Mapping</i> kebutuhan beras dari daerah tujuan pemasaran beras lokal • Pengembangan klaster padi • Menambah jumlah jam kerja di pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sub terminal agribisnis untuk pemantauan keluar/masuk antar daerah • Implementasi penggunaan kalender tanam • Pengembangan infrastruktur pelabuhan untuk menambah kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kejelasan strategi kebijakan program ketahanan pangan nasional • Fasilitator kerjasama perdagangan antar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Sulsel • Bali • NTB • Maluku • Sultra • Sulteng • Papua • NTT • Sulut

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (4)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Struktural:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Posisi tawar petani lemah 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kelembagaan petani • Pemanfaatan akses informasi harga • Peningkatan akses keuangan petani • Mendukung penyerapan beras petani oleh BULOG 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan <i>system</i> penetapan harga dan <i>supply</i> beras • Formalisasi Gapoktan menjadi badan hukum seperti koperasi • Modernisasi lembaga penyuluh menjadi lembaga konsultasi pedesaan 		<ul style="list-style-type: none"> • Sulsel • Bali • NTB • Maluku • Sultra • Sulteng • Papua • NTT

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (5)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Struktural:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sarana dan prasarana produksi dan pemasaran (fisik dan SDM) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan saprodi sesuai jadwal • Pelatihan dan pendampingan petani terkait teknik produksi, manajemen dan distribusi • Perbaiki infrastruktur (jalan/irigasi, bendungan, penggilingan, pergudangan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pembangunan infrastruktur baru dan pemeliharaan fasilitas spt jalan, irigasi, pergudangan, bendungan, penggilingan • Sinkronisasi rencana RT/RW untuk membatasi alih fungsi lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran penyediaan infrastruktur pertanian yang lebih besar untuk daerah Sulampua-Bali-Nusra • Pengalihan dana subsidi BBM ke sektor pertanian • Mendorong aturan peningkatan peran KP3 di daerah • Konsistensi alokasi anggaran pertanian di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • NTB • NTT • Sulteng • Sultra • Maluku • Bali

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (6)				
Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Struktural:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan peran kelembagaan dan tata kelola pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan <i>review</i> HPP BULOG secara rutin yang disesuaikan dengan harga pasar Penguatan peran penyuluh pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Efisiensi tata niaga beras dan mengurangi margin keuntungan pedagang besar dengan memperkuat kelembagaan dan keuangan BULOG Penguatan kelembagaan penguatan penyuluh pertanian 	<p>Kebijakan penguatan peran dan fungsi BULOG, strategi penetapan HPP dan aksi pembelian beras petani yang lebih antisipatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sulsel, NTT

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Beras (7)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Struktural:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Konversi lahan (baik untuk industri maupun lahan hortikultura) 	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan areal kebutuhan beras dan areal persawahan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan kebijakan Perda pelarangan alih fungsi lahan Pengawasan pelaksanaan kebijakan pelarangan alih fungsi lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan daerah produksi sentra pangan di suatu provinsi Peran aktif pemerintah dalam penciptaan lahan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Sulut Sulteng
<ul style="list-style-type: none"> Preferensi konsumen terhadap beras dari luar daerah 		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan teknologi dan bibit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 		<ul style="list-style-type: none"> Sulut Maluku

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Rawit (I)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Jangka Pendek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan pasokan mengikuti musim dan rentan terhadap gangguan bencana El Nino dan La Nina 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan dalam pola tanam • Pembangunan <i>rain shelter</i> dan <i>netting house</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kawasan sentra cabai • Implementasi penggunaan kalender tanam secara berkesinambungan dan dikoordinir oleh Pemprov • Penanganan paska panen melalui <i>cold storage</i> dan industri hilirisasi 	<p>Penyediaan bantuan obat-obatan tanaman cabai dan pupuk bersubsidi sesuai jadwal tanam</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Papua • Sulut • Gorontalo

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Rawit (2)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Jangka Pendek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sifat barang yang tidak tahan lama 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan teknologi tanam cabai berbiaya murah • Perluasan gerakan tanam cabai di pekarangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan pasca panen melalui <i>cold storage</i> • Menerapkan sistem pasca panen dengan mengeringkan cabai serta mengolah menjadi produk turunan • Pembuatan STA sebagai mediasi proses hulu hilir 		<ul style="list-style-type: none"> • Sulut • Sultra
<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya <i>demand</i> pada saat hari besar dan perayaan keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktif memberikan himbauan untuk mengkonsumsi cabai olahan • Memperkuat komunikasi kepada masyarakat mengenai ketersediaan cabai 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan demplot sebagai sarana pusat penyediaan bibit cabai 		NTB

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Rawit (3)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<u>Permasalahan Jangka Pendek:</u> <ul style="list-style-type: none">• Minimnya pembiayaan di tingkat petani sehingga menjamurkan praktek ijon	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sistem pembiayaan usaha tani• Meningkatkan upaya dalam sertifikasi lahan pertanian yang dapat dijadikan agunan	Penguatan kelembagaan petani melalui pembinaan dan bantuan sarana alat produksi kepada Gapoktan		Sulsel

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Rawit (4)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Struktural:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan pasokan dari daerah lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembenahan tata niaga terkait arus komoditas yang keluar masuk • Koordinasi dengan dinas non teknis lain dalam rangka peningkatan pasokan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama antar daerah untuk pemenuhan kebutuhan di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator kerjasama antar daerah dengan provinsi sentra lain • Optimalisasi pengaturan impor 	<ul style="list-style-type: none"> • Maluku • Papua • Sulut • Gorontalo • Sultra
<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki pola tanam • Penyediaan bibit, pupuk, dan bahan/obat secara memadai • Memperkuat peran penyuluh, kelompok tani dan PT 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan akses petani terhadap teknologi, pasar dan permodalan 		<ul style="list-style-type: none"> • Papua • Sultra
<ul style="list-style-type: none"> • Pola konsumsi masyarakat pada cabai segar 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan gerakan penanaman cabai di pekarangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas gerakan penanaman cabai di pekarangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan bibit • Dukungan gerakan serupa di level nasional 	Gorontalo

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Rawit (5)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Struktural:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan sarana prasarana (SDM, saprodi dan Teknologi produksi) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan bibit unggul pada tanaman pangan Pengontrolan distribusi dan harga pupuk bersubsidi Memperkuat peran penyuluh, kelompok tani dan peruruan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan perbaikan infrastruktur distribusi dari sentra produksi menuju pasar Peningkatan kualitas dan insentif bagi tenaga kerja di sektor pertanian Pembangunan <i>distribution center</i> dan gudang SRG 	<p>Bantuan bibit dan pupuk bersubsidi kepada petani.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Maluku Papua Sulut Gorontalo Sultra
<ul style="list-style-type: none"> <i>Price setting</i> : pedagang besar lebih dominan, mengikuti harga tertinggi, serta rantai distribusi yang panjang 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kelembagaan petani Pemanfaatan akses informasi harga pangan Meningkatkan akses keuangan petani Stabilisasi harga di tingkat petani dan konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> Memecah pasar dengan membangun pasar penyeimbang Perbaikan sistem penetapan harga dan <i>supply</i> cabai Pembuatan STA sebagai mediasi proses hulu hilir 	<ul style="list-style-type: none"> Mengkaji penetapan harga minimum oleh masing-masing Prov./Kab./Kot. Mendukung sosialisasi harga referensi kepada publik. 	<ul style="list-style-type: none"> Papua Gorontalo Sultra Maluku

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Cabai Rawit (6)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Struktural:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan lahan pertanian (alih fungsi dan hak ulayat) 		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan lahan tanam khusus/sentra produksi terpadu yang dibina secara khusus oleh pemda 		Papua Barat
<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur pemasaran dan tata niaga komoditas cabai belum diatur 	<ul style="list-style-type: none"> Memperpendek jalur distribusi antara lain melalui pengembangan pasar induk, kerjasama dengan pasar modern. Meningkatkan akses informasi harga pangan antara lain melalui PIHPS 	<ul style="list-style-type: none"> Mengefisienkan tata niaga perdagangan beras dan mengurangi margin pada pedagang besar antara lain dengan memperkuat kelembagaan dan keuangan BULOG. Mengintensifkan kerjasama antar daerah surplus defisit Memperbaiki kualitas infrastruktur terutama jalan darat 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung sosialisasi informasi harga pangan Mendukung kerjasama antar daerah Menyederhanakan perizinan pembangunan infrastruktur 	Gorontalo

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Ikan Segar (I)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Jangka Pendek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan pasokan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan periodik untuk menjaga <i>illegal fishing</i> dan penjualan langsung kepada kapal asing • Penyediaan informasi cuaca yang mudah diakses nelayan • Memperkuat komunikasi kepada masyarakat mengenai ketersediaan pasokan ikan • Edukasi prosedur melaut yang efektif • Pembangunan <i>Distribution Centre</i> dan gudang SRG 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan tempat penyimpanan hasil tangkapan melalui <i>cold storage</i> • Penambahan tempat pelelangan ikan dan perbaikan infrastruktur pendukung • Penjajakan penerapan kebijakan untuk menyediakan <i>buffer</i> ikan beku bagi pelaku eksportir untuk dijual di pasar lokal ketika cuaca ekstrim • Implementasi SLIN 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan <i>cold storage</i> • Penyediaan ramalan cuaca yang akurat • Regulasi dan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • NTT • Gorontalo • Sulteng • Sultra • Maluku • Papua Barat • Maluku Utara • Sulsel • Sulut

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Ikan Segar (2)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<u>Permasalahan Jangka Pendek:</u> <ul style="list-style-type: none">• Jarak penangkapan ikan dengan pelabuhan yang <i>relative</i> jauh			Penambahan dan peningkatan kapasitas pelabuhan	Sulsel
<ul style="list-style-type: none">• Metode penangkapan yang masih tradisional	Melaksanakan riset untuk pengembangan teknik produksi dan distribusi	Melaksanakan riset untuk pengembangan teknik produksi dan distribusi		Maluku Utara

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Ikan Segar (3)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Struktural:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan sarana dan prasarana fisik (jumlah perahu/kapal, teknologi pengolahan dan penyimpanan/<i>cold storage</i>, pelabuhan perikanan, stasiun pengisian bahan bakar dan industri pengolahan ikan) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian bantuan teknis alat tangkap ramah lingkungan pada nelayan kecil yang menjadi pemasok ikan di pasar lokal Penyediaan pelatihan dan pendampingan bagi nelayan Perbaikan dan pembangunan fasilitas pelabuhan Maksimalisasi pelelangan ikan 	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan kapasitas <i>cold storage</i> pemerintah Pemberian insentif bagi nelayan untuk mendapatkan sertifikasi pelayaran Pembangunan tempat pelelangan ikan yang <i>representative</i> Penyediaan kapal kecil bermesin dan pelatan penangkapan ikan. Membangun lebih banyak stasiun pengisian bahan bakar di tengah laut 	<ul style="list-style-type: none"> Menjamin ketersediaan stok bahan bakar bersubsidi bagi para nelayan guna mendukung kegiatan operasional Pemberian bantuan kapal tangkap kapasitas menengah kepada kelompok nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> NTT Gorontalo Sulteng Sultra Maluku Papua Barat Maluku Utara Sulsel

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Ikan Segar (4)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Struktural:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya akses dan fasilitas pembiayaan bagi nelayan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan koperasi di tingkat nelayan • Mendorong intermediasi perbankan dalam penyediaan skim kredit bagi nelayan 	<p>Pemberian insentif kepada perusahaan eksportir ikan yang menjadi bapak angkat bagi nelayan kecil yang membutuhkan pembinaan dan permodalan</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Maluku • Papua Barat • Sulsel • Maluku Utara
<p><u>Permasalahan Struktural:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan SDM (nelayan) dan rendahnya <i>skill</i> ABK 	<p>Bekerjasama dengan dinas terkait, akademisi, praktisi dalam memberikan pendampingan dan pelatihan</p>	<p>Membentuk dan menjalin kemitraan dengan kelompok nelayan</p>	<p>Koordinasi K/L terkait</p>	<p>Maluku Utara</p>

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Ikan Segar (5)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<ul style="list-style-type: none">• Pola konsumsi masyarakat yang lebih memilih ikan segar	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi perubahan pola konsumsi ikan laut dengan substitusi ikan air tawar	Sosialisasi perubahan pola konsumsi ikan laut dengan substitusi ikan air tawar	<ul style="list-style-type: none">• Menjamin pasokan BBM bagi nelayan• Mendukung sosialisasi perubahan pola konsumsi ikan laut yang disubstitusi dengan ikan air tawar	Gorontalo

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (I)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Jangka Pendek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan jumlah peternak 	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan jumlah kelompok peternak ayam ras Peningkatan kompetensi peternak terkait budidaya ayam ras 	<p>Pemberian insentif bagi peternak dengan memberikan subsidi pakan ternak dan bibit ayam ras</p>	<p>Regulasi subsidi bibit dan pakan ayam ras</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sulsel Bali Papua Barat NTB
<ul style="list-style-type: none"> Minimnya sumber pendanaan peternak 	<ul style="list-style-type: none"> Intermediasi antara perbankan dan peternak Meningkatkan pola kemitraan antara perusahaan ayam dan peternak 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan intermediasi Pengembangan pola kemitraan 		<p>Sulsel</p>

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (I)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Struktural:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Impor bahan baku 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pakan ternak 	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan pakan ternak lokal • Sinkronisasi industri pakan ternak dalam negeri dan menjaga jalur distribusinya 	<p>Kebijakan pemerintah yang mengatur ketersediaan dan keterjangkauan pakan ternak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sulsel • Bali • Papua Barat • NTB
<ul style="list-style-type: none"> • Produksi bergantung pada DOC, pakan dan proses peternakan (penggemukan) yang dilakukan peternak dikendalikan oleh beberapa perusahaan (oligopoli) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pola kemitraan antara perusahaan dan peternak • Pemberian bantuan kandang dan bibit • Koordinasi antar sentra pemasok 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki tata niaga daging ayam dalam mengatasi posisi tawar peternak yang rendah • Memperbaiki konektivitas perdagangan antar wilayah sentra pemasok 		<ul style="list-style-type: none"> • Bali • NTT

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Daging Ayam Ras (3)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Struktural:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya pasar penampung khusus peternakan 		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan pasar penampung khusus peternakan 	Pembangunan infrastruktur pendukung (pasar/ <i>centra polling commodity</i>)	Papua Barat
<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan dan kondisi infrastruktur darat yang belum memadai (meningkatkan <i>distribution cost</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan moda angkutan umum daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur jalan darat 	Pencanaan transportasi darat, laut dan udara yang terintegrasi di wilayah timur	Papua Barat
<ul style="list-style-type: none"> • Peternak masih bersifat tradisional (keterampilan budidaya masih minim) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kapasitas peternak 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan teknologi budidaya ternak 		Papua Barat

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (I)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Jangka Pendek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan pasokan 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan pola tanam Peningkatan areal lahan baru Pembentukan klaster bawang merah Optimalisasi penggunaan gudang <i>pooling commodity</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama antar daerah pemasok Penciptaan bibit bawang merah yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi lokal 	<ul style="list-style-type: none"> Data pasokan (<i>surplus/deficit</i>) bawang merah di masing-masing daerah Kebijakan dan mekanisme impor bawang merah disesuaikan dengan jadwal musim tanam/panen 	<ul style="list-style-type: none"> Sulsel Bali NTB Maluku Utara Maluku Papua Barat Gorontalo Sulteng NTT
<ul style="list-style-type: none"> Sifat barang yang tidak tahan lama 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan pola tanam Peningkatan areal lahan baru Pembentukan klaster bawang merah Optimalisasi penggunaan gudang <i>pooling commodity</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi penggunaan gudang <i>pooling commodity</i> Pemanfaatan <i>cold storage</i> 		<ul style="list-style-type: none"> Sulsel Bali NTB Maluku Utara Maluku Papua Barat Gorontalo Sulteng NTT

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (2)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Jangka Pendek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya <i>demand</i> pada saat hari besar dan perayaan keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki pola tanam • Peningkatan areal lahan baru • Pembentukan klaster bawang merah • Optimalisasi penggunaan gudang <i>pooling commodity</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki pola tanam • Peningkatan areal lahan baru • Pembentukan klaster bawang merah • Optimalisasi penggunaan gudang <i>pooling commodity</i> 		<ul style="list-style-type: none"> • Sulsel • Bali • NTB • Maluku Utara • Maluku • Papua Barat • Gorontalo • Sulteng • NTT

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (3)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Struktural:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran bawang merah 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan bibit unggul pada tanaman pangan Pengontrolan distribusi dan harga pupuk bersubsidi 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan perbaikan infrastruktur distribusi dari sentra produksi menuju pasar Peningkatan kualitas dan insentif bagi tenaga kerja di sektor pertanian Pembangunan <i>distribution center</i> dan gudang SRG 	Bantuan bibit dan pupuk bersubsidi kepada petani.	<ul style="list-style-type: none"> Sulsel Bali NTB Maluku Utara Maluku Papua Barat Gorontalo Sulteng NTT
<ul style="list-style-type: none"> Produktivitas rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan pola tanam Penyediaan bibit, pupuk, dan bahan/obat secara memadai Memperkuat peran penyuluh, kelompok tani dan perguruan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan akses petani terhadap teknologi, pasar dan permodalan 		Papua

Roadmap Pengendalian Inflasi Volatile Food

Bawang Merah (4)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Struktural:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur pemasaran dan tata niaga yang belum diatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Menginisiasi perdagangan antar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan kerjasama antar daerah • Peningkatan sarana distribusi dari sentra produksi ke daerah lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan HET yang disertai dengan SOP pengawasannya • Subsidi bea angkut 	Papua
<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan pasokan dari daerah lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan dinas non teknis lain dalam rangka peningkatan pasokan 		Optimalisasi pengaturan impor	Papua

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Tarif Angkutan Udara (I)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Jangka Pendek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Potensi cuaca dan bencana yang menyebabkan penutupan operasi sementara dari maskapai penerbangan 	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan jam operasional bandara Sinergi dengan pemda dalam menciptakan event daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun bandara perintis di pulau-pulau yang mampu ditembus oleh pesawat kecil Perbaikan infrastruktur bandara Mendorong maskapai untuk menambah rute penerbangan 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan terhadap kebijakan <i>low cost carrier</i> Mempersempit penetapan batas atas dan bawah tarif angkutan udara 	<ul style="list-style-type: none"> Bali NTB Maluku Utara Maluku Sultra Papua Gorontalo NTT

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Tarif Angkutan Udara (2)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Jangka Pendek:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Kenaikan harga bahan bakar	Melakukan review terhadap metode perhitungan tarif angkutan udara		<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan kesetaraan harga avtur antara wilayah jawa dan kawasan timur agar mengurangi <i>gap</i> biaya transportasi• Kebijakan pemberian subsidi bagi penerbagang perintis	Maluku

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

Tarif Angkutan Udara (3)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Jangka Pendek:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Jumlah jadwal dan maskapai yang terbatas	<ul style="list-style-type: none">Penambahan jam operasional bandaraSinergi dengan pemda dalam menciptakan event daerahMelakukan komunikasi dengan penyedia jasa penerbangan terkait penambahan jadwal <i>flight</i>	<ul style="list-style-type: none">Perbaikan infrastruktur fasilitas bandara (terminal dan <i>runway</i>)	<ul style="list-style-type: none">Alokasi APBN untuk perbaikan infrastrukturPerubahan status pengelola Bandara dari pemerintah Provinsi kepada Angkasa Pura (BUMN) agar lebih profesional	Gorontalo

Roadmap Pengendalian Inflasi Administered Prices

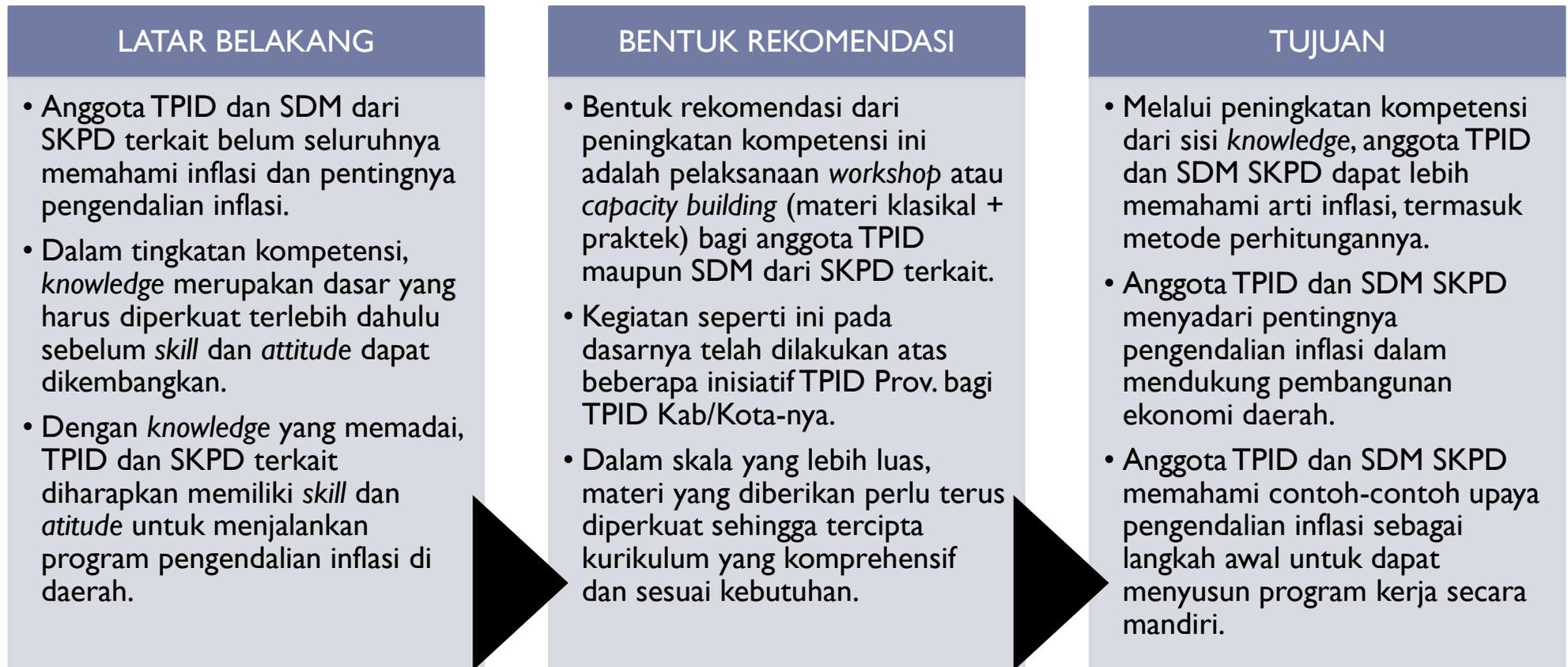
Tarif Angkutan Udara (4)

Permasalahan	Peran Pemda		Dukungan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan	Provinsi
	Solusi Jangka Pendek (2015-2016)	Solusi Jangka Menengah (2017-2018)		
<p><u>Permasalahan Struktural:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas bandara yang masih terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan jam operasional bandara Sinergi dengan pemda dalam menciptakan event daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun bandara perintis di pulau-pulau yang mampu ditembus oleh pesawat kecil Perbaikan infrastruktur bandara Mendorong maskapai untuk menambah rute penerbangan 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan terhadap kebijakan <i>low cost carrier</i> Mempersempit penetapan batas atas dan bawah tarif angkutan udara 	Bali, NTB, Maluku Utara, Maluku, Sultra, Papua, Gorontalo, NTT
<ul style="list-style-type: none"> Kontinuitas maskapai yang tidak <i>sustainable</i> 	Sinergi dengan pemda dalam menciptakan event daerah	Sinergi dengan pemda dalam menciptakan event daerah		NTT Gorontalo

Roadmap Pengendalian Inflasi: Rekomendasi Spesifik

I. Peningkatan Kompetensi Anggota TPID dan SKPD Terkait

Untuk mendukung program pengendalian inflasi di daerah, para anggota TPID maupun SDM dari SKPD terkait (bagi daerah yang belum memiliki TPID) perlu mendapatkan materi penguatan kompetensi yang berhubungan dengan inflasi dan upaya pengendaliannya...



Roadmap Pengendalian Inflasi: Rekomendasi Spesifik

I. Peningkatan Kompetensi Anggota TPID dan SKPD Terkait

Penyusunan kurikulum yang lebih matang dan tajam tentunya menjadi agenda penting dalam merancang program peningkatan kompetensi yang direkomendasikan. Adapun beberapa hal yang saat ini dapat direkomendasikan terkait kurikulum dimaksud antara lain mencakup isi materi, anggaran, peserta, dan durasi capacity building...

Aspek	Penjelasan			
Materi	Cakupan Pilihan Materi		Narasumber	Metode
	Metode Perhitungan Inflasi	Peserta memahami data yang dikumpulkan untuk menghitung inflasi dan metode pengolahan data untuk menghitung inflasi dan dekomposisinya.	BPS	Presentasi narasumber klasikal, diskusi tanya-jawab
	Asesmen Inflasi	Peserta memahami teknik asesmen/analisis data inflasi dan indikator apa yang dapat digunakan.	TPI, Pokjanas, KPwDN BI	Presentasi narasumber klasikal, diskusi tanya-jawab
	Pengendalian Inflasi	Peserta memahami pentingnya upaya pengendalian inflasi dalam mendukung pembangunan ekonomi.	TPI, Pokjanas	Presentasi narasumber klasikal, diskusi tanya-jawab
	Sharing dari TPID Lain	Peserta berdiskusi tentang pengalaman dari TPID lain terkait upaya-upaya pengendalian harga.	TPID/SKPD terkait	Sharing narasumber, diskusi tanya-jawab
Penyusunan Program Kerja	Peserta melakukan latihan penyusunan program kerja pengendalian inflasi dalam wadah studi kasus.	TPI, Pokjanas, KPwDN BI	Studi kasus, presentasi peserta	
Anggaran	Sharing antara lembaga terkait			
Peserta	Anggota TPID maupun SDM SKPD terkait (maksimal 30 orang dalam 1 kelas)			
Durasi	1 s.d. 2 hari (sesuai kebutuhan)			
Tahapan	Analisis Kebutuhan Peserta – Penyusunan Materi – Pelaksanaan Capacity Building – Evaluasi			

Roadmap Pengendalian Inflasi: Rekomendasi Spesifik

2. Model Kerjasama Perdagangan Antardaerah dalam Provinsi

Risiko dari sisi ketersediaan pangan yang cenderung mendorong terjadinya inflasi mendorong kebutuhan akan sebuah mekanisme kerjasama antara daerah penghasil dengan daerah pembeli komoditas pangan untuk menjaga stok dan memastikan kelancaran distribusi...

LATAR BELAKANG

- Komoditas pangan seringkali menjadi penyumbang utama inflasi di daerah.
- Setiap daerah memiliki surplus dan defisit komoditas pangan yang berbeda-beda.
- Terdapat risiko disparitas harga yang tinggi ketika perdagangan antardaerah dalam satu provinsi tidak melalui sebuah mekanisme yang terawasi dan tertata rapi.

BENTUK REKOMENDASI

- Bentuk rekomendasi terkait model kerjasama perdagangan antardaerah di sini adalah apa yang telah dilakukan oleh Provinsi Bali dalam mengelola perdagangan antardaerah yang dinilai dapat dilakukan di provinsi lain.
- Model Kerjasama Antardaerah yang dilakukan adalah melalui peningkatan peran PD. Pasar di masing-masing Wilayah Provinsi Bali.

TUJUAN

- Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pasokan serta memastikan kelancaran distribusi hasil pertanian.
- Mendorong terciptanya struktur pasar dan tata niaga yang kompetitif dan efisien, sehingga dapat mengurangi tekanan disparitas harga.
- Memotong rantai distribusi komoditas pangan yang selama ini relatif panjang dari produsen ke konsumen.

Roadmap Pengendalian Inflasi: Rekomendasi Spesifik

2. Model Kerjasama Perdagangan Antardaerah dalam Provinsi

Kerjasama Perdagangan Antardaerah untuk pemenuhan pasokan komoditas pangan antara kabupaten/kota di Provinsi Bali telah dilakukan antara PD. Pasar Kota Denpasar, PD. Pasar Kabupaten Buleleng dan PD. Pasar Kabupaten Badung yang dapat dijadikan sebagai model percontohan di daerah maupun provinsi lainnya...

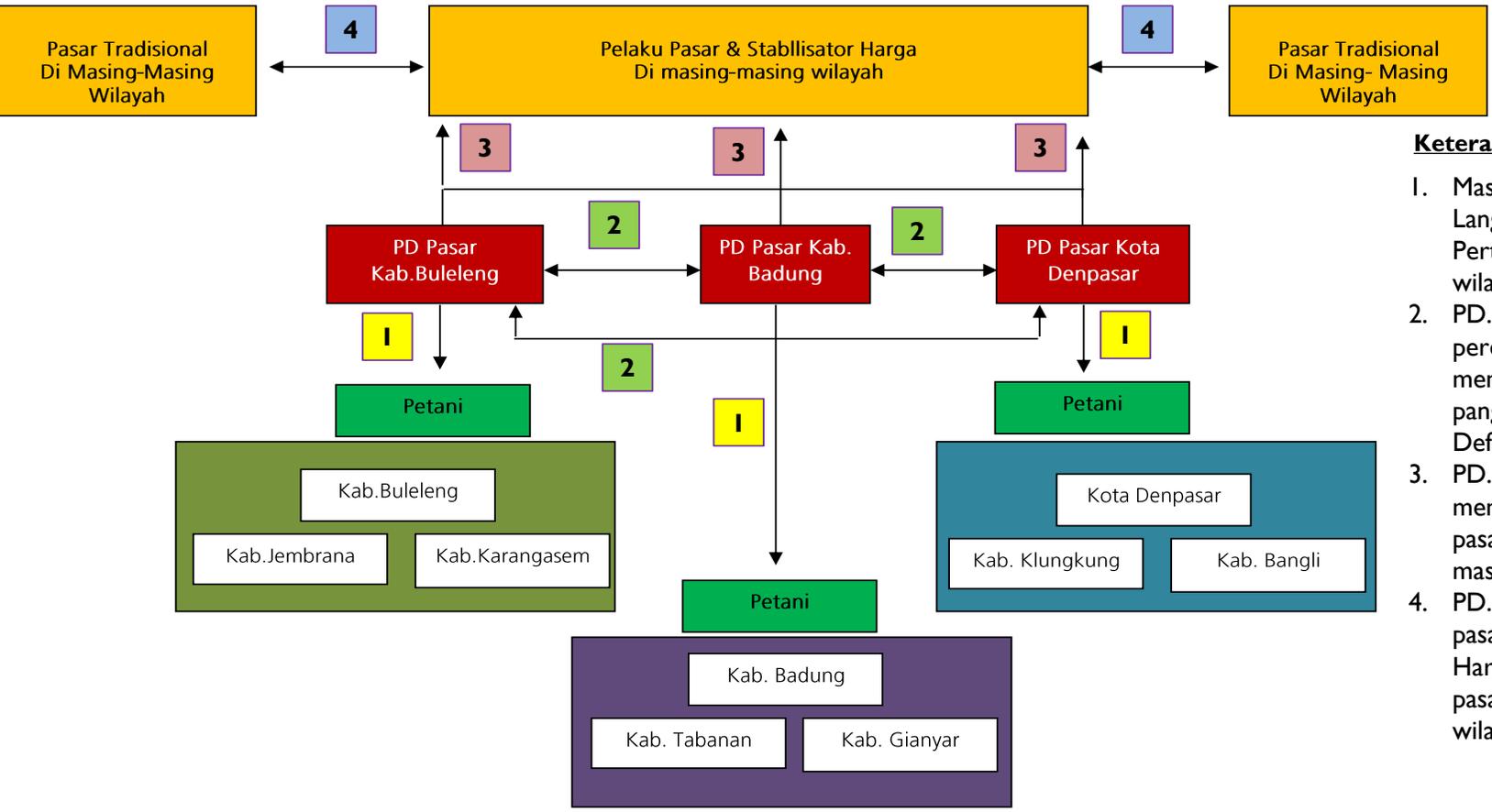
- PD. Pasar berperan sebagai bapak angkat terhadap para petani penghasil komoditas di wilayah Bali.
- Peningkatan peran PD. Pasar sebagai pelaku pasar yang berperan sebagai mediator dalam hal distribusi komoditas-komoditas pasar yang akan dikelola, termasuk peran PD. Pasar dalam melakukan stabilator harga komoditas pokok.
- PD. Pasar melakukan penanganan pasca panen dan akan melakukan pengolahan secara tepat guna, sehingga akan diperoleh nilai tambah (*value added*) dari komoditas yang dihasilkan para petani secara berkesinambungan.
- PD Pasar melakukan kerjasama perdagangan antar Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan pasokan komoditas pangan di wilayah masing-masing, yaitu kerjasama yang dilakukan antara PD. Pasar Kota Denpasar, PD. Pasar Kabupaten Buleleng, dan PD. Pasar Kabupaten Badung.
- Komoditas pangan yang diperdagangkan adalah komoditas pangan yang sering memberikan kontribusi terhadap terjadinya gejolak harga di masing-masing wilayah yang disebabkan kekurangan pasokan. Komoditas pangan dan kebutuhan pokok yang diperdagangkan meliputi sayuran, buah-buahan, beras, dan komoditas pokok lainnya.
- Komoditas pangan yang diperdagangkan dilakukan antara kabupaten/kota di Provinsi Bali yang dikelola oleh masing-masing PD. Pasar diutamakan adalah daerah yang mengalami kelebihan komoditas pangan dengan daerah yang mengalami kekurangan komoditas pangan.

Roadmap Pengendalian Inflasi: Rekomendasi Spesifik

2. Model Kerjasama Perdagangan antar Daerah dalam Provinsi

Adanya pembagian kewilayahan dalam hal distribusi komoditas pangan dengan tujuan utama memotong rantai distribusi tersebut diilustrasikan dengan skema sebagai berikut...

Skema Model Kerjasama Antar Daerah Melalui PD. Pasar



Keterangan

- 1. Masing-masing PD. Pasar menyerap Langsung Hasil Komoditas Pertanian/Pangan di masing-masing wilayah dari petani
- 2. PD. Pasar melakukan kerjasama perdagangan antar Kabupaten untuk memenuhi pasokan komoditas pangan (Antara Daerah Surplus dan Defisit)
- 3. PD. Pasar menjadi mediator untuk memasarkan hasil pertanian di pasar (pelaku langsung) di masing-masing wilayah
- 4. PD. Pasar bertugas untuk menjadi pasar penyeimbang/stabilisator Harga komoditas pokok/pangan di pasar tradisional di masing-masing wilayah.

Roadmap Pengendalian Inflasi: Rekomendasi Spesifik

3. Mekanisme Sistem Logistik Ikan di Daerah

Risiko dari sisi ketersediaan pangan di Sulampua-Bali-Nusra yang cukup berbeda dari regional lain adalah komoditas perikanan sehingga upaya untuk stabilisasi atau pengendalian harga ikan menjadi salah satu hal yang krusial di Sulampua-Bali-Nusra...

LATAR BELAKANG

- Komoditas pangan seringkali menjadi penyumbang utama inflasi di daerah.
- Berbeda dengan regional lain, salah satu komoditas pangan strategis di Sulampua-Bali-Nusra adalah perikanan.
- Permasalahan yang sering terjadi adalah melimpahnya pasokan ikan di musim panen yang tidak dikelola secara baik sehingga pada musim paceklik tidak terdapat stok yang memadai.

BENTUK REKOMENDASI

- Bentuk rekomendasi terkait pengendalian harga ikan di Sulampua-Bali-Nusra pada dasarnya telah dilakukan oleh beberapa provinsi salah satunya Sulawesi Tenggara melalui pemanfaatan *cold storage*.
- Dalam hal ini, perlu upaya yang sama di beberapa daerah lain di Sulampua-Bali-Nusra yang turut disertai dengan dorongan kepada Pemda untuk berkomitmen pada pemanfaatan *cold storage* dimaksud.

TUJUAN

- Mengelola pasokan ikan yang berlimpah pada musim panen.
- Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pasokan komoditas perikanan di musim paceklik.
- Mengendalikan harga ikan agar tidak terlalu rendah pada musim panen (merugikan nelayan) serta tidak meningkat tinggi pada musim paceklik.

Roadmap Pengendalian Inflasi: Rekomendasi Spesifik

3. Mekanisme Sistem Logistik Ikan di Daerah

Mekanisme yang ditampilkan merupakan program dari Pemda Sulawesi Tenggara yang dinilai dapat diimplementasikan (diadaptasi) di daerah lain...



Tim Penyusun

Lembaga	Departemen
Bank Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter ▪ Departemen Regional I : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bangka Belitung ▪ Departemen Regional II: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DI Yogyakarta, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur ▪ Departemen Regional III: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. ▪ Departemen Regional IV: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kementerian Koordinator Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan ▪ Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian
Kementerian Keuangan	Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas ▪ Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan ▪ Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Perdagangan	Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri
Perum Bulog	Divisi Analisa Harga dan Pasar, Direktorat Pelayanan Publik
Kementerian Perhubungan	Direktorat Jendral Perhubungan Darat
Kementerian Pertanian	Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Dalam Negeri	Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah